



Jateng
gayeng

PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang
Telp. 024-3511351 (Pswt.313) Fax. 024-3517463
e-mail : mi_jateng@yahoo.co.id;
dinkes@jatengprov.go.id
 [@dinkesjateng](https://twitter.com/dinkesjateng)

TIM PENYUSUN

Pembina

dr. Yulianto Prabowo, M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab

Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, M.Kes
Kepala Bidang SDK

Ketua

Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT
Kepala Seksi MIK

Anggota

Endah Sri Lestari, SKM, M.Kes
Istirochah, SKM, M.Kes
Aris Sugiarto, SKM, M.Kes(epid)
Estri Aurorina, SKM, M.Kes
Masfiah, SKM, M.Kes
Laila Erni Yusnita, SKM, M.Kes
Winarni Retno Suciati, AMd

Kontributor

BPS Provinsi Jawa Tengah; BKKBN Jawa Tengah; Sekretariat; Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Sumber Daya Kesehatan; Subbagian Program; Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; Seksi Surveilans dan Imunisasi; Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan; Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan; Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dapat diterbitkan. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu hasil kinerja pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi kesehatan secara komprehensif.

Sumber data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berasal dari pengelola program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta institusi lain yang memiliki data terkait bidang kesehatan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Data yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dapat membantu kita dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Jawa Tengah, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 mengacu pada Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2019.

Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini disajikan dalam bentuk *softfile* dan dapat diunduh di *website* www.dinkesjatengprov.go.id. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kritik dan saran kami harapkan untuk penyempurnaan profil yang akan datang

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, disampaikan terima kasih.

Semarang, Agustus 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
[Signature]
dr. YULIANTO PRABOWO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19620720 198803 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I DEMOGRAFI	1
A. KEADAAN PENDUDUK	1
1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk	1
2. Rasio Jenis Kelamin	2
3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	2
B. KEADAAN EKONOMI	2
1. Produk Domestik Regional Bruto	2
2. Angka Beban Tanggungan	4
C. KEADAAN PENDIDIKAN	4
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	5
BAB II SARANA KESEHATAN	9
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)	9
B. RUMAH SAKIT	13
1. Jenis Rumah Sakit	12
2. Kelas Rumah Sakit	14
3. Akreditasi Rumah Sakit	15
C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	16
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	16
2. Ketersediaan Obat	18
D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT (UKBM)	19
1. Posyandu	19
2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)	21
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	23
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN	23
B. DISTRIBUSI SEMBILAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS DI PUSKESMAS	29
C. RASIO TENAGA KESEHATAN	34
BAB IV PEMB IAYAAN KESEHATAN	36
A. PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD	36
B. ANGGARAN KESEHATAN PER KAPITA	38
C. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	38
D. DANA DESA	39
BAB V KESEHATAN KELUARGA	41
A. KESEHATAN IBU	42
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil	48
3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	52
5. Pelayanan Komplikasi Kebidanan	55
6. Pelayanan Kontrasepsi	56
B. KESEHATAN ANAK	59
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal	63
2. Pelayanan Kesehatan Bayi	66
3. Imunisasi	67
4. Pelayanan Kesehatan Balita	72
5. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	73
C. GIZI	75
1. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian AI Eksklusif	75
2. Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6-59 Bulan	78
3. Penimbangan Balita	79
4. Status Gizi Balita	81
D. KESEHATAN USIA LANJUT	84
BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT	85
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	85
1. Tuberkulosis	85
2. Pneumonia	88
3. HIV/AIDS	88
4. Diare	92
5. Kusta	93
B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)..	95
1. Polio dan AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut</i>)	96
2. Difteri	97
3. Tetanus Neonatorum	98
4. Campak	98
C. KEJADIAN LUAR BIASA	99
D. PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG	101
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)	101
2. Malaria	103
3. Filariasis	105
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR	107
1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)	108
2. Pelayanan Skrining Usia Produktif	109
3. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	110
4. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara	111
5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	113
BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN	115
A. AIR MINUM	116
B. AKSES SANITASI YANG LAYAK	118
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)	120
D. TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN	122
E. TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)	123
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Tren IPM Jawa Tengah Tahun 2011-2019 6
Gambar 1.2	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 7
Gambra 1.3	Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2019 8
Gambar 2.1	Perkembangan Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 11
Gambar 2.2	Rasio Puskesmas Per Kecamatan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 12
Gambar 2.3	Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 14
Gambar 2.4	Proporsi Klasifikasi Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 15
Gambar 2.5	Proporsi Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 16
Gambar 2.6	Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 17
Gambar 2.7	Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 17
Gambar 2.8	Persentase Posyandu Menurut Strata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 20
Gambar 2.9	Persentase Posyandu Aktif Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 20
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah Posbindu PTM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019 21
Gambar 2.11	Distribusi Posbindu PTM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 22
Gambar 3.1	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 24
Gambar 3.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 29
Gambar 3.3	Persentase Kecukupan Dokter Umum di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 30
Gambar 3.4	Persentase Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 31
Gambar 3.5	Persentase Kecukupan Perawat di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 31
Gambar 3.6	Persentase Kecukupan Bidan di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 32
Gambar 4.1	Proporsi Anggaran Kesehatan Menurut Sumber Biaya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 37
Gambar 4.2	Perkembangan Cakupan Kepesertaan JKN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 39
Gambar 4.3	Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 40
Gambar 5.1	Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 42

Gambar 5.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019	43
Gambar 5.3	Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019...	43
Gambar 5.4	Cakupan K1 dan K4 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	45
Gambar 5.5	Cakupan K4 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	46
Gambar 5.6	Persentase Pemberian 90 TTD Pada Ibu Hamil di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	47
Gambar 5.7	Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ...	47
Gambar 5.8	Cakupan Imunisasi Td1-Td5 pada Wanita Usia Subur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	49
Gambar 5.9	Cakupan Imunisasi Td2+ Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	49
Gambar 5.10	Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ..	50
Gambar 5.11	Proporsi Tempat Persalinan yang Dimanfaatkan oleh perempuan umur 10-54 tahun di Provinsi Jawa Tengah, Riskesdas 2018	51
Gambar 5.12	Proporsi Persalinan dengan Kualifikasi Tertinggi pada perempuan umur 10-54 tahun di Provinsi Jawa Tengah, Riskesdas 2018	52
Gambar 5.13	Cakupan Pelayanan Nifas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	53
Gambar 5.14	Cakupan Pelayanan Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	53
Gambar 5.15	Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	54
Gambar 5.16	Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	54
Gambar 5.17	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	55
Gambar 5.18	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	56
Gambar 5.19	Cakupan Peserta KB Aktif dan KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	57
Gambar 5.20	Cakupan Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019..	58
Gambar 5.21	Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Terhadap Jumlah Ibu Bersalin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	58
Gambar 5.22	Tren Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	59
Gambar 5.23	Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	60
Gambar 5.24	Penyebab Kematian Neonatal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	60
Gambar 5.25	Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	61
Gambar 5.26	Penyebab Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ..	61
Gambar 5.27	Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	62

Gambar 5.28	Penyebab Kematian Anak Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	62
Gambar 5.29	Persentase KN 1 dan KN Lengkap di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	63
Gambar 5.30	Persentase KN 1 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	64
Gambar 5.31	Persentase KN Lengkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	64
Gambar 5.32	Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	65
Gambar 5.33	Persentase BBLR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	66
Gambar 5.34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	67
Gambar 5.35	Cakupan Imunisasi Bayi berdasarkan Jenis Imunisasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	69
Gambar 5.36	Persentase Desa/Kelurahan UCI di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	70
Gambar 5.37	Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib(4) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	71
Gambar 5.38	Cakupan Imunisasi Campak/MR2 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	71
Gambar 5.39	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	72
Gambar 5.40	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019..	74
Gambar 5.41	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi Murid Sekolah Dasar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	75
Gambar 5.42	Cakupan Bayi Baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019..	76
Gambar 5.43	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	77
Gambar 5.44	Persentase Pemberian ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	77
Gambar 5.45	Cakupan Suplementasi Kapsul Vitamin A Pada Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	78
Gambar 5.46	Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	79
Gambar 5.47	Cakupan Balita Ditimbang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	80
Gambar 5.48	Cakupan Balita Ditimbang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	81
Gambar 5.49	Persentase Balita Gizi Kurang (BB/U) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	82
Gambar 5.50	Persentase Balita Pendek (TB/U) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	82
Gambar 5.51	Persentase Balita Kurus (BB/TB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	83
Gambar 5.52	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	84
Gambar 6.1	Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2019	86
Gambar 6.2	Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	87

Gambar 6.3	Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Pada Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	88
Gambar 6.4	Jumlah Kasus HIV Positif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	89
Gambar 6.5	Persentase Kasus HIV Positif menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ...	90
Gambar 6.6	Jumlah Kasus AIDS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	90
Gambar 6.7	Persentase Kasus AIDS menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	91
Gambar 6.8	Jumlah Kematian AIDS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	92
Gambar 6.9	Persentase Kasus Diare Balita Dilayani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	93
Gambar 6.10	Persentase Kasus Diare Semua Umur Dilayani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	93
Gambar 6.11	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	94
Gambar 6.12	Angka Cacat Kusta Tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	95
Gambar 6.13	Persentase Kasus Baru Kusta Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	95
Gambar 6.14	AFP Rate Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	97
Gambar 6.15	Kasus Difteri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	98
Gambar 6.16	Jumlah Suspek Campak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	99
Gambar 6.17	Distribusi Frekuensi KLB Menurut Jumlah Desa Yang Terserang Di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	100
Gambar 6.18	Jenis KLB Menurut Jumlah Kejadian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	100
Gambar 6.19	Angka Kesakitan DBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	101
Gambar 6.20	<i>Incidence Rate</i> DBD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	102
Gambar 6.21	<i>Case Fatality Rate</i> (CFR) DBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	102
Gambar 6.22	<i>Case Fatality Rate</i> DBD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	103
Gambar 6.23	Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019	104
Gambar 6.24	Persentase Pengobatan Standar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	105
Gambar 6.25	Jumlah Seluruh Kasus Kronis Filariasis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	106
Gambar 6.26	Proporsi Kasus Baru Penyakit Tidak Menular di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	108
Gambar 6.27	Persentase Pelayanan Kesehatan Hipertensi Penduduk > 15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	109
Gambar 6.28	Persentase Pelayanan Skrining Kesehatan pada Penduduk usia 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	110

Gambar 6.29	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita DM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	111
Gambar 6.30	Persentase IVA Positif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	112
Gambar 6.31	Persentase WUS Terdapat Benjolan Pada Pemeriksaan CBE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .	113
Gambar 6.32	Persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	114
Gambar 7.1	Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	117
Gambar 7.2	Proporsi Penggunaan Jenis Jamban Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	119
Gambar 7.3	Persentase Keluarga Dengan Akses Sanitasi yang Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .	119
Gambar 7.4	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	122
Gambar 7.5	Persentase Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	123
Gambar 7.6	Persentase TPM Memenuhi Syarat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	124

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Persentase Kelompok Usia Produktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	2
Tabel 1.2	Angka Beban Tanggungan Jawa Tengah Tahun 2019	4
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019	5
Tabel 2.1	Perkembangan Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Penyelenggaraan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2019	13
Tabel 3.1	Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019	34

DAFTAR LAMPIRAN
PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

	Resume Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
TABEL 1	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota.
TABEL 2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
TABEL 3	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin
TABEL 4	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan
TABEL 5	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan
TABEL 6	Persentase Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I
TABEL 7	Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit
TABEL 8	Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit
TABEL 9	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
TABEL 10	Jumlah Posyandu dan Posbindu PTM Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 11	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan
TABEL 12	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan
TABEL 13	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Kesehatan
TABEL 14	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik, Dan Keteknisan Medik Di Fasilitas Kesehatan
TABEL 15	Jumlah Tenaga Kefarmasian Di Fasilitas Kesehatan
TABEL 16	Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan
TABEL 17	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk
TABEL 18	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan Menurut Kabupaten
TABEL 19	Alokasi Anggaran Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
TABEL 20	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
TABEL 21	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota
TABEL 22	Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab dan Kabupaten/Kota
TABEL 23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 24	Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 25	Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 26	Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil dan Tidak Hamil) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 27	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 28	Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kabupaten/Kota
TABEL 29	Cakupan Dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi Dan Kabupaten/Kota

TABEL 30	Jumlah Dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan Dan Komplikasi Neonatal Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 31	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 32	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Anak Balita Menurut Penyebab Utama Dan Kabupaten/Kota
TABEL 33	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 34	Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 35	Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 37	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 38	Cakupan Imunisasi Hepatitis B ₀ (0 -7 Hari) Dan BCG Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 39	Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4, Campak/MR, Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 40	Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib 4 Dan Campak/MR Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 41	Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 42	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 43	Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 44	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, Dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 45	Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Serta Usia Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 46	Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 47	Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak SD Dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 48	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 49	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 50	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
TABEL 51	Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, <i>Case Notification Rate</i> (CNR) Per 100.000 Penduduk Dan <i>Case Detection Rate</i> (CDR) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 52	Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

TABEL 53	Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 54	Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
TABEL 55	Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat AIDS Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
TABEL 56	Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 57	Kasus Baru Kusta Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 58	Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Cacat Tingkat 2, Penderita Kusta Anak<15 Tahun, Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 59	Jumlah Kasus Terdaftar Dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 60	Penderita Kusta Selesai Berobat (<i>Release From Treatment/RFT</i>) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 61	Jumlah Kasus AFP (Non Polio) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 62	Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 63	Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam
TABEL 64	Jumlah Penderita Dan Kematian Pada KLB Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)
TABEL 65	Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 66	Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 67	Penderita Kronis Filariasis Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 68	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota
TABEL 69	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 70	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 71	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 72	Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan
TABEL 73	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 74	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TABEL 75	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
TABEL 76	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota

BAB I

DEMOGRAFI

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak cukup strategis karena berada diantara dua provinsi besar, yaitu bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Jawa Tengah terletak antara 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota yang tersebar menjadi 573 kecamatan dan 8.558 desa/kelurahan. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,70 persen dari luas Indonesia. Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.124,47 km², atau sekitar 6,48 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Magelang merupakan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu seluas 16,06 km².

Pada bab ini akan diulas mengenai keadaan penduduk, ekonomi dan pendidikan.

A. KEADAAN PENDUDUK

1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 34.718.204 jiwa yang terdiri atas 17.212.455 jiwa penduduk laki-laki dan 17.505.749 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang sebanyak 1.814.110 jiwa (5,23 persen) dan paling sedikit di Kota Magelang sebanyak 122.111 jiwa (0,35 persen).

Dengan luas wilayah sebesar 32.800,7 kilometer persegi (km²) maka rata-rata kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 1.058 jiwa per km². Wilayah terpadat adalah Kota Surakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 11.293 jiwa per km². Wilayah terlapang adalah Kabupaten Blora, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 479 jiwa per km², dengan demikian

persebaran penduduk di Jawa Tengah belum merata. Jumlah rumah tangga Provinsi Jawa Tengah sebanyak 9.309.110, maka rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga adalah sebesar 4 jiwa. Data tentang luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada lampiran Tabel 1.

2. Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 sebesar 98,32 per 100 penduduk perempuan, berarti setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 98 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan mempunyai proporsi terbesar pada kelompok umur 15–64 tahun. Gambaran komposisi penduduk secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.

Perbandingan komposisi proporsi penduduk menurut usia produktif dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Kelompok Usia Produktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2019

Kelompok Usia (Tahun)	2015	2016	2017	2018	2019
0 – 14	24,66 %	24,35 %	24,04 %	23,76 %	23,48 %
15 – 64	67,52 %	67,63 %	67,71 %	67,74 %	67,73 %
65 +	7,82 %	8,02 %	8,25 %	8,50 %	8,79 %

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Pada tabel 1.1. dapat dilihat bahwa proporsi penduduk tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018, kelompok usia produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan 0,01 persen, kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) mengalami penurunan 0,28 persen, sedangkan kelompok usia (65 tahun +) mengalami peningkatan 0,29 persen.

B. KEADAAN EKONOMI

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada

suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,41 persen (2018 = 5,32 persen). Pertumbuhan riil sektoral tahun 2019 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,62 persen, namun perannya terhadap PDRB hanya sebesar 3,64 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2019 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan yaitu sebesar 1,36 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 34,42 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 13,74 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 5,98 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga. Menurut harga berlaku, tahun 2019 konsumsi rumahtangga mempunyai kontribusi 60,33 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah atau senilai 821.948,12 miliar rupiah. Jika didasarkan harga konstan tahun 2010 nilainya mencapai 582.253,35 miliar rupiah, turun sebesar 4,62 persen pada tahun 2018. Konsumsi pemerintah yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah serta pertahanan dan keamanan, atas dasar harga berlaku sebesar 103.439,52 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 7,59 persen. Laju Pertumbuhan konsumsi pemerintah berdasarkan harga konstan 2010, konsumsi pemerintah tahun 2019 naik 3,98 persen. Penggunaan lain yang cukup besar dari PDRB adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga berlaku, tahun 2019 mencapai 449.486,05 miliar rupiah, dan sebesar 298.877,27 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2010. PMTB atas dasar harga konstan 2010 naik 4,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Angka Beban Tanggungan

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Secara kasar perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur nonproduktif. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 47,6. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Jawa Tengah yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 47,6 orang yang tidak produktif. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Angka beban tanggungan laki-laki sebesar 47,9 yang berarti bahwa 100 orang penduduk laki-laki yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 47,9 orang penduduk laki-laki yang tidak produktif. Sedangkan angka beban tanggungan perempuan sebesar 47,4 yang berarti bahwa 100 orang perempuan produktif, disamping menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 47,4 orang penduduk perempuan yang tidak produktif.

Tabel 1.2
Angka Beban Tanggungan Jawa Tengah Tahun 2019

Usia	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & perempuan
0 – 14 tahun	4,184,539	3,966,466	8,151,005
15 – 64 tahun	11,637,275	11,878,835	23,516,110
65 tahun ke atas	1,390,641	1,660,448	3,051,089
Jumlah	17,212,455	17,505,749	34,718,204
Angka beban tanggungan	47,9	47,4	47,6

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) dapat melahirkan sumber

daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kondisi keaksaraan di Jawa Tengah berdasarkan hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 93,54 persen, artinya Jawa Tengah belum benar-benar bebas buta aksara, masih ada sekitar 6 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum melek huruf. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2019 mencapai 7,53 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII). Selama 4 tahun terakhir rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan walaupun belum signifikan, masih dikisaran 7 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Gambaran kualitas SDM Jawa Tengah dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Tabel 1.3. menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas paling banyak adalah SD/MI sebesar 28,56 persen, dan hanya sekitar 6,9 persen penduduk yang menamatkan jenjang perguruan tinggi. Disamping itu masih ada sekitar 19,4 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum pernah mengenyam pendidikan dasar/pernah bersekolah di SD/MI namun tidak/belum tamat.

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019

Tahun	Tdk /Blm pernah sekolah	Tdk punya Ijazah SD/MI	SD/MI	SMP/ Mts	SMU/ SMK	DIPL/AK/ PT	Total
2017	6,45	15,96	31,24	19,84	20,25	6,26	100,00
2018	5,16	19,61	27,28	22,13	19,70	6,12	100,00
2019	4,96	14,44	28,56	23,92	21,20	6,90	100,00

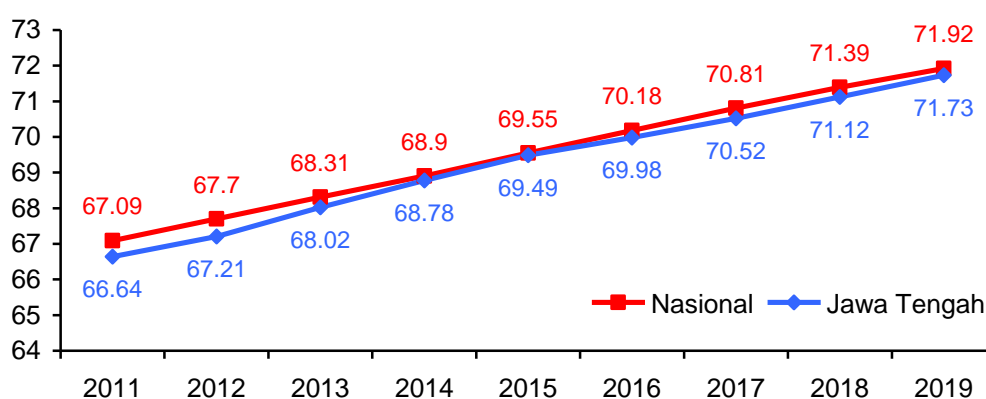
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Statistik Pendidikan 2019)

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP= Purchasing Power Parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan melalui standarisasi nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Karena IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang, maka memahaminya difokuskan pada dua aspek, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Gambar 1.1
Tren IPM Jawa Tengah Tahun 2011-2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Secara umum, pembangunan manusia Jawa Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2019. IPM Jawa Tengah meningkat dari 66,64 pada tahun 2011 menjadi 71,73 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Jawa Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,95 persen per tahun. Pada periode 2018-

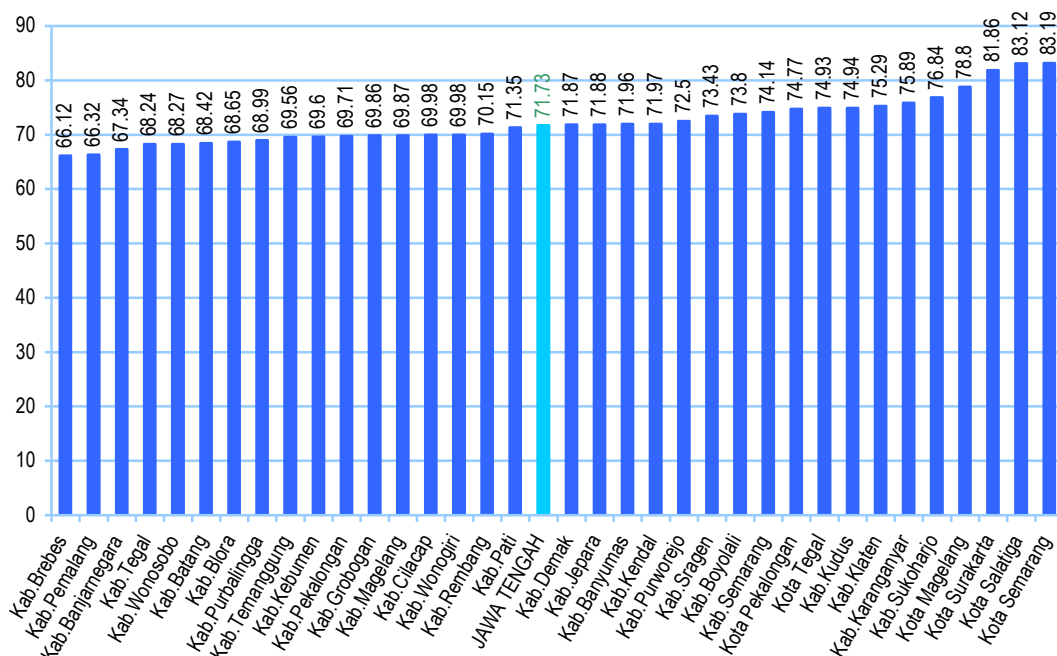
2019, IPM Jawa Tengah tumbuh 0,86 persen atau meningkat 0,61 poin. Peningkatan pada periode tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2016-2017, yang naik sebesar 0,54 poin, maupun pada periode 2017-2018, yang naik sebesar 0,60 poin. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga IPM Jawa Tengah berstatus “tinggi” (IPM di atas 70).

Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari Kecepatan IPM dan Status IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode sementara Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode:

- Sangat tinggi : IPM > 80
- Tinggi : 70 < IPM < 80
- Sedang : 60 < IPM < 70
- Rendah : IPM < 60

Gambar 1.2 menunjukkan nilai IPM menurut kabupaten/kota tahun 2019. Berdasarkan status IPM, ada tiga kota yang mempunyai nilai IPM kategori sangat tinggi yaitu Kota Semarang (83,19), Kota Salatiga (83,12) dan Kota Surakarta (81,86). Ada 17 kabupaten/kota (48,57%) masuk dalam kategori IPM tinggi dan 15 kabupaten/kota (42,86%) masuk kategori IPM sedang.

Gambar 1.2
IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

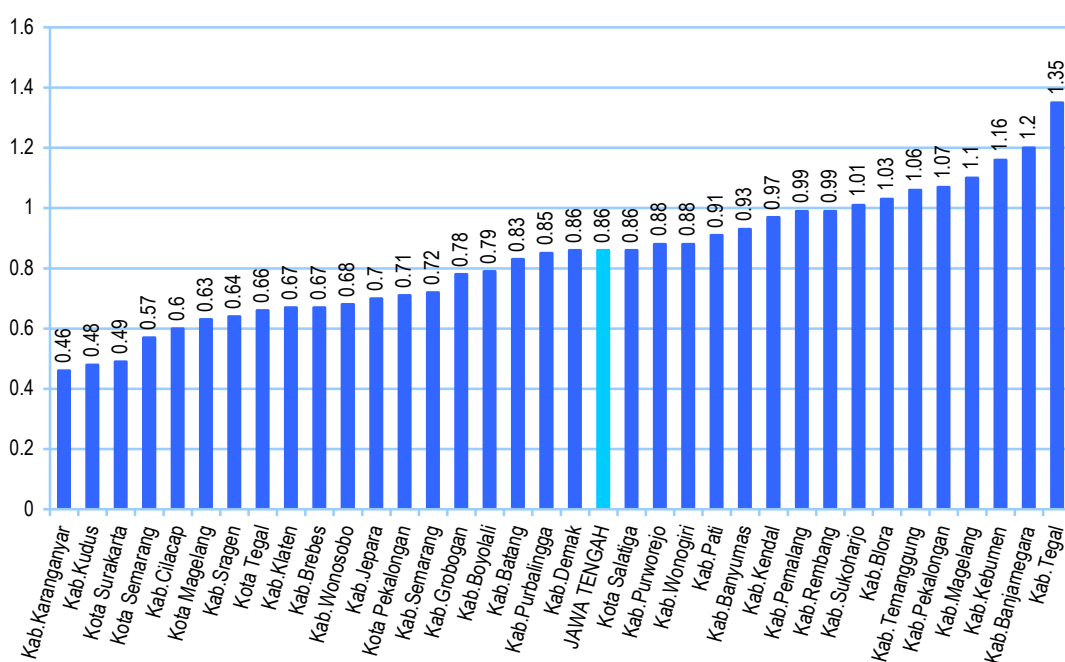


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2018–2019, IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan.

Selama periode ini, tiga kabupaten mencatat kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Tegal (1,35%), Kabupaten Banjarnegara (1,20%) dan Kabupaten Kebumen (1,16%). Kemajuan pembangunan manusia di tiga daerah tersebut didorong oleh peningkatan ketiga dimensi pembentuk IPM. Sementara, pembangunan manusia di Kota Surakarta (0,49%), Kabupaten Kudus (0,48%), dan Kabupaten Karanganyar (0,46%) tercatat tumbuh paling lambat dibandingkan dengan capaian di wilayah lain selama tahun 2018-2019.

Gambar 1.3
Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019



BAB II

SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Sarana kesehatan yang diulas pada bagian ini terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, sarana kefarmasian dan alat kesehatan, serta Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM). Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari puskesmas dan rumah sakit.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mendefinisikan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang:

1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
2. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu;
3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan

jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

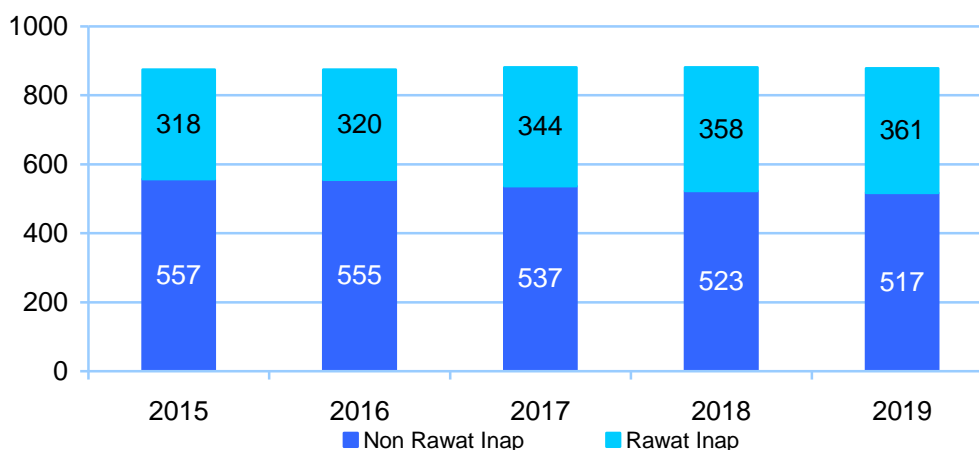
Dalam melaksanakan tugas, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk (a) menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan; (b) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; (c) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; (d) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait; (e) melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; (f) melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; (g) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; (h) memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual; (i) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; (j) memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit; (k) melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan (l) melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk: (a) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara; (b) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; (c) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat; (d) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja; (e) menyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; (f) melaksanakan penyelenggaraan rekam medis; (g) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; (h) melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; (i) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan (j) melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Puskesmas juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Jumlah puskesmas di Jawa Tengah sampai dengan Desember 2019 sebanyak 878 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 361 unit puskesmas rawat inap dan 517 unit puskesmas non rawat inap, ada perubahan dari tahun 2018 yaitu perubahan 3 puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap, 4 puskesmas di Boyolali mengalami penggabungan dan satu puskesmas baru di Temanggung. Jumlah Puskesmas di Jawa Tengah dalam kurun lima tahun terakhir adalah seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Perkembangan Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



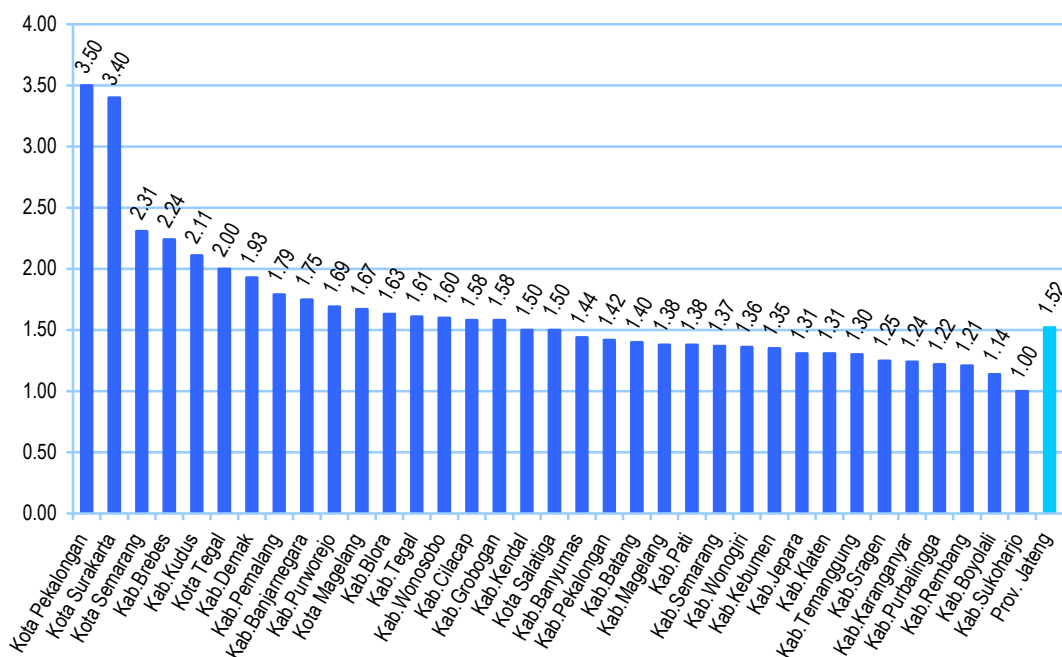
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Gambar di atas perkembangan jumlah puskesmas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, peningkatan jumlah terjadi pada tahun 2017 sebanyak 6 puskesmas dan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak 3 puskesmas. Perubahan terjadi pada jumlah puskesmas rawat inap yang bertambah di setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah Puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan

kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 1,52. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan di Provinsi Jawa Tengah sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

Gambar 2.2
Rasio Puskesmas Per Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Gambar 2.2 menjelaskan kabupaten dengan rasio Puskesmas terhadap kecamatan tertinggi adalah Kota Pekalongan sebesar 7,50 Puskesmas per kecamatan dan Kota Surakarta 3,40 Puskesmas per kecamatan, sedangkan Kabupaten Sukoharjo memiliki rasio terendah yaitu sebesar 1,00 Puskesmas per kecamatan. Rasio Puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas. Jaringan pelayanan

Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik bidan desa. Pada tahun 2019, jumlah jaringan Puskesmas di Jawa Tengah adalah Puskesmas Pembantu sebanyak 1.792 unit dan Puskesmas Keliling sebanyak 1.071 unit.

B. RUMAH SAKIT

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

1. Jenis Rumah Sakit

Pengertian Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitkan.

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Rumah Sakit berdasarkan Penyelenggaraan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2019

No	Penyelenggara	2015	2016	2017	2018	2019
Pemerintah						
1	Kementerian Kesehatan	5	5	5	5	5
2	TNI / POLRI	12	12	12	12	11
3	Kementerian lain	4	3	3	3	3
Total Pemerintah		19	21	20	20	19
Pemerintah Daerah						
1	Pemerintah Provinsi	7	7	7	7	7
2	Pemerintah Kab/Kota	47	48	49	49	52
Total Pemerintah Daerah		53	54	55	56	59
Swasta		212	201	204	213	229
Total		284	276	279	289	307

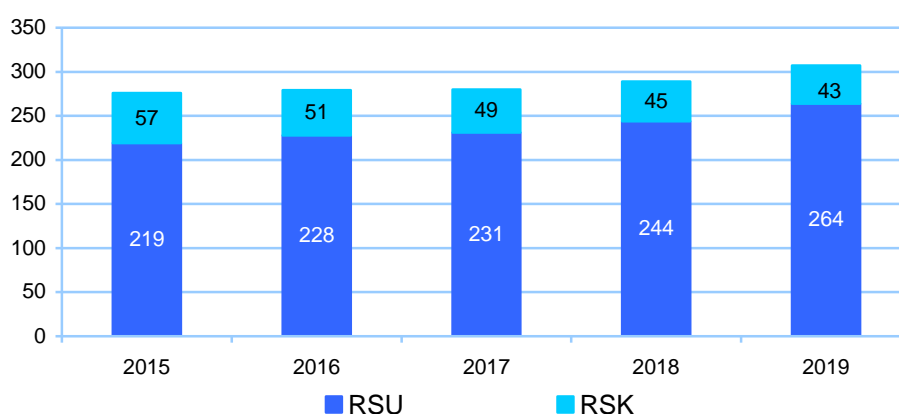
Sumber : Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019

Berdasarkan penyelenggaraannya, yang mengalami penambahan pada tahun 2019 adalah rumah sakit pemerintah kab/kota dari 49 menjadi 52, yaitu di Kabupaten Demak, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Rumah sakit swasta bertambah dari 213 unit menjadi 229 unit. Sementara rumah sakit TNI/POLRI berkurang satu yaitu Rumkitban Pati yang berubah menjadi Klinik Utama.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan menjadi Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 276 meningkat menjadi 307 tahun 2019, terdiri dari 264 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 43 Rumah Sakit Khusus (RSK).

Gambar 2.3
Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Dasar Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

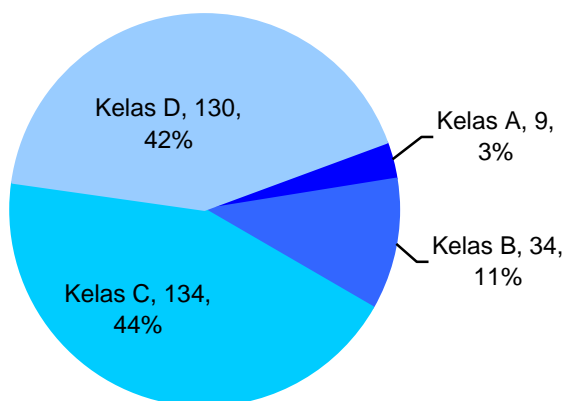
Bila dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah rumah sakit umum mengalami peningkatan sementara rumah sakit khusus jumlahnya menurun. (lihat gambar 2.4).

2. Kelas Rumah Sakit

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan. Klasifikasi Rumah Sakit terdiri atas RS kelas A, RS

Kelas B, RS kelas C dan RS kelas D. Klasifikasi RS di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Proporsi Klasifikasi Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Dasar Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

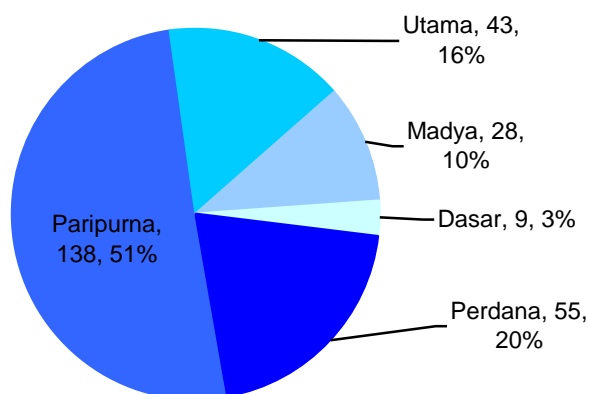
3. Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit disebutkan bahwa Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit. Pengaturan Akreditasi bertujuan untuk (a) meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit; (b) meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi; (c) mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan; dan (d) meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata Internasional.

Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. Akreditasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun. Akreditasi dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.

Sampai tahun 2019, rumah sakit yang terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,93% (273 RS) meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 70,03% (201 RS).

Gambar 2.5
Proporsi Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber: Buku Saku Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2019

C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

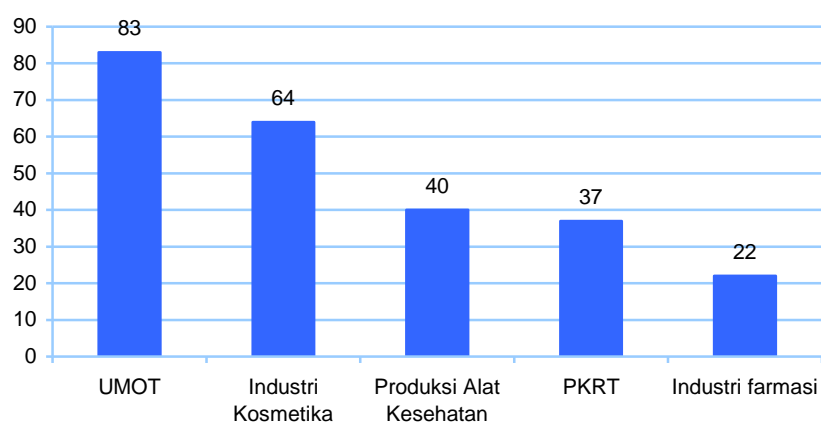
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat.

Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Produksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan Industri Farmasi.

Tahun 2019 terdapat 246 sarana produksi di Provinsi Jawa Tengah. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2019 terdapat pada Gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6
Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

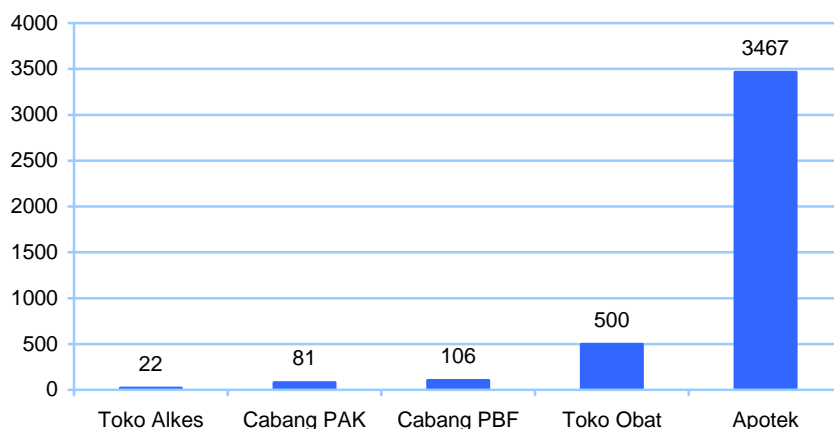


Sumber: Data Program Farmamin dan Perbekes Tahun 2019

Cakupan sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan di Provinsi Jawa Tengah antara lain Toko alat kesehatan, Cabang penyalur alat kesehatan (Cabang PAK), Cabang pedagang besar farmasi (Cabang PBF), Toko Obat dan Apotek.

Tahun 2019 terdapat 4.176 sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2019 terdapat pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7
Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber Data Program Farmamin dan Perbekes Tahun 2019

2. Ketersediaan Obat

Obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Obat harus tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan obat, sehingga pelayanan kesehatan tidak terhambat. Sesuai dengan salah satu tujuan yang tercantum dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS) yang tertuang dalam Kepmenkes No 189/Menkes/SK/III/2006, yaitu ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat utamanya obat esensial dijamin oleh pemerintah, maka sudah menjadi komitmen bahwa pemerintah turut serta dalam upaya penyediaan obat untuk masyarakat, utamanya melalui sarana kesehatan milik pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan Nawacita Presiden RI pada butir kelima dengan programnya berupa Program Indonesia Sehat, utamanya terkait pada pilar penguatan pelayanan kesehatan, dalam hal ini melalui terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan. Indikator ketersediaan obat merupakan salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Penilaian Indikator Ketersediaan Obat dihitung berdasarkan persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas. Definisi operasional dari persentase ketersediaan obat dan vaksin adalah tersedianya obat dan vaksin indikator di puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar, dimana pemantauan dilakukan terhadap data ketersediaan 20 item obat dan vaksin di puskesmas dengan rincian terdiri dari 17 item obat dan 3 item vaksin yang bersifat esensial. Obat-obatan yang masuk dalam daftar penilaian indikator ketersediaan obat tersebut merupakan obat pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit serta obat dan vaksin pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan tercantum dalam Formularium Nasional (FORNAS).

Pemantauan ketersediaan obat tahun 2019 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas ditiap kabupaten/kota tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program di masa yang akan datang.

Berdasarkan data Program Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah didapatkan bahwa sebesar 92,03% dari seluruh puskesmas di Provinsi Jawa Tengah memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial di atas 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari 20 item obat dan vaksin, sebanyak > 16 jenis obat dan vaksin yang tersedia di Puskesmas.

D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

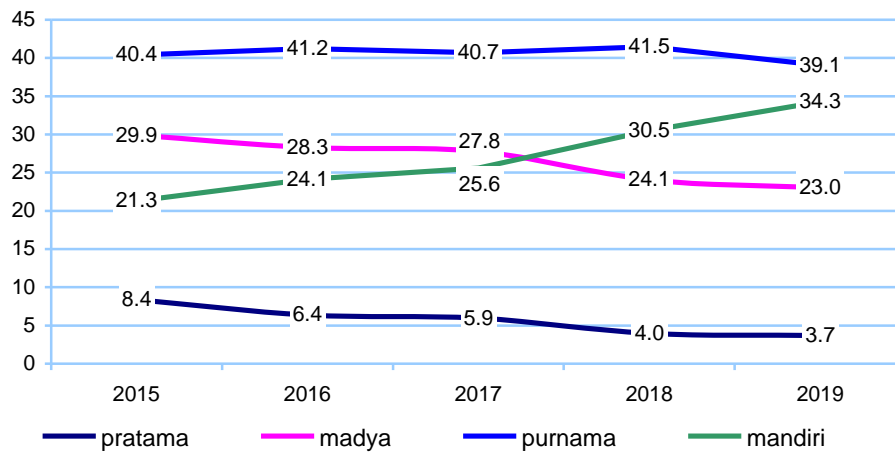
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Bentuk peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu manusianya, pendanaannya, aktivitasnya dan kelembagaannya seperti posyandu, pos lansia, polindes, PKD, pos UKK, poskestren, KP-KIA, Toga, BKB, posbindu, Pos malaria desa, Pos Tb desa dan masih banyak lainnya. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibahas pada bagian ini adalah Posyandu dan Posbindu.

1. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya lima program prioritas yang meliputi (KIA; KB; Gizi; Imunisasi; penanggulangan diare dan ISPA) dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Dasar penghitungan strata/penilaian tingkat perkembangan posyandu yang selama ini digunakan adalah Penghitungan strata Posyandu secara kuantitatif berdasar Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 414.4/05768, tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman teknis penghitungan strata Posyandu secara kuantitatif yang terdiri dari 35 indikator. Adapun rincian variabel penilaian meliputi: 1) Variabel Input (kepengurusan, kader, sarana, prasarana dan dana); 2) Variabel Proses (pelaksanaan program pokok, program pengembangan dan administrasi); 3) Variable Output (D/S, N/S, K/S, cakupan K4, pertolongan persalinan oleh nakes, Cakupan peserta KB, Imunisasi, dana sehat, Cak Fe, Cak. Vit A, Cak. pemberian ASI eksklusif dan frekuensi penimbangan). Penentuan strata posyandu sebagai berikut : 1) Posyandu pratama (Skor \leq 60 persen); 2) Posyandu madya (Skor > 60–70 persen); 3) Posyandu purnama (Skor > 70–80 persen); Posyandu mandiri (Skor > 80 persen).

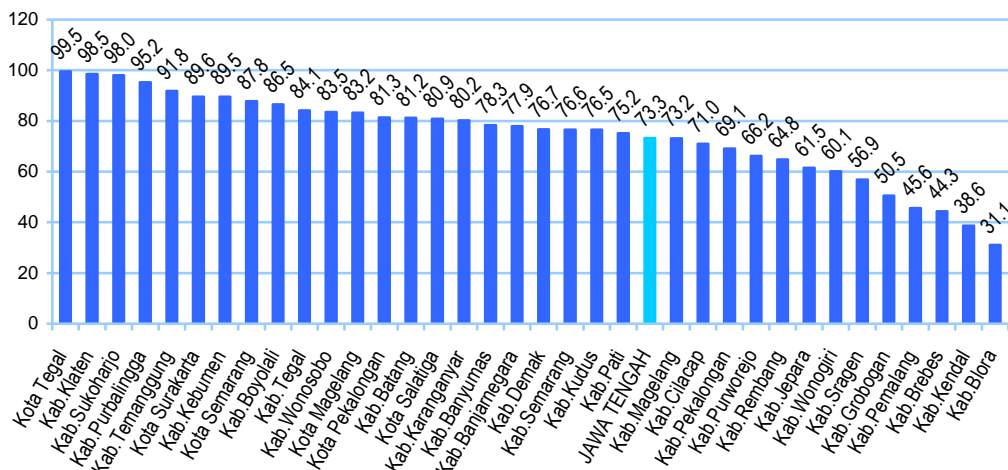
Gambar 2.8
Persentase Posyandu Menurut Strata
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber: Data Program Promkes & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

Berdasarkan laporan kabupaten/kota, jumlah posyandu mengalami peningkatan dari 48.897 pada tahun 2018 menjadi 49.410 pada tahun 2019. Posyandu yang mencapai Strata Mandiri tahun 2019 sebesar 34,3 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 30,5 persen. Dari gambar 2.8 terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah posyandu pratama, sedangkan jumlah posyandu mandiri semakin meningkat. Posyandu strata mandiri cenderung meningkat, hal tersebut dapat terjadi seiring dengan dikembangkannya Posyandu Model (Kegiatan Posyandu yang sudah diintegrasikan dengan minimal satu kelompok kegiatan yang sesuai dengan karakteristik daerah, misal kegiatan BKB, PAUD, UP2K). Sehingga secara tidak langsung kegiatan integrasi tersebut dapat mempengaruhi pencapaian indikator proses maupun indikator output posyandu.

Gambar 2.9
Persentase Posyandu Aktif Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber: Data Program Promkes & Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

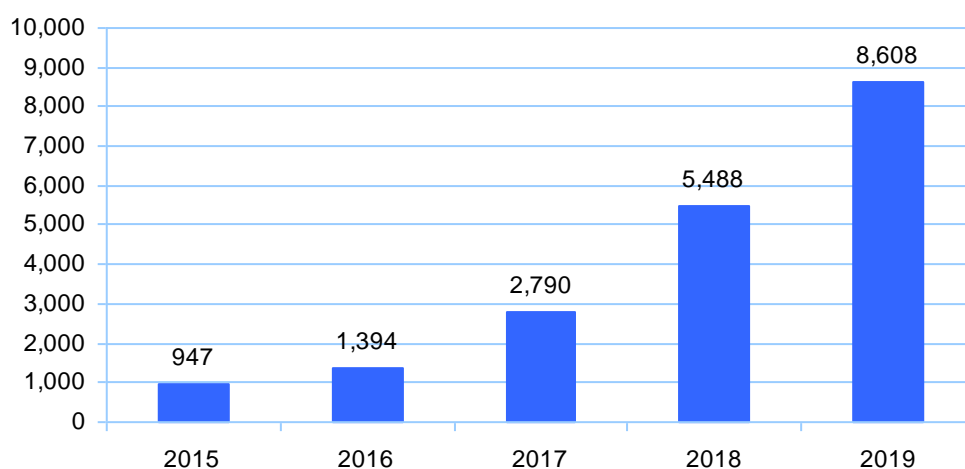
Pada tahun 2019, jumlah Posyandu di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 49.410 Posyandu dan sebanyak 36.237 atau sekitar 73,34% Posyandu merupakan Posyandu aktif. Posyandu aktif adalah Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan.

2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Posbindu PTM yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM juga terintegrasi secara rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sasaran utama kegiatan adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Jumlah Posbindu PTM tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.608 buah. Pertumbuhan jumlah Posbindu PTM tahun 2018-2019 mencapai 56,85%. Perkembangan jumlah Posbindu PTM dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 2.11.

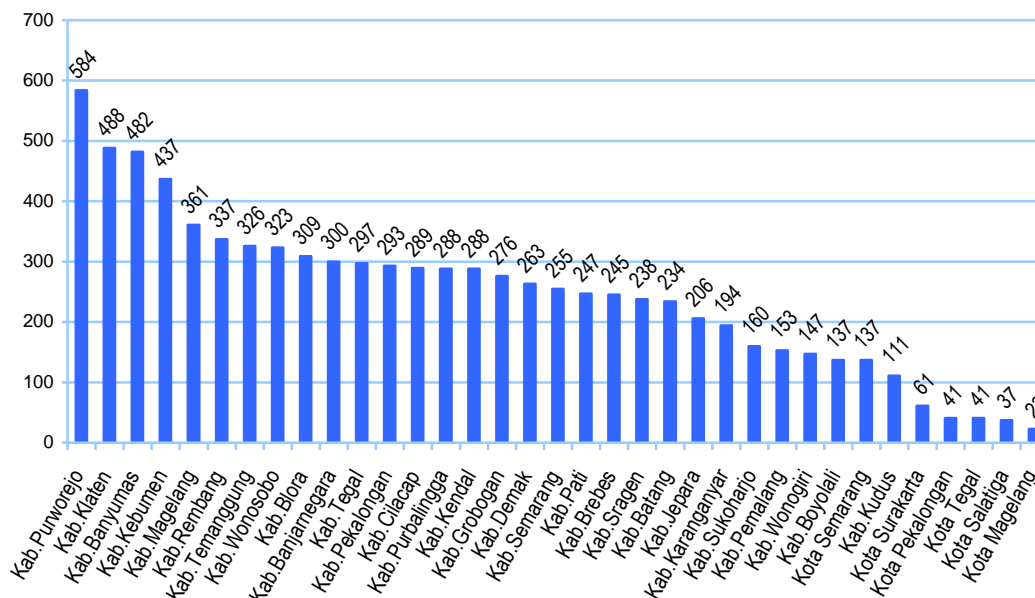
Gambar 2.10
Perkembangan jumlah Posbindu PTM
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber: Program PTM Prov. Jateng Tahun 2019

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten/kota dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak (584 Posbindu), sementara Kota Magelang hanya memiliki 23 posbindu PTM.

Gambar 2.11
Distribusi Posbindu PTM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber: Program PTM Prov. Jateng Tahun 2019

Selain Posyandu dan Posbindu PTM, terdapat beberapa jenis UKBM, yaitu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) dan Posyandu Lanjut Usia (Lansia). Dari pencatatan Data Dasar Puskesmas kondisi Desember 2019 yang dilakukan pengumpulan dari kabupaten/kota pada tahun 2020, diperoleh data yang dilaporkan yaitu jumlah Poskesdes 6.107 unit, Poskestren 1.252 unit dan Posyandu Lansia 18.102 unit.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Penyelenggaraan subsistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pengembangan dan pemberdayaan SDMK merupakan salah satu program teknis sehingga memerlukan perhatian yang sama dengan program-program kesehatan lainnya. Pada bab ini, akan dibahas mengenai SDMK terutama fokus kepada jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga kesehatan.

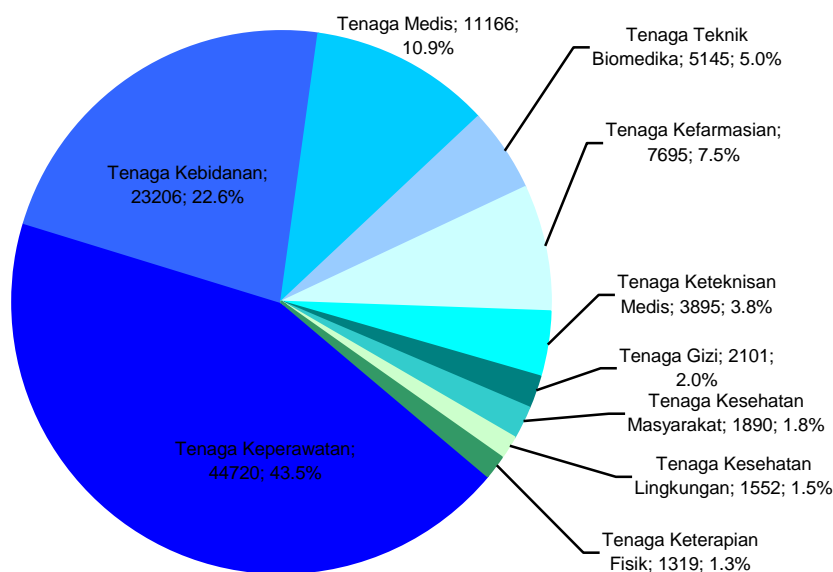
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.

Undang-Undang tersebut membagi tenaga kesehatan menjadi beberapa rumpun dan subrumpun yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Total SDM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 147.492 orang yang terdiri dari 102.689 orang tenaga kesehatan (69,62%) dan 44.803 orang tenaga penunjang kesehatan (30,38%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebesar 43,5% dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga keterampilan fisik sebesar 1,3% dari total tenaga kesehatan.

Gambar 3.1
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program SDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

1. Dokter Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang dimaksud Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah dokter umum yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 6.014 dokter umum terdiri dari 2.344 dokter laki-laki dan 3.670 dokter perempuan. Jumlah tersebut terdistribusi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya sejumlah 29 dokter, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 16 dokter, puskesmas sejumlah 2.017 dokter, rumah sakit sejumlah 2.169 dokter dan fasyankes lainnya (klinik, balai kesehatan, praktik mandiri, rumah bersalin dll) sejumlah 2.437 dokter.

2. Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang dimaksud Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah dokter gigi yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 1.392 dokter gigi, yang terdiri dari 1 dokter gigi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 1 dokter gigi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 769 dokter gigi di puskesmas, 458 dokter gigi di rumah sakit dan 447 dokter gigi di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Dokter Spesialis

Regulasi dokter spesialis sama dengan dokter dan dokter gigi. Jumlah spesialis yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 3.581 terdiri dari 10 dokter spesialis di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2 dokter spesialis di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 1 dokter spesialis di puskesmas, 3.539 di rumah sakit dan 338 di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Berdasarkan rumpun dokter spesialis, sub rumpun tertinggi ada pada dokter spesialis dasar dengan jumlah 2.585, diikuti dokter spesialis lainnya 2.248 dan dokter spesialis penunjang sejumlah 1.116.

4. Dokter Gigi Spesialis

Regulasi yang mengatur pelaksanaan praktik dokter gigi spesialis juga sama dengan diatas. Jumlah dokter gigi spesialis yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 179 orang, terdiri dari 5 dokter gigi spesialis di puskesmas, 162 di rumah sakit dan 24 di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

5. Perawat

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan keperawatan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Jumlah perawat yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 44.720, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT 78 perawat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya 140 perawat, puskesmas sejumlah 9.157 perawat, rumah sakit 32.975 perawat dan fasyankes lainnya 2.974 perawat.

6. Bidan

Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kebidanan adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Bidan. Berdasarkan pemetaan SDM Kesehatan, jumlah bidan yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 23.206, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT sejumlah 1 bidan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 79 bidan, puskesmas sejumlah 15.283 bidan, rumah sakit sejumlah 5.864 bidan dan fasyankes lainnya 2.545 bidan.

7. Apoteker

Regulasi yang mengatur tentang pekerjaan pelayanan apoteker ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Selain itu juga ada peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek. Jumlah apoteker yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 3.352 apoteker, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya sejumlah 4 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 51 orang, puskesmas sejumlah 551 orang, rumah sakit sejumlah 1.451 orang dan fasyankes lainnya 1.590 orang.

8. Tenaga Teknis Kefarmasian

Regulasi yang mengatur tentang pekerjaan pelayanan tenaga kefarmasian ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jumlah tenaga teknis kefarmasian yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 4.343 orang, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya 10 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya 77 orang, puskesmas 841 orang, rumah sakit 2.857 orang dan fasyankes lainnya 705 orang.

9. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Dibandingkan dengan jenis tenaga kesehatan lainnya, regulasi yang khusus mengatur tentang pelayanan tenaga kesehatan masyarakat belum ada. Jenis tenaga kesehatan masyarakat yang masuk dalam rumpun tenaga tersebut adalah epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku,

pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Keberadaan jabatan fungsional yang ada masih terbatas pada epidemiologi dan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat berpedoman pada Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 1.670 orang, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya sebanyak 45 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya 328 orang, puskesmas 1.265, rumah sakit 243 orang dan fasyankes lainnya 53 orang.

10. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Regulasi yang mengatur tentang pekerjaan pelayanan tenaga kesehatan lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. Jumlah tenaga kesehatan lingkungan/sanitarian yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah adalah 1.552 orang, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya sebanyak 7 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sebanyak 53 orang, Puskesmas 1.048 orang, rumah sakit 362 orang dan fasyankes lainnya 24 orang.

11. Tenaga Gizi

Regulasi yang mengatur tentang pekerjaan pelayanan tenaga gizi ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. Jumlah tenaga gizi yang tersedia di seluruh unit kerja/fasilitas pelayanan kesehatan adalah 2.101 orang, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya 4 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 58 orang, puskesmas 1.099 orang, rumah sakit 903 orang dan fasyankes lainnya sejumlah 150 orang.

12. Tenaga Keterampilan Fisik

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 yang termasuk dalam rumpun tenaga keterampilan fisik adalah fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupunktur. Jumlah tenaga keterampilan fisik di Jawa Tengah adalah 1.241 orang terdiri dari 1.019 orang fisioterapis, 122 orang okupasi terapis, 94 orang terapis wicara dan 6 orang akupunturis. Tenaga keterampilan fisik tersedia di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya 2 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 1 orang, puskesmas 191 orang, rumah sakit 1.040 orang dan fasyankes lainnya sejumlah 97 orang

13. Tenaga Keteknisian Medis

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 yang termasuk dalam rumpun tenaga keteknisian medis adalah refraksionis optisien, teknisi gigi, perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi pelayanan darah, teknisi kardiovaskuler, terapis gigi dan mulut, serta penata anestesi. Jumlah tenaga keteknisian medis di Jawa Tengah adalah 3.762 orang, dengan ketersediaan tertinggi mulai dari 2.497 perekam medis dan informasi kesehatan, 902 terapis gigi dan mulut, 95 teknisi gigi, 111 penata anestesi, 60 refraksionis optisien, 92 teknisi pelayanan darah dan 4 teknisi kardiovaskuler.

14. Tenaga Teknik Biomedika

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 yang termasuk dalam rumpun Teknik Biomedika adalah radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik. Jumlah tenaga teknik biomedika di Jawa Tengah adalah 5.010 yang terdiri dari 1.273 radiografer, 319 elektromedis, 3.293 ahli teknologi laboratorium medik, 42 fisikawan medik, 51 radioterapis dan 32 ortotik prostetik.

Regulasi yang mengatur tentang pekerjaan pelayanan ahli teknologi laboratorium medik ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Ahli teknologi laboratorium medik tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya 57 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 121 orang, puskesmas 990 orang, rumah sakit 2.034 orang dan fasyankes lainnya sejumlah 306 orang.

15. Tenaga Penunjang Kesehatan

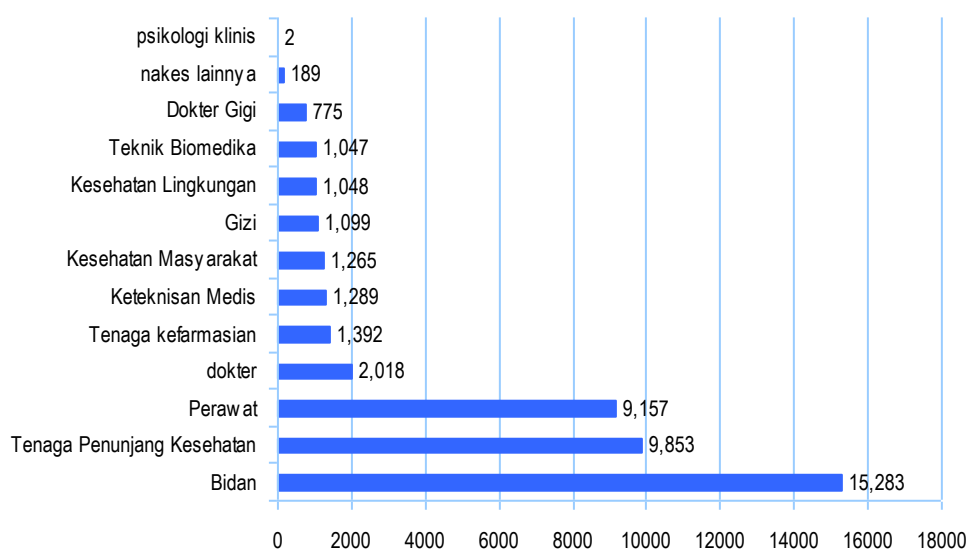
Disamping tenaga kesehatan, dukungan tenaga non kesehatan atau yang disebut tenaga penunjang/pendukung kesehatan terdiri dari pejabat struktural dan tenaga dukungan manajemen. Jumlah pejabat struktural adalah 3.571 orang, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya 51 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 632 orang, puskesmas 1.043 orang, rumah sakit 1.700 orang dan fasyankes lainnya sejumlah 752 orang. Jumlah tenaga dukungan manajemen adalah 41.232 orang, yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTnya 309 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTnya sejumlah 2.047 orang, puskesmas 8.810 orang,

rumah sakit 26.648 orang dan fasyankes lainnya sejumlah 5.889 orang. Jenis tenaga penunjang/pendukung kesehatan diperlukan untuk mendukung manajemen dan tata kelola organisasi agar pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

B. DISTRIBUSI SEMBILAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS DI PUSKESMAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, pada Buku Manual 2 yang berisi tentang Perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal maka pola ketenagaan minimal untuk penyelenggaraan upaya wajib puskesmas berdasarkan kriteria puskesmas dan berdasarkan lokasi. Jenis tenaga minimal yang harus ada dalam pedoman tersebut adalah tenaga dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik (ATLM)/analisis kesehatan.

Gambar 3.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program SDMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

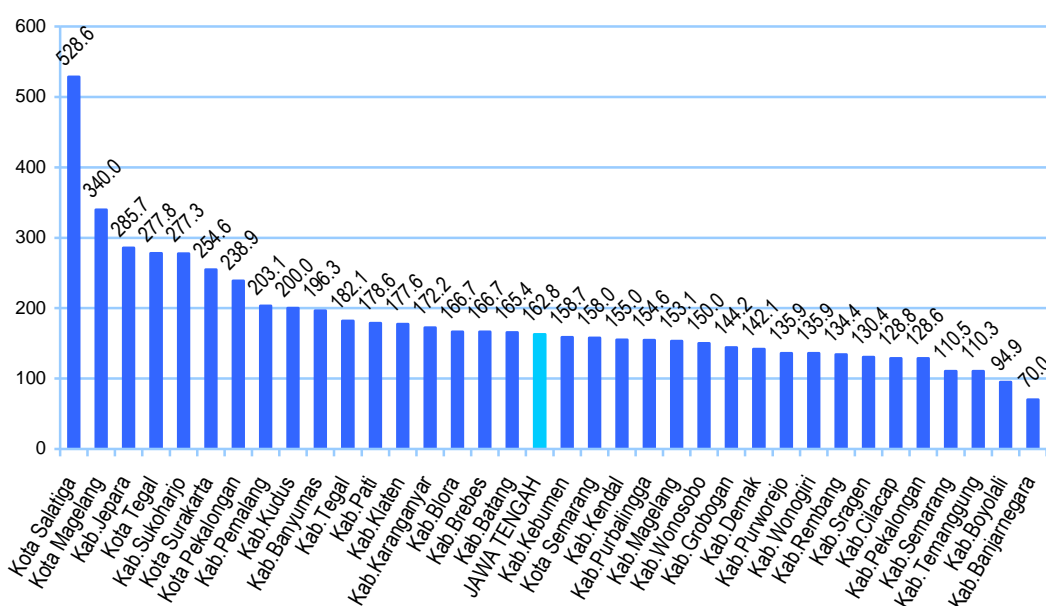
Jumlah SDM yang bertugas di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 44.417 orang yang terdiri dari 34.564 orang tenaga kesehatan (77,82%) dan 9.853 orang tenaga penunjang kesehatan (22,18%). Proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas terbanyak yaitu bidan sebanyak 34,41% (15.283 orang), sedangkan proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas yang paling sedikit yaitu psikologi klinis sebesar 0,005% (2 orang).

Secara keseluruhan gambaran ketersediaan 9 tenaga kesehatan strategis di puskesmas sebagai berikut :

1. Dokter Umum

Kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas juga diatur pada Permenkes yang sama yang membedakan antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter adalah satu orang, sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Persentase kecukupan dokter umum yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 162,8% dimana masih terdapat 5,71% (2 kabupaten) yang persentasenya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia dokter umum. Tetapi ada 22,86% (8 kabupaten/kota) yang puskesmasnya tersedia lebih dari dua dokter umum.

Gambar 3.3
Persentase Kecukupan Dokter Umum di Puskesmas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



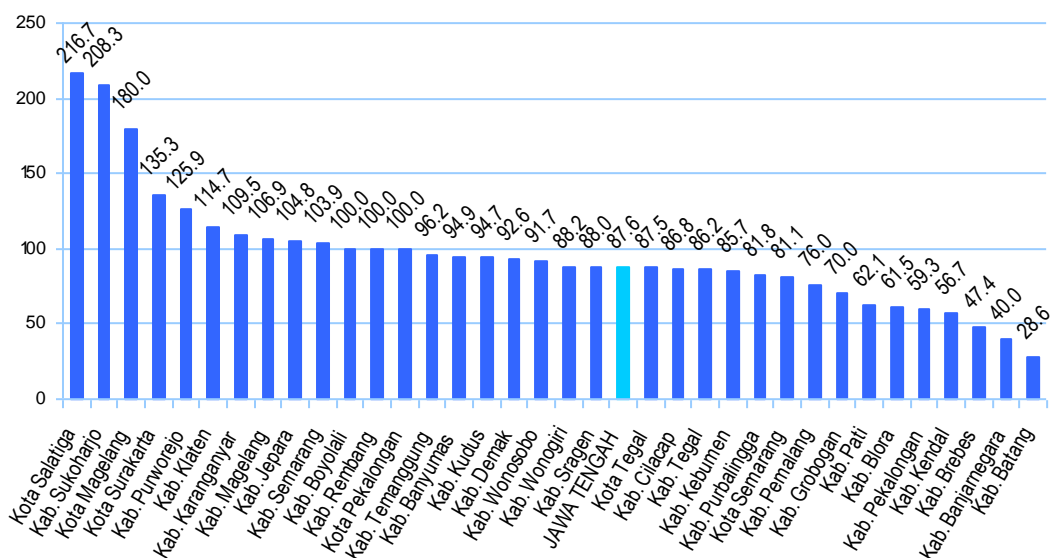
Sumber : Data Program SDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

2. Dokter Gigi

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas adalah minimal satu orang, baik di puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Persentase kecukupan dokter gigi yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 87,6% dimana masih terdapat 62,86% (22 kabupaten) yang persentasenya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia dokter gigi.

Tetapi hanya ada 5,71% (2 kabupaten/kota) yang puskesmasnya tersedia lebih dari dua dokter gigi.

Gambar 3.4
Persentase Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

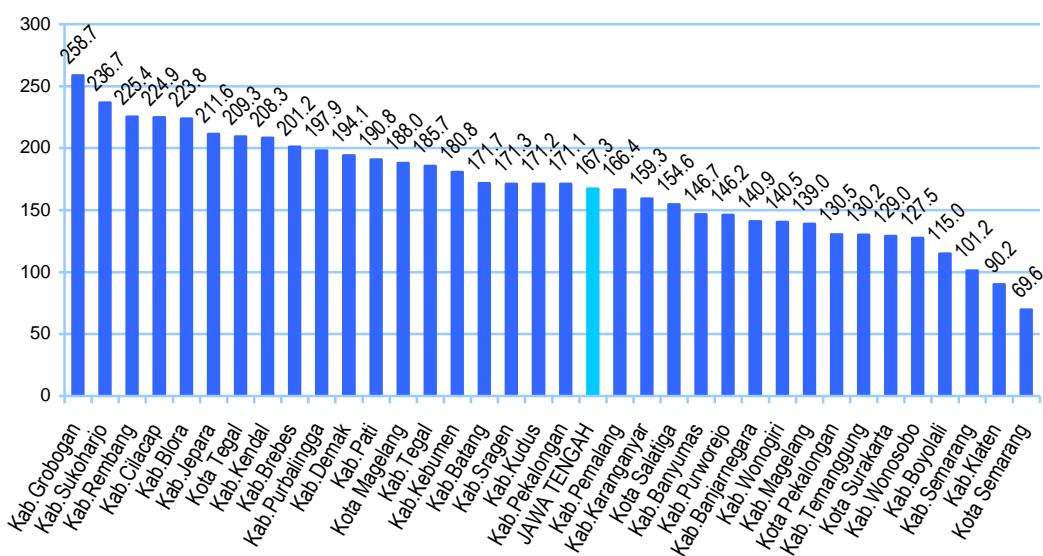


Sumber : Data Program SDM Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

3. Perawat

Suatu puskesmas dianggap memiliki perawat yang cukup apabila memiliki minimal lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal delapan perawat pada Puskesmas rawat inap. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Gambar 3.5
Persentase Kecukupan Perawat di Puskesmas
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



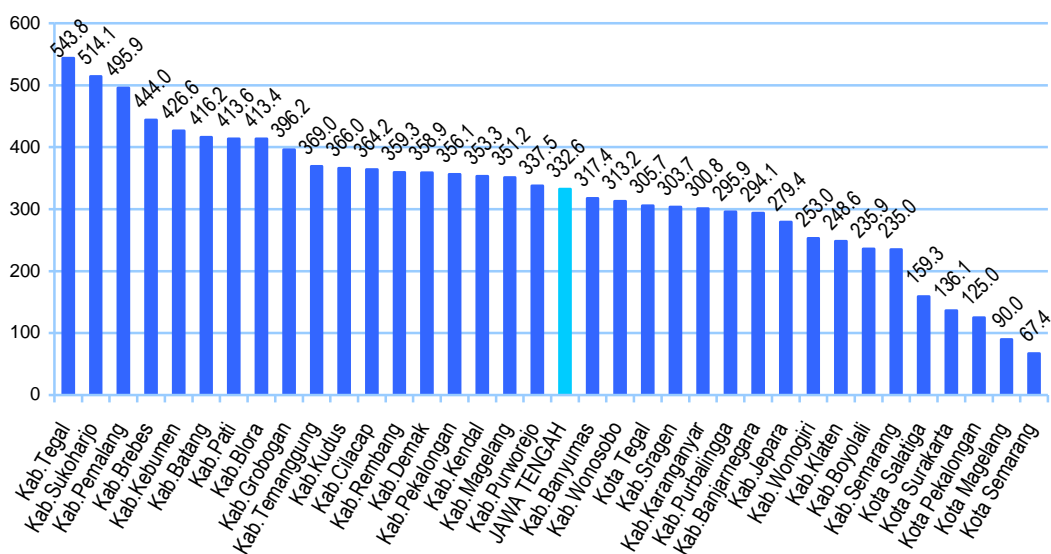
Sumber : Data Program SDM Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Persentase kecukupan perawat yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 167,3% dimana masih terdapat 5,71% (2 kabupaten/kota) yang persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia perawat sesuai standar. Tetapi ada 25,71% (9 kabupaten/kota) yang puskesmasnya tersedia perawat melebihi jumlah standar.

4. Bidan

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Persentase kecukupan bidan yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 332,6% dimana masih terdapat 5,71% (2 kabupaten/kota) yang persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia bidan sesuai standar. Tetapi ada 85,71% (30 kabupaten/kota) yang puskesmasnya tersedia bidan melebihi jumlah standar.

Gambar 3.6
Persentase Kecukupan Bidan di Puskesmas
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program SDMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

5. Tenaga Kefarmasian

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Ketersediaan apoteker yang bekerja di puskesmas yaitu 551, sedangkan jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian ada 841 orang. Standar Ketenagaan Minimal masih berdasarkan tenaga Kefarmasian, dan untuk jenis tenaga ini masih minimal yang dibutuhkan yaitu 1 orang untuk masing-masing puskesmas. Persentase kecukupan tenaga kefarmasian yang bekerja di

puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 158,5% dimana masih terdapat 5,71% (2 kabupaten/kota) yang persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia tenaga kefarmasian. Tetapi ada 20,00% (7 kabupaten/kota) yang puskesmasnya tersedia lebih dari satu tenaga farmasi.

6. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat yang bekerja di puskesmas yaitu 1.265 orang. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 yang masuk dalam rumpun tenaga kesehatan masyarakat adalah epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Kondisi yang terjadi di puskesmas sebagian besar adalah tenaga promosi kesehatan dan epidemiologi kesehatan. Standar ketenagaan minimal tenaga kesehatan masyarakat membutuhkan 1 orang untuk masing-masing puskesmas. Persentase kecukupan tenaga kesehatan masyarakat yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 144,1% dimana masih terdapat 22,86% (8 kabupaten/kota) yang persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia tenaga kesehatan masyarakat. Tetapi ada 17,14% (6 kabupaten/kota) yang puskesmasnya tersedia lebih dari satu tenaga kesehatan masyarakat.

7. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Ketersediaan tenaga kesehatan lingkungan yang bekerja di puskesmas yaitu 1.048 orang. Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal untuk tenaga kesehatan lingkungan minimal 1 orang di masing-masing puskesmas. Persentase kecukupan tenaga kesehatan lingkungan yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 119,4% dimana masih terdapat 20,00% (7 kabupaten/kota) yang persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia tenaga kesehatan lingkungan.

8. Tenaga Gizi

Ketersediaan tenaga gizi yang bekerja di puskesmas yaitu 1.099 orang. Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal, jumlah yang harus ada untuk tenaga gizi adalah 1.239, sehingga masih ada kekurangan sejumlah 140 orang. Untuk jenis tenaga ini standar minimal yang dibutuhkan tergantung tipe puskesmasnya. Bila puskesmas rawat inap membutuhkan 2 orang sedangkan bila non rawat inap membutuhkan 1 orang. Persentase kecukupan tenaga kesehatan gizi yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 88,7% dimana masih

terdapat 60,00% (21 kabupaten/kota) yang persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia tenaga gizi sesuai standar.

9. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) merupakan penamaan jenis tenaga kesehatan yang dulunya analis kesehatan atau pranata laboratorium. Ketersediaan tenaga ATLM yang bekerja di puskesmas yaitu 990 orang. Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal untuk tenaga ATLM minimal 1 orang di masing-masing puskesmas. Persentase kecukupan ATLM yang bekerja di puskesmas di Provinsi Jawa Tengah mencapai 112,8% dimana masih terdapat 28,57% (10 kabupaten/kota) yang Persentase kecukupannya dibawah 100% atau belum semua puskesmas tersedia ATLM sesuai standar.

C. RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu.

Tabel 3.1.
Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio per 100.000 penduduk
1	Dokter Spesialis	10,3
2	Dokter Umum	17,3
3	Dokter Gigi	4,0
4	Dokter Gigi Spesialis	0,5
5	Perawat	128,8
6	Bidan	66,8
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	12,5
8	Apoteker	9,7
9	Kesehatan Masyarakat	5,4
10	Kesehatan Lingkungan	4,5
11	Tenaga Gizi	6,1
12	Keterampilan Fisik	3,8
13	Ahli Laboratorium Medik	9,8
14	Tenaga Teknik Biomedika lainnya	5,0
15	Tenaga Keteknisian Medis	11,2

Sumber : Data Program SDMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan

Tahun 2011–2025, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 di antaranya rasio dokter spesialis 11 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum 45 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi 13 per 100.000 penduduk, rasio perawat 180 per 100.000 penduduk, rasio bidan 120 per 100.000 penduduk, rasio sanitarian 18 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga gizi 14 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1.

BAB IV

PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu sub sistem dalam kesehatan nasional adalah sub sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai persentase anggaran kesehatan dalam APBD dan anggaran kesehatan per kapita. Selain itu, juga dijelaskan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Desa.

A. PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD

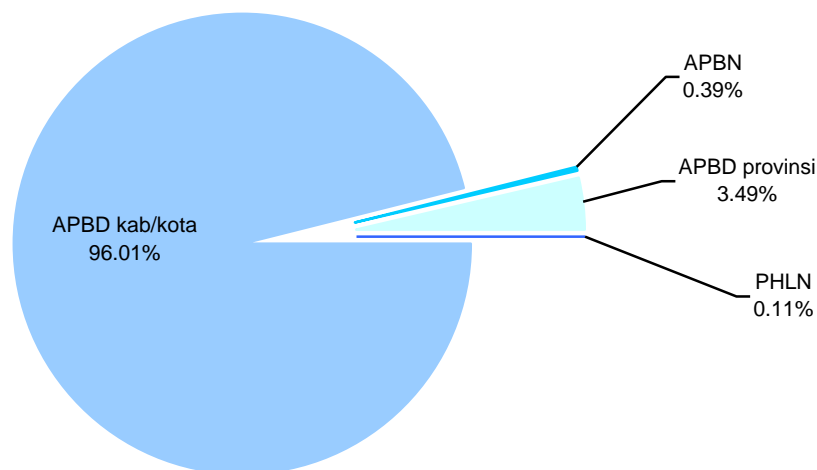
Pada tahun 2019, jumlah total anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 14.590.292.112.405,-. Anggaran tersebut bersumber dari : 1) APBD kabupaten/kota yang terdiri dari belanja langsung, belanja tidak langsung dan dana Alokasi Khusus (DAK); 2) APBD provinsi yang terdiri dari belanja langsung, belanja tidak langsung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) BOK; 3) APBN yang terdiri dari dana dekonsentrasi; 4) Pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang terdiri dari ADD GF AIDS NFMC dan *Global Fund* komponen TB.

Kontribusi terbesar dari anggaran kesehatan tahun 2019 sebesar 96,01 persen (Rp. 14.008.555.084.951,-) berasal dari APBD kabupaten/kota. Sementara kontribusi dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dimana pada tahun 2019 sebesar 3,49 persen meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,01 persen, bila dilihat dari jumlah anggarannya mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 321.964.207.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 509.044.518.000,- pada tahun 2019.

Anggaran pemerintah daerah untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95.846,71 juta rupiah dan Belanja Langsung sebesar 413.197,81 juta rupiah. Belanja langsung terdiri dari kegiatan-kegiatan non urusan kesehatan (Ex Bau/Rutin) dan urusan kesehatan. Kegiatan-

kegiatan urusan kesehatan terdiri dari UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Proporsi kegiatan UKM sebesar 92,64%, sedangkan kegiatan UKP sebesar 7,36%. Kegiatan UKM meliputi kegiatan-kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Kesehatan. Sementara kegiatan UKP meliputi kegiatan pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta kegiatan di farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan.

Gambar 4.1
Proporsi Anggaran Kesehatan Menurut Sumber Biaya
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat memberikan anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Karena berasal dari pemerintah pusat, maka seluruh atau sebagian dana tersebut berasal dari APBN.

APBN Dekonsentrasi sebagai dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, diarahkan untuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan dan target indikator tercapai di daerah. APBN Dekonsentrasi dialokasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 57.277,48 juta rupiah. Proporsi APBN Dekonsentrasi untuk kegiatan UKM sebesar 85,78%, kegiatan program prioritas (HIV, TB, Malaria) sebesar 1,96%, kegiatan SPM sebesar 4,04% dan pendukung kegiatan

sebesar 7,24%. Sedangkan kontribusi anggaran kesehatan bersumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri(PHLN) tahun 2019 sebesar 0,11 persen, menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 0,31 persen.

B. ANGGARAN KESEHATAN PER KAPITA

Total Anggaran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp. 95.016.392.441.569,-, sedangkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD diluar gaji sebesar Rp. 6.033.213.610.648,-. Sehingga persentase anggaran kesehatan dibandingkan total APBD tahun 2019 adalah 10,9 persen, meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 6,3 persen. Hal ini berarti sudah sesuai dengan amanat undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki alokasi minimal sepuluh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji (belanja pegawai). Sedangkan anggaran kesehatan perkapita di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp.302.234,29,-, menurun bila dibandingkan tahun 2018 yaitu Rp. 310.499,42,-.

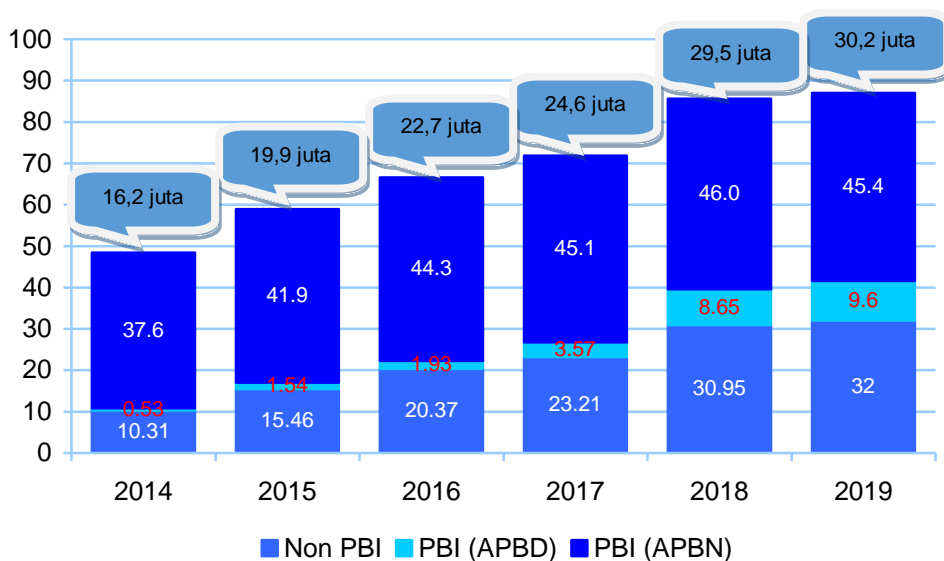
C. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pada tahun 2019, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun keenam. Harus diakui bahwa reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial, seperti pada kasus penyakit katastropis yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Akan tetapi, sebagaimana pengalaman berbagai negara yang telah mencapai Jaminan Semesta (*Universal Health Coverage/ UHC*), pelaksanaan JKN di Indonesia pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah adaptasi peserta dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengelolaan program publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan finansial dari program JKN. Beberapa isu yang sering mengemuka antara lain adalah ketidakakuratan sasaran kelompok PBI, peningkatan cakupan kepesertaan kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang

mempunyai risiko kesehatan yang besar tetapi dengan kesinambungan pembayaran iuran kepesertaan yang rendah, luasnya cakupan manfaat dibandingkan dengan besaran iuran, pertanyaan tentang besaran tarif INA-CBG untuk RS swasta, dan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan primer serta isu mengenai *fraud/kecurangan*.

Gambar 4.2
Perkembangan Cakupan Kepesertaan JKN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

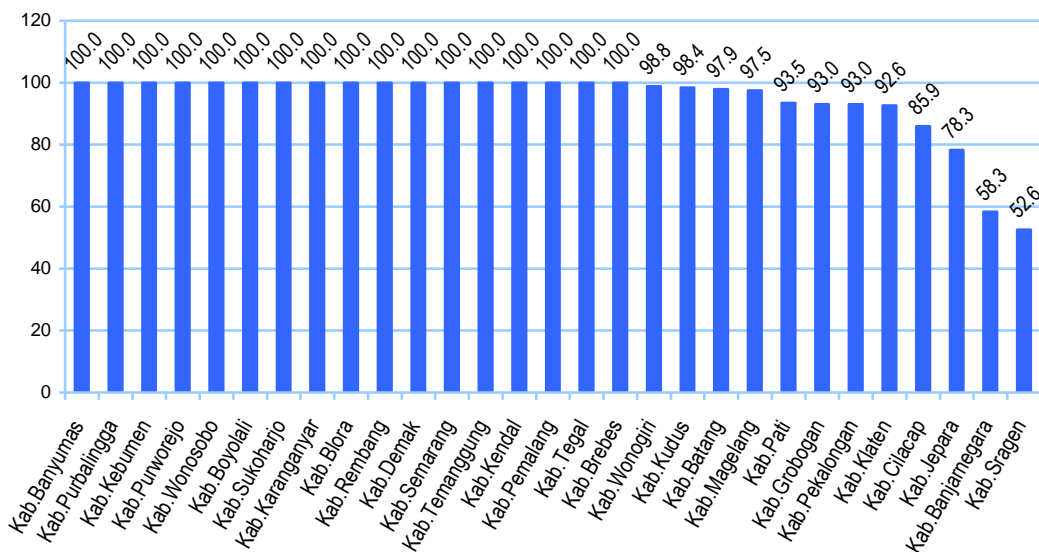
Sejak awal diluncurkan program JKN-KIS pada tahun 2014, cakupan kepesertaan program terus meningkat. Pada Tahun 2019, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 45,4%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 30,2 juta jiwa.

D. DANA DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial.

Gambar 4.3
Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebesar 95% atau sebanyak 7.415 dari 7.809 desa yang ada di Jawa Tengah. Sebanyak 17 kabupaten persentasenya sudah mencapai 100%, sementara Kabupaten Sragen merupakan kabupaten dengan persentase terendah.

BAB V

KESEHATAN KELUARGA

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Keluarga sebagai komponen dari masyarakat berperan signifikan dalam mempengaruhi status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan di masa yang akan datang. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia yang ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi.

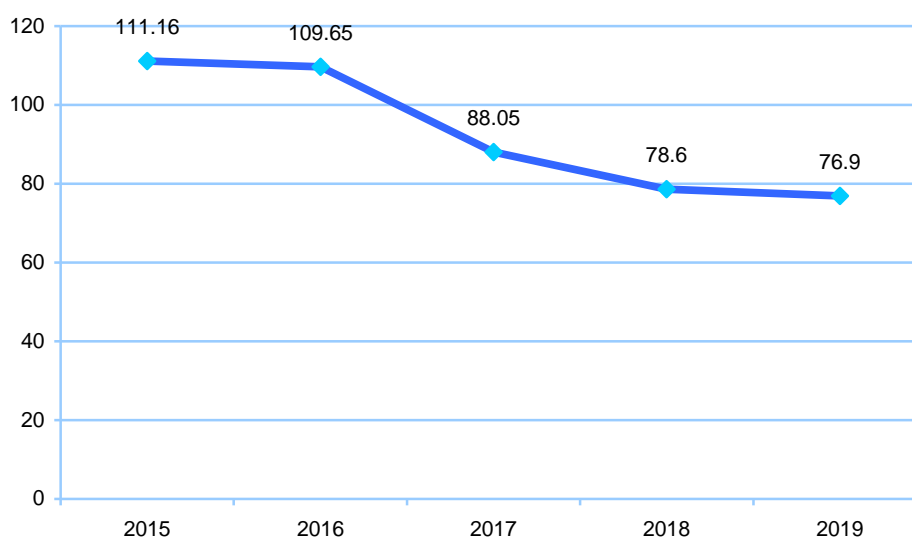
Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

A. KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 2015-2019 dari 111,16 menjadi 76,9 per 100.000 kelahiran hidup. Gambaran AKI di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini.

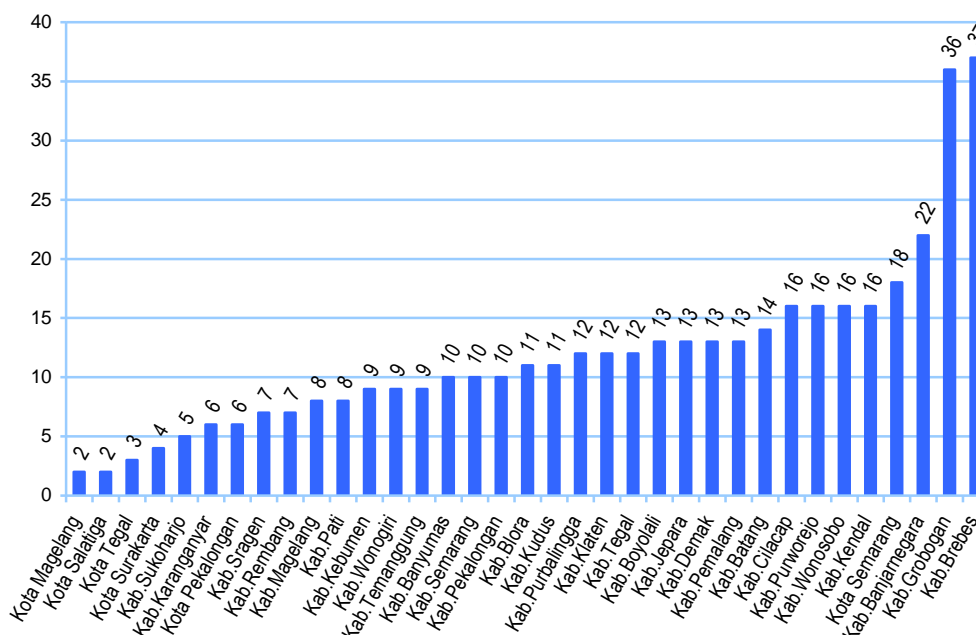
Gambar 5.1
Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan jumlah kasus kematian ibu tertinggi adalah Kabupaten Brebes sebanyak 37 kasus, diikuti Grobogan 36 kasus, dan Banjarnegara 22 kasus. Kabupaten/kota dengan kasus kematian ibu terendah adalah Kota Magelang dan Kota Salatiga masing-masing 2 kasus, diikuti Kota Tegal dengan 3 kasus. Gambaran kasus kematian ibu per kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 5.2.

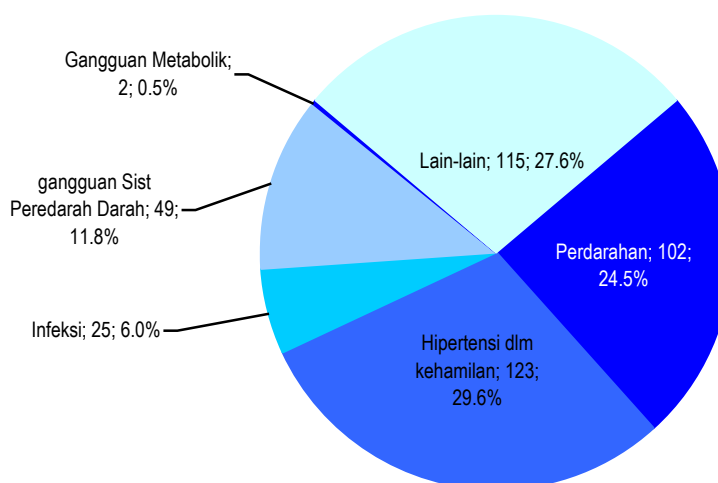
Gambar 5.2
Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sebesar 64,18 persen kematian maternal di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada waktu nifas, sebesar 25,72 persen pada waktu hamil, dan sebesar 10,10 persen terjadi pada waktu persalinan. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 64,66 persen, kemudian pada kelompok umur ≥ 35 tahun sebesar 31,97 persen dan pada kelompok umur ≤ 20 tahun sebesar 3,37 persen. Sedangkan untuk penyebab kematian dapat dilihat di gambar 5.3 berikut ini.

Gambar 5.3
Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) pelayanan kesehatan ibu nifas, (4) pelayanan komplikasi kebidanan dan (5) pelayanan kontrasepsi.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu;

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
- b. Pengukuran tekanan darah;
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi;
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan);
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya);
- j. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

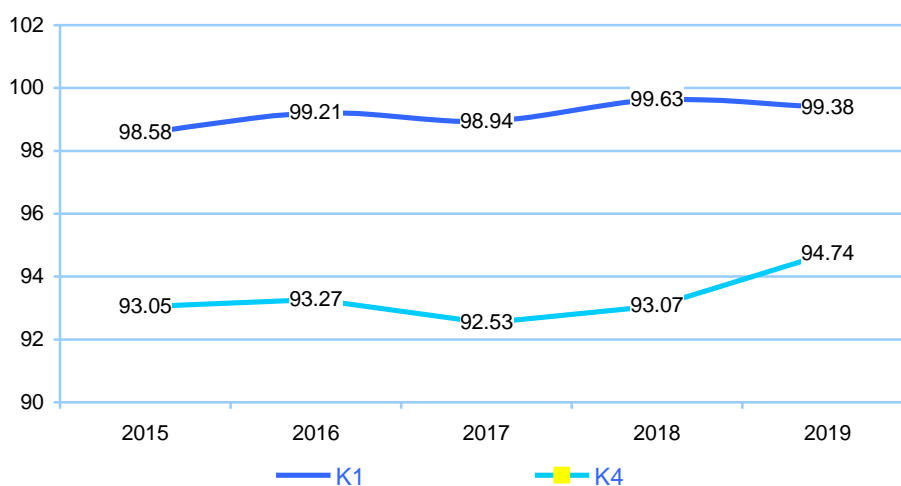
Pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada

kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 pada tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan cakupan tahun 2018. Capaian K1 dan K4 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada gambar berikut ini.

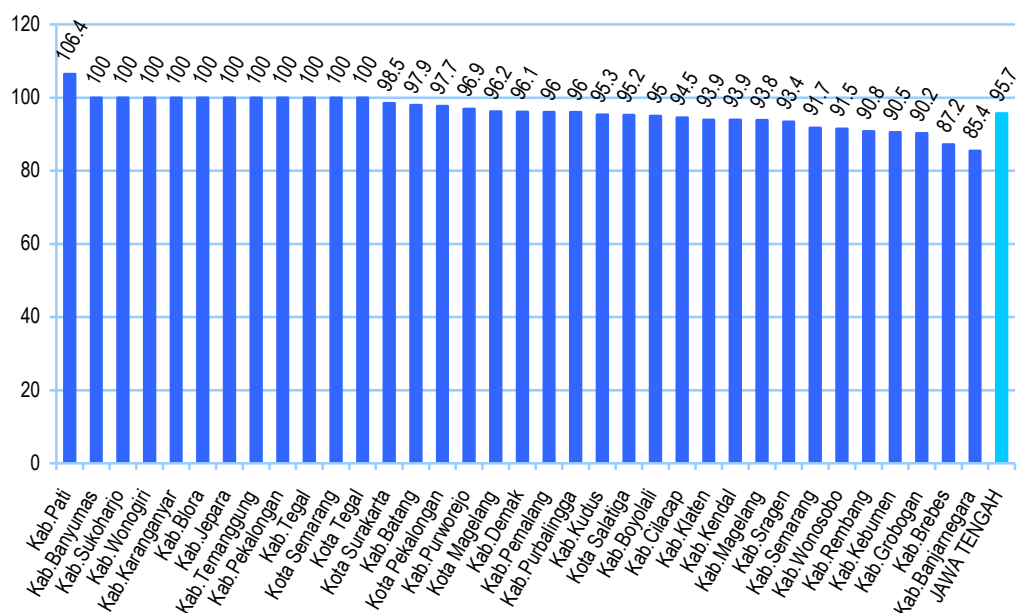
Gambar 5.4
Cakupan K1 dan K4 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data SPM Kab/kota dan Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sebanyak 30 kabupaten/kota (85,7 persen) di Provinsi Jawa Tengah mempunyai cakupan K1 sebesar 100 persen. Cakupan K1 terendah adalah di Kebumen sebesar 90,59 persen. Sebanyak 23 kabupaten/kota (65,7 persen) yang mempunyai cakupan K4 lebih dari 95 persen pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang sebesar 25,71 persen, maka capaian tersebut sudah mencapai target. Cakupan K4 terendah adalah Banjarnegara yaitu 85,4 persen, diikuti Brebes 87,2 persen, dan Grobogan 90,2 persen. Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2019 di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar 5.5 berikut ini.

Gambar 5.5
Cakupan K4 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

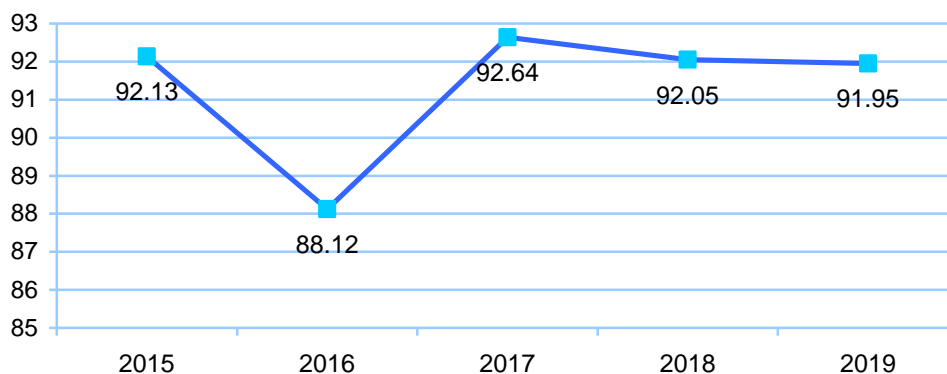


Sumber : Data SPM Kab/kota dan Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pada tahun 2019 ini terdapat Drop Out (DO) K1 – K4 sebesar 4,5 persen. Artinya masih ada sebanyak 4,5 persen ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang ke-4. Drop out ini dapat disebabkan karena ibu yang kontak pertama (K1) dengan tenaga kesehatan kehamilannya sudah berumur lebih dari 3 bulan, sehingga perlu intervensi peningkatan pendataan ibu hamil yang lebih intensif. Batas tertinggi untuk DO K1 – K4 adalah 10 persen. Apabila DO K1 – K4 lebih dari 10 persen maka perlu adanya penelusuran dan intervensi lebih lanjut.

Program penanggulangan anemia yang dilakukan pada ibu hamil dilaksanakan dengan memberikan 90 Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil selama periode kehamilannya. Cakupan ibu hamil mendapat 90 TTD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 91,95 persen, menurun bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2018 yaitu 92,05 persen. Cakupan ibu hamil mendapat 90 TTD selama lima tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat dalam gambar 5.6.

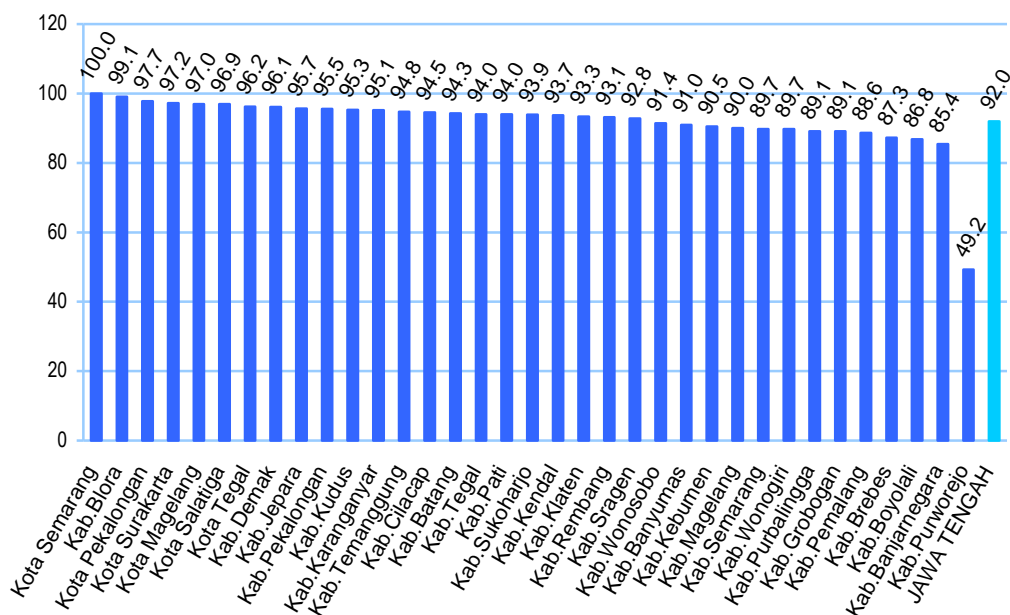
Gambar 5.6
Persentase Pemberian 90 TTD Pada Ibu Hamil
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan persentase pemberian 90 TTD tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 100 persen. Kabupaten/kota dengan persentase pemberian 90 TTD terendah adalah Purworejo 49,2 persen, diikuti Banjarnegara 85,4 persen, dan Boyolali 86,8 persen. Cakupan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.7.

Gambar 5.7
Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

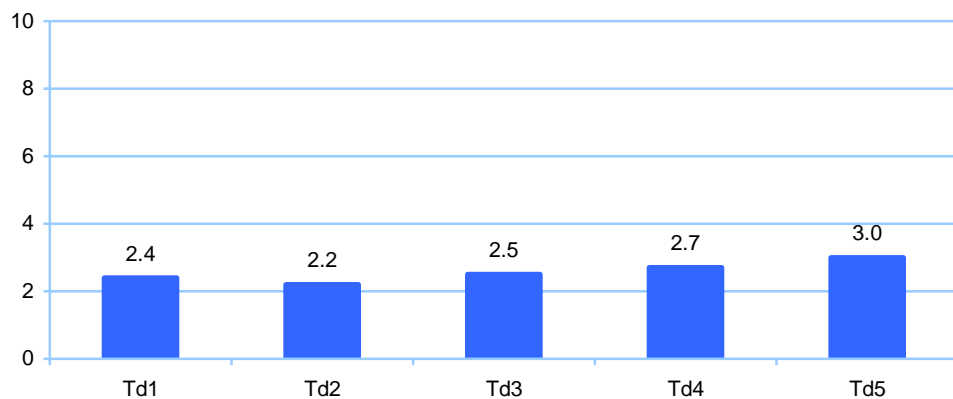
Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil screening mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+.

Gambar 5.8 memperlihatkan cakupan imunisasi Td5 pada wanita usia subur dan gambar 5.9 memperlihatkan cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil. Pada gambar 5.8 diketahui cakupan imunisasi Td pada status Td1 sampai Td5 pada wanita usia subur tahun 2019 masih sangat rendah yaitu kurang dari 5% jumlah seluruh WUS. Cakupan Td5 sebesar 3,0 persen dengan cakupan tertinggi di Kota Surakarta sebesar 15,6 persen dan terendah di Kota Magelang sebesar 0,03 persen.

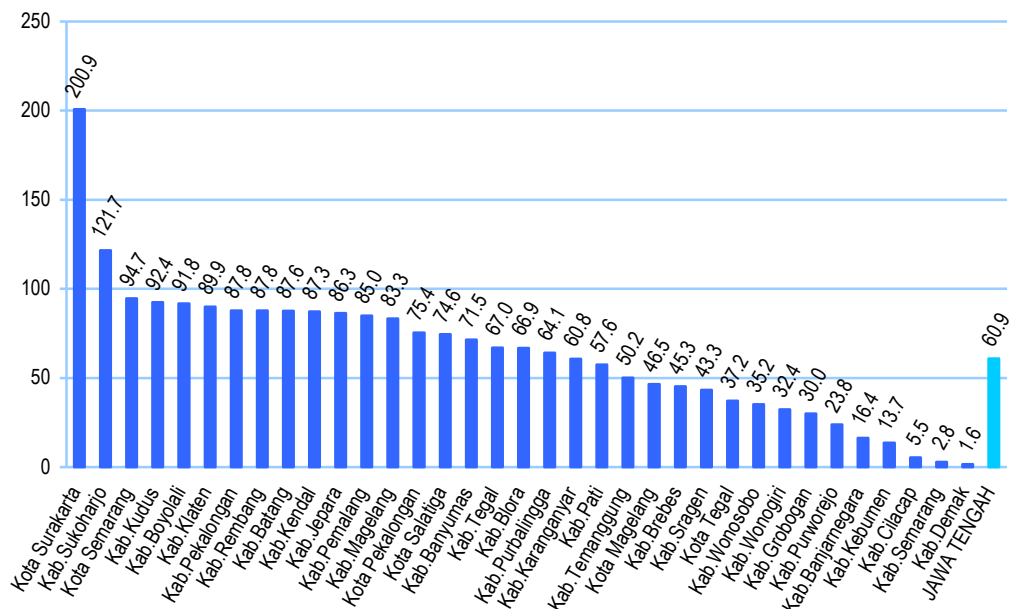
Gambar 5.8
Cakupan Imunisasi Td1-Td5 pada Wanita Usia Subur
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Imunisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2019 sebesar 60,9 persen, lebih rendah sekitar 33,8 persen dibandingkan dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 yang sebesar 94,7 persen, sementara Td2+ merupakan syarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4. Kota Surakarta dan Sukoharjo memiliki capaian imunisasi Td2+ pada ibu hamil lebih dari 100 persen, tertinggi di Jawa Tengah. Sedangkan kabupaten/kota dengan capaian terendah yaitu Demak (1,6 persen), Semarang (2,8 persen), dan Cilacap (5,5 persen).

Gambar 5.9
Cakupan Imunisasi Td2+ Pada Ibu Hamil
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



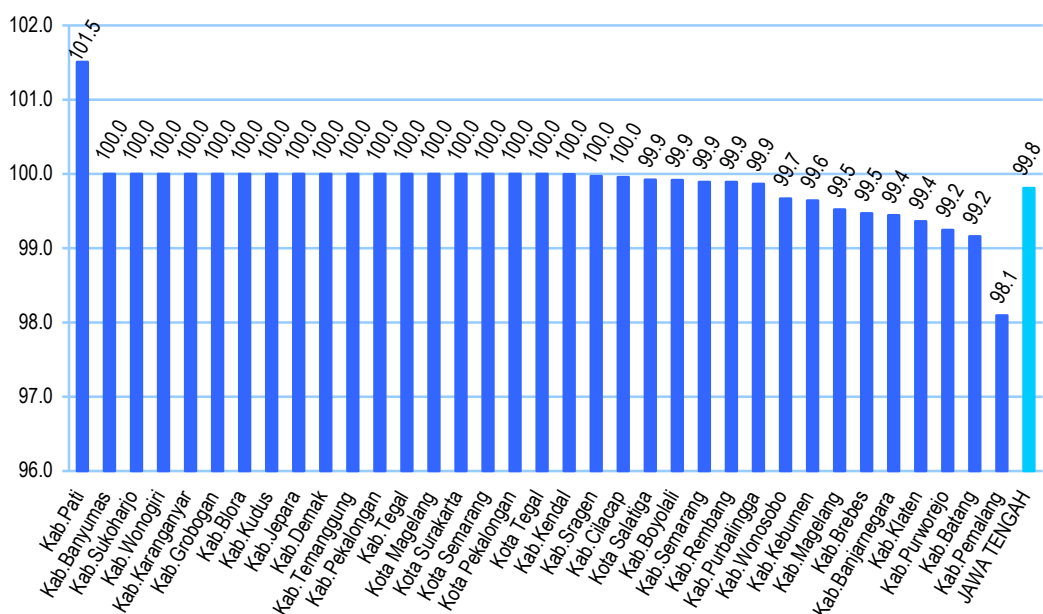
Sumber : Data Program Imunisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Berikut ini disajikan gambaran cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 (Gambar 5.10).

Gambar 5.10
Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



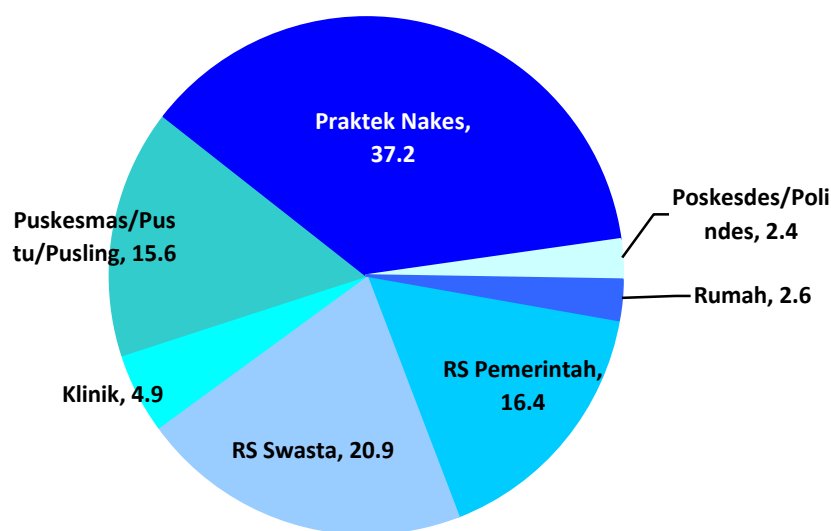
Sumber : Data SPM Kab/kota dan Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 99,9 persen persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Sementara ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 99,8 persen. Dengan demikian hanya sekitar 0.1 persen persalinan yang ditolong tenaga kesehatan

namun tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Hasil Riskesdas 2018 memperlihatkan tempat persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 97,4 persen yang berarti hampir mendekati dengan hasil pencatatan rutin program kesehatan keluarga yang sebesar 99,7 persen. Tempat persalinan paling banyak digunakan yaitu rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) dan praktek tenaga kesehatan (nakes). Namun penggunaan rumah sebagai tempat persalinan masih ada meskipun kecil yaitu 2,6 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan Poskesdes/polindes yang hanya 2,4 persen.

Gambar 5.11
Proporsi Tempat Persalinan yang Dimanfaatkan oleh perempuan umur 10-54 tahun di Provinsi Jawa Tengah, Riskesdas 2018

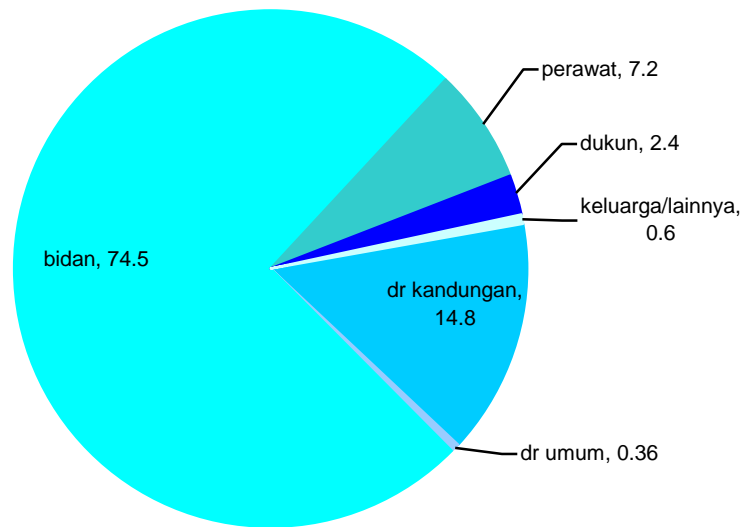


Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018, Balitbangkes, Kemenkes RI, 2019

Ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas), yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut hasil Riskesdas 2018 sebesar 96,9 persen yang berarti hampir sama dengan hasil pencatatan rutin program kesehatan keluarga yang sebesar 99,9 persen. Berikut ini proporsi persalinan dengan kualifikasi tertinggi pada perempuan umur 10-54 tahun.

Gambar 5.12
Proporsi Persalinan dengan Kualifikasi Tertinggi pada perempuan umur 10-54 tahun di Provinsi Jawa Tengah, Riskesdas 2018



Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018, Balitbangkes, Kemenkes RI, 2019

Proporsi terbesar penolong persalinan tertinggi yaitu bidan sebesar 74,5 persen dan dokter kandungan sebesar 14,8 persen. Masih ada sekitar 2,4 persen yang persalinannya ditolong oleh dukun.

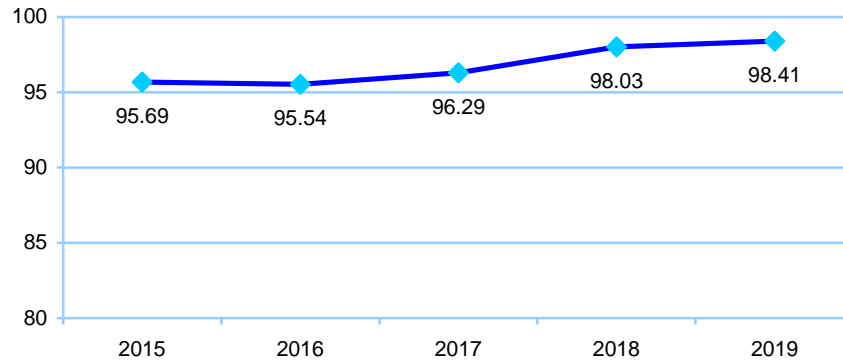
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari :

- pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
- pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- pemeriksaan lochia dan cairan per vaginam lain;
- pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
- pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;
- pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Gambar berikut menyajikan cakupan kunjungan nifas di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

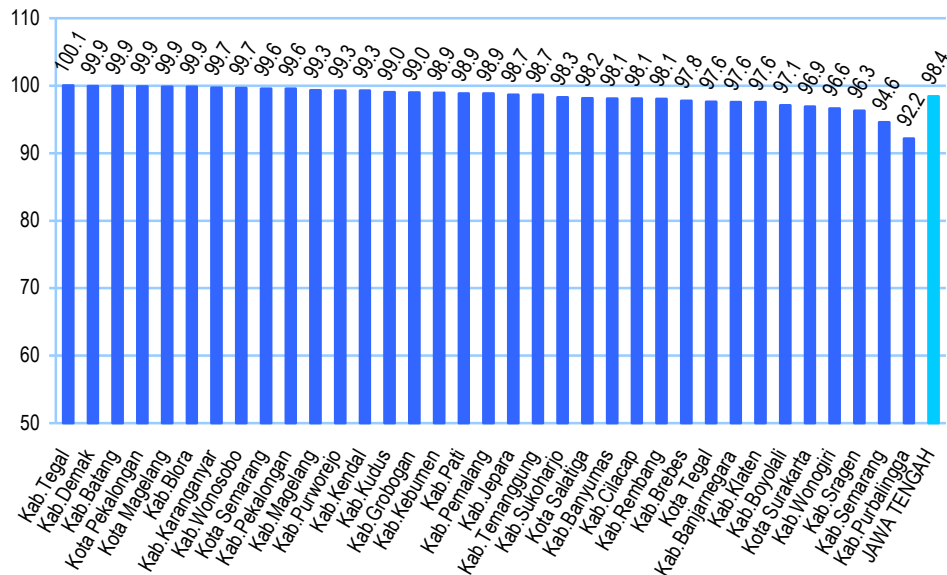
Gambar 5.13
Cakupan Pelayanan Nifas di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Profil Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan laporan rutin kabupaten/kota tahun 2019 diketahui bahwa cakupan pelayanan nifas Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,41 persen, mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan cakupan tahun 2018 yaitu 98,03 persen. Trend cakupan ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan nifas dari tahun 2015 -2019 terlihat bahwa sejak tahun 2016 cenderung meningkat meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Gambar 5.14
Cakupan Pelayanan Nifas Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

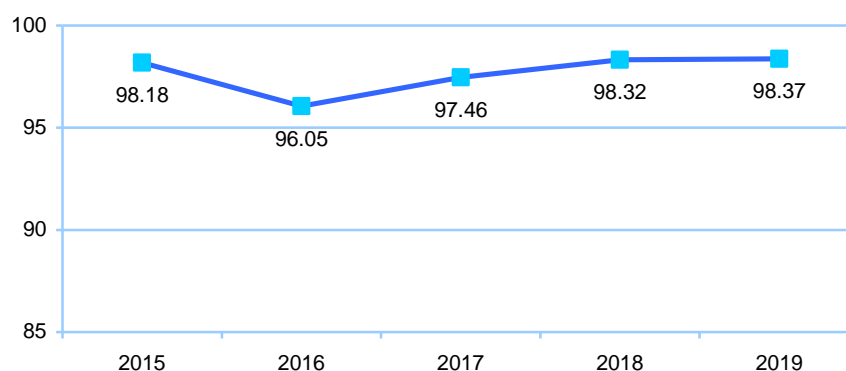


Sumber : Data Profil Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan gambar 5.14, Kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan nifas tertinggi adalah Tegal yaitu sebesar 100,1 persen. Kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan nifas terendah adalah Purbalingga yaitu 92,2 persen, diikuti Semarang 94,6 persen, dan Sragen 96,3 persen.

Suplementasi vitamin A pada ibu nifas merupakan salah satu program penanggulangan kekurangan vitamin A. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A adalah cakupan ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi (200.000 SI) pada periode sebelum 40 hari setelah melahirkan. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A tahun 2019 sebesar 98,37 persen, relatif meningkat dibandingkan cakupan tahun 2018 yang sebesar 98,32 persen.

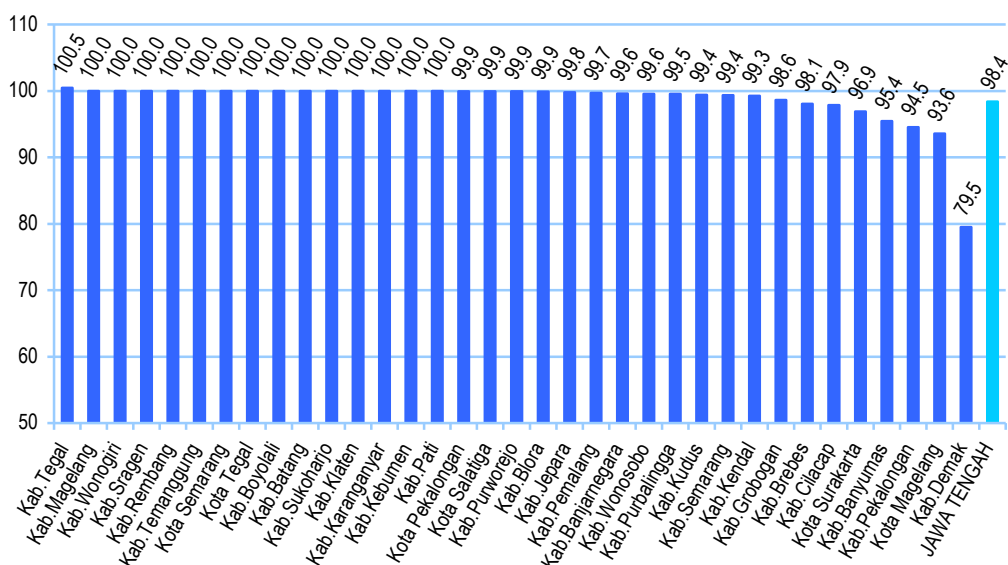
Gambar 5.15
Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Profil Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

Cakupan pemberian kapsul Vitamin A menurut kabupaten/kota dapat dilihat bahwa terdapat lima kabupaten/kota dengan cakupan lebih atau sama dengan 100 persen yaitu Kota Surakarta, Banjarnegara, Brebes, Jepara dan Wonogiri, sementara Kabupaten/kota dengan cakupan terendah adalah Kabupaten Blora 74 persen.

Gambar 5.16
Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



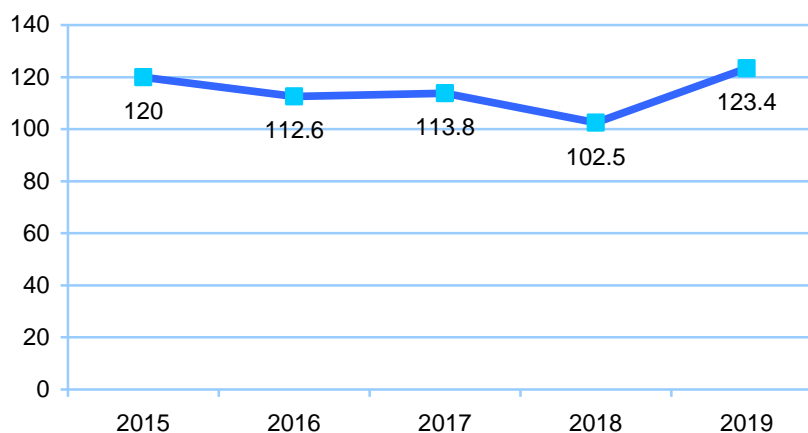
Sumber : Data Profil Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

5. Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Diperkirakan 20 persen ibu hamil akan mengalami komplikasi kebidanan. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani.

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 123,4 persen, meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (102,5 persen). Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan ini mencapai lebih dari 100 persen karena penyebut untuk penghitungan indikator tersebut adalah perkiraan bumil dengan komplikasi yaitu 20 persen dari jumlah ibu hamil, tetapi pada kenyataannya jumlah ibu hamil dengan komplikasi riil lebih besar daripada perkiraan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 5.17.

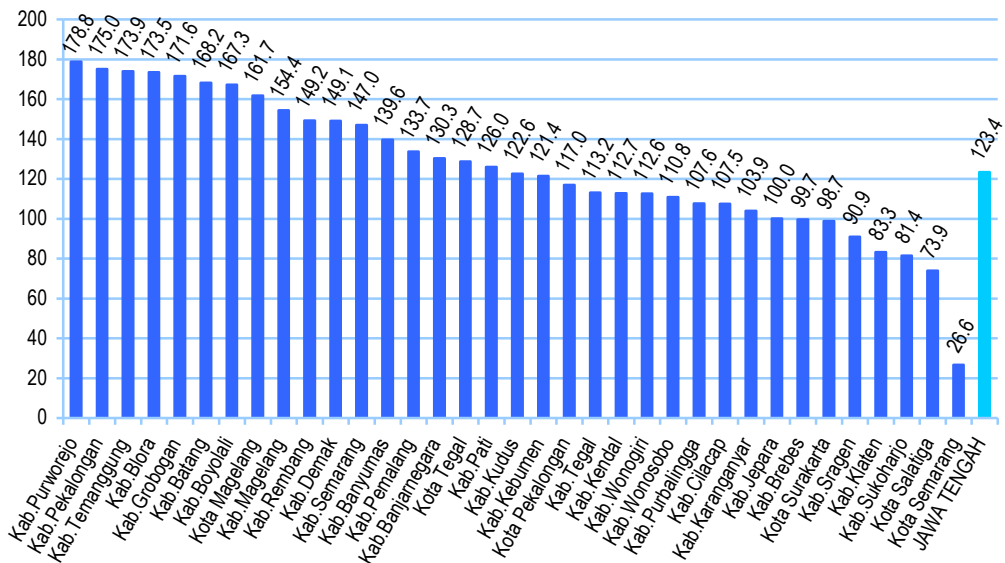
Gambar 5.17
Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan persentase penanganan ibu hamil komplikasi tertinggi adalah Purworejo sebesar 178,9 persen, diikuti Pekalongan (175,1 persen), dan Temanggung (173,9 persen). Kabupaten/kota dengan persentase penanganan ibu hamil komplikasi terendah adalah Kota Semarang yaitu 26,6 persen, diikuti Kota Salatiga (73,9 persen) dan Sukoharjo (81,4 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.18.

Gambar 5.18
Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

6. Pelayanan Kontrasepsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T yaitu Terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), Terlalu sering melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan, dan Terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

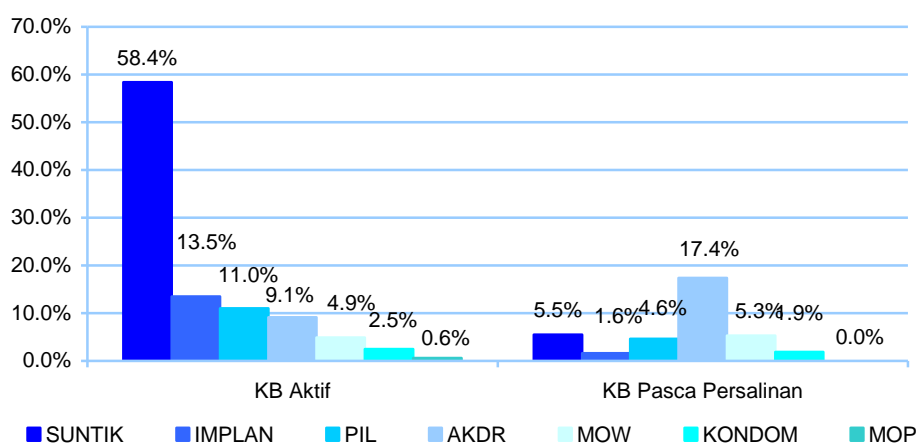
KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara-

cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak.

Melalui tahapan konseling pelayanan KB, Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, serta risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Untuk selanjutnya, diharapkan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan benar.

Jumlah PUS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 6.652.451 pasang. Dari seluruh PUS yang ada, sebesar 73,5 persen adalah peserta KB aktif. Adapun jenis kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif dapat dilihat pada gambar 5.19.

Gambar 5.19
Cakupan Peserta KB Aktif dan KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



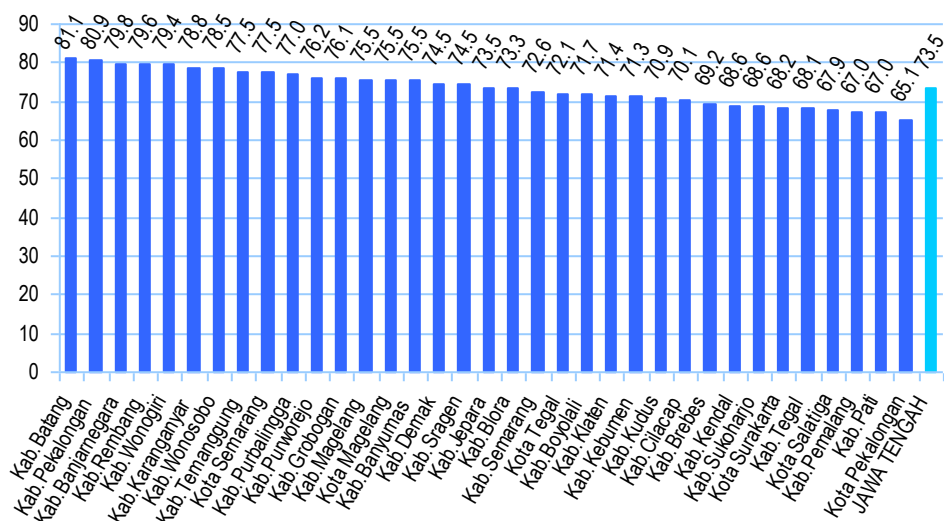
Sumber: BKKBN Prov. Jateng, 2019

Pemilihan jenis alat kontrasepsi pada peserta KB aktif dan peserta KB pasca persalinan menunjukkan pola yang berbeda, sebagaimana dapat terlihat pada gambar 5.19 di atas. Pada peserta KB aktif, sebagian besar memilih alat kontrasepsi suntik. Sementara pada peserta KB pasca persalinan, sebagian besar memilih alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR).

Peserta KB aktif adalah akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan PUS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara PUS. Cakupan peserta KB aktif

Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 73,5 persen, relative menurun bila dibandingkan pencapaian tahun 2018 yaitu 73,7 persen.

Gambar 5.20
Cakupan Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

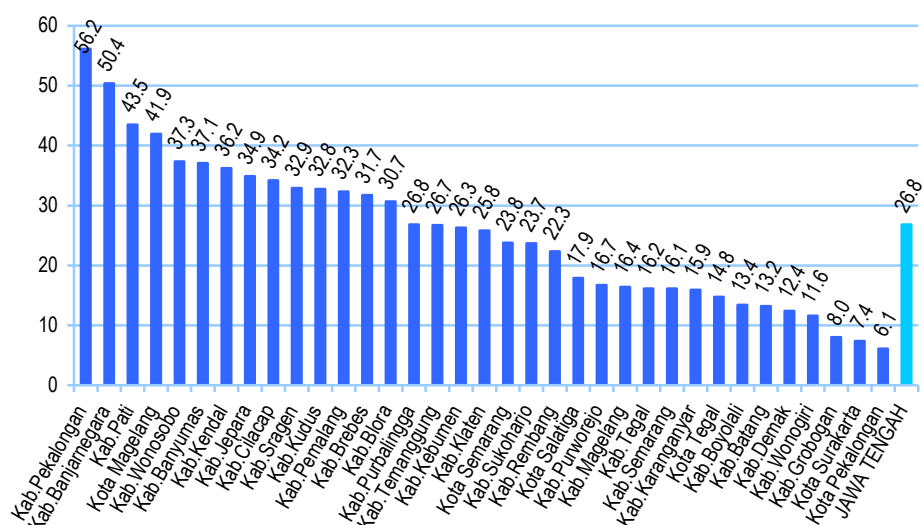


Sumber: BKKBN Prov. Jateng, 2019

Kabupaten/kota dengan cakupan tertinggi adalah Batang yaitu 81,1 persen, diikuti Pekalongan 80,9 persen, dan Banjarnegara 79,8 persen. Kabupaten/kota dengan cakupan terendah Kota Pekalongan yaitu 65,1 persen, diikuti Pati 67,0 persen, dan Pemalang 67,0 persen.

Peserta KB pasca persalinan adalah PUS yang memakai kontrasepsi pada masa pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan). Cakupan peserta KB pasca persalinan di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 26,8 persen.

Gambar 5.21
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Terhadap Jumlah Ibu Bersalin
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



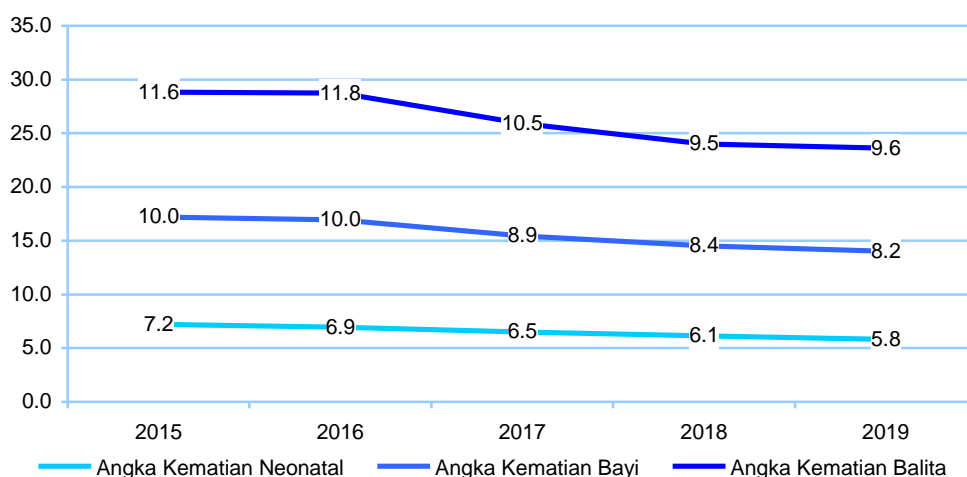
Sumber: BKKBN Prov. Jateng, 2019

B. KESEHATAN ANAK

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun.

Dengan upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). AKN, AKB dan AKABA dari tahun 2015 sampai dengan 2019 kecenderungannya menurun.

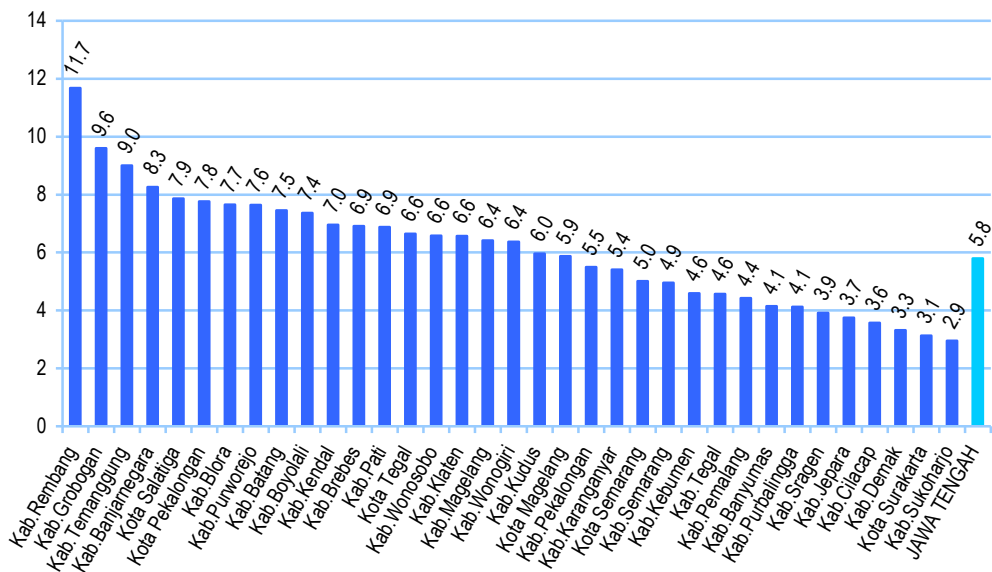
Gambar 5.22
Tren Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

AKN di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 5,8 per 1.000 kelahiran hidup. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 69,9 persen kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan gambar 5.23, kabupaten/kota dengan AKN tertinggi adalah Rembang sebesar 11,7 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Grobogan (9,6 per 1.000 kelahiran hidup) dan Temanggung (9,0 per 1.000 kelahiran hidup). Kabupaten/kota dengan AKN paling rendah adalah Sukoharjo sebesar 2,9 per 1.000 kelahiran hidup.

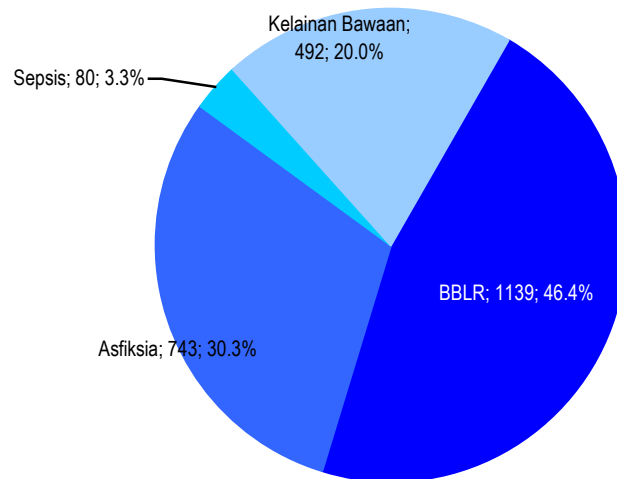
Gambar 5.23
Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sebesar 46,4 persen kematian neonatal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 disebabkan karena BBLR. Penyebab kematian neonatal secara lengkap dapat dilihat di gambar 5.24 berikut ini.

Gambar 5.24
Penyebab Kematian Neonatal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

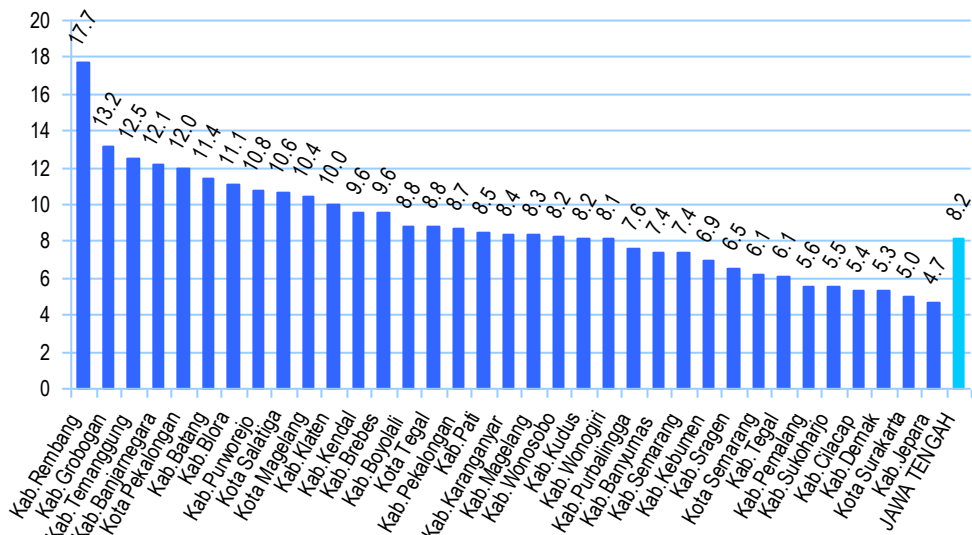


Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di

suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 8,2 per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten/kota dengan AKB terendah adalah Jepara sebesar 4,7 per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi adalah Rembang (17,7 per 1.000 kelahiran hidup).

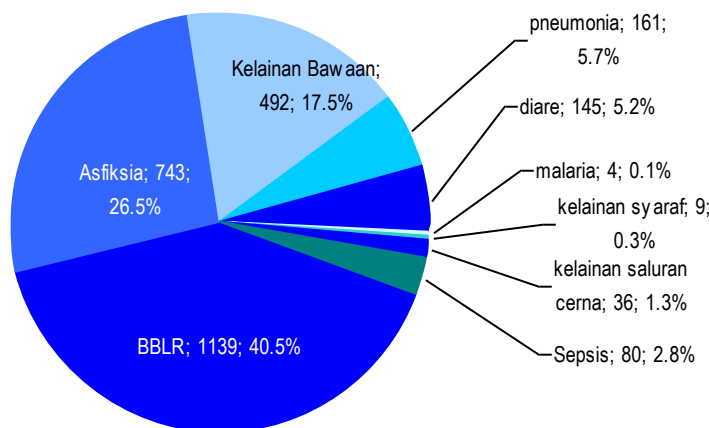
Gambar 5.25
Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sebesar 40,5 persen kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 disebabkan karena BBLR. Penyebab kematian bayi secara lengkap dapat dilihat di gambar 5.26 berikut ini.

Gambar 5.26
Penyebab Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

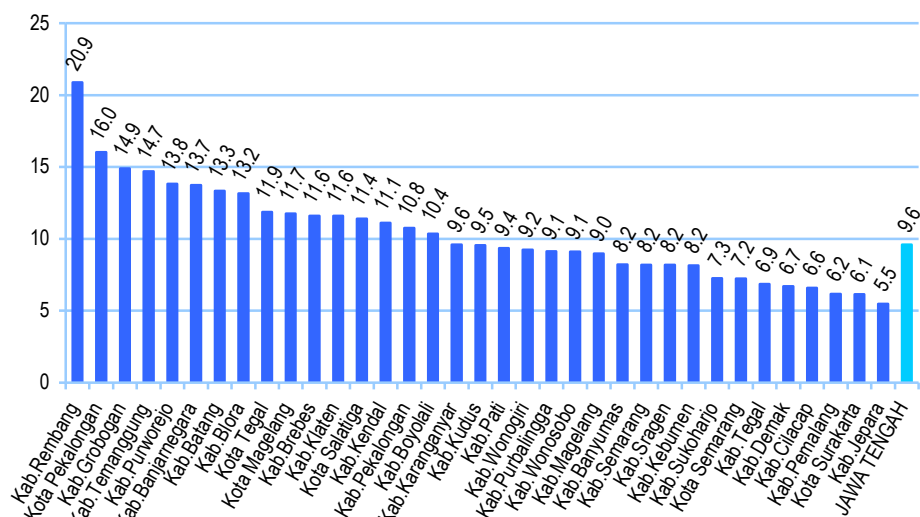


Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0–5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan

tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Gambar 5.27
Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

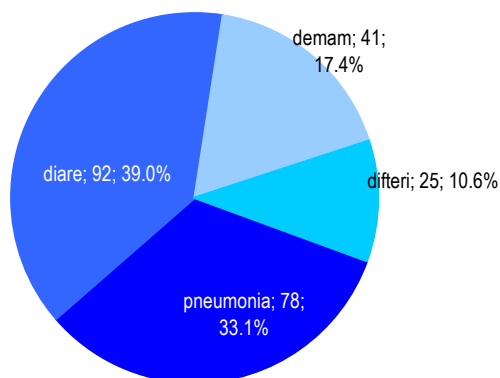


Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

AKABA Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 9,6 per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten/kota dengan AKABA tertinggi adalah Rembang yaitu 20,9 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Kota Pekalongan (16,0 per 1.000 kelahiran hidup), dan Grobogan (14,9 per 1.000 kelahiran hidup). Kabupaten/kota dengan AKABA paling rendah adalah Jepara sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Sebesar 39,0 persen kematian anak balita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 disebabkan karena diare. Penyebab kematian anak balita secara lengkap dapat dilihat di gambar 5.28 berikut ini.

Gambar 5.28
Penyebab Kematian Anak Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019

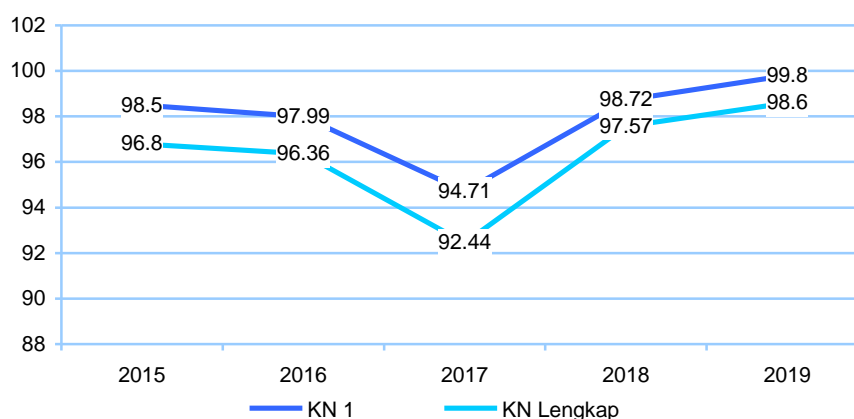
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B₀ injeksi bila belum diberikan.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, 1 kali pada 8-28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja pada satu tahun.

Gambar 5.29
Persentase KN 1 dan KN Lengkap
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

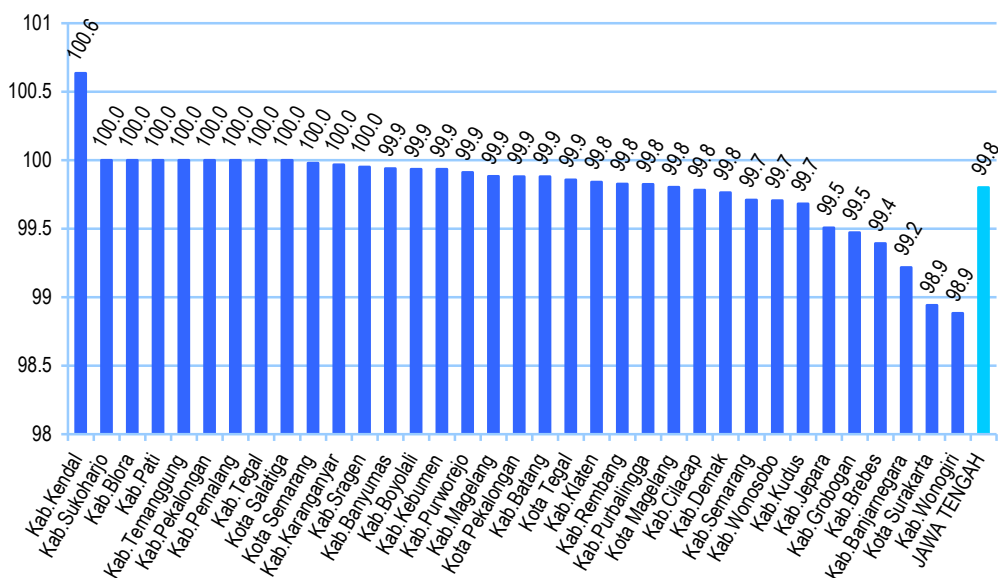


Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Persentase KN 1 di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 99,8 persen, meningkat dibandingkan persentase KN 1 tahun 2018 yaitu 98,72 persen.

Persentase KN lengkap tahun 2019 sebesar 98,6 persen, meningkat dibandingkan persentase KN lengkap tahun 2018 yaitu 97,57.

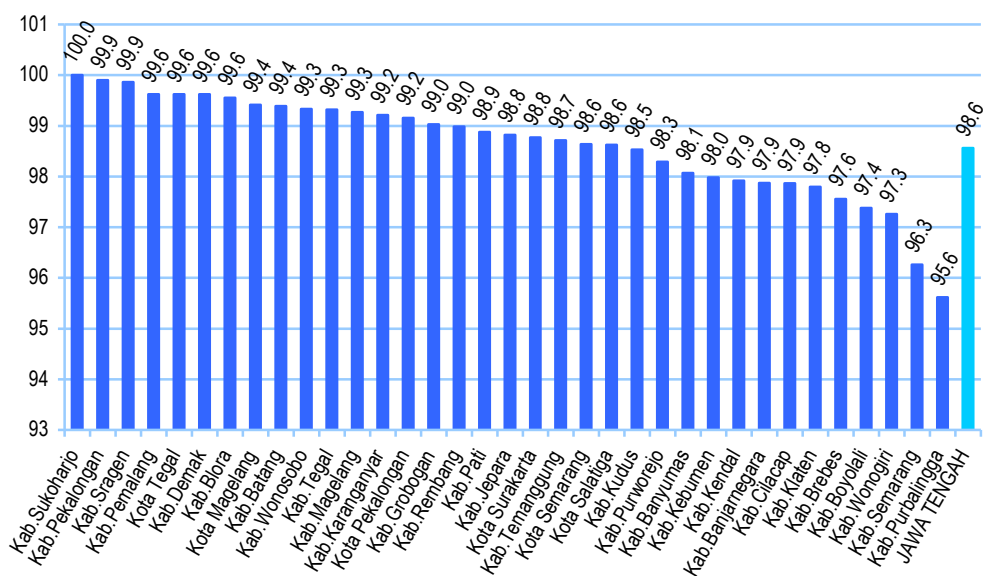
Gambar 5.30
Persentase KN 1 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari gambar 5.30, terdapat satu kabupaten/kota dengan cakupan KN1 mencapai lebih dari 100 persen yaitu Kendal. Sebanyak 22,8 persen (8 kabupaten/kota) yang capaiannya 100 persen, sementara terendah adalah Wonogiri (98,9 persen).

Gambar 5.31
Persentase KN Lengkap Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



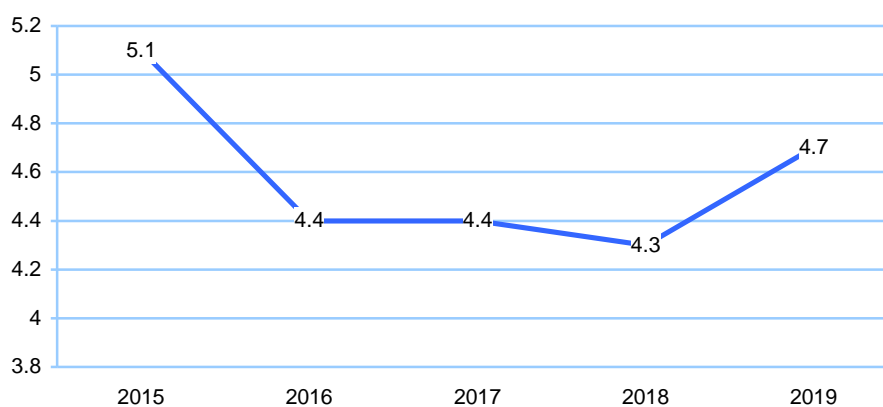
Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dari gambar 5.31, kabupaten dengan cakupan KN lengkap tertinggi adalah Sukoharjo (100 persen) sedangkan kabupaten dengan persentase KN lengkap terendah adalah Purbalingga (95,6 persen).

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor risiko kematian bayi. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kematian bayi adalah penanganan BBLR. BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Penyebab terjadinya BBLR antara lain karena ibu hamil mengalami anemia, kurang asupan gizi waktu dalam kandungan, ataupun lahir kurang bulan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah perlu penanganan yang serius, karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi dan belum sepenuhnya pembentukan organ-organ tubuhnya yang biasanya akan menjadi penyebab utama kematian bayi.

Persentase bayi berat lahir rendah (BBLR) di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 4,7 persen, meningkat bila dibandingkan dengan persentase tahun 2018.

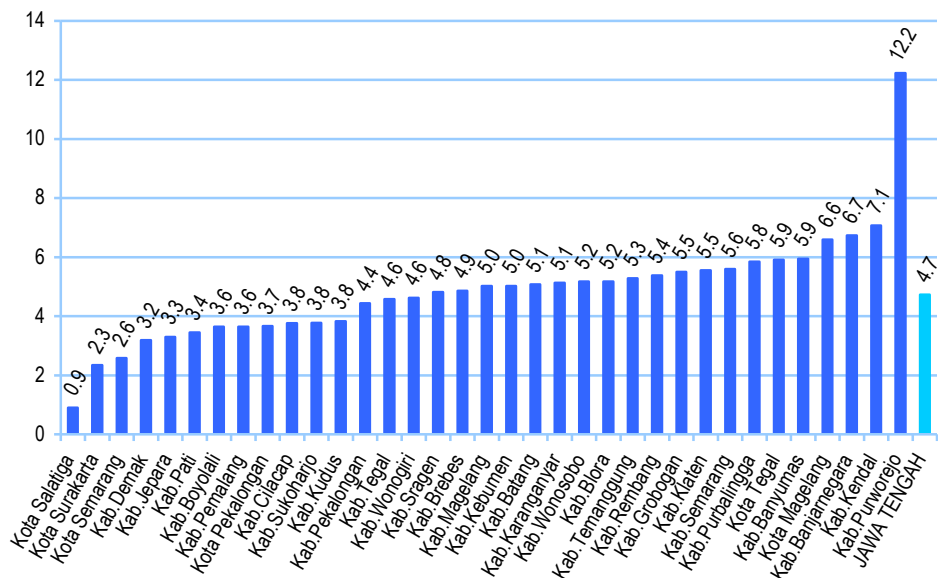
Gambar 5.32
Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan persentase BBLR kurang dari 2 persen adalah Kota Salatiga sebesar 0,9 persen, sementara kabupaten/kota dengan persentase BBLR tertinggi adalah Purworejo sebesar 12,2 persen. Adapun gambaran persentase BBLR menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 5.33.

Gambar 5.33
Persentase BBLR Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

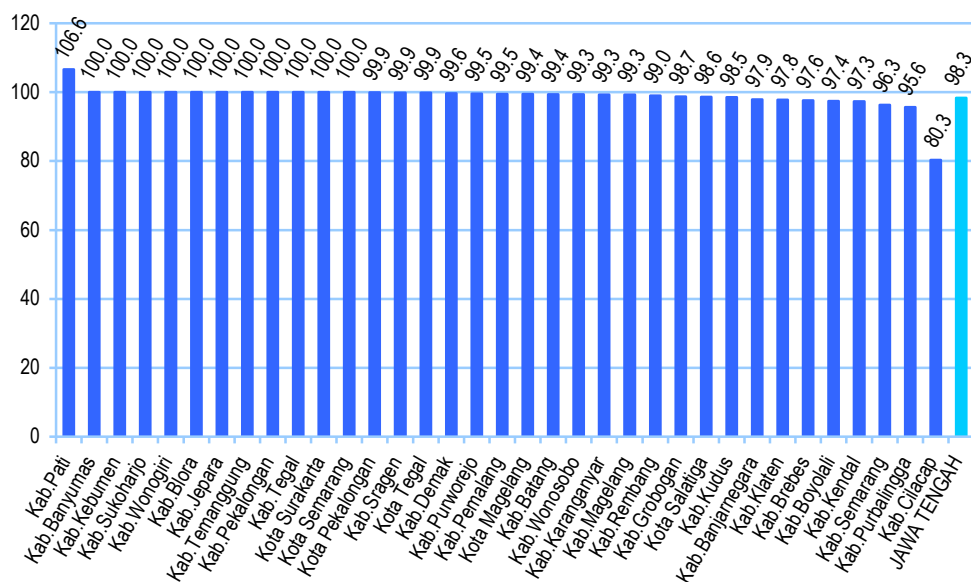
2. Pelayanan Kesehatan Bayi

Bayi merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali, yaitu pada 29 hari – 2 bulan, 3 – 5 bulan, 6 – 8 bulan dan 9 – 12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Gambaran cakupan pelayanan kesehatan bayi per kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019 disajikan pada gambar 5.34.

Gambar 5.34
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data SPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 98,3 persen, sedikit menurun bila dibandingkan cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2018 yaitu 98,44 persen. Terdapat satu kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan kesehatan bayi lebih dari 100 persen yaitu Pati (106,6 persen). Kabupaten dengan cakupan pelayanan kesehatan bayi terendah adalah Cilacap (80,3 persen).

3. Imunisasi

Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Pertusis, Campak, Polio, radang selaput otak, dan radang

paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost-effective (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu.

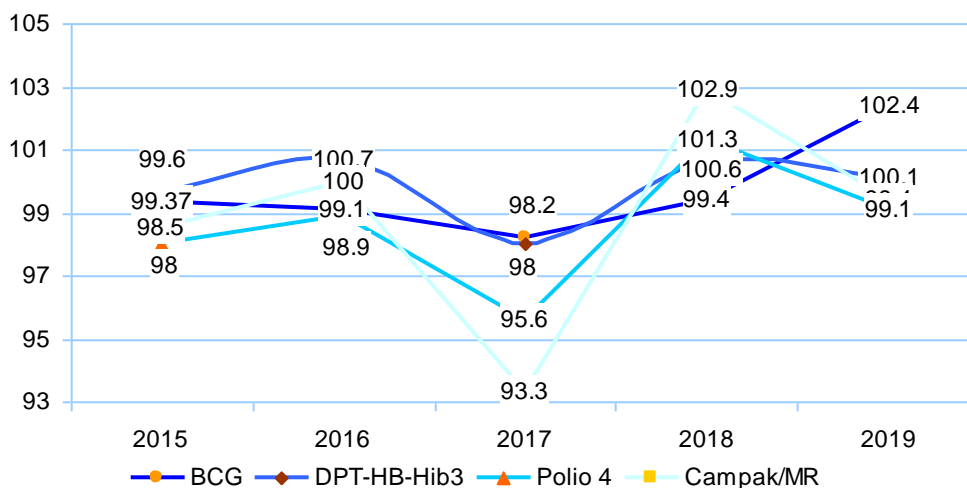
a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B, dan Campak. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari HB 0-7 hari 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali.

Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Jawa Tengah tahun 2019 dari semua antigen sudah mencapai target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu sebesar 98,5 persen. Sedangkan pencapaian

per kabupaten/kota tahun 2019 ada 9 kabupaten/kota yang belum mencapai target 94,5% yaitu Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Kota Pekalongan, Purworejo, Wonogiri, Temanggung, Brebes dan Kota Tegal. Sedang cakupan masing-masing jenis imunisasi selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Gambar 5.35
Cakupan Imunisasi Bayi berdasarkan Jenis Imunisasi
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber: Data Program Imunisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota yang belum mencapai target imunisasi dasar lengkap pada bayi disebabkan antara lain :

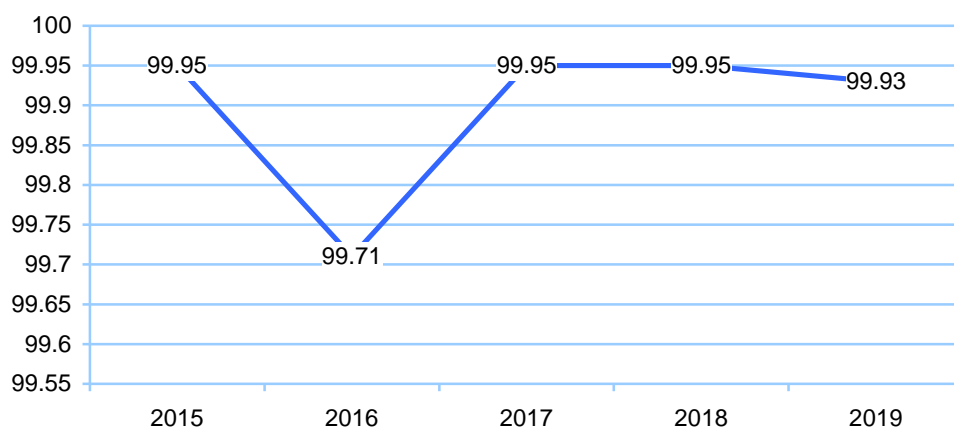
- 1) Adanya perbedaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran yang ada, hal ini dikarenakan penentuan jumlah sasaran masih berdasarkan angka estimasi jumlah penduduk bukan dari hasil pendataan dan belum semua puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan validasi data dan cakupan pada akhir tahun.
- 2) Belum dilakukan pelaksanaan *sweeping* atau kunjungan rumah untuk melengkapi status imunisasi pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya masih rendah, pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya atau tenaga banyak yang merangkap dengan tugas lain.
- 3) Sering terjadi mutasi petugas baik di puskesmas maupun Kabupaten/kota

b. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Sebagai salah satu indikator keberhasilan program imunisasi adalah pencapaian cakupan tinggi dan merata berupa pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) yang berdasarkan indikator cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang meliputi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali pada bayi usia 1 tahun dengan cakupan minimal 85

persen dari jumlah sasaran bayi di desa. Cakupan UCI desa di Jawa Tengah tahun 2019 mencapai 99.93 persen. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum mencapai UCI desa 100 persen pada tahun 2019 ada empat kabupaten yaitu Purworejo (satu desa), Karanganyar (satu desa), Temanggung (satu desa) dan Kota Surakarta (tiga desa).

Gambar 5.36
Persentase Desa/Kelurahan UCI di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



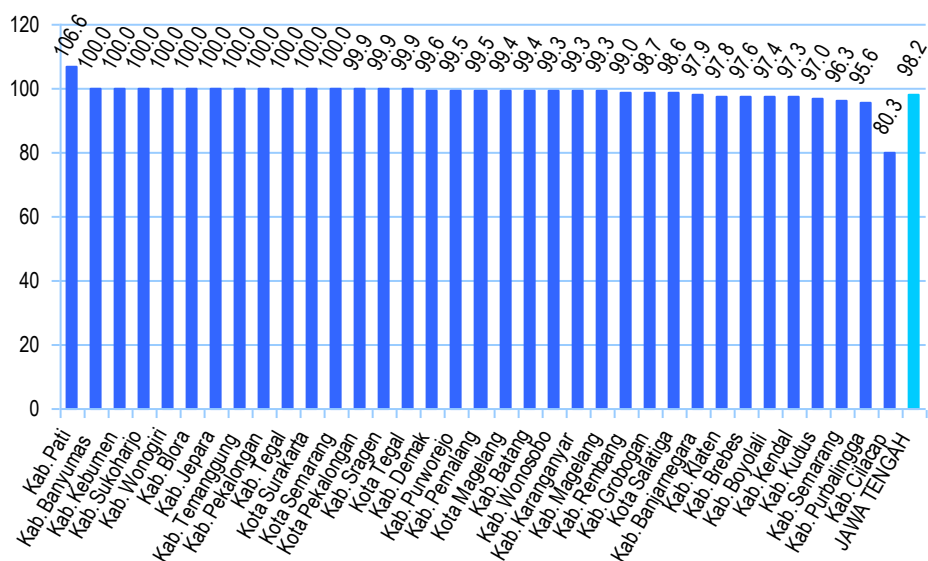
Sumber : Data Program Imunisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

c. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan agar tetap tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Pemberian imunisasi pada anak perlu ditambah dengan dosis lanjutan (booster) untuk meningkatkan kekebalannya yang diberikan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan 1 dosis DPT-HB-HiB(4) dan campak/MR(2) kepada anak usia 18-24 bulan.

Cakupan anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib(4) pada tahun 2019 sebesar 90,0 persen. Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cakupan imunisasi DPT-HB-Hib(4) di atas 90 persen. Kabupaten/kota dengan cakupan terendah adalah Kota Tegal (59,1 persen). Cakupan per kabupaten/kota tersaji pada gambar 5.37 berikut.

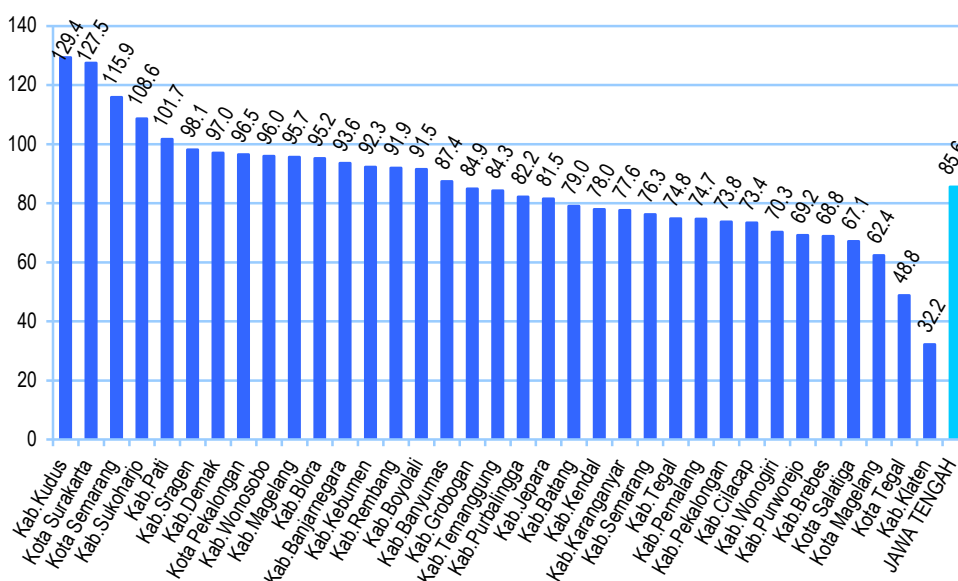
Gambar 5.37
Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib(4) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Imunisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Cakupan anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi Campak/MR2 pada tahun 2019 sebesar 85,6 persen. Sebanyak 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cakupan imunisasi Imunisasi Campak/MR di atas cakupan Provinsi. Kabupaten/kota dengan cakupan terendah adalah Klaten (32,2 persen). Cakupan per kabupaten/kota tersaji pada gambar 5.38 berikut.

Gambar 5.38
Cakupan Imunisasi Campak/MR2 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

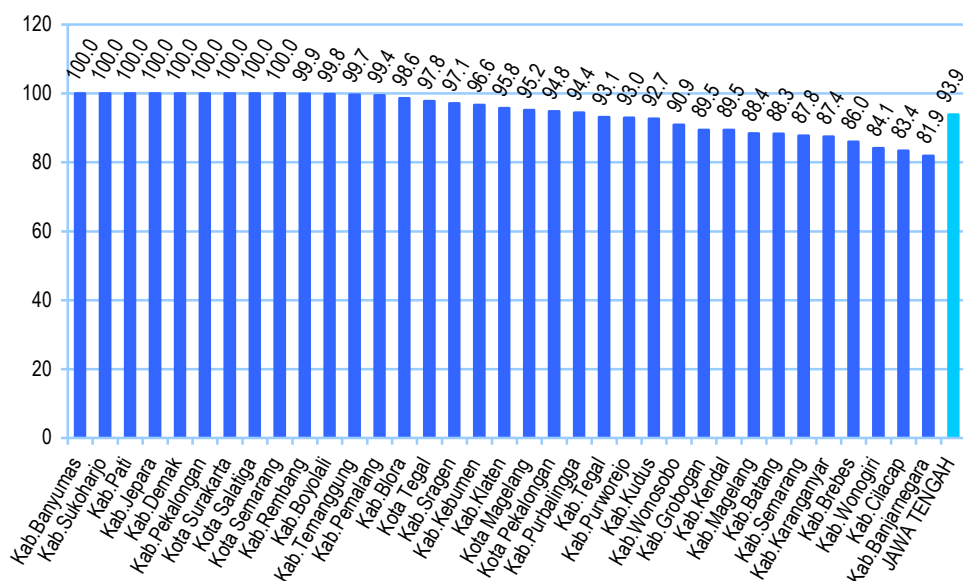


Sumber : Data Program Imunisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan; b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan; c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan; d) Pemantauan perkembangan balita; e) Pemberian kapsul vitamin A; f) Pemberian imunisasi dasar lengkap; g) Pemberian imunisasi lanjutan; h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan; dan i) Edukasi dan informasi. Pelayanan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Gambar 5.39
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data SPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Persentase cakupan pelayanan kesehatan balita di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 93,9 persen, meningkat dibandingkan persentase pelayanan kesehatan balita tahun 2018 yaitu 89,2 persen. Kabupaten/kota dengan persentase pelayanan anak balita mencapai 100 persen ada 9 yaitu Banyumas, Sukoharjo, Pati, Jepara, Demak, Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Kabupaten dengan persentase pelayanan anak balita terendah adalah Banjarnegara (81,9 persen).

5. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Upaya peningkatan kesehatan anak usia sekolah dilakukan melalui kegiatan lintas sektor terkait Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan ini meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Penjangkaran kesehatan merupakan rangkaian pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan fisik dan kuesioner) bagi peserta didik kelas 1 SD/MI, 7 SMP/MTs dan 10 SMA/SMK/MA meliputi :

- pemeriksaan status gizi dan risiko anemia,
- pemeriksaan riwayat kesehatan,
- pemeriksaan riwayat imunisasi,
- pemeriksaan kesehatan pendengaran dan penglihatan,
- pemeriksaan kesehatan reproduksi,
- pemeriksaan perilaku berisiko kesehatan,
- pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,
- pemeriksaan mental dan emosional,
- pemeriksaan intelegensia, dan
- pemeriksaan kebugaran.

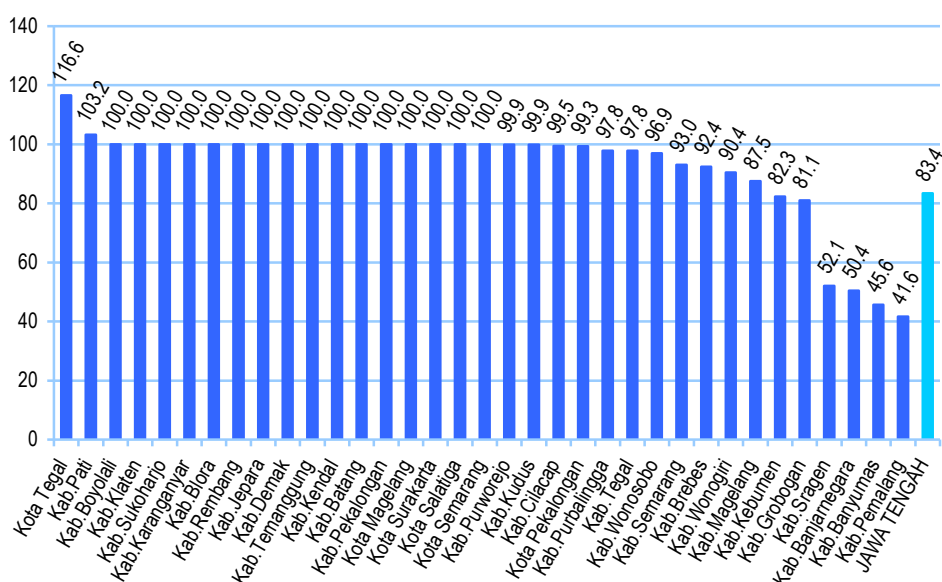
Penjangkaran kesehatan bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari penjangkaran kesehatan juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 1 SD/MI oleh tenaga kesehatan/guru UKS/kader kesehatan sekolah tahun 2019 sebesar 96,4 persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2018 yaitu 95,9 persen. Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 7 SMP/MTS oleh tenaga kesehatan/guru UKS/kader kesehatan sekolah tahun 2019 sebesar 90,6 persen, sementara cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 10 SMA/MA oleh tenaga kesehatan/guru UKS/kader kesehatan sekolah tahun 2019 sebesar 85,1 persen

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi: 1) skrining kesehatan dan 2) tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebesar 83,4 persen. Kabupaten/kota yang sudah mencapai target 100 persen atau lebih sebanyak 18 kabupaten/kota sedangkan capaian cakupan terendah di Pemalang (41,6 persen). Gambaran pencapaian cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tahun 2019 menurut kabupaten/kota dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.40
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



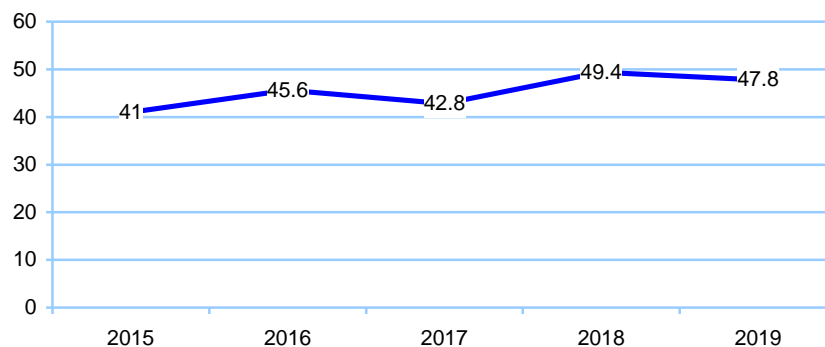
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut lainnya adalah Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) yang merupakan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi khususnya untuk anak sekolah. Kegiatan sikat gigi massal di SD/MI merupakan salah satu kegiatan UKGS yang bertujuan agar anak-anak sekolah dasar dapat memahami cara dan waktu yang tepat untuk melakukan sikat gigi. Persentase SD/MI yang melaksanakan sikat gigi massal pada tahun 2019 sebesar 58,1 persen, sedangkan yang mendapatkan pelayanan gigi sebesar 71,6 persen.

Kegiatan UKGS yang lain adalah pemeriksaan gigi pada seluruh murid untuk mendapatkan murid yang perlu perawatan gigi, kemudian melakukan perawatan pada murid yang memerlukan. Cakupan pemeriksaan kesehatan gigi murid SD/MI tahun 2019 sebesar 47,8 persen, mengalami penurunan

dibandingkan dengan cakupan tahun 2018 sebesar 49,4 persen. Tren cakupan pemeriksaan gigi murid sekolah dasar tahun 2015–2019 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 5.41
Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gigi Murid Sekolah Dasar
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Dari keseluruhan murid yang perlu perawatan, baru 50,7 persen yang mendapat perawatan. Cakupan pemeriksaan dan perawatan gigi murid sekolah dasar masih sangat rendah, hal ini dapat berdampak pada kesehatan gigi masyarakat, karena kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan gigi akan sangat efektif bila ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk peningkatan kegiatan UKGS ini.

C. GIZI

1. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD.

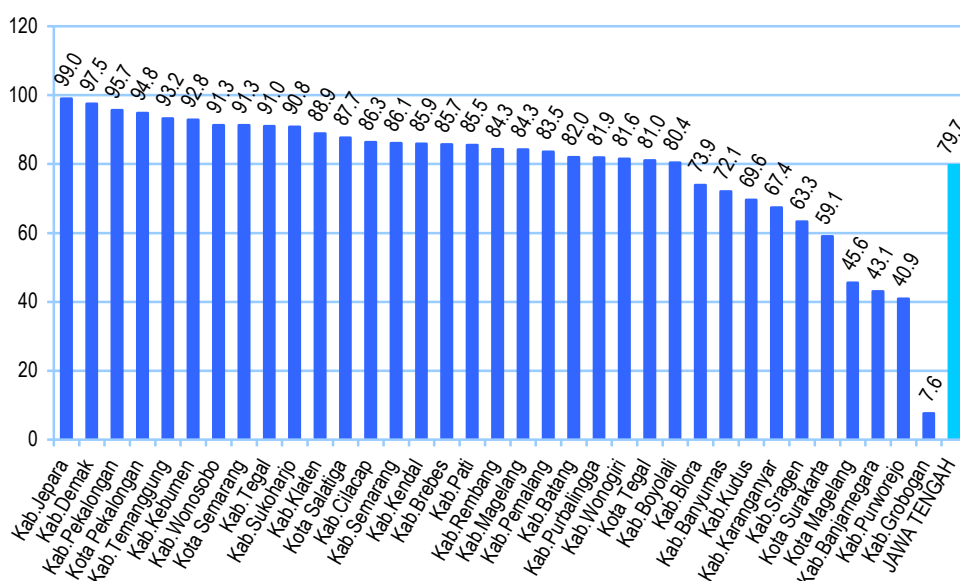
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi

risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalornya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Selain mengandung zat makanan, ASI juga mengandung enzim tertentu yang berfungsi sebagai zat penyerap yang tidak akan mengganggu enzim lain di usus. Susu formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu sebesar 79,7 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah Jepara (99,0 persen), sedangkan kabupaten dengan persentase terendah adalah Grobogan (7,6%).

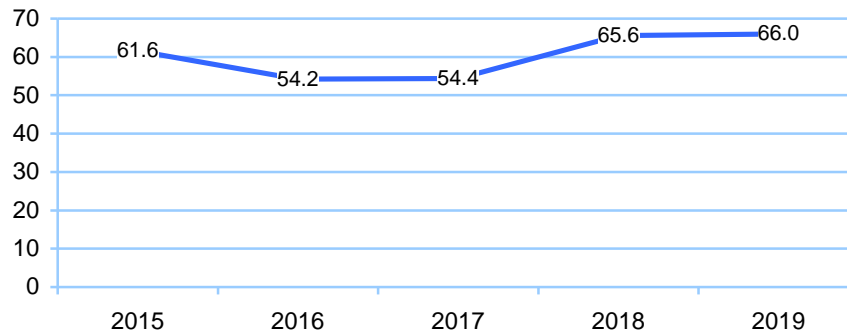
Gambar 5.42
Cakupan Bayi Baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 66,0 persen, meningkat bila dibandingkan persentase pemberian ASI eksklusif tahun 2018 yaitu 65,6 persen. Tren persentase pemberian ASI eksklusif tahun 2015–2019 disajikan pada gambar berikut.

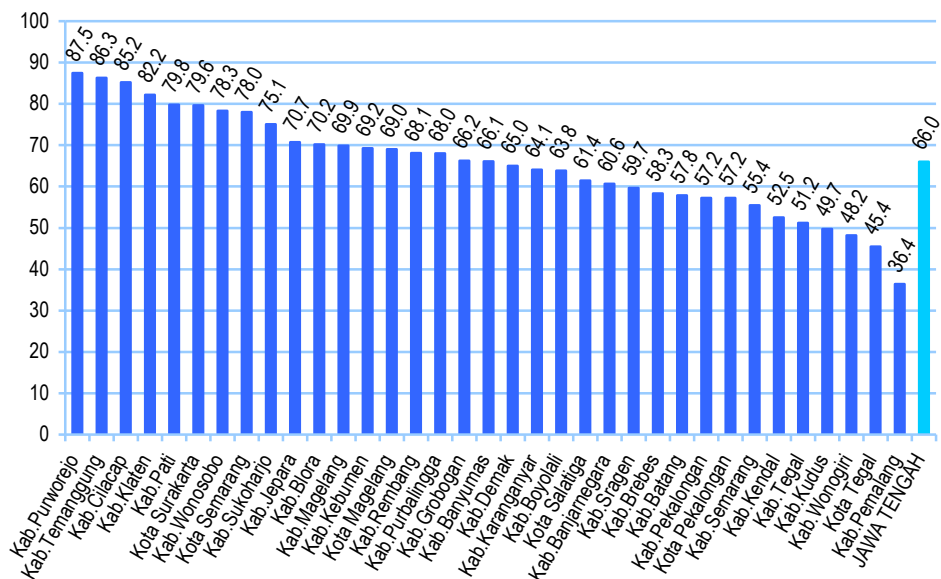
Gambar 5.43
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan persentase pemberian ASI eksklusif tertinggi adalah Purworejo yaitu 87,5 persen dan terendah adalah Pemalang yaitu 36,4 persen

Gambar 5.44
Persentase Pemberian ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain :

- Pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yg tidak ada masalah medis
- Masih banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan tidak memberi kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya

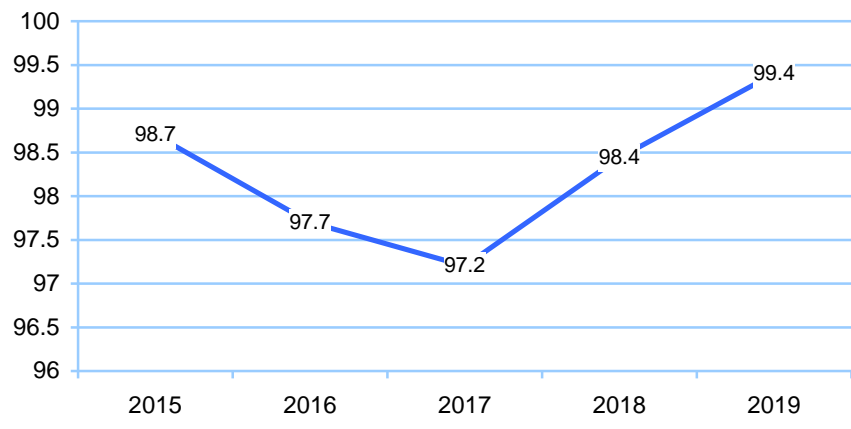
- c. Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI
- d. Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

2. Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6-59 Bulan

Vitamin A merupakan zat gizi penting yang sangat diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anak serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Asupan vitamin A dari makanan sehari-hari masih cukup rendah sehingga diperlukan asupan gizi tambahan berupa kapsul vitamin A. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple) yang dapat digunting, tidak transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

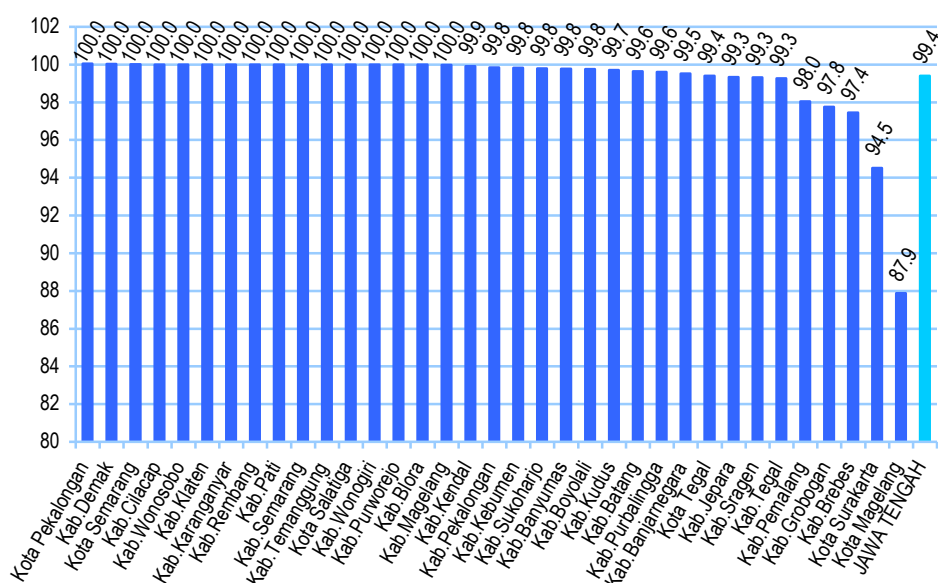
Gambar 5.45
Cakupan Suplementasi Kapsul Vitamin A Pada Balita
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan di Jawa Tengah tahun 2019 adalah 99,4 persen, meningkat bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2018 yang mencapai 98,4 persen. Terdapat 12 Kabupaten/kota dengan cakupan 100 persen atau lebih sebanyak yaitu Kota Pekalongan, Demak, Kota Semarang, Cilacap, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Rembang, Pati, Semarang, Temanggung dan Kota Salatiga. Kabupaten dengan cakupan pemberian kapsul Vitamin A terendah adalah Kota Magelang (87,9 persen).

Gambar 5.46
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

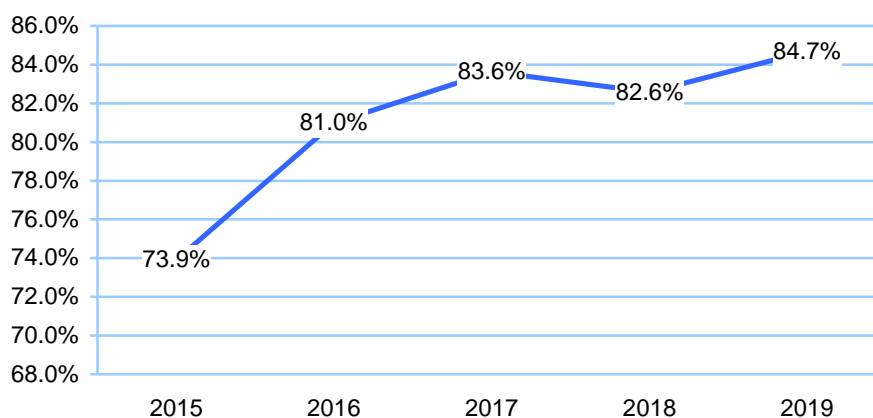
3. Penimbangan Balita

Deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk dapat dilakukan melalui penimbangan balita. Dengan rutin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Hal ini dimaksudkan apabila berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin cepat ditangani. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi kurang atau gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan.

Jumlah balita ditimbang di Posyandu merupakan data indikator terpantaunya pertumbuhan balita melalui pengukuran perubahan berat badan setiap bulan sesuai umur. Secara kuantitatif indikator balita ditimbang menjadi

indikator pantauan sasaran (*monitoring covered*), sedangkan secara kualitatif merupakan indikator cakupan deteksi dini (*surveillance covered*). Semakin besar persentase balita ditimbang semakin tinggi capaian sasaran balita yang terpantau pertumbuhannya, dan semakin besar peluang masalah gizi bisa ditemukan secara dini. Dalam ruang lingkup yang lebih luas balita di timbang (D/S) merupakan gambaran dari keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Kehadiran balita di Posyandu merupakan hasil dari akumulasi peran serta ibu, keluarga, kader, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendorong, mengajak, memfasilitasi, dan mendukung balita agar ditimbang di Posyandu untuk dipantau pertumbuhannya. Dengan demikian indikator D/S dapat dikatakan sebagai indikator partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu.

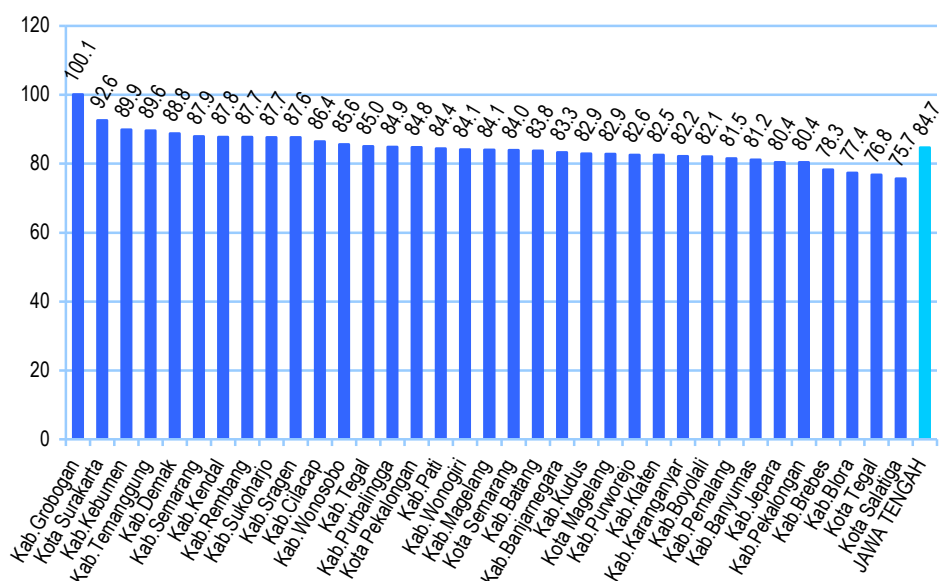
Gambar 5.47
Cakupan Balita Ditimbang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Persentase D/S di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 84,7 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan persentase D/S tahun 2018 yaitu 82,6 persen. Persentase D/S menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 100,1 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kota Salatiga yaitu sebesar 75,7 persen. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.48
Cakupan Balita Ditimbang Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



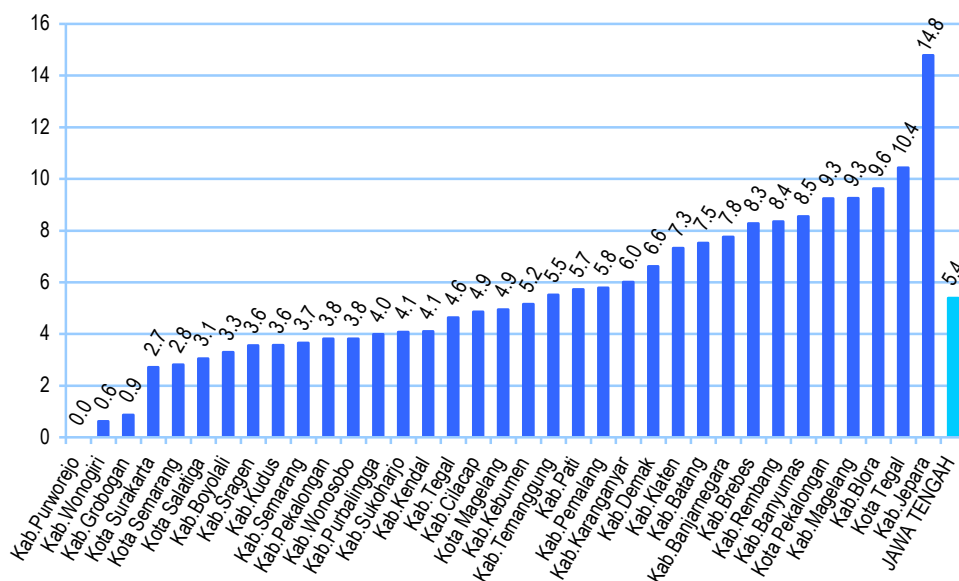
Sumber : Data Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

4. Status Gizi balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-59 bulan di Jawa Tengah adalah 3,7 persen, sedangkan persentase gizi kurang adalah 13,68 persen. Sementara berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota dilaporkan bahwa persentase gizi kurang tahun 2019 sebesar 5,4 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi gizi kurang pada balita usia 0-59 bulan tahun 2019 adalah Jepara, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Wonogiri. Kabupaten Purworejo tidak tersedia datanya.

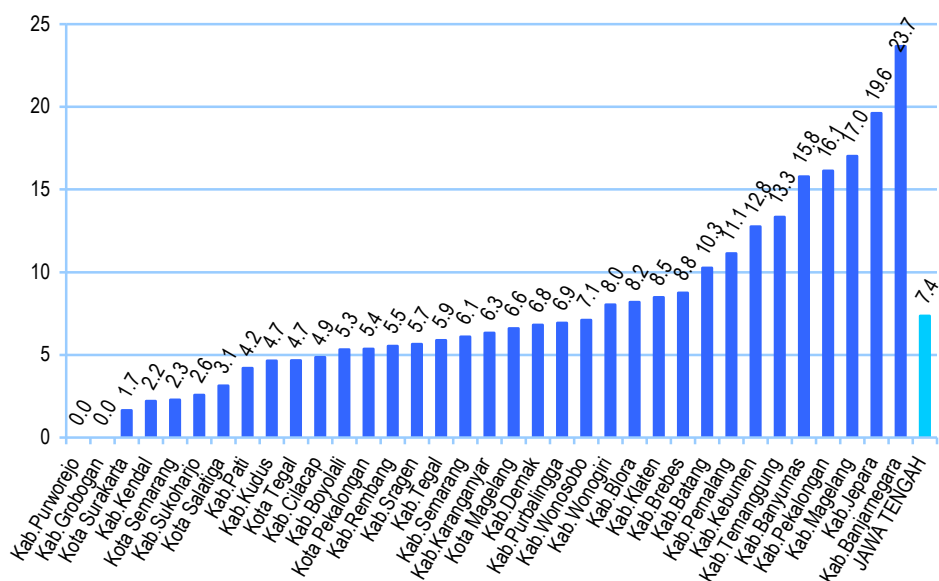
Gambar 5.49
Persentase Balita Gizi Kurang (BB/U) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai stunting merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase balita sangat pendek pada balita usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Tengah adalah 31,15 persen, sedangkan persentase balita pendek adalah 20,06 persen.

Gambar 5.50
Persentase Balita Pendek (TB/U) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

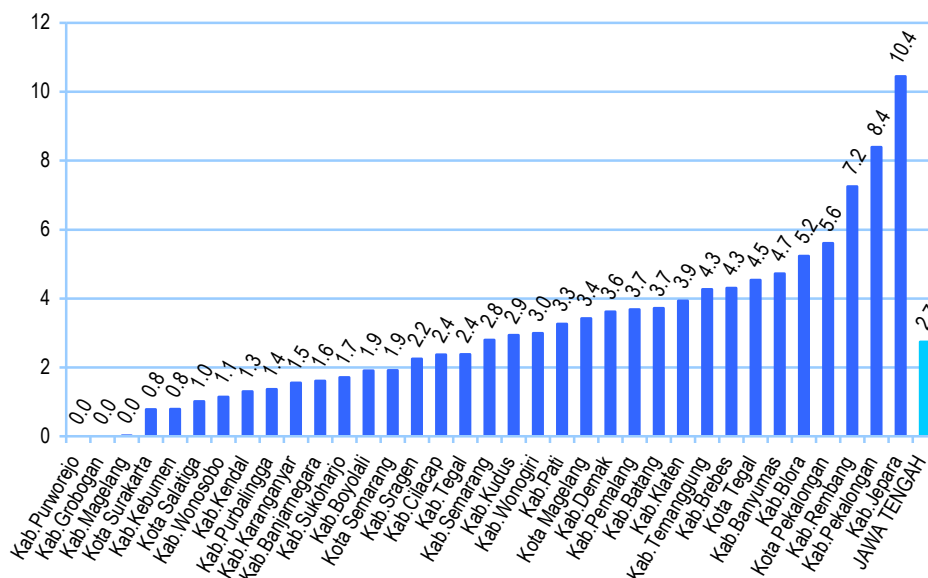


Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota dilaporkan bahwa persentase balita pendek tahun 2019 sebesar 7,4 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi balita pendek pada balita usia 0-59 bulan tahun 2019 adalah Banjarnegara, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kota Surakarta. Kabupaten Purworejo dan Grobogan tidak tersedia data.

Kategori balita kurus dan sangat kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase balita sangat kurus pada balita usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Tengah adalah 2,69 persen, sedangkan persentase balita kurus adalah 5,76 persen.

Gambar 5.51
Persentase Balita Kurus (BB/TB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Profil kab/kota dan Program Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

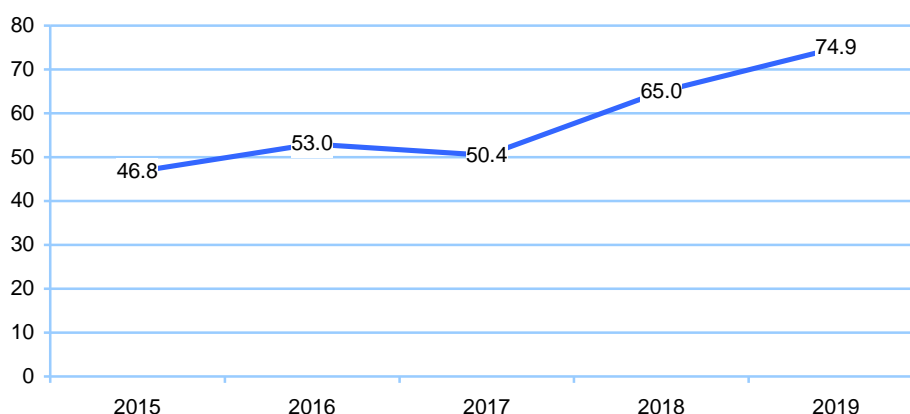
Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota dilaporkan bahwa persentase balita kurus tahun 2019 sebesar 2,7 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi balita kurus pada balita usia 0-59 bulan tahun 2019 adalah Jepara, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kota Surakarta. Kabupaten Purworejo, Grobogan dan Magelang tidak tersedia data.

D. KESEHATAN USIA LANJUT

Pelayanan kesehatan usia lanjut yaitu pelayanan penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun di posyandu/ kelompok usia lanjut. Cakupan

pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 74,9 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 64,98 persen. Kabupaten/kota dengan cakupan 100 persen atau lebih adalah Kota Semarang, Pati, Kota Pekalongan, Jepara dan Demak. Sementara kabupaten/kota dengan cakupan terendah adalah Kudus (20,9 persen) diikuti Banjarnegara (32,5 persen). Gambaran tren cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2015-2019 disajikan pada gambar 5.52.

Gambar 5.52
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program Lansia dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan lansia antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi (Penguatan Promosi Kesehatan melalui pendekatan perubahan gaya hidup)
- b. Meningkatkan akses masyarakat lansia untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas (Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung “*Active and Healthy Ageing*”).
- c. Menjalinkan kemitraan.
- d. Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan usia lanjut.
- f. Mengupayakan anggaran dari pemerintah, swasta dan masyarakat
- g. Kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk pengembangan program.

BAB VI

PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Angka kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan imunisasi. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban tuberkulosis yang terbesar diantara 8 negara yaitu India (27%), China (9%), Indonesia (8%), Philippina (6%), Pakistan (5%), Nigeria (4%), Bangladesh (4%) dan Afrika Selatan (3%) (*Global Tuberculosis Report, 2018; hal. 1*). Masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus TB-MDR, TB-HIV, TB dengan DM, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program.

Secara global kasus baru tuberkulosis sebesar 6,4 juta, setara dengan 64% dari insiden tuberkulosis (10,0 juta). Tuberkulosis tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia dan kematian tuberkulosis secara global diperkirakan 1,3 juta pasien (WHO, *Global Tuberculosis Report, 2018*).

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insidens, prevalensi, dan mortalitas/kematian.

a. Insidens Tuberkulosis

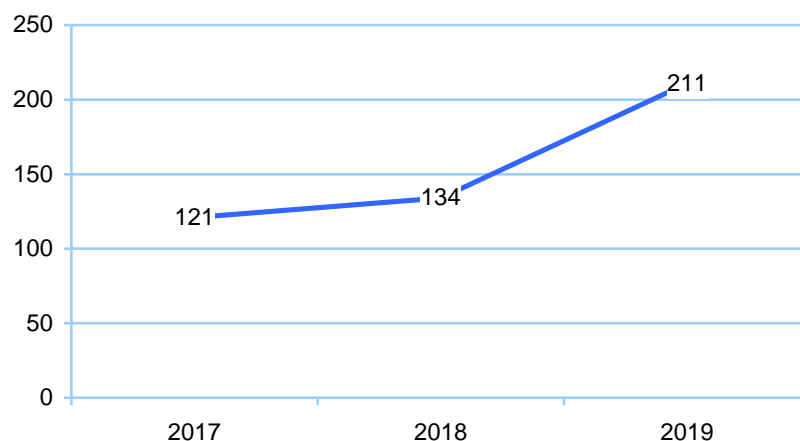
Angka insiden tuberkulosis Indonesia pada tahun 2017 sebesar 319 per 100.000 penduduk dan angka kematian penderita tuberkulosis 40 per

100.000 penduduk. (*Global Tuberculosis Report WHO*, 2018). Indikator yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019 adalah prevalensi berbasis mikroskopis saja. Hal ini mengakibatkan angkanya lebih rendah dari hasil survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014 yang telah menggunakan metode yang lebih sensitif yaitu konfirmasi bakteriologis yang mencakup pemeriksaan mikroskopis, molekuler dan kultur. Insidens Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebesar 239 per 100.000 penduduk.

b. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate* (CNR)

Angka Notifikasi Kasus (CNR) adalah angka yang menunjukkan jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ketahun di suatu wilayah. Gambar 6.1 menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2017-2019. Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis pada tahun 2019 sebesar 211 per 100.000 penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 134 per 100.000 penduduk.

Gambar 6.1
Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2019

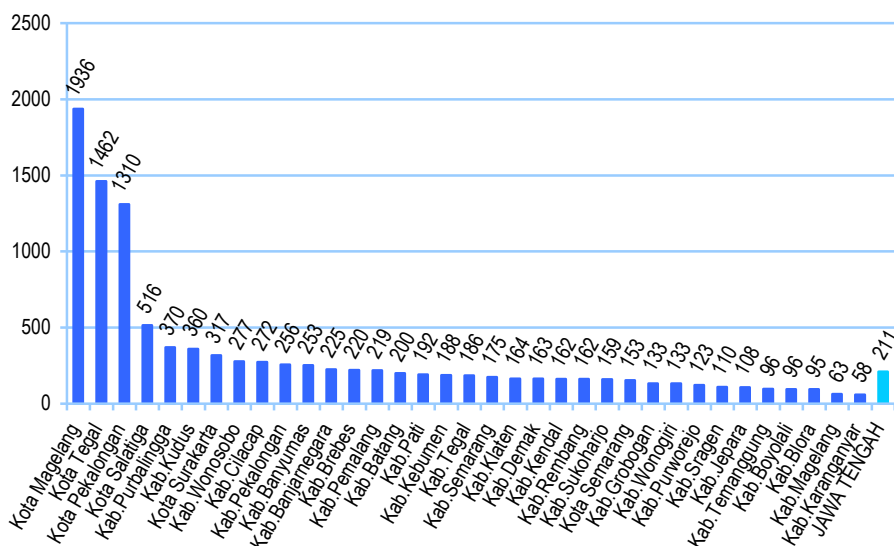


Sumber : Data Program TB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan CNR seluruh kasus tuberkulosis tertinggi adalah Kota Tegal sebesar 832,5 per 100.000 penduduk, diikuti Kota Magelang (621,1 per 100.000 penduduk), dan Kota Pekalongan (535,3 per 100.000 penduduk). Kabupaten/kota dengan CNR seluruh kasus tuberkulosis terendah adalah Kabupaten Temanggung sebesar 45,72 per 100.000

penduduk. CNR seluruh kasus tuberkulosis menurut kab/kota tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 6.2.

Gambar 6.2
Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program TB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

c. Proporsi Kasus Tuberkulosis Anak 0 – 14 Tahun

Proporsi kasus tuberkulosis anak 0-14 tahun adalah persentase kasus tuberkulosis anak 0-14 tahun diantara semua kasus tuberkulosis. Proporsi kasus tuberkulosis anak di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 11,97 persen, meningkat dibandingkan proporsi tuberkulosis anak tahun 2018 yaitu 11,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penularan kasus tuberkulosis kepada anak cukup besar. Ada sebanyak 8.762 anak yang tertular tuberkulosis dewasa yang berhasil ditemukan dan diobati.

d. Angka Keberhasilan Pengobatan

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis adalah angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*). Angka keberhasilan pengobatan merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus yang menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Walaupun angka kesembuhan telah mencapai, hasil pengobatan lainnya tetap perlu diperhatikan antara lain kasus meninggal, gagal, putus berobat (*lost to follow up*), dan tidak dievaluasi. *Success Rate* di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 85,1 persen. Ini menunjukkan bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis masih

belum mencapai target rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (> 90 persen).

2. Pneumonia

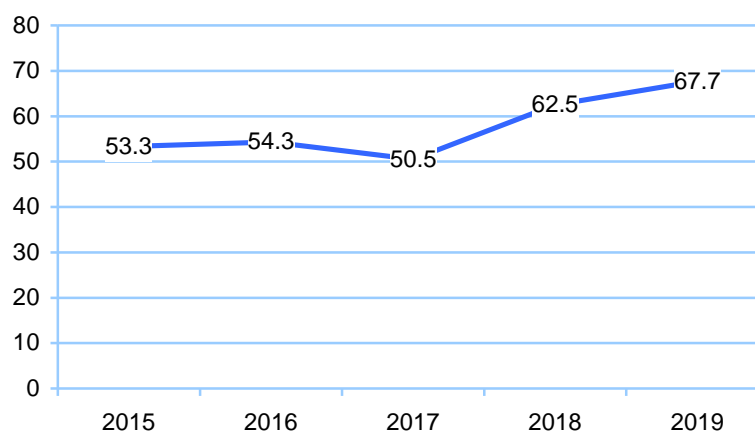
Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (*alveoli*). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih di prioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk DAN ATAU tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat, kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan frekuensi nafas berdasarkan usia penderita:

- < 2 bulan : ≤ 60 /menit,
- 2 - < 12 bulan : ≤ 50 /menit,
- 1 - < 5 tahun : ≤ 40 /menit.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Angka perkiraan kasus pneumonia secara Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 3,61%, sehingga pada tahun 2019 diperkirakan ada sebanyak 83.101 kasus pneumonia balita.

Penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada balita di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 67,7 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 yaitu 62,5 persen. Gambaran tren penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada balita dapat dilihat pada gambar 6.3.

Gambar 6.3
Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia
Pada Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data program ISPA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

3. HIV dan AIDS

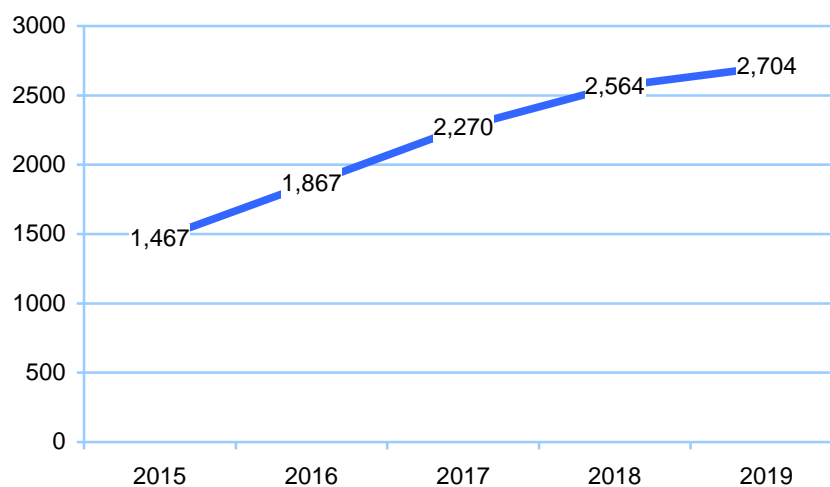
HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan

ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

a. Jumlah Kasus HIV Positif

Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui Layanan Konseling dan Tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan sampai dengan tahun 2019 disajikan pada gambar 6.4.

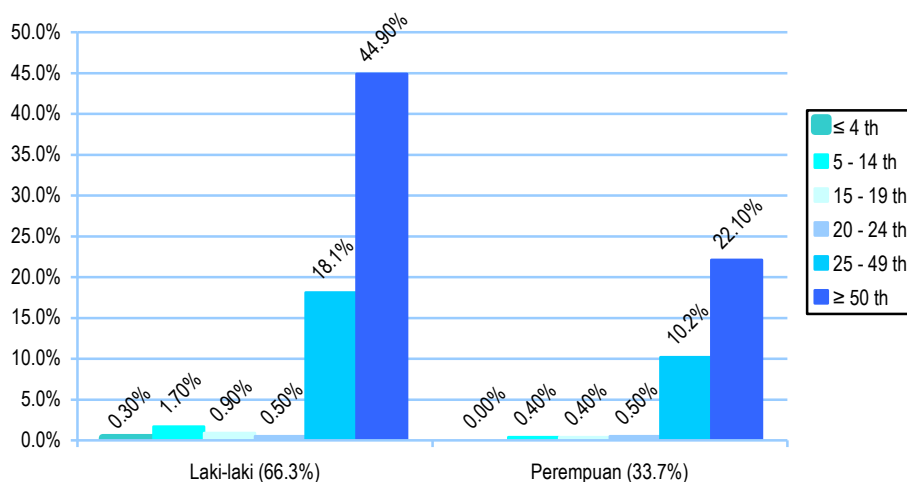
Gambar 6.4
Jumlah Kasus HIV Positif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



Sumber : Data Program HIV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan pada tahun 2019 dilaporkan sebanyak 2.704 kasus. Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi tahun 2019 sebanyak 736.939 orang, 90,6 persen dari jumlah tersebut (667.761 orang) sudah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Penemuan kasus HIV pada laki-laki lebih banyak dibandingkan pada perempuan dan dapat menimpa umur dari usia dini hingga umur tua. Proporsi kasus HIV positif menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada gambar 6.5.

Gambar 6.5
Persentase Kasus HIV Positif menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



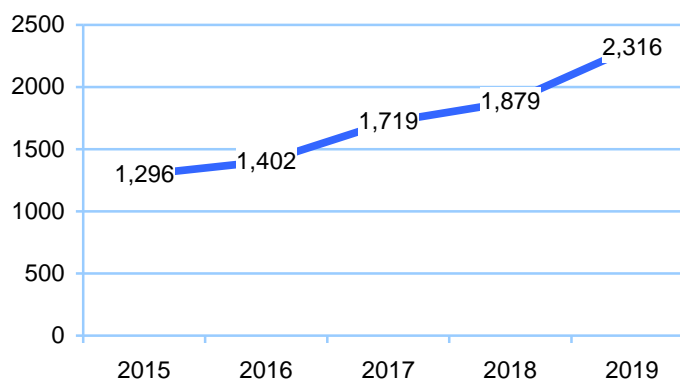
Sumber : Data Program HIV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Penderita HIV positif pada laki-laki sebesar 66,3 persen dan pada perempuan sebesar 33,7 persen. Berdasarkan grafik di atas, masih ditemukan penularan HIV dari ibu ke anak yang di tunjukkan dengan adanya penemuan Kasus HIV positif pada kelompok usia di bawah 4 tahun. Untuk mencapai tujuan nasional dan global dalam rangka triple elimination (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya. Proporsi terbesar kasus HIV di Jawa Tengah adalah pada penduduk kelompok usia ≥ 50 tahun.

b. Jumlah Kasus AIDS

Jumlah kasus baru AIDS (*Aquired Immuno Devisiency Syndrome*) tahun 2019 sebanyak 2.316 kasus, lebih banyak dibanding tahun 2018 yaitu 1.879 kasus. Jumlah kasus baru AIDS yang dilaporkan sampai dengan tahun 2019 disajikan pada gambar 6.6.

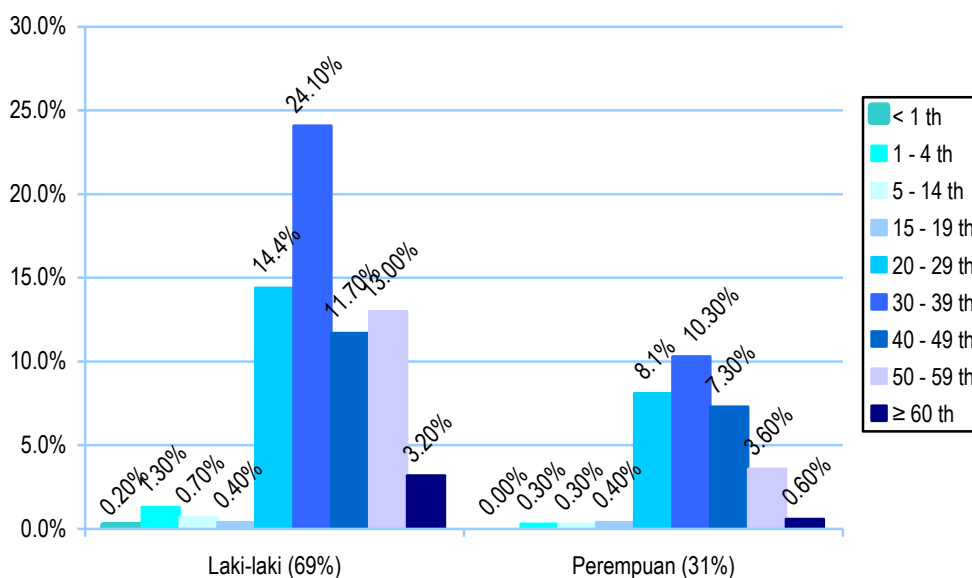
Gambar 6.6
Jumlah Kasus AIDS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



Sumber : Data Program HIV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Penderita AIDS pada laki-laki sebesar 69 persen dan pada perempuan sebesar 31 persen. Proporsi terbesar kasus AIDS di Jawa Tengah adalah pada penduduk kelompok usia 30-39 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan.

Gambar 6.7
Persentase Kasus AIDS menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



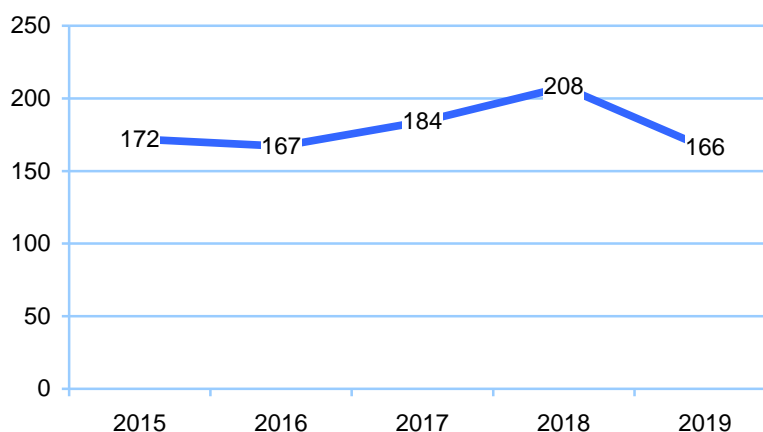
Sumber : Data Program HIV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kasus tersebut didapatkan dari laporan VCT rumah sakit, laporan rutin AIDS kabupaten/kota serta Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM). Peningkatan kasus AIDS ini dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di rumah sakit dan upaya penjangkauan oleh LSM peduli AIDS di kelompok risiko tinggi. Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil yang ada di masyarakat.

c. Jumlah Kematian Akibat AIDS

Jumlah kematian AIDS tahun 2019 sebanyak 166 kasus, menurun dibandingkan kematian tahun 2018 sebanyak 208 kasus, dengan kasus kematian AIDS tertinggi pada laki-laki (68,7 persen) dan kelompok umur 30-39 tahun (38,6 persen). Jumlah kasus kematian AIDS yang dilaporkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada gambar 6.8.

Gambar 6.8
Jumlah Kematian AIDS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



Sumber : Data Program HIV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

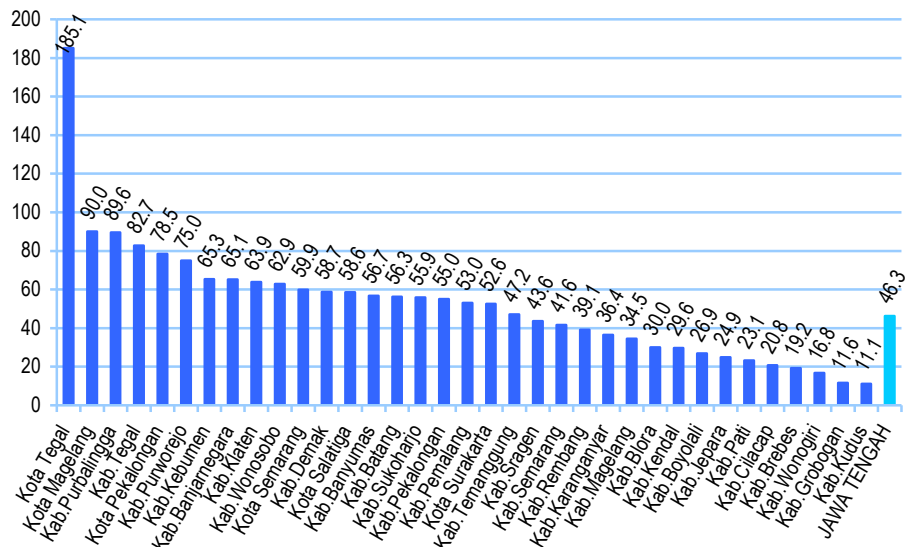
4. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Target cakupan pelayanan penderita Diare Balita yang datang ke sarana kesehatan adalah 20 persen dari perkiraan jumlah penderita Diare Balita (Insidens Diare Balita dikali jumlah Balita di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2019 jumlah penderita diare Balita yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 179.172 atau 46,3 persen dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Dari jumlah penderita diare balita yang dilayani di sarana kesehatan, sebanyak 83,6 persen mendapatkan oralit dan 89 persen mendapatkan Zinc.

Target cakupan pelayanan penderita Diare semua umur (SU) yang datang ke sarana kesehatan adalah 10 persen dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens Diare SU dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2019 jumlah penderita diare SU yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 573.609 penderita (61,2 persen dari perkiraan diare di sarana kesehatan), terjadi penurunan dibanding tahun 2018 yang sebanyak 584.259 penderita. Angka kesakitan diare semua umur di Provinsi Jawa Tengah adalah 270/1.000 penduduk (Rapid Survey Diare tahun 2015). Dari jumlah penderita diare semua umur yang dilayani di sarana kesehatan, sebanyak 71,6 persen mendapatkan oralit.

Kabupaten/kota dengan persentase kasus diare balita dilayani di sarana kesehatan tertinggi adalah Kota Tegal (185,1 persen) dan terendah adalah Kudus (11,1 persen). Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada gambar 6.9.

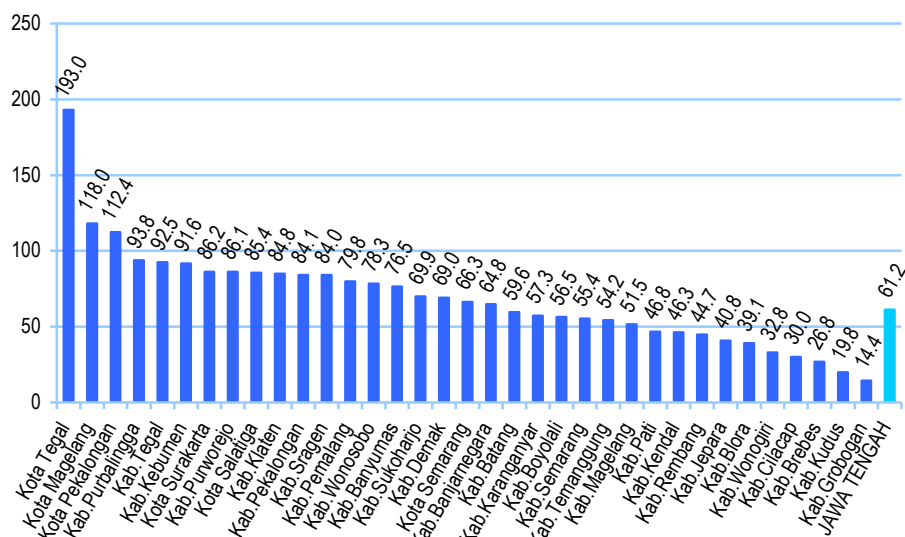
Gambar 6.9
Persentase Kasus Diare Balita Dilayani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Diare Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota dengan persentase kasus diare semua umur dilayani di sarana kesehatan tertinggi adalah Kota Tegal (192,9 persen) dan terendah adalah Grobogan (14,4 persen). Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada gambar 6.10.

Gambar 6.10
Persentase Kasus Diare Semua Umur Dilayani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Diare Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

5. Kusta

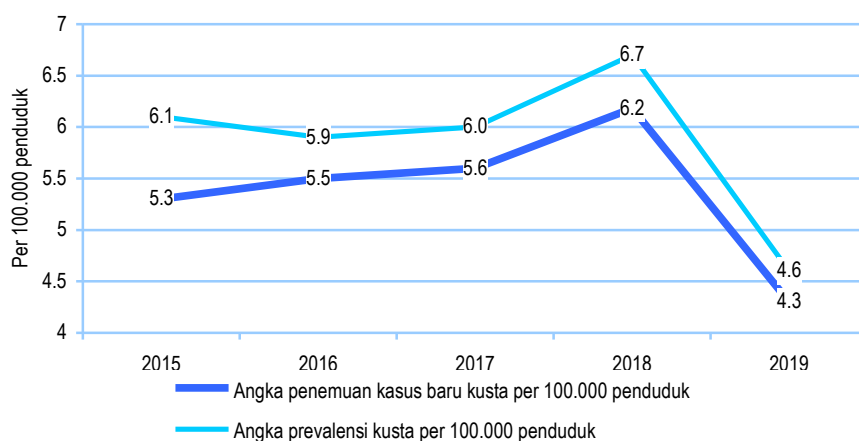
Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan

atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR – New Case Detection Rate)

Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta (prevalensi kusta <10 per 100.000 penduduk). Angka prevalensi kusta di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 4,6 kasus per 100.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,3 kasus per 100.000 penduduk. Tren Angka kejadian dapat dilihat pada gambar 6.11.

Gambar 6.11
Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2019



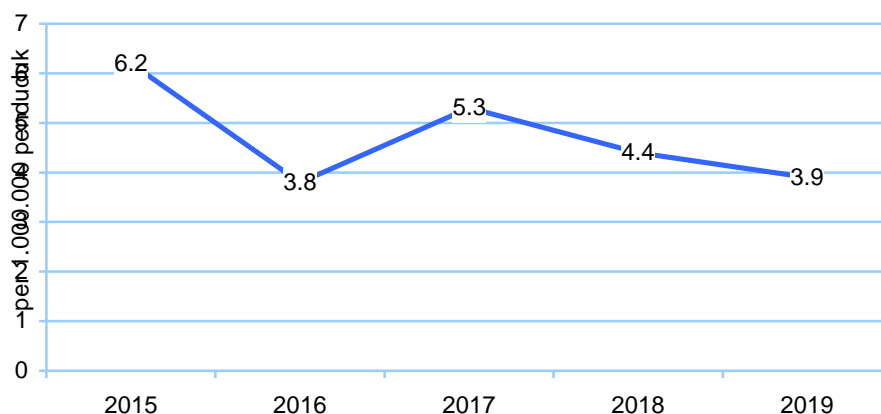
Sumber : Data Program Kusta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pada tahun 2019 dilaporkan 1.490 kasus baru kusta, lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 2.133 kasus. Sebesar 89,4 persen kasus di antaranya merupakan tipe *Multi Basiler* (MB). Sedangkan menurut jenis kelamin, kasus terbanyak terjadi pada laki-laki (89,1 persen).

b. Angka Cacat Tingkat 2

Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini adalah angka cacat tingkat 2. Pada tahun 2019 angka cacat tingkat 2 penderita kusta di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 3,9 per 1.000.000 penduduk, menurun dibandingkan dengan angka cacat tingkat 2 tahun 2018 yang mencapai 4,4 per 1.000.000 penduduk. Hal tersebut menggambarkan kegiatan penemuan kasus semakin ke arah dini dan keterlambatan kasus dapat dicegah.

Gambar 6.12
Angka Cacat Kusta Tingkat 2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2018

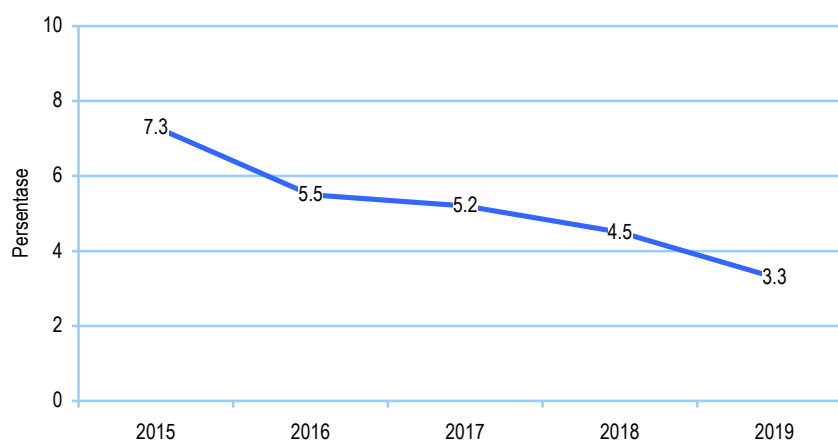


Sumber : Data Program Kusta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

c. Persentase Kasus Baru Kusta Anak Usia 0 – 14 Tahun

Indikator lain yang digunakan pada penyakit kusta yaitu proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru, yang memperlihatkan sumber dan tingkat penularan di masyarakat. Persentase kasus baru kusta pada anak periode 2015 – 2019 ditunjukkan pada gambar 6.13 berikut.

Gambar 6.13
Persentase Kasus Baru Kusta Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019



Sumber : Data Program Kusta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Persentase kasus baru kusta pada anak tertinggi di Kota Semarang (20 persen), Kota Tegal (13,6 persen) dan Kota Pekalongan (9,5 persen).

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

Yang termasuk dalam PD3I yaitu Difteri, Pertusis, Tetanus Non Neonatorum, Tetanus Neonatorum, Campak, Polio, dan Hepatitis B. Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit tersebut, diperlukan komitmen global untuk

menekan turunnya angka kesakitan kematian yang lebih banyak dikenal dengan Eradikasi Polio (ERAPO), Reduksi Campak (Redcam) dan Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN).

Saat ini telah dilaksanakan Program Surveilans Integrasi PD3I, yaitu pengamatan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Difteri, Tetanus Neonatorum, dan Campak). Dalam waktu 5 tahun terakhir jumlah kasus PD3I yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Polio dan AFP (*Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut*)

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara mereka yang lumpuh, 5% hingga 10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan mereka.

Pada pertemuan tahunan bulan Mei 1988, the *World Health Assembly* (WHA), suatu forum sidang tertinggi yang diselenggarakan oleh organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization/WHO*), telah mengeluarkan resolusi untuk membasmi penyakit polio dari dunia ini. Pada 27 Maret 2014, Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region* (SEARO) lainnya. Namun, masih ada 2 negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang masih endemik polio.

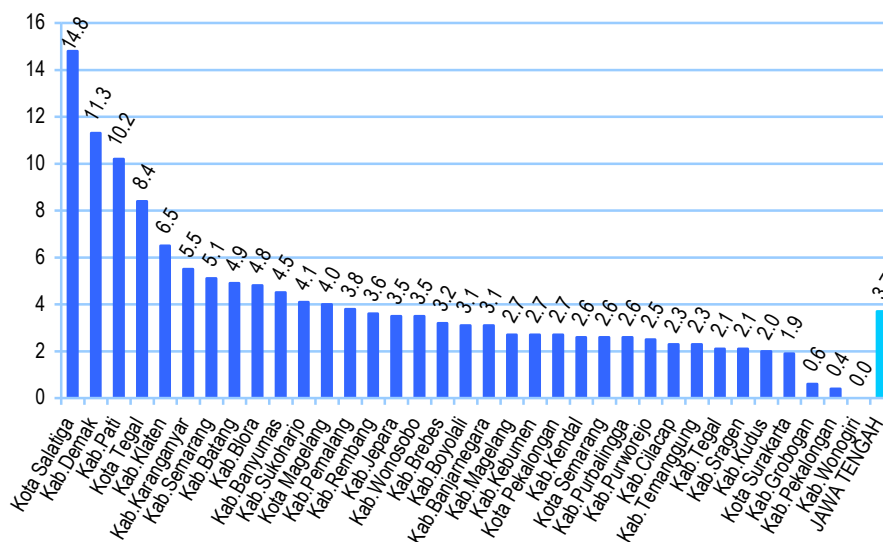
KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (AFP) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan. Penemuan adanya transmisi virus polio liar dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans AFP juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio liar sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Kasus lumpuh layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari nonpolio AFP. Kementerian Kesehatan menetapkan non polio AFP rate minimal 2/100.000

populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2019, non polio AFP rate di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,7/100.000 populasi penduduk <15 tahun. Hal itu berarti angka ini sudah mencapai standar minimal penemuan. Non polio AFP rate tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 3,3/100.000 populasi penduduk <15 tahun.

Kabupaten/kota dengan AFP rate tertinggi adalah Kota Salatiga (14,8 per 100.000 penduduk usia<15 tahun) dan terendah adalah Wonogiri (0 per 100.000 penduduk usia<15 tahun). Gambaran AFP rate per kabupaten/kota pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 6.14.

Gambar 6.14
AFP Rate Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



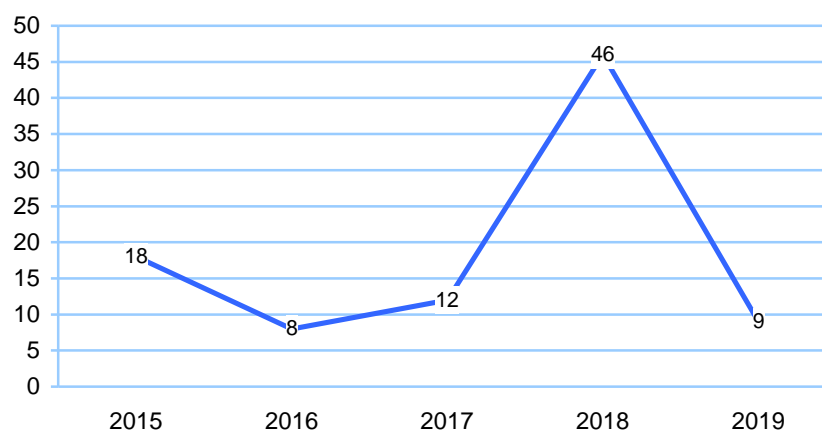
Sumber : Data Program AFP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2. Difteri

Penyakit difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran udara bagian atas, dan menghasilkan racun yang mempengaruhi organ lain. Penyakit ini menyebar melalui kontak fisik langsung, atau melalui pernafasan di udara yang mengandung sekresi dari penderita yang batuk atau bersin. Penyakit difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama pada anak-anak (1-10 tahun).

Jumlah kasus Difteri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus yang terdistribusi pada laki-laki sebanyak 4 kasus dan perempuan 5 kasus. Jumlah ini jauh menurun bila dibandingkan dengan kasus tahun 2018 yaitu sebanyak 46 kasus. Dari seluruh kasus yang ada, tidak dilaporkan adanya kasus yang meninggal.

Gambar 6.15
Kasus Difteri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program Surveilens Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

3. Tetanus Neonatorum

Tetanus Neonatorum umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir. Tetanus Neonatorum menyerang bayi yang baru lahir karena dilahirkan di tempat yang tidak bersih dan steril, terutama jika tali pusar terinfeksi. Tetanus Neonatorum dapat menyebabkan kematian pada bayi dan banyak terjadi di negara berkembang. Sedangkan di negara-negara maju, dimana kebersihan dan teknik melahirkan yang sudah maju tingkat kematian akibat infeksi tetanus dapat ditekan. Sejak 2016 tidak ditemukan adanya kasus tetanus neonatorum di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

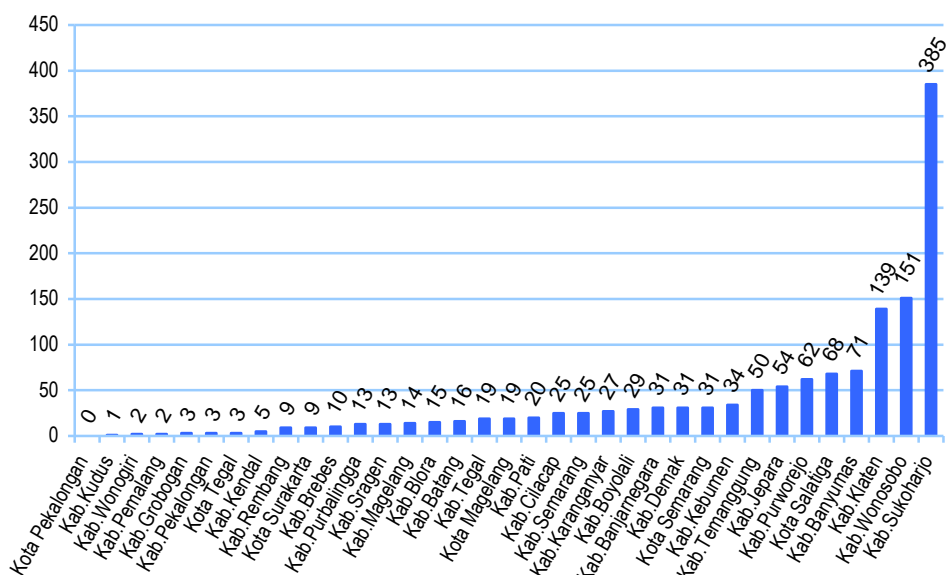
4. Campak

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari genus Morbillivirus dan termasuk golongan Paramyxovirus. Campak disebut juga morbili atau measles. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia.

Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Penyebaran kasus suspek campak tahun 2019 hampir terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hanya 1 kabupaten/kota yang tidak terdapat kasus suspek campak yaitu Kota Pekalongan. Pada tahun 2019, terdapat 1.389 kasus suspek campak. Kasus suspek campak terbanyak terdapat di Sukoharjo (385 kasus), Wonosobo (151 kasus) dan Klaten (139 kasus). Insidens rate suspek campak di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebesar 4,0 per 100.000 penduduk.

Gambar 6.16
Jumlah Suspek Campak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Surveilens Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

C. KEJADIAN LUAR BIASA

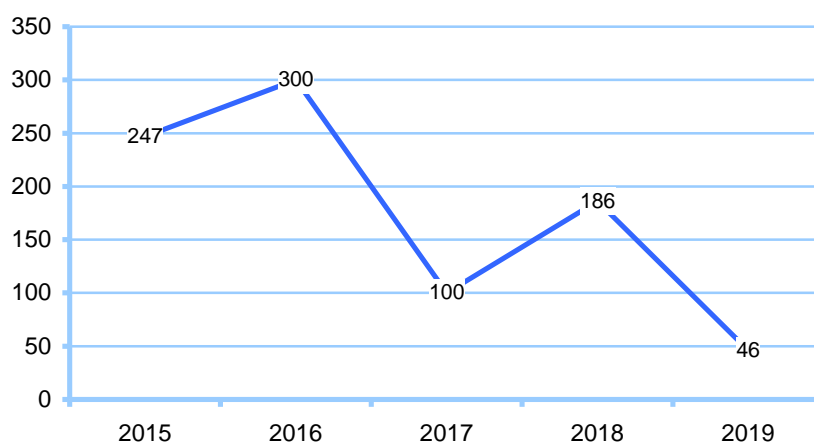
Kejadian luar biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam jangka waktu tertentu. Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Jawa Tengah.

Tingginya frekuensi KLB seperti Keracunan Makanan, Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Difteri, Campak, Diare dan bencana disamping menimbulkan korban kesakitan dan kematian juga berdampak pada situasi sosial ekonomi masyarakat secara umum (keresahan masyarakat, produktivitas menurun). Kondisi tersebut menuntut upaya atau tindakan secara cepat dan tepat (kurang dari

24 jam) untuk menanggulangi setiap KLB serta melaporkan kepada tingkat administrasi kesehatan.

Tahun 2019 desa yang mengalami kejadian luar biasa mengalami peningkatan yaitu dari 186 desa/kelurahan pada tahun 2018 menjadi 46 desa/kelurahan. Dari 46 desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa, seluruhnya atau 100 persen ditangani secara cepat (kurang dari 24 jam).

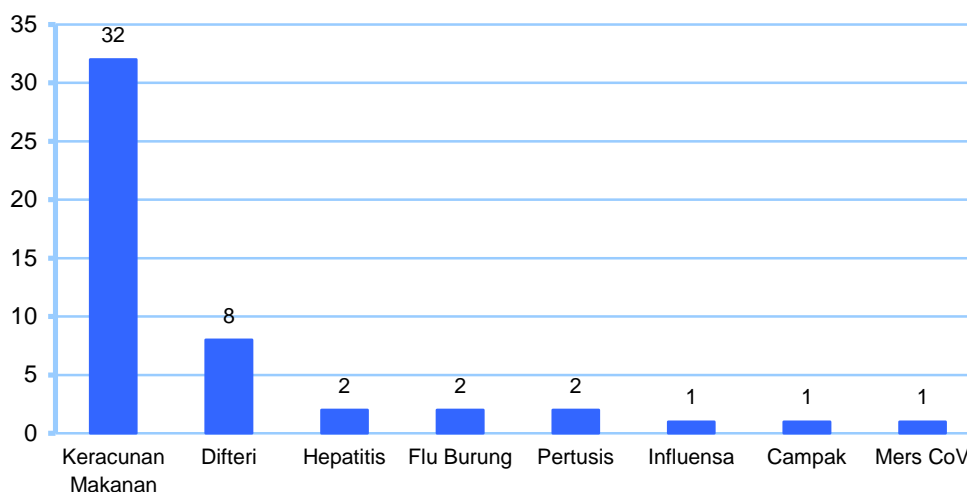
Gambar 6.17
Distribusi Frekuensi KLB Menurut Jumlah Desa Yang Terserang Di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program KLB Tahun 2019

Pada tahun 2019, frekuensi tertinggi adalah KLB keracunan makanan yang terjadi sebanyak 32 kali di 32 kecamatan/desa/kelurahan. Urutan ke dua adalah KLB Difteri yang terjadi sebanyak 8 kali di 7 kecamatan dan 8 desa/kelurahan.

Gambar 6.18
Jenis KLB Menurut Jumlah Kejadian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program KLB Tahun 2019

KLB yang menyebabkan kematian (CFR) adalah keracunan makanan sebesar 0.41 persen.

D. PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG

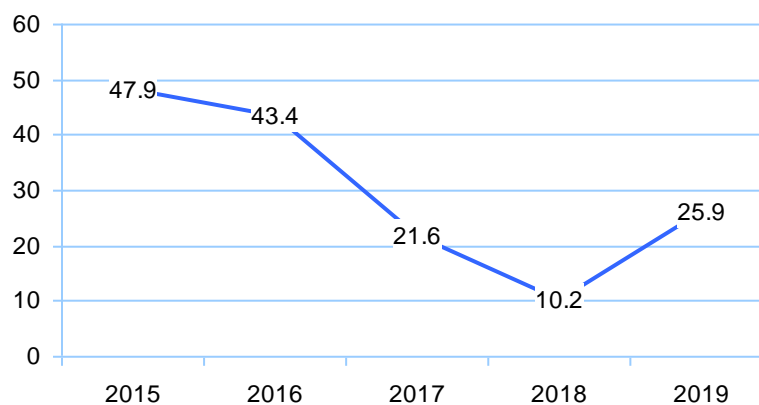
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesies *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

a. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk

Kasus DBD ditegakkan dengan diagnosa yang terdiri dari gejala klinis dan hasil laboratorium yang mengindikasikan penurunan trombosit < 100.000/mm³ dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit > 20%. Kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 9.007 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 3.519 kasus.

Gambar 6.19
Angka Kesakitan DBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019

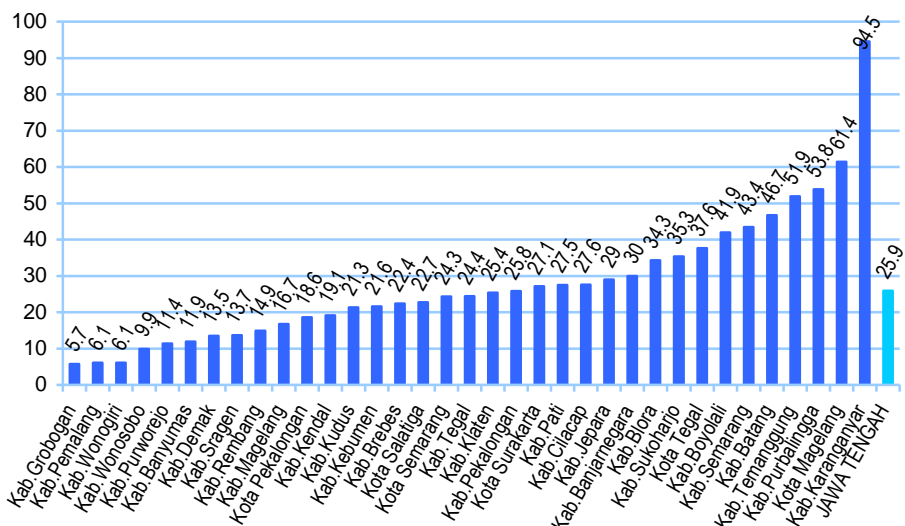


Sumber : Data Program DBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 25,9 per 100.000 penduduk, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 yaitu 10,2 per 100.000 penduduk. Meskipun meningkat tetapi IR DBD di Jawa Tengah lebih rendah dari target nasional (<51/100.000 penduduk) dan target Renstra (< 46/100.000). Setiap penderita DBD yang dilaporkan dilakukan tindakan perawatan penderita, penyelidikan epidemiologi di lapangan serta upaya pengendalian.

Kabupaten/kota dengan IR DBD tertinggi adalah Karanganyar (94,5 per 100.000 penduduk) dan terendah adalah Grobogan (5,7 per 100.000 penduduk).

Gambar 6.20
Incidence Rate DBD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

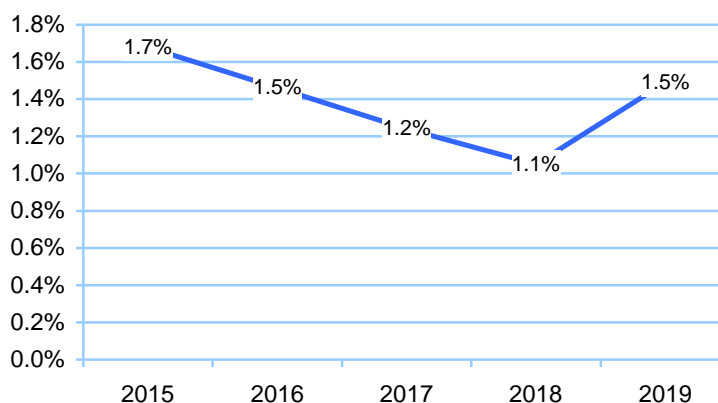


Sumber : Data Program DBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

b. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)

Selain angka kesakitan, besaran masalah DBD juga dapat diketahui dari angka kematian atau CFR yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. *Case Fatality Rate* (CFR) DBD di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 1,5 persen, meningkat bila dibandingkan CFR tahun 2018 yaitu 1,1 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional (<1%), namun lebih rendah dibandingkan target renstra (<2%) .

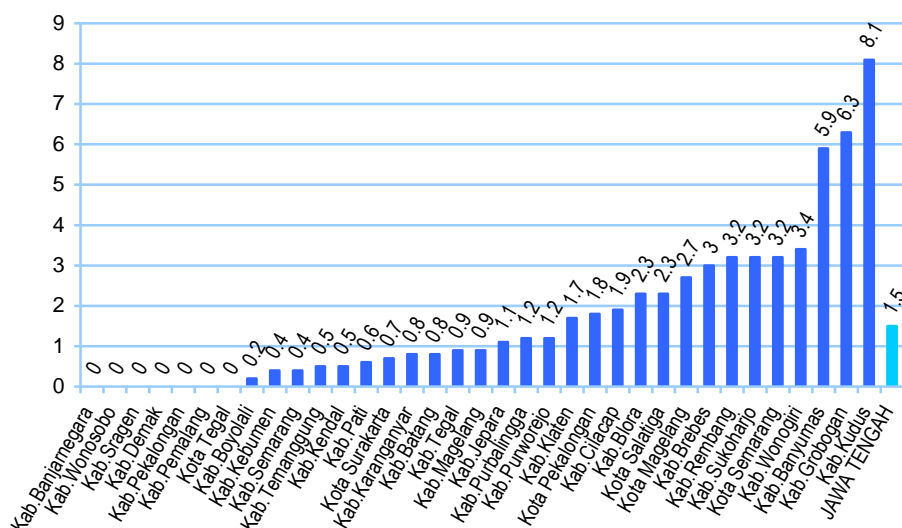
Gambar 6.21
Case Fatality Rate (CFR) DBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019



Sumber : Data Program DBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pada tahun 2019, kematian akibat penyakit DBD terjadi di 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah (80 persen). Terdapat 11 kabupaten/kota dengan CFR >2 persen, CFR tertinggi adalah Kudus (8,1 persen). Gambaran CFR di Jawa Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 6.22.

Gambar 6.22
Case Fatality Rate DBD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program DBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

2. Malaria

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan *Plasmodium* yang terdiri dari banyak spesies, namun yang pada umumnya menyebabkan malaria adalah *Plasmodium vivax*, *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* yang di dalam tubuhnya mengandung *Plasmodium*. Penyebaran dan endemisitas Malaria sangat dipengaruhi oleh keberadaan tempat perindukan nyamuk *Anopheles* sebagai vektor penular.

Malaria menjadi salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkulosis yang pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional program eliminasi malaria ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia”. Target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

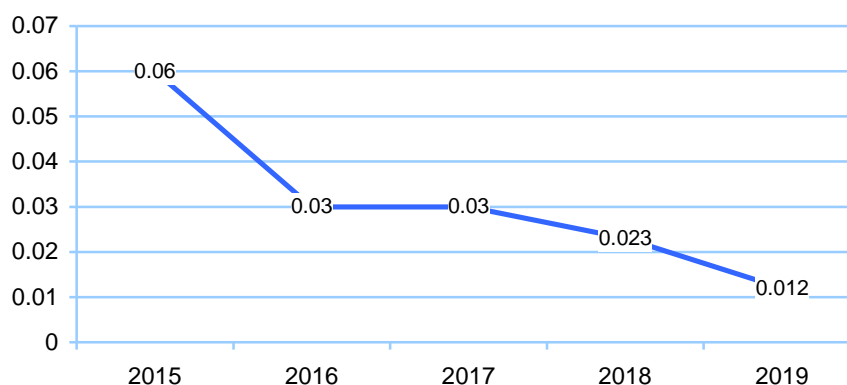
Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, karena

menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian serta sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terdapat 29 kabupaten/kota yang sudah masuk dalam fase pemeliharaan eliminasi malaria non endemis malaria dan 6 kabupaten masuk dalam fase pembebasan yaitu Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan Purbalingga.

a. Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tersebut dengan konstanta 1.000. API malaria di Jawa Tengah pada tahun 2019 tercatat 0,012 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibanding API tahun 2018 yang tercatat 0.023 per 1.000 penduduk. API tersebut sudah mencapai target nasional yaitu < 1 per 1.000 penduduk.

Gambar 6.23
Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019

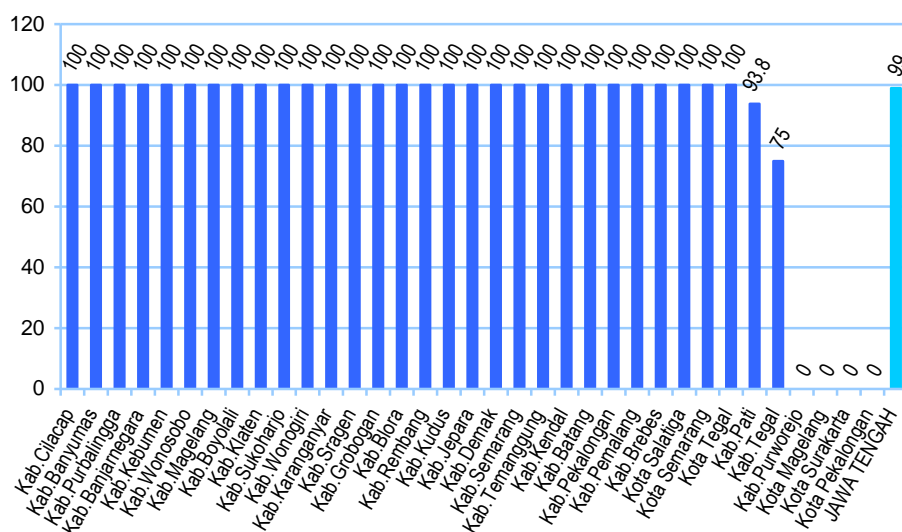


Sumber : Data Program Malaria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria secara efektif dilakukan dengan pemberian ACT (Artemicin-based Combination Therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Persentase pengobatan ACT masuk dalam indikator prioritas dengan target sebesar 90 persen. Tahun 2019, sebanyak 30 kabupaten/kota (85,7 persen) memiliki persentase pengobatan di atas 90 persen yang artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara ada 3 kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus malaria yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan.

Gambar 6.24
Persentase Pengobatan Standar Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Malaria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

c. Angka Kematian Malaria

Untuk menjamin kasus malaria tetap rendah diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan kasus supaya tidak meningkat kembali seperti penemuan dini dan tatalaksana kasus yang tepat. Kasus malaria import di daerah reseptif yang terlambat ditangani sangat potensial untuk terjadinya penularan lokal (*indigenous*) bahkan peningkatan kasus atau KLB. Pada tahun 2019 tidak ditemukan kasus kematian akibat Malaria, sehingga CFR Malaria di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 0 persen.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

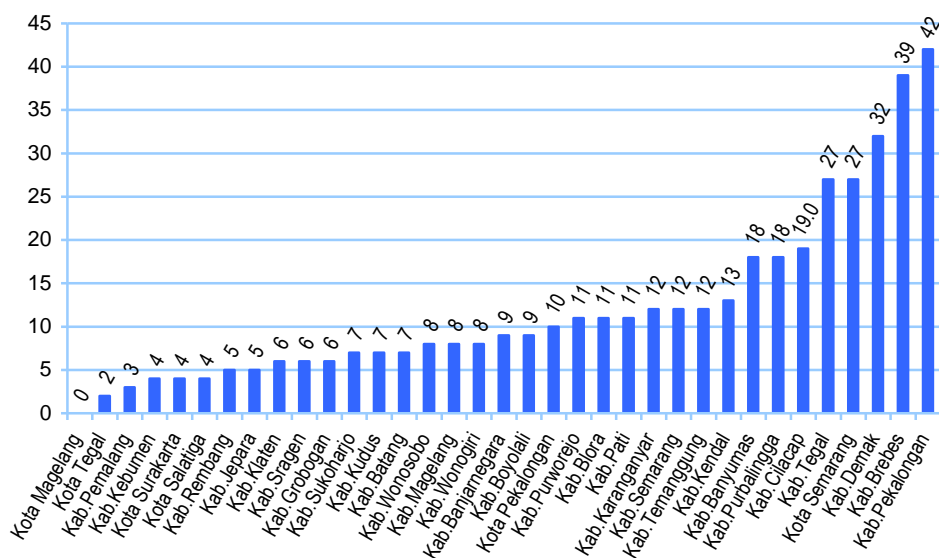
WHO menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan

penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60 persen kasus berada di Asia Tenggara.

Di Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 10.758 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Program eliminasi dilaksanakan melalui dua pilar kegiatan yaitu: pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis kepada seluruh penduduk di kabupaten endemis filariasis, kedua dengan tatalaksana kasus klinis filariasis guna mencegah dan mengurangi kecacatan.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 9 kabupaten/kota yang endemis filariasis yaitu Kota Pekalongan, Pekalongan, Brebes, Wonosobo, Semarang, Grobogan, Blora, Pati dan Demak. Daerah endemis filariasis di Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan kegiatan pemberian obat pencegahan massal filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut. Kabupaten/kota yang tidak endemis filariasis dilakukan survei darah jari pada kasus baru yang ditemukan, dimaksudkan untuk mencari penderita lain yang ada di sekitar penderita. Kasus baru filariasis tiap tahun selalu ada dan ditemukan secara *pasif case finding*. Penemuan kasus baru filariasis ditemukan dalam keadaan terlambat yaitu sudah terjadi pembengkakan.

Gambar 6.25
Jumlah Seluruh Kasus Kronis Filariasis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Filariasis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Jumlah seluruh kasus kronis filariasis di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 422 kasus menyebar di 34 kabupaten/kota. Hanya Kota Magelang yang belum pernah melaporkan penemuan kasus kronis

filariasis. Penemuan kasus kronis baru filariasis tahun 2019 sebanyak 27 kasus yang tersebar di 16 kabupaten/kota.

Penatalaksanaan kasus filariasis kronis oleh kabupaten/kota berupa pemberian obat DEC 3 x 100 mg selama 10 hari. Permasalahannya, perawatan bagi penderita belum dilakukan secara rutin sehingga pasien harus dilatih untuk melakukan perawatan diri sendiri. Oleh karena itu saat ini masih diperlukan advokasi dan sosialisasi program filariasis ke kabupaten/kota, peningkatan pengetahuan petugas untuk penemuan dan tatalaksana kasus filariasis.

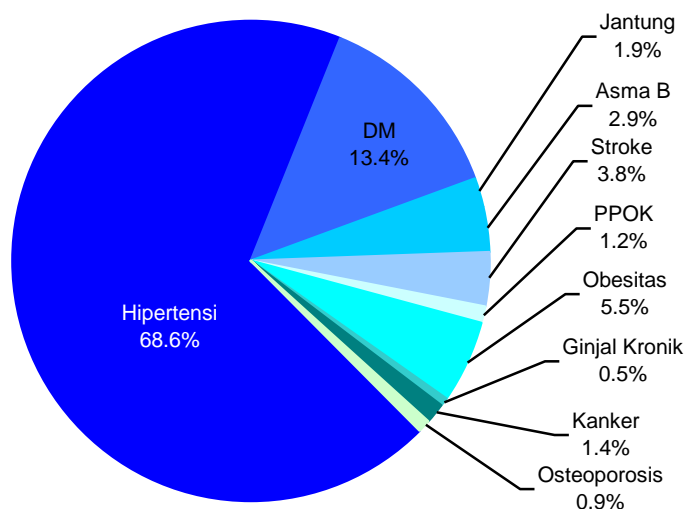
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini bertanggungjawab terhadap sedikitnya 70 persen kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan untuk mengendalikan faktor risiko PTM, melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Cek kesehatan secara berkala yaitu pemeriksaan faktor risiko PTM dapat dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM yang ada di desa/kelurahan, dan di Puskesmas. Upaya pengendalian PTM juga dilakukan melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok di sekolah-sekolah, hal ini sebagai upaya penurunan prevalensi perokok \leq 18 tahun. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh bidang kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasar hasil rekapitulasi data kasus baru PTM, jumlah kasus baru PTM yang dilaporkan secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah 3.074.607 kasus. Adapun proporsi kasus baru PTM tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Gambar 6.26
Proporsi Kasus Baru Penyakit Tidak Menular di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Penyakit Hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 68,6 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Diabetes Mellitus sebesar 13,4 persen. Dua penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Jawa Tengah. Jika Hipertensi dan Diabetes Melitus tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan PTM lanjutan seperti Jantung, Stroke, Gagal Ginjal, dan sebagainya. Pengendalian PTM dapat dilakukan dengan intervensi yang tepat pada setiap sasaran/kelompok populasi tertentu sehingga peningkatan kasus baru PTM dapat ditekan.

1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk di Provinsi Jawa Tengah dengan hipertensi sebesar 37,57 persen. Prevalensi hipertensi pada perempuan (40,17%) lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (34,83 persen). Prevalensi di perkotaan sedikit lebih tinggi (38,11 persen) dibandingkan dengan perdesaan (37,01 persen). Prevalensi semakin meningkat seiring dengan pertambahan umur.

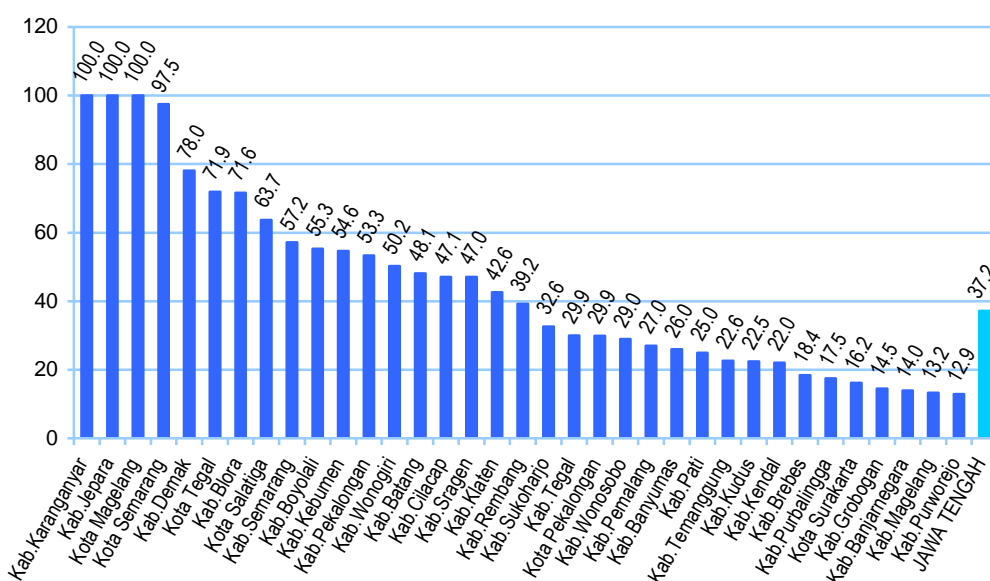
Pengukuran tekanan darah merupakan salah satu kegiatan deteksi dini terhadap faktor risiko PTM seperti Hipertensi, Stroke, Jantung, Kelainan Fungsi Ginjal atau yang lainnya. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas atau klinik kesehatan lainnya. Juga bisa dilaksanakan di Pos Pembinaan Terpadu PTM yang ada di masyarakat.

Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 th tahun 2019 sebanyak 8.070.378 orang atau sebesar 30,4 persen dari seluruh penduduk berusia ≥ 15

tahun. Dari jumlah estimasi tersebut, sebanyak 2.999.412 orang atau 37,2 persen sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hipertensi terkait dengan perilaku dan pola hidup. Pengendalian hipertensi dilakukan dengan perubahan perilaku antara lain menghindari asap rokok, diet sehat, rajin aktifitas fisik dan tidak mengonsumsi alkohol. Kabupaten/kota dengan persentase pelayanan kesehatan kepada penderita hipertensi tertinggi adalah di Karanganyar, Jepara dan Kota Magelang, masing-masing sebesar 100 persen. Sementara persentase terendah di Purworejo (12,9 persen).

Gambar 6.27
Persentase Pelayanan Kesehatan Hipertensi Penduduk ≥ 15 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data SPM Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

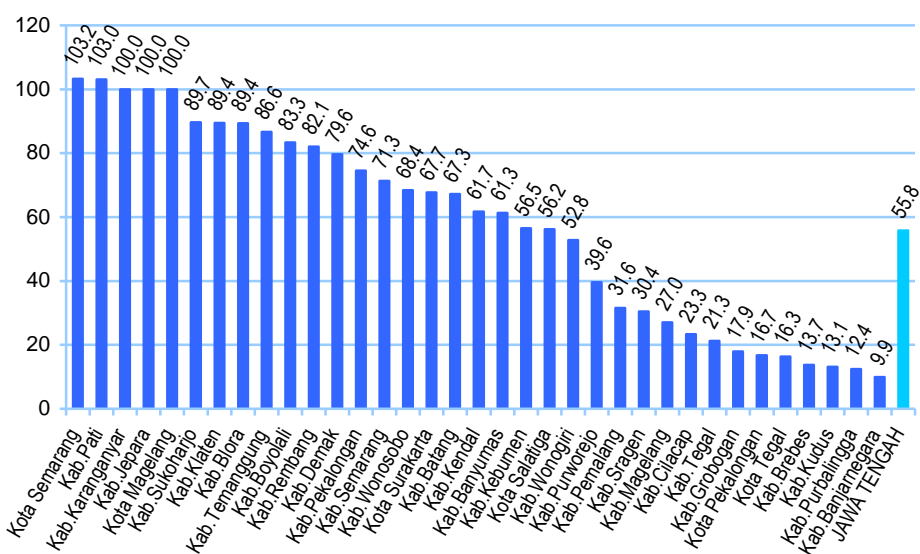
2. Pelayanan Skrining Usia Produktif

Pelayanan skrining usia produktif merupakan Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku berisiko. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 6.28 menunjukkan persentase penduduk usia produktif yang telah diberikan pelayanan skrining usia produktif. Penduduk di Provinsi Jawa Tengah

usia 15-49 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2019 sebanyak 12.097.039 orang (55,8 persen). Target pelayanan skrining usia produktif di setiap kabupaten/kota adalah 100%. Dari gambar terlihat bahwa kabupaten/kota dengan capaian pelayanan skrining tertinggi dicapai oleh Kota Semarang, Pati, Karanganyar, Jepara dan Kota Magelang (≥ 100 persen). Sedangkan kabupaten/kota dengan capaian terendah berada di Banjarnegara (9,9 persen).

Gambar 6.28
Persentase Pelayanan Skrining Kesehatan pada Penduduk usia 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data SPM Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

3. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

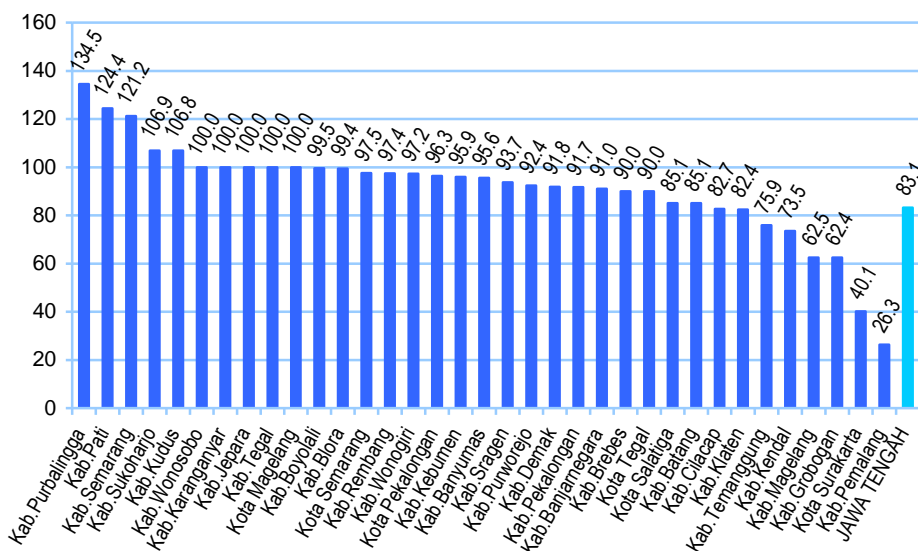
Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.

Gambar 6.29 menunjukkan persentase penderita Diabetes Melitus yang telah diberikan pelayanan sesuai dengan standar. Estimasi jumlah penderita DM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah sebanyak 652.822 orang, dan sebesar 83,1 persen telah diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Target capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus ditetapkan berdasarkan prevalensi Diabetes Mellitus yang telah ditetapkan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan / BPS.

Perhitungan capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yaitu Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikalikan dengan 100%.

Dari gambar terlihat bahwa kabupaten/kota dengan persentase pelayanan kesehatan penderita DM tertinggi (≥ 100 persen) adalah di Purbalingga, Pati, Semarang, Sukoharjo, Kudus, Wonosobo, Karanganyar, Jepara, Tegal dan Kota Magelang. Sedangkan kabupaten/kota dengan capaian terendah berada di Pemalang (26,3 persen).

Gambar 6.29
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita DM
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data SPM Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

4. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Kedua kanker di atas menjadi salah satu masalah utama pada kesehatan perempuan di dunia, terutama pada negara berkembang yang mempunyai sumber daya terbatas seperti di Indonesia. Pengendalian kanker, khususnya kanker payudara dan kanker leher rahim, dikembangkan melalui program deteksi dini (skrining). Program ini dilakukan dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA positif untuk kanker leher rahim. Sedangkan untuk kanker payudara dilakukan pemeriksaan

payudara klinis (SADANIS) atau *Clinical Breast Examination* (CBE) dan Periksa Payudara Sendiri (SADARI).

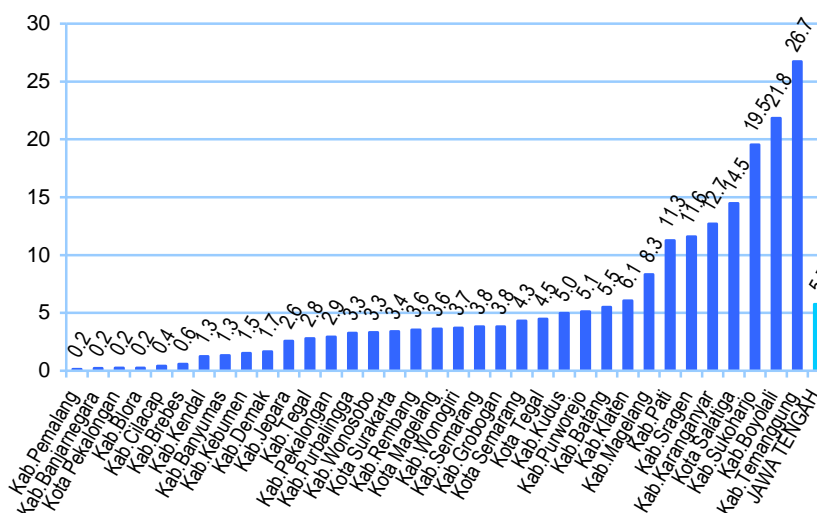
Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes tahun 2014-2019. Pencapaian indikator ini didukung dengan aksi nyata berupa gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan di Indonesia yang dikemas dalam Program Nasional Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan di Indonesia yang telah dicanangkan oleh Ibu Negara pada tanggal 21 April 2015 yang lalu. Gerakan ini akan berlangsung selama 5 tahun.

Jumlah WUS yang melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara tahun di Jawa Tengah tahun 2019 yang dilaporkan sebanyak 74.784 WUS atau 1.5 persen dari perempuan usia 30-50 tahun. Persentase WUS ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan (10 persen).

a. Kanker Leher Rahim

Dari WUS yang dilakukan IVA test, ditemukan IVA positif pada 4.300 orang (5,7 persen), lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (3 persen). Kabupaten/kota dengan persentase IVA positif tertinggi adalah Temanggung yaitu 26,7 persen. Tingginya persentase IVA positif menunjukkan faktor risiko kanker leher rahim yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Persentase IVA positif menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 6.30.

Gambar 6.30
Persentase IVA Positif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

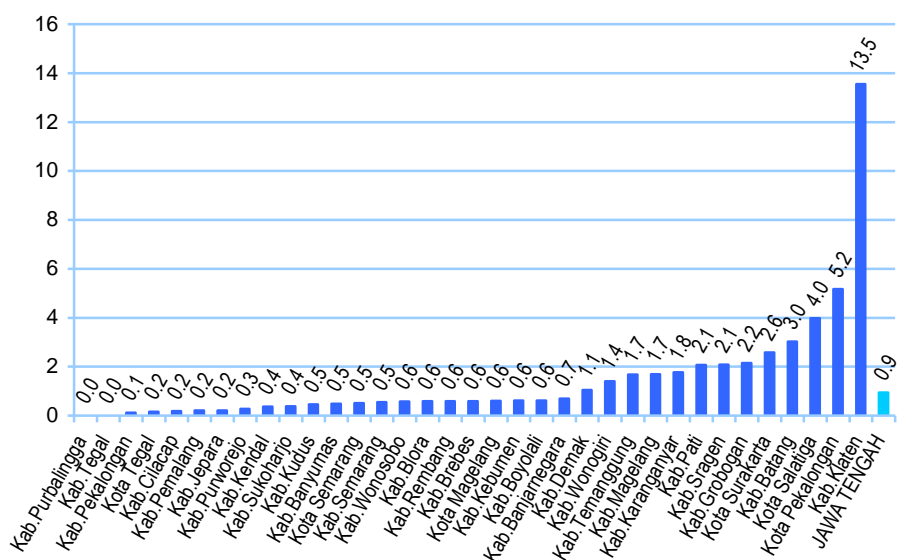


Sumber : Program PTM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

b. Kanker Payudara

Untuk deteksi dini kanker payudara dilakukan pemeriksaan *Clinical Breast Examination* (CBE) yaitu pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga terlatih. Pemeriksaan ini dipakai untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang ada pada payudara dan untuk mengevaluasi kanker payudara pada tahap dini sebelum berkembang menjadi tahap yang lebih lanjut. Dari keseluruhan WUS yang dilakukan pemeriksaan CBE sebanyak 1,30 persen WUS terdapat tumor/benjolan. Hasil pemeriksaan CBE menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 6.31. Kabupaten/kota dengan persentase WUS yang terdapat benjolan tertinggi adalah Klaten (13,5 persen). Tingginya persentase benjolan menunjukkan faktor risiko kanker payudara di wilayah tersebut.

Gambar 6.31
Persentase WUS Terdapat Benjolan Pada Pemeriksaan CBE
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Program PTM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Kesehatan Jiwa menurut Undang-undang tentang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014 adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang

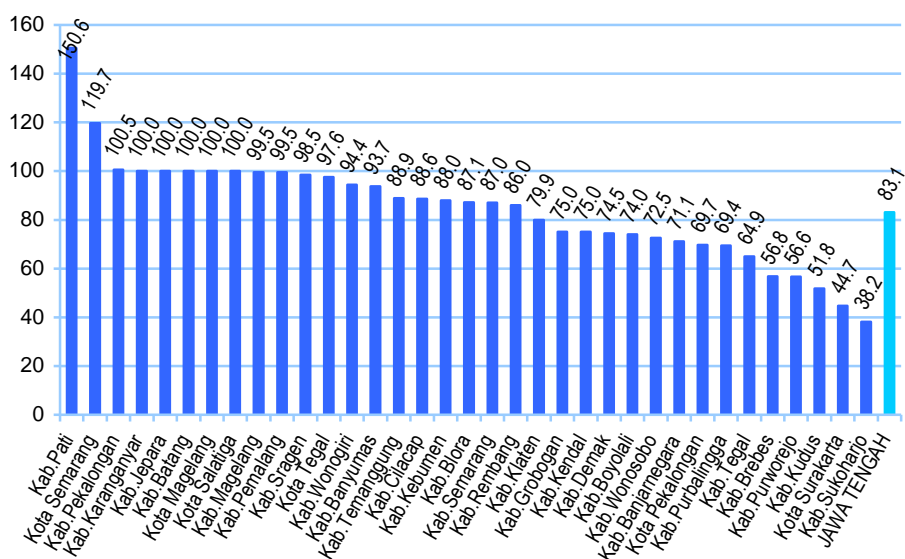
yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Sasaran ODGJ Berat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 81.983 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 68.090 atau sebesar 83,1 persen. Kabupaten/kota dengan persentase pelayanan kesehatan ODGJ berat 100 persen atau lebih adalah Pati, Kota Semarang, Pekalongan, Karanganyar, Jepara, Batang, Kota Magelang dan Kota Salatiga. Sedangkan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Sukoharjo (38,16 persen).

Gambar 6.32
Persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data SPM Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

BAB VII

KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

A. AIR MINUM

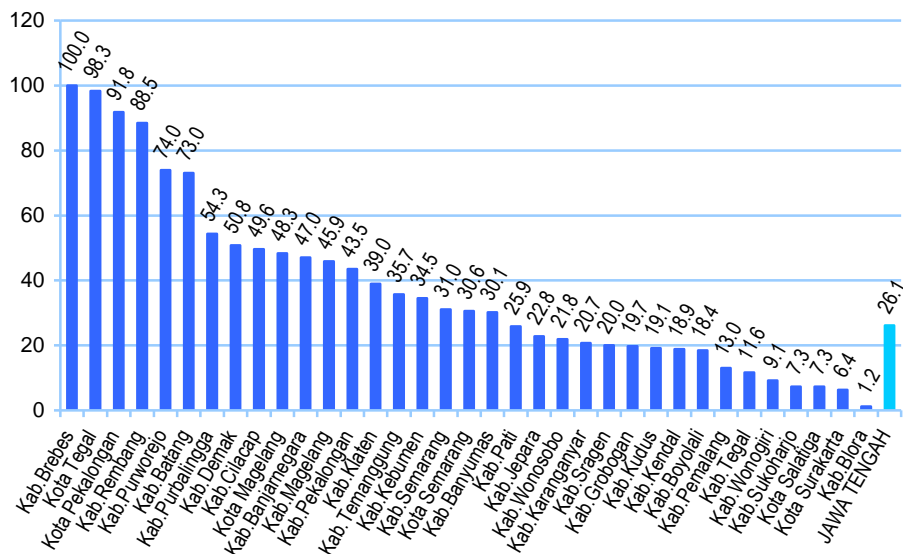
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri E.Coli dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar gross alpha activity tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar gross beta activity tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan secara internal dilakukan oleh penyedia air minum yaitu badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 pasal 4 ayat 4 meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum.

Gambar 7.1
Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pada tahun 2019, sebanyak 1.195.389 sarana air minum dilakukan IKL. Dari jumlah tersebut, 872.914 sarana air minum beresiko rendah dan sedang. 92.224 sarana air minum diambil sampel untuk diperiksa dan sebesar 85,8 persen sudah memenuhi syarat kesehatan. Persentase sarana air minum yang dilakukan IKL di Provinsi Jawa Tengah sebesar 26,1 persen. Hanya ada satu kabupaten/kota yang memiliki persentase IKL sebesar 100 persen yaitu Brebes. Kabupaten/kota dengan persentase IKL terendah adalah Blora (1,2 persen), Kota Surakarta (6,4 persen) dan Kota Salatiga (7,3 persen).

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak diantaranya adalah:

1. jenis sumber air utama yang digunakan untuk diminum;
2. jenis sumber air utama yang digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci;
3. jarak sumber air ke penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter.

Akses air minum yang layak dan bersih diperoleh dari sumber air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), hydrant umum, keran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor/pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari sarana pembuangan kotoran, penampungan

limbah, dan tempat penampungan atau pembuangan sampah. Air kemasan, air yang diperoleh dari penjual keliling, serta air dari sumur atau mata air tak terlindung bukan termasuk dalam kriteria akses air minum layak dan bersih.

B. AKSES SANITASI YANG LAYAK

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urine dan faeces. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM untuk Masyarakat, jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Bangunan jamban disebut sehat apabila memenuhi kriteria bangunan jamban sehat yang terdiri dari:

1. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)

Bangunan atas jamban berfungsi untuk melindungi pengguna dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.

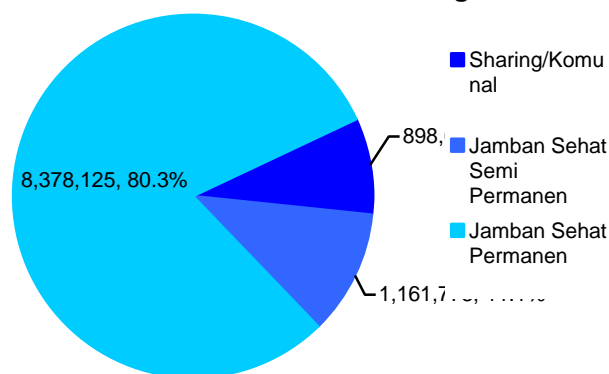
2. Bangunan tengah jamban

Lubang pembuangan kotoran berbentuk leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan air bekas ke system pembuangan air limbah (SPAL).

3. Bangunan bawah

Bangunan bawah sebagai penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja. Bangunan bawah dapat berupa tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan dengan kepadatan penduduk rendah dan sulit air.

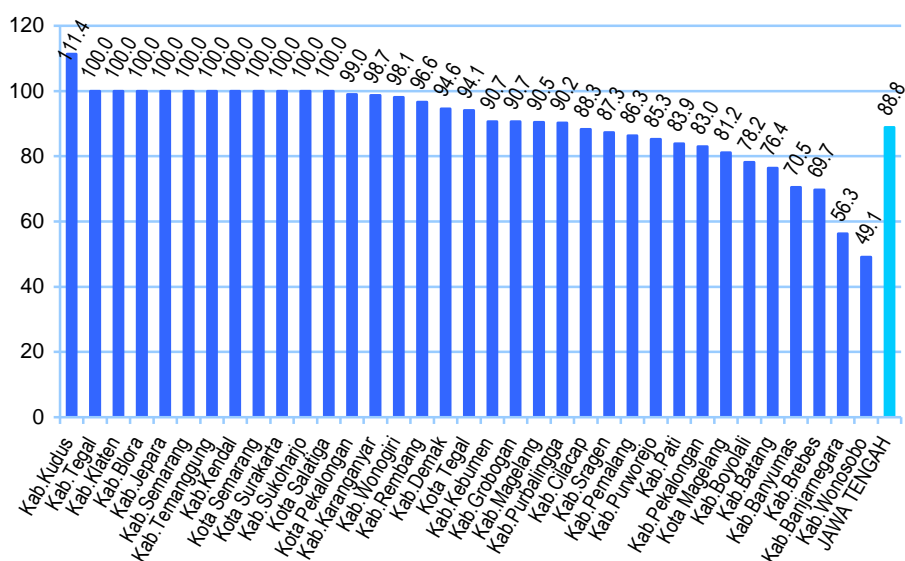
Gambar 7.2
Proporsi Penggunaan Jenis Jamban Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasi menjadi jamban sharing/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP), dan jamban sehat permanen. Jamban sharing/komunal merupakan jamban yang digunakan bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). Jamban sehat semi permanen belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak di dalam rumah. Jamban sehat permanen adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah. Pada tahun 2019, sebesar 80,3 persen keluarga di Jawa Tengah sudah menggunakan jamban sehat permanen (Gambar 7.2). Sisanya 11,1 persen menggunakan jamban sehat semi permanen dan masih ada 8,6 persen yang menggunakan jamban sharing/komunal.

Gambar 7.3
Persentase Keluarga Dengan Akses Sanitasi yang Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia pada tahun 2019 adalah 88,8 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (≥ 100 persen) adalah Kudus, Tegal, Klaten, Blora, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Sukoharjo. Kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Wonosobo (49,1 persen), Banjarnegara (56,3 persen), dan Brebes (69,7 persen).

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya peningkatan akses sanitasi. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan adalah melakukan perubahan arah kebijakan pendekatan sanitasi dari yang sebelumnya memberikan subsidi (*project driven*) menjadi pemberdayaan masyarakat yang fokus pada perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan menggunakan metode CLTS (*Community Led Total Sanitation*). Belajar dari pengalaman implementasi CLTS melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah bersama NGO (*Non-Governmental Organization*), maka pendekatan CLTS selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan 4 (empat) pilar perubahan perilaku lainnya yang dinamakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), selanjutnya Pemerintah menetapkan STBM menjadi kebijakan nasional pada tahun 2008, yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM. Pendekatan ini telah berkontribusi pada percepatan perubahan perilaku masyarakat dan penyediaan layanan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
2. Cuci Tangan Pakai Sabun;
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak seperti LSM, swasta, perguruan tinggi, media, dan organisasi sosial lainnya merupakan pelaku utama STBM. Dukungan yang diberikan meliputi pengembangan kapasitas, pengembangan pilihan teknologi, memfasilitasi pengembangan mekanisme jejaring pemasaran, pengembangan media, fasilitasi pemicuan, dan pertemuan-pertemuan pembelajaran antar pihak. Berbagai dukungan tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun sarana sanitasi sesuai kemampuan. STBM digunakan sebagai sarana pemerintah dalam pencapaian akses sanitasi menuju *universal access* pada akhir tahun 2019.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang disebut dengan 3 Komponen Sanitasi Total adalah sebagai berikut.

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*)

Tujuan: menciptakan lingkungan yang mendukung melalui sinergi lintas sektor dan lintas program, penguatan-penguatan melalui regulasi yang mendukung pelaksanaan STBM, dan membangun mekanisme pembelajaran antar daerah.

2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*)

Tujuan: meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana sanitasi yang dilakukan melalui kegiatan pemicuan, monitoring, dan penggunaan media komunikasi perubahan perilaku.

3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*)

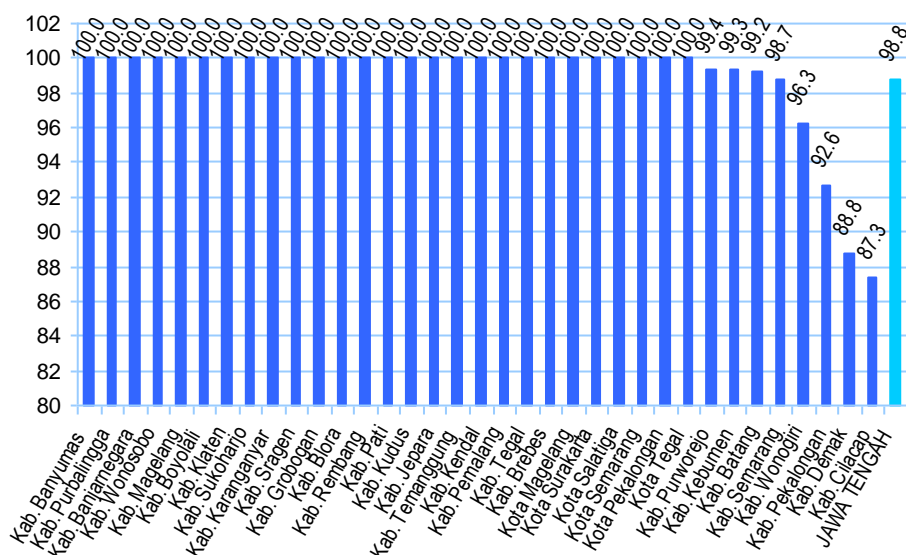
Tujuan: meningkatkan penyediaan sarana sanitasi dengan pilihan yang bervariasi dan terjangkau masyarakat secara luas.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan CLTS).
2. Telah memiliki natural leader (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Capaian desa yang melaksanakan STBM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 98,8 persen atau sebanyak 8.455 desa, meningkat dibandingkan cakupan pada tahun 2018 yang sebesar 90,9 persen (7.782 desa) dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2.482 desa (29 persen).

Gambar 7.4
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesling Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Terdapat 27 kabupaten/kota dengan persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM telah mencapai 100 persen. Kabupaten/kota dengan persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM terendah adalah Cilacap (87,3 persen). Dari keseluruhan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, sebesar 11,6 persen merupakan desa STBM. Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan sebagai Desa/Kelurahan STBM adalah Desa/Kelurahan tersebut telah mencapai lima Pilar STBM.

D. TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN

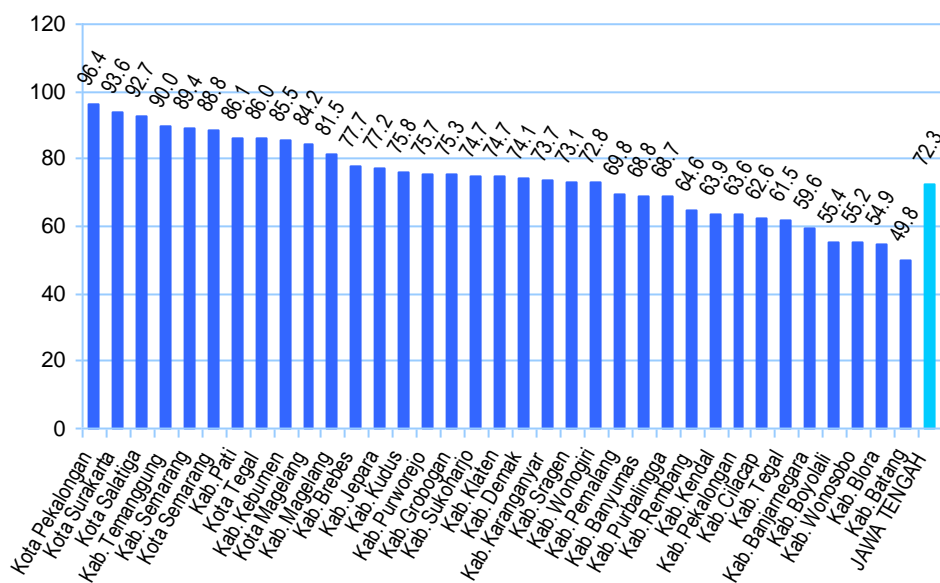
Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan

dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Pemerintah Daerah minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, yaitu:

1. Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi.
2. Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, adanya proses tawar menawar di pasar, sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pengawasan Tempat Tempat Umum meliputi Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Tempat Ibadah dan Pasar. Capaian kegiatan pengawasan TTU yang telah memenuhi syarat pada tahun 2019 sebesar 72,3 persen. Kabupaten/kota dengan persentase TTU memenuhi syarat tertinggi adalah Kota Pekalongan yaitu 96,4 persen dan terendah adalah Batang yaitu 49,8 persen.

Gambar 7.5
Persentase Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesling Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

E. TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. TPM adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau catering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang

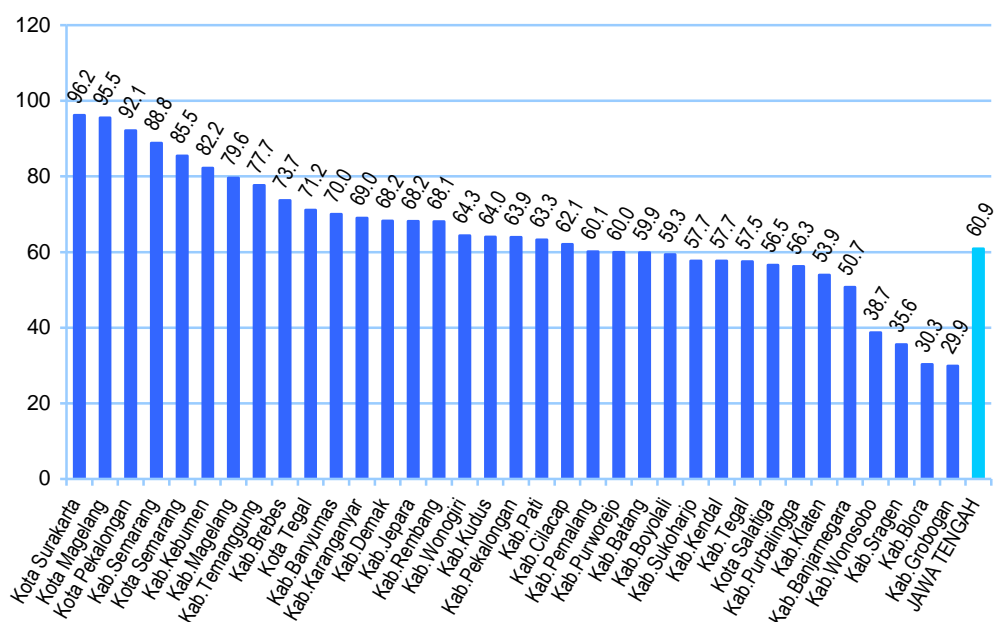
Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. persyaratan lokasi dan bangunan,
2. persyaratan fasilitas sanitasi,
3. persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan,
4. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi,
5. persyaratan pengolahan makanan,
6. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi,
7. persyaratan penyajian makanan jadi,
8. persyaratan peralatan yang digunakan.

TPM yang dilakukan penilaian untuk memenuhi syarat kesehatan adalah TPM siap saji di antaranya Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum, dan Makanan Jajanan/Kantin/Sentra Makanan Jajanan yang dibuktikan dengan sertifikat layak hygiene sanitasi.

Pada tahun 2019 TPM yang ada di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 67.998 tempat. Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 60,9 persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2018 yang sebesar 62,1 persen. Kabupaten/kota dengan persentase TPM memenuhi syarat tertinggi adalah Kota Surakarta yaitu sebesar 96,2 persen dan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Grobogan 29,9 persen.

Gambar 7.6
Persentase TPM Memenuhi Syarat Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



Sumber : Data Program Kesling Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

LAMPIRAN

**RESUME PROFIL KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			No. Lampiran	
		L	P	L + P		Satuan
I GAMBARAN UMUM						
1	Luas Wilayah			32,801	Km ²	Tabel 1
2	Jumlah Desa/Kelurahan			8,562	Desa/Kelurahan	Tabel 1
3	Jumlah Penduduk	17,212,455	17,505,749	34,718,204	Jiwa	Tabel 2
4	Rata-rata jiwa/rumah tangga			3.7	Jiwa	Tabel 1
5	Kepadatan Penduduk /Km ²			1058.5	Jiwa/Km ²	Tabel 1
6	Rasio Beban Tanggungan			47.6	per 100 penduduk produktif	Tabel 2
7	Rasio Jenis Kelamin			98.3		Tabel 2
8	Penduduk 15 tahun ke atas melek huruf	96.3	90.9	93.5	%	Tabel 3
9	Penduduk 15 tahun yang memiliki ijazah tertinggi					
	a. SMP/MTs/ sederajat	24.2	23.7	23.9	%	Tabel 3
	b. SMA/MA/ sederajat	24.5	18.1	21.2	%	Tabel 3
	c. Perguruan Tinggi	6.7	7.1	6.9	%	Tabel 3
II SARANA KESEHATAN						
II.1 Sarana Kesehatan						
10	Jumlah Rumah Sakit Umum			264	RS	Tabel 4
11	Jumlah Rumah Sakit Khusus			4	RS	Tabel 4
12	Jumlah Puskesmas Rawat Inap			361	Puskesmas	Tabel 4
13	Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap			517	Puskesmas	Tabel 4
14	Jumlah Puskesmas Keliling			1,071	Puskesmas keliling	Tabel 4
15	Jumlah Puskesmas pembantu			1,792	Pustu	Tabel 4
16	Jumlah Apotek			3,467	Apotek	Tabel 4
17	RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1			100.0	%	Tabel 6
II.2 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
18	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	115.0	161.3	138.3	%	Tabel 5
19	Cakupan Kunjungan Rawat Inap	7.3	9.1	8.2	%	Tabel 5
20	Angka kematian kasar/ <i>Gross Death Rate</i> (GDR) di RS	33.8	25.0	28.8	per 1.000 pasien keluar	Tabel 7
21	Angka kematian murni/ <i>Nett Death Rate</i> (NDR) di RS	16.4	12.3	14.1	per 1.000 pasien keluar	Tabel 7
22	<i>Bed Occupation Rate</i> (BOR) di RS			44.9	%	Tabel 8

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			No. Lampiran	
		L	P	L + P		Satuan
23	<i>Bed Turn Over</i> (BTO) di RS			65.0	Kali	Tabel 8
24	<i>Turn of Interval</i> (TOI) di RS			3.1	Hari	Tabel 8
25	<i>Average Length of Stay</i> (ALOS) di RS			2.7	Hari	Tabel 8
26	Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial			92.0	%	Tabel 9
II.3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)						
27	Jumlah Posyandu			49,410	Posyandu	Tabel 10
28	Posyandu Aktif			73.3	%	Tabel 10
29	Rasio posyandu per 100 balita			1.9	per 100 balita	Tabel 10
30	Posbindu PTM			8,608	Posbindu PTM	Tabel 10
III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
31	Jumlah Dokter Spesialis	2,219	1,362	3,581	Orang	Tabel 11
32	Jumlah Dokter Umum	2,344	3,670	6,014	Orang	Tabel 11
33	Rasio Dokter (spesialis+umum)			10	per 100.000 penduduk	Tabel 11
34	Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	378	1,193	1,571	Orang	Tabel 11
35	Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)			5	per 100.000 penduduk	Tabel 11
36	Jumlah Bidan		23,206		Orang	Tabel 12
37	Rasio Bidan per 100.000 penduduk		67		per 100.000 penduduk	Tabel 12
38	Jumlah Perawat	14,293	30,427	44,720	Orang	Tabel 12
39	Rasio Perawat per 100.000 penduduk			129	per 100.000 penduduk	Tabel 12
40	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	444	1,446	1,890	Orang	Tabel 13
41	Jumlah Tenaga Sanitasi	563	989	1,552	Orang	Tabel 13
42	Jumlah Tenaga Gizi	221	1,880	2,101	Orang	Tabel 13
43	Jumlah Tenaga Kefarmasian	1,139	6,556	7,695	Orang	Tabel 15
IV PEMBIAYAAN KESEHATAN						
44	Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			87.1	%	Tabel 17
45	Desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan			95.0	%	Tabel 18
46	Total anggaran kesehatan			Rp14,590,292,112,405	Rp	Tabel 19
47	APBD kesehatan terhadap APBD kab/kota			10.9	%	Tabel 19
48	Anggaran kesehatan perkapita			Rp302,234	Rp	Tabel 19
V KESEHATAN KELUARGA						

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			Satuan	No. Lampiran
		L	P	L + P		
V.1 Kesehatan Ibu						
49	Jumlah Lahir Hidup	278,525	262,261	540,786	Orang	Tabel 20
50	Angka Lahir Mati (dilaporkan)	5.2	4.3	4.8	per 1.000 Kelahiran Hidup	Tabel 20
51	Jumlah Kematian Ibu		416		Ibu	Tabel 21
52	Angka Kematian Ibu (dilaporkan)		76.9		per 100.000 Kelahiran Hidup	Tabel 21
53	Kunjungan Ibu Hamil (K1)		100.2		%	Tabel 23
54	Kunjungan Ibu Hamil (K4)		95.7		%	Tabel 23
55	Ibu hamil dengan imunisasi Td2+		61.4		%	Tabel 24
56	Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90		92.7		%	Tabel 27
57	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan		99.9		%	Tabel 23
58	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes		99.8		%	Tabel 23
59	Pelayanan Ibu Nifas KF3		98.5		%	Tabel 23
60	Ibu Nifas Mendapat Vitamin A		98.4		%	Tabel 23
61	Penanganan komplikasi kebidanan		124.4		%	Tabel 30
62	Peserta KB Aktif			73.5	%	Tabel 28
63	Peserta KB Pasca Persalinan			26.8	%	Tabel 29
V.2 Kesehatan Anak						
64	Jumlah Kematian Neonatal	1,755	1,357	3,112	neonatal	Tabel 31
65	Angka Kematian Neonatal (dilaporkan)	6.3	5.2	5.8	per 1.000 Kelahiran Hidup	Tabel 31
66	Jumlah Bayi Mati	2,495	1,955	4,450	bayi	Tabel 31
67	Angka Kematian Bayi (dilaporkan)	9.0	7.5	8.2	per 1.000 Kelahiran Hidup	Tabel 31
68	Jumlah Balita Mati	2,896	2,312	5,208	Balita	Tabel 31
69	Angka Kematian Balita (dilaporkan)	10.4	8.8	9.6	per 1.000 Kelahiran Hidup	Tabel 31
70	Penanganan komplikasi Neonatal	88.8	86.6	87.7	%	Tabel 30
71	Bayi baru lahir ditimbang	99.8	99.8	99.8	%	Tabel 33
72	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	4.5	5.0	4.7	%	Tabel 33
73	Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	99.8	99.8	99.8	%	Tabel 34
74	Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap)	98.4	98.7	98.6	%	Tabel 34
75	Bayi yang diberi ASI Eksklusif			66.0	%	Tabel 35
76	Pelayanan kesehatan bayi	98.3	98.2	98.3	%	Tabel 36
77	Desa/Kelurahan UCI			99.9	%	Tabel 37
78	Cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi	99.1	99.8	99.4	%	Tabel 39

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			No. Lampiran	
		L	P	L + P		Satuan
79	Imunisasi dasar lengkap pada bayi	98.1	98.9	98.5	%	Tabel 39
80	Bayi Mendapat Vitamin A			99.6	%	Tabel 41
81	Anak Balita Mendapat Vitamin A			99.4	%	Tabel 41
82	Pelayanan kesehatan balita	93.9	94.0	93.9	%	Tabel 42
83	Balita ditimbang (D/S)	84.6	84.8	84.7	%	Tabel 43
84	Balita gizi kurang (BB/umur)			5.4	%	Tabel 44
85	Balita pendek (TB/umur)			7.4	%	Tabel 44
86	Balita kurus (BB/TB)			2.8		Tabel 44
87	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI			96.4	%	Tabel 45
88	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs			90.6	%	Tabel 45
89	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA			85.1	%	Tabel 45
90	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			83.4	%	Tabel 45
V.3 Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut						
91	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	50.7	60.8	55.8	%	Tabel 48
92	Pelayanan Kesehatan Usila (60+ tahun)	75.4	74.4	74.9	%	Tabel 49
VI PENGENDALIAN PENYAKIT						
VI.1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung						
93	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			99.93	%	Tabel 51
94	CNR seluruh kasus TBC			211	per 100.000 penduduk	Tabel 51
95	Case detection rate TBC			88.18	%	Tabel 51
96	Cakupan penemuan kasus TBC anak			88.00	%	Tabel 51
97	Angka kesembuhan BTA+	66.8	67.9	67.3	%	Tabel 52
98	Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC	50.3	52.8	51.5	%	Tabel 52
99	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	85.2	85.1	85.1	%	Tabel 52
100	Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis			2.8	per 100.000 penduduk	Tabel 52
101	Penemuan penderita pneumonia pada balita			67.7	%	Tabel 53
102	Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 60%			83.1	%	Tabel 53
103	Jumlah Kasus HIV	1,793	911	2,704	Kasus	Tabel 54
104	Jumlah Kasus Baru AIDS	1,597	719	2,316	Kasus	Tabel 55
105	Jumlah Kematian akibat AIDS	114	52	166	Jiwa	Tabel 55

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			No. Lampiran	
		L	P	L + P		Satuan
106	Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada balita			46.3	%	Tabel 56
107	Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada semua umur			61.2	%	Tabel 56
108	Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	168	1,331	1,499	Kasus	Tabel 57
109	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	1	8	4	per 100.000 penduduk	Tabel 57
110	Persentase Kasus Baru Kusta anak 0-14 Tahun			3.3	%	Tabel 58
111	Persentase Cacat Tingkat 0 Penderita Kusta			68.0	%	Tabel 58
112	Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta			7.6	%	Tabel 58
113	Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta			3.3	per 100.000 penduduk	Tabel 58
114	Angka Prevalensi Kusta			0.5	per 10.000 Penduduk	Tabel 59
115	Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)	4.2	19.0	12.3	%	Tabel 60
116	Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)	0.7	32.8	10.9	%	Tabel 60
VI.2	Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi					
117	AFP Rate (non polio) < 15 tahun			3.7	per 100.000 penduduk <15 tahun	Tabel 61
118	Jumlah kasus difteri	4	5	9	Kasus	Tabel 62
119	<i>Case fatality rate</i> difteri			0.0	%	Tabel 62
120	Jumlah kasus pertusis	0	2	2	Kasus	Tabel 62
121	Jumlah kasus tetanus neonatorum	0	0	0	Kasus	Tabel 62
122	<i>Case fatality rate</i> tetanus neonatorum			0.0	%	Tabel 62
123	Jumlah kasus hepatitis B	176	1,121	1,297	Kasus	Tabel 62
124	Jumlah kasus suspek campak	704	685	1,389	Kasus	Tabel 62
125	Insiden rate suspek campak	2.0	2.0	4.0	per 100.000 penduduk	Tabel 62
126	KLB ditangani < 24 jam			100.0	%	Tabel 63
VI.3	Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik					
127	Angka kesakitan (<i>incidence rate</i>) DBD	14.9	11.1	25.9	per 100.000 penduduk	Tabel 65
128	Angka kematian (<i>case fatality rate</i>) DBD	1.5	1.5	1.5	%	Tabel 65
129	Angka kesakitan malaria (<i>annual parasit incidence</i>)	0.0	0.0	0.0	per 1.000 penduduk	Tabel 66
130	Konfirmasi laboratorium pada suspek malaria			98.8	%	Tabel 66
131	Pengobatan standar kasus malaria positif			99.0	%	Tabel 66
132	<i>Case fatality rate</i> malaria	0.0	0.0	0.0	%	Tabel 66
133	Penderita kronis filariasis	176	246	422	Kasus	Tabel 67

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			Satuan	No. Lampiran
		L	P	L + P		
VI.4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
135	Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan	37.1	37.2	37.2	%	Tabel 68
136	Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			83.1	%	Tabel 69
138	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara		1.5		% perempuan usia 30-50 tahun	Tabel 70
139	Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun		5.7		%	Tabel 70
140	% tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun		0.9		%	Tabel 70
141	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			83.5	%	Tabel 71
	VII KESEHATAN LINGKUNGAN					
142	Sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang			73.0	%	Tabel 72
143	Sarana air minum memenuhi syarat			85.8	%	Tabel 72
144	Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)			88.8	%	Tabel 73
145	Desa STBM			11.6	%	Tabel 74
146	Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan			72.3	%	Tabel 75
147	Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan			60.9	%	Tabel 76

TABEL 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK per km ²
			DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	2,124.5	269	15	284	865,031	862,067	1,727,098	465,240	3.71	813
2	Kab.Banyumas	1,335.3	301	30	331	845,612	847,394	1,693,006	457,041	3.70	1,268
3	Kab.Purbalingga	677.6	224	15	239	461,281	472,708	933,989	232,453	4.02	1,378
4	Kab.Banjarnegara	1,023.7	266	12	278	462,405	460,787	923,192	240,812	3.83	902
5	Kab.Kebumen	1,211.7	449	11	460	596,388	601,594	1,197,982	321,384	3.73	989
6	Kab.Purworejo	1,091.5	469	25	494	354,084	364,232	718,316	208,267	3.45	658
7	Kab.Wonosobo	981.4	236	29	265	400,612	389,892	790,504	214,869	3.68	805
8	Kab.Magelang	1,102.9	367	5	372	647,413	643,178	1,290,591	347,621	3.71	1,170
9	Kab.Boyolali	1,008.5	261	6	267	484,716	500,091	984,807	275,702	3.57	977
10	Kab.Klaten	658.2	391	10	401	576,513	598,473	1,174,986	338,650	3.47	1,785
11	Kab.Sukoharjo	489.1	150	17	167	441,782	450,130	891,912	244,956	3.64	1,824
12	Kab.Wonogiri	1,793.7	251	43	294	466,206	493,286	959,492	264,337	3.63	535
13	Kab.Karanganyar	775.4	162	15	177	438,296	448,223	886,519	234,178	3.79	1,143
14	Kab.Sragen	941.5	196	12	208	436,180	454,338	890,518	256,333	3.47	946
15	Kab.Grobogan	2,013.9	273	7	280	681,296	696,492	1,377,788	398,053	3.46	684
16	Kab.Blora	1,804.6	271	24	295	425,590	439,423	865,013	247,235	3.50	479
17	Kab.Rembang	887.1	287	7	294	317,910	320,278	638,188	174,530	3.66	719
18	Kab.Pati	1,489.2	401	5	406	609,984	649,606	1,259,590	366,453	3.44	846
19	Kab.Kudus	425.2	123	9	132	428,815	442,496	871,311	216,607	4.02	2,049
20	Kab.Jepara	1,059.3	184	11	195	627,007	630,905	1,257,912	329,553	3.82	1,188
21	Kab.Demak	900.1	243	6	249	575,895	586,910	1,162,805	308,171	3.77	1,292
22	Kab.Semarang	950.2	208	27	235	517,597	536,189	1,053,786	284,012	3.71	1,109
23	Kab.Temanggung	837.7	266	23	289	386,782	385,236	772,018	201,503	3.83	922
24	Kab.Kendal	1,118.1	266	20	286	492,113	478,973	971,086	263,573	3.68	868
25	Kab.Batang	788.7	239	9	248	383,697	384,886	768,583	194,401	3.95	975
26	Kab.Pekalongan	837.0	272	13	285	445,790	451,921	897,711	209,203	4.29	1,073
27	Kab.Pemalang	1,118.0	211	11	222	644,682	658,131	1,302,813	321,774	4.05	1,165
28	Kab.Tegal	876.1	281	6	287	715,887	724,811	1,440,698	366,625	3.93	1,644
29	Kab.Brebes	1,902.4	292	5	297	908,786	900,310	1,809,096	471,188	3.84	951
30	Kota Magelang	16.1	0	17	17	60,107	62,004	122,111	32,192	3.79	7,603
31	Kota Surakarta	46.0	0	54	54	252,594	266,993	519,587	147,019	3.53	11,293
32	Kota Salatiga	57.4	0	23	23	94,887	99,197	194,084	53,547	3.62	3,384
33	Kota Semarang	373.8	0	177	177	889,298	924,812	1,814,110	478,912	3.79	4,853
34	Kota Pekalongan	45.3	0	27	27	153,518	153,579	307,097	76,278	4.03	6,787
35	Kota Tegal	39.7	0	27	27	123,701	126,204	249,905	66,438	3.76	6,298
PROVINSI JAWA TENGAH		32,800.7	7,809	753	8,562	17,212,455	17,505,749	34,718,204	9,309,110	3.73	1,058

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6
1	0 - 4	1,347,755	1,278,897	2,626,652	105.4
2	5 - 9	1,410,146	1,332,857	2,743,003	105.8
3	10 - 14	1,426,638	1,354,712	2,781,350	105.3
4	15 - 19	1,423,617	1,353,136	2,776,753	105.2
5	20 - 24	1,413,120	1,337,940	2,751,060	105.6
6	25 - 29	1,266,426	1,239,465	2,505,891	102.2
7	30 - 34	1,146,481	1,183,646	2,330,127	96.9
8	35 - 39	1,170,649	1,247,463	2,418,112	93.8
9	40 - 44	1,194,579	1,250,732	2,445,311	95.5
10	45 - 49	1,156,235	1,219,145	2,375,380	94.8
11	50 - 54	1,091,603	1,174,036	2,265,639	93.0
12	55 - 59	974,369	1,045,324	2,019,693	93.2
13	60 - 64	800,196	827,948	1,628,144	96.6
14	65 - 69	570,236	590,552	1,160,788	96.6
15	70 - 74	364,704	437,566	802,270	83.3
16	75+	455,701	632,330	1,088,031	72.1
PROVINSI JAWA TENGAH		17,212,455	17,505,749	34,718,204	98.3
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				47.6	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

TABEL 3

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF
DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	VARIABEL	JUMLAH			PERSENTASE		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	13,027,916	13,539,283	26,567,199			
2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF	12,544,580	12,307,208	24,851,789	96.3	90.9	93.5
3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:						
	a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD	2,008,905	3,147,883	5,156,788	15.4	23.2	19.4
	b. SD/MI	3,809,363	3,778,814	7,588,177	29.2	27.9	28.6
	c. SMP/ MTs	3,148,847	3,207,456	6,356,303	24.2	23.7	23.9
	d. SMA/ MA/SMK	3,186,628	2,446,548	5,633,176	24.5	18.1	21.2
	e. Perguruan Tinggi	875,476	958,581	1,834,057	6.7	7.1	6.9

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Statistik Pendidikan 2019)

TABEL 4

JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		PEM. PUSAT	PEM.PROV	PEM.KAB/KOT A	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM	4	4	52	11	1	192	264
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	4	3	0	0	0	36	43
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	361	0	0	0	361
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR	0	0	6874	0	0	0	6874
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	0	0	517	0	0	0	517
3	PUSKESMAS KELILING	0	0	1071	0	0	0	1071
4	PUSKESMAS PEMBANTU	0	0	1792	0	0	0	1792
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN	0	0	2	0	0	61	63
2	KLINIK PRATAMA	2	3	30	33	21	1272	1361
3	KLINIK UTAMA	0	0	1	3	2	186	192
4	BALAI PENGOBATAN	0	1	16	0	0	170	187
5	PRAKTIK DOKTER BERSAMA	0	0	0	0	0	83	83
6	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	0	0	31	0	0	2917	2948
7	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	0	0	2	0	0	648	650
8	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	0	0	0	0	0	747	747
9	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0	0	0	0	1692	1692
10	BANK DARAH RUMAH SAKIT	2	3	18	2	0	131	156
11	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	1	16	0	0	29	46
12	LABORATORIUM KESEHATAN	0	0	20	0	0	95	115
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI	0	0	0	0	0	22	22
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	0	0
3	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	83	83
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	40	40
5	PEDAGANG BESAR FARMASI	0	0	0	0	0	0	0
6	APOTEK	0	0	0	0	0	3467	3467
7	APOTEK PRB	0	0	0	0	0	0	0
8	TOKO OBAT	0	0	0	0	0	500	500
9	TOKO ALKES	0	0	0	0	0	22	22

Sumber: Data Program RS, Puskesmas, Kefarmasian

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA			
			RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Klinik Pratama											
	Kab.Purbalingga	5	4,555	4,679	9,234	180	218	398	1	1	2	
	Kab.Banjarnegara	11	46,126	52,255	98,381	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Wonosobo	12	17,346	20,557	37,903	0	0	0	19	10	29	
	Kab.Boyolali	21	125,955	182,315	308,270	4,205	6,056	10,261	20	29	49	
	Kab.Sukoharjo	30	19,132	21,182	40,314	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Wonogiri	28	97,351	112,497	209,848	8,472	10,593	19,065	1	2	3	
	Kab.Karanganyar	14	41,169	37,067	78,236	1,188	1,456	2,644	2	0	2	
	Kab.Sragen	56	135,417	153,810	289,227	3,176	4,180	7,356	0	0	0	
	Kab.Rembang	1	1,203	1,400	2,603	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Pati	27	136,486	170,615	307,101	0	518	518	62	53	115	
	Kab.Kudus	6	80,527	91,457	171,984	0	0	0	47	14	61	
	Kab.Demak	6	22,377	28,325	50,702	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Semarang	8	19,570	43,494	63,064	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Temanggung	6	11,046	10,971	22,017	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Tegal	26	105,911	145,612	251,523	4,217	5,036	9,253	7	5	12	
	Kota Magelang	7	22,481	26,273	48,754	0	0	0	0	0	0	
3	Praktik Mandiri Dokter											
	Kab.Purbalingga	4	17,386	22,991	40,377	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Wonosobo	77	6,647	8,745	15,392	0	0	0	2	0	2	
	Kab.Karanganyar	9	17,803	21,209	39,012	0	0	0	1	2	3	
	Kab.Pati	2	9,502	14,043	23,545	0	0	0	16	1	17	
	Kab.Kudus	9	32,172	52,240	84,412	0	0	0	9	8	17	
	Kab.Demak	8	13,649	17,331	30,980	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Semarang	6	3,810	11,217	15,027	0	0	0	0	0	0	
	Kota Magelang	6	8,779	10,164	18,943	0	0	0	0	0	0	
4	Praktik Mandiri Dokter Gigi											
	Kab.Wonosobo	22	1,600	1,104	2,704	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Karanganyar	3	1,119	1,655	2,774	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Pati	1	161	208	369	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Demak	11	0	700	700	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Semarang	1	141	151	292	0	0	0	0	0	0	
	Kota Magelang	3	980	1,134	2,114	0	0	0	0	0	0	
5	Praktik Mandiri Bidan											
	Kab.Purbalingga	5	2,432	5,677	8,109	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Wonosobo	2	700	2,401	3,101	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Karanganyar	22	5,070	15,035	20,105	0	229	229	0	0	0	
	Kab.Pati	1	33	76	109	0	18	18	0	0	0	
	Kab.Kudus	61	18,713	82,837	101,550	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Demak	42	19,887	38,224	58,111	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Semarang	7	5,561	14,778	20,339	0	0	0	0	0	0	
SUB JUMLAH I		1,444	11,497,270	16,908,310	28,405,580	153,644	215,771	369,415	36,612	28,688	65,300	

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA			
			RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut											
1	Klinik Utama											
	Kab.Banjarnegara	5	16,855	35,429	52,284	0	0	0	0	0	0	0
	Kab.Wonosobo	3	2,722	4,512	7,234	0	0	0	0	0	0	0
	Kab.Boyolali	3	419	2,713	3,132	0	158	158	0	0	0	0
	Kab.Wonogiri	3	1,222	4,270	5,492	0	838	838	0	0	0	0
	Kab.Karanganyar	7	17,593	31,377	48,970	1,231	1,857	3,088	9	17	26	
	Kab.Sragen	4	5,087	35,545	40,632	448	3,281	3,729	0	0	0	0
	Kab.Rembang	1	727	1,015	1,742	0	0	0	0	0	0	0
	Kab.Pati	2	14,384	16,956	31,340	528	690	1,218	5,454	4,441	9,895	
	Kab.Kudus	2	1,116	946	2,062	130	84	214	0	0	0	0
	Kab.Semarang	1	912	2,316	3,228	0	0	0	0	0	0	0
	Kab.Tegal	4	33,219	63,395	96,614	528	2,834	3,362	0	0	0	0
	Kota Surakarta	1	17,467	12,939	30,406	710	409	1,119	0	0	0	0
	Kota Semarang	12	52,374	82,137	134,511	426	414	840	0	0	0	0
	Kota Pekalongan	1	3,116	6,232	9,348	0	0	0	0	0	0	0
2	RS Umum											
	Kab.Cilacap	11	229,102	266,256	495,358	31,512	42,127	73,639	2,895	2,705	5,600	
	Kab.Banyumas	16	560,067	744,166	1,304,233	78,712	95,707	174,419	41,354	29,205	70,559	
	Kab.Purbalingga	4	145,348	235,475	380,823	19,731	30,438	50,169	2,226	2,188	4,414	
	Kab.Banjarnegara	4	170,054	227,715	397,769	21,559	26,098	47,657	2,056	2,355	4,411	
	Kab.Kebumen	11	288,097	359,385	647,482	41,760	48,718	90,478	4,333	3,781	8,114	
	Kab.Purworejo	9	83,019	44,536	127,555	11,477	13,315	24,792	6,836	6,353	13,189	
	Kab.Wonosobo	3	105,582	138,247	243,829	16,863	21,925	38,788	6,503	7,502	14,005	
	Kab.Magelang	5	50,696	60,749	111,445	22,210	38,394	60,604	1,937	1,259	3,196	
	Kab.Boyolali	10	227,699	317,680	545,379	28,211	40,005	68,216	2,786	1,947	4,733	
	Kab.Klaten	8	455,663	635,767	1,091,430	49,842	70,350	120,192	3,959	6,312	10,271	
	Kab.Sukoharjo	8	354,948	461,648	816,596	30,422	41,412	71,834	7,611	8,085	15,696	
	Kab.Wonogiri	10	156,529	185,206	341,735	24,744	27,339	52,083	5,814	5,838	11,652	
	Kab.Karanganyar	7	56,427	56,562	112,989	16,546	19,246	35,792	502	561	1,063	
	Kab.Sragen	10	185,768	249,063	434,831	23,670	29,199	52,869	3,882	3,809	7,691	
	Kab.Grobogan	7	147,710	145,754	293,464	28,225	36,256	64,481	4,943	4,286	9,229	
	Kab.Blora	6	98,885	151,486	250,371	21,303	31,458	52,761	1,114	1,572	2,686	
	Kab.Rembang	3	60,068	83,676	143,744	14,464	12,465	26,929	0	0	0	
	Kab.Pati	9	315,696	436,131	751,827	22,211	28,815	51,026	1,160	927	2,087	
	Kab.Kudus	7	357,038	489,576	846,614	35,743	62,380	98,123	1,971	2,034	4,005	
	Kab.Jepara	6	170,022	195,889	365,911	26,090	29,760	55,850	9,603	7,020	16,623	
	Kab.Demak	4	138,554	235,478	374,032	19,153	24,700	43,853	4,839	4,401	9,240	
	Kab.Semarang	5	144,830	221,809	366,639	23,554	30,573	54,127	1,477	1,282	2,759	
	Kab.Temanggung	4	150,976	259,550	410,526	25,078	36,144	61,222	3,689	2,750	6,439	
	Kab.Kendal	5	85,300	126,847	212,147	11,345	17,363	28,708	4,541	4,108	8,649	
	Kab.Batang	3	99,697	122,404	222,101	15,036	19,196	34,232	2,534	2,438	4,972	
	Kab.Pekalongan	3	141,046	189,795	330,841	16,704	25,138	41,842	3,470	3,006	6,476	
	Kab.Pemalang	8	83,671	60,861	144,532	27,528	36,179	63,707	3,367	2,328	5,695	
	Kab.Tegal	8	173,185	249,789	422,974	36,025	54,381	90,406	12,268	9,637	21,905	
	Kab.Brebes	12	95,748	108,668	204,416	27,614	34,261	61,875	5,761	4,673	10,434	
	Kota Magelang	6	207,246	260,237	467,483	29,098	34,816	63,914	1,816	1,485	3,301	
	Kota Surakarta	14	329,981	473,176	803,157	39,509	52,065	91,574	499	672	1,171	
	Kota Salatiga	4	59,896	179,176	239,072	86,759	14,152	100,911	285	336	621	
	Kota Semarang	20	1,624,465	2,260,973	3,885,438	113,170	144,040	257,210	10,504	10,023	20,527	
	Kota Pekalongan	9	170,299	200,105	370,404	18,530	26,897	45,427	10,164	8,026	18,190	
	Kota Tegal	3	55,031	76,718	131,749	12,310	15,603	27,913	107	114	221	

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA			
			RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	RS Khusus											
	Kab.Cilacap	1	246	5,153	5,399	108	564	672	0	0	0	
	Kab.Banyumas	7	29,640	64,680	94,320	3,449	6,339	9,788	0	0	0	
	Kab.Purbalingga	1	6,396	22,910	29,306	1,136	7,131	8,267	0	0	0	
	Kab.Purworejo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kab.Wonosobo	1	213	16,313	16,526	965	1,785	2,750	0	0	0	
	Kab.Klaten	4	84,595	80,233	164,828	8,523	8,911	17,434	14,299	13,720	28,019	
	Kab.Sukoharjo	2	110,346	101,671	212,017	12,233	11,308	23,541	0	0	0	
	Kab.Karanganyar	1	178	1,217	1,395	376	1,406	1,782	0	0	0	
	Kab.Sragen	1	573	10,297	10,870	1,292	3,702	4,994	0	0	0	
	Kab.Kudus	2	2,408	26,019	28,427	426	3,209	3,635	0	0	0	
	Kab.Pekalongan	1	2,564	12,555	15,119	111	2,726	2,837	0	0	0	
	Kab.Tegal	1	8,189	10,995	19,184	2,341	3,001	5,342	0	0	0	
	Kab.Brebes	1	53	2,189	2,242	29	729	758	0	0	0	
	Kota Magelang	2	24,507	27,637	52,144	2,200	2,480	4,680	10,538	11,884	22,422	
	Kota Surakarta	4	65,755	72,409	138,164	2,269	1,375	3,644	22,841	15,090	37,931	
	Kota Salatiga	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kota Semarang	9	9,301	46,198	55,499	639	3,659	4,298	0	0	0	
	Kota Tegal	1	1,297	9,768	11,065	217	1,041	1,258	0	0	0	
4	Praktik Mandiri Dokter Spesialis											
	Kab.Kudus	2	1,546	2,318	3,864			0			0	
	SUB JUMLAH II	356	8,293,364	11,322,896	19,616,260	1,107,024	1,380,845	2,487,869	229,948	198,169	428,117	

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

TABEL 6

PERSENTASE RUMAH SAKIT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR) LEVEL I
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH	MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	RUMAH SAKIT UMUM	264	264	100.0
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	43	43	100.0
PROVINSI JAWA TENGAH		307	307	100.0

Sumber:Data Program Rujukan

TABEL 7

ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIEN KELUAR MATI			PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			Gross Death Rate			Net Death Rate		
				L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kab.Cilacap	12	1,182	95,964	112,751	208,715	1,347	1,139	2,486	677	583	1,260	14.0	10.1	11.9	7.1	5.2	6.0
2	Kab.Banyumas	23	2,843	94,311	123,854	218,165	2,953	2,744	5,697	1,779	1,895	3,674	31.3	22.2	26.1	18.9	15.3	16.8
3	Kab.Purbalingga	6	638	20,522	30,859	51,381	681	673	1,354	267	302	569	33.2	21.8	26.4	13.0	9.8	11.1
4	Kab.Banjarnegara	4	580	19,102	21,555	40,657	431	555	986	253	233	486	22.6	25.7	24.3	13.2	10.8	12.0
5	Kab.Kebumen	11	1,275	39,121	48,609	87,730	4,353	4,736	9,089	899	884	1,783	111.3	97.4	103.6	23.0	18.2	20.3
6	Kab.Purworejo	11	793	11,122	12,972	24,094	838	725	1,563	430	315	745	75.3	55.9	64.9	38.7	24.3	30.9
7	Kab.Wonosobo	4	553	16,565	22,607	39,172	658	543	1,201	273	254	527	39.7	24.0	30.7	16.5	11.2	13.5
8	Kab.Magelang	5	457	22,210	38,394	60,604	114	122	236	45	69	114	5.1	3.2	3.9	2.0	1.8	1.9
9	Kab.Boyolali	11	960	30,314	43,672	73,986	734	716	1,450	410	351	761	24.2	16.4	19.6	13.5	8.0	10.3
10	Kab.Klaten	12	1,770	46,945	60,583	107,528	1,961	1,980	3,941	641	705	1,346	41.8	32.7	36.7	13.7	11.6	12.5
11	Kab.Sukoharjo	9	1,274	41,010	49,906	90,916	1,072	892	1,964	566	688	1,254	26.1	17.9	21.6	13.8	13.8	13.8
12	Kab.Wongorejo	10	1,200	31,064	24,042	55,106	1,153	893	2,046	497	385	882	37.1	37.1	37.1	16.0	16.0	16.0
13	Kab.Karanganyar	8	812	27,458	33,094	60,552	683	570	1,253	405	320	725	24.9	17.2	20.7	14.7	9.7	12.0
14	Kab.Sragen	11	1,129	30,355	35,612	65,967	1,114	999	2,113	665	622	1,287	36.7	28.1	32.0	21.9	17.5	19.5
15	Kab.Grobogan	7	1,114	26,693	32,639	59,332	1,332	1,216	2,548	573	656	1,229	49.9	37.3	42.9	21.5	20.1	20.7
16	Kab.Blora	6	639	28,627	45,927	74,554	726	747	1,473	305	300	605	25.4	16.3	19.8	10.7	6.5	8.1
17	Kab.Rembang	3	483	3,458	4,647	8,105	74	87	161	16	18	34	21.4	18.7	19.9	4.6	3.9	4.2
18	Kab.Pati	9	1,178	34,938	46,505	81,443	1,124	891	2,015	582	306	888	32.2	19.2	24.7	16.7	6.6	10.9
19	Kab.Kudus	9	1,325	41,929	57,760	99,689	1,771	1,492	3,263	839	761	1,600	42.2	25.8	32.7	20.0	13.2	16.0
20	Kab.Jepara	6	1,848	40,008	47,535	87,543	1,005	753	1,758	596	448	1,044	25.1	15.8	20.1	14.9	9.4	11.9
21	Kab.Demak	4	1,042	38,920	46,578	85,498	1,542	1,272	2,814	860	830	1,690	39.6	27.3	32.9	22.1	17.8	19.8
22	Kab.Semarang	5	749	18,422	27,785	46,207	586	690	1,276	341	408	749	31.8	24.8	27.6	18.5	14.7	16.2
23	Kab.Temanggung	4	739	22,387	32,498	54,885	881	651	1,532	541	203	744	39.3	20.0	27.9	24.2	6.2	13.6
24	Kab.Kendal	5	597	10,565	16,539	27,104	625	555	1,180	322	294	616	59.2	33.6	43.5	30.5	17.8	22.7
25	Kab.Batang	3	880	32,426	41,008	73,434	1,210	998	2,208	766	600	1,366	37.3	24.3	30.1	23.6	14.6	18.6
26	Kab.Pekalongan	4	614	16,504	24,822	41,326	925	976	1,901	454	484	938	56.0	39.3	46.0	27.5	19.5	22.7
27	Kab.Pemalang	9	1,228	45,790	56,717	102,507	1,358	1,586	2,944	458	539	997	29.7	28.0	28.7	10.0	9.5	9.7
28	Kab.Tegal	9	1,376	39,894	55,868	95,762	1,183	1,342	2,525	741	833	1,574	29.7	24.0	26.4	18.6	14.9	16.4
29	Kab.Brebes	13	1,351	50,118	53,936	104,054	698	792	1,490	458	603	1,061	13.9	14.7	14.3	9.1	11.2	10.2
30	Kota Magelang	8	1,327	24,108	26,158	50,266	575	510	1,085	332	309	641	23.9	19.5	21.6	13.8	11.8	12.8
31	Kota Surakarta	18	2,951	31,964	39,850	71,814	640	570	1,210	263	245	508	20.0	14.3	16.8	8.2	6.1	7.1
32	Kota Salatiga	6	525	13,307	19,232	32,539	191	243	434	64	65	129	14.4	12.6	13.3	4.8	3.4	4.0
33	Kota Semarang	29	4,741	108,513	149,955	258,468	4,455	4,457	8,912	2,703	2,779	5,482	41.1	29.7	34.5	24.9	18.5	21.2
34	Kota Pekalongan	9	807	21,398	29,733	51,131	698	700	1,398	327	363	690	32.6	23.5	27.3	15.3	12.2	13.5
35	Kota Tegal	4	881	12,531	16,649	29,180	465	412	877	174	195	369	37.1	24.7	30.1	13.9	11.7	12.6
PROVINSI JAWA TENGAH		307	41,861	1,188,562	1,530,852	2,719,414	40,155	38,228	78,383	19,523	18,844	38,367	33.8	25.0	28.8	16.4	12.3	14.1

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

Keterangan: ^a termasuk rumah sakit swasta

TABEL 8

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.Cilacap	12	1182	208,715	165,024	437,541	38.3	177	1	2
2	Kab.Banyumas	23	2843	218,165	745,766	777,286	71.9	77	1	4
3	Kab.Purbalingga	6	638	51,381	93,170	301,943	40.0	81	3	6
4	Kab.Banjarnegara	4	580	40,657	124,848	129,010	59.0	70	2	3
5	Kab.Kebumen	11	1275	87,730	292,272	292,954	62.8	69	2	3
6	Kab.Purworejo	11	793	24,094	88,333	109,635	30.5	30	8	5
7	Kab.Wonosobo	4	553	39,172	103,706	119,301	51.4	71	3	3
8	Kab.Magelang	5	457	60,604	34,880	34,880	20.9	133	2	1
9	Kab.Boyolali	11	960	73,986	239,338	140,976	68.3	77	2	2
10	Kab.Klaten	12	1770	107,528	410,472	446,272	63.5	61	2	4
11	Kab.Sukoharjo	9	1274	90,916	81,166	80,724	17.5	71	4	1
12	Kab.Wonogiri	10	1200	55,106	113,190	88,379	25.8	46	6	2
13	Kab.Karanganyar	8	812	60,552	176,354	186,451	59.5	75	2	3
14	Kab.Sragen	11	1129	65,967	249,388	294,894	60.5	58	2	4
15	Kab.Grobogan	7	1114	59,332	200,415	232,599	49.3	53	3	4
16	Kab.Blora	6	639	74,554	149,104	86,144	63.9	117	1	1
17	Kab.Rembang	3	483	8,105	20,839	20,577	11.8	17	19	3
18	Kab.Pati	9	1178	81,443	267,099	229,176	62.1	69	2	3
19	Kab.Kudus	9	1325	99,689	370,982	348,041	76.7	75	1	3
20	Kab.Jepara	6	1848	87,543	479,272	487,976	71.1	47	2	6
21	Kab.Demak	4	1042	85,498	292,220	353,814	76.8	82	1	4
22	Kab.Semarang	5	749	46,207	68,558	71,915	25.1	62	4	2
23	Kab.Temanggung	4	739	54,885	78,644	95,167	29.2	74	3	2
24	Kab.Kendal	5	597	27,104	111,796	90,316	51.3	45	4	3
25	Kab.Batang	3	880	73,434	233,646	244,296	72.7	83	1	3
26	Kab.Pekalongan	4	614	41,326	1,311	9,022	0.6	67	5	0
27	Kab.Pemalang	9	1228	102,507	278,821	287,656	62.2	83	2	3
28	Kab.Tegal	9	1376	95,762	55,925	51,553	11.1	70	5	1
29	Kab.Brebes	13	1351	104,054	178,738	201,969	36.2	77	3	2
30	Kota Magelang	8	1327	50,266	169,151	164,424	34.9	38	6	3
31	Kota Surakarta	18	2951	71,814	366,370	380,187	34.0	24	10	5
32	Kota Salatiga	6	525	32,539	74,484	81,859	38.9	62	4	3
33	Kota Semarang	29	4741	258,468	287,664	267,932	16.6	55	6	1
34	Kota Pekalongan	9	807	51,131	161,210	169,986	54.7	63	3	3
35	Kota Tegal	4	881	29,180	99,709	91,168	31.0	33	8	3
PROVINSI JAWA TENGAH		307	41861	2,719,414	6,863,865	7,406,023	44.9	65	3	3

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

Keterangan: ^a termasuk rumah sakit swasta

TABEL 9

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL
1	2	3	4	5
1	Kab.Cilacap	38	38	38
2	Kab.Banyumas	39	39	39
3	Kab.Purbalingga	22	22	15
4	Kab.Banjarnegara	35	35	35
5	Kab.Kebumen	35	35	35
6	Kab.Purworejo	27	27	24
7	Kab.Wonosobo	24	24	24
8	Kab.Magelang	29	16	14
9	Kab.Boyolali	25	25	24
10	Kab.Klaten	34	34	27
11	Kab.Sukoharjo	12	12	11
12	Kab.Wonogiri	34	15	13
13	Kab.Karanganyar	21	21	21
14	Kab.Sragen	25	25	23
15	Kab.Grobogan	30	30	30
16	Kab.Blora	26	26	26
17	Kab.Rembang	17	17	17
18	Kab.Pati	29	29	28
19	Kab.Kudus	19	19	18
20	Kab.Jepara	21	21	21
21	Kab.Demak	27	27	25
22	Kab.Semarang	26	26	26
23	Kab.Temanggung	26	26	26
24	Kab.Kendal	30	30	28
25	Kab.Batang	21	21	21
26	Kab.Pekalongan	27	27	27
27	Kab.Pemalang	25	25	25
28	Kab.Tegal	29	29	29
29	Kab.Brebes	38	38	37
30	Kota Magelang	5	5	5
31	Kota Surakarta	17	17	17
32	Kota Salatiga	6	6	6
33	Kota Semarang	37	37	37
34	Kota Pekalongan	14	14	8
35	Kota Tegal	8	8	8
PROVINSI JAWA TENGAH		878	846	808
% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL				92.03

Sumber: Seksi Farmamin & Perbekkes

TABEL 10

JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	STRATA POSYANDU								POSYANDU AKTIF*		JUMLAH POSBINDU PTM**	
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH		%
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kab.Cilacap	38	162	7.4	469	21.6	754	34.7	791	36.4	2,176	1,545	71.0	289
2	Kab.Banyumas	39	49	1.9	499	19.7	1,239	49.0	744	29.4	2,531	1,983	78.3	482
3	Kab.Purbalingga	22	3	0.2	56	4.6	309	25.3	855	69.9	1,223	1,164	95.2	288
4	Kab.Banjarnegara	35	61	3.9	289	18.3	556	35.1	677	42.8	1,583	1,233	77.9	300
5	Kab.Kebumen	35	14	0.7	209	9.8	703	33.1	1,197	56.4	2,123	1,900	89.5	437
6	Kab.Purworejo	27	60	3.7	494	30.2	603	36.8	480	29.3	1,637	1,083	66.2	584
7	Kab.Wonosobo	24	21	1.7	186	14.8	427	34.0	622	49.5	1,256	1,049	83.5	323
8	Kab.Magelang	29	77	3.2	567	23.6	873	36.3	890	37.0	2,407	1,763	73.2	361
9	Kab.Boyolali	25	2	0.1	249	13.4	814	43.9	789	42.6	1,854	1,603	86.5	137
10	Kab.Klaten	34	3	0.1	31	1.4	1,041	45.8	1,197	52.7	2,272	2,238	98.5	488
11	Kab.Sukoharjo	12	1	0.1	23	1.9	489	41.1	676	56.9	1,189	1,165	98.0	160
12	Kab.Wonogiri	34	106	4.9	750	34.9	897	41.8	394	18.4	2,147	1,291	60.1	147
13	Kab.Karanganyar	21	31	2.2	249	17.6	706	49.9	428	30.3	1,414	1,134	80.2	194
14	Kab.Sragen	25	29	1.8	659	41.3	660	41.4	248	15.5	1,596	908	56.9	238
15	Kab.Grobogan	30	285	17.5	520	32.0	541	33.3	280	17.2	1,626	821	50.5	276
16	Kab.Blora	26	183	14.1	713	54.8	296	22.8	108	8.3	1,300	404	31.1	309
17	Kab.Rembang	17	30	2.4	402	32.8	604	49.2	191	15.6	1,227	795	64.8	337
18	Kab.Pati	29	26	1.6	373	23.2	689	42.9	518	32.3	1,606	1,207	75.2	247
19	Kab.Kudus	19	0	0.0	193	23.5	435	52.9	195	23.7	823	630	76.5	111
20	Kab.Jepara	21	8	0.7	427	37.8	476	42.2	218	19.3	1,129	694	61.5	206
21	Kab.Demak	27	3	0.2	291	23.1	581	46.0	387	30.7	1,262	968	76.7	263
22	Kab.Semarang	26	4	0.2	389	23.2	464	27.7	820	48.9	1,677	1,284	76.6	255
23	Kab.Temanggung	26	20	1.3	104	6.9	586	38.7	805	53.1	1,515	1,391	91.8	326
24	Kab.Kendal	30	215	15.4	642	46.0	408	29.2	130	9.3	1,395	538	38.6	288
25	Kab.Batang	21	0	0.0	231	18.8	433	35.3	562	45.8	1,226	995	81.2	234
26	Kab.Pekalongan	27	102	7.4	326	23.5	610	44.0	347	25.1	1,385	957	69.1	293
27	Kab.Pemalang	25	124	10.3	531	44.1	408	33.9	140	11.6	1,203	548	45.6	153
28	Kab.Tegal	29	51	3.4	191	12.6	914	60.2	362	23.8	1,518	1,276	84.1	297
29	Kab.Brebes	38	92	5.0	927	50.7	654	35.7	157	8.6	1,830	811	44.3	245
30	Kota Magelang	5	0	0.0	33	16.8	65	33.0	99	50.3	197	164	83.2	23
31	Kota Surakarta	17	0	0.0	62	10.4	32	5.4	500	84.2	594	532	89.6	61
32	Kota Salatiga	6	9	3.2	44	15.8	158	56.8	67	24.1	278	225	80.9	37
33	Kota Semarang	37	39	2.4	156	9.8	594	37.2	808	50.6	1,597	1,402	87.8	137
34	Kota Pekalongan	14	2	0.5	75	18.2	234	56.9	100	24.3	411	334	81.3	41
35	Kota Tegal	8	0	0.0	1	0.5	42	20.7	160	78.8	203	202	99.5	41
PROVINSI JAWA TENGAH		878	1,812	3.7	11,361	23.0	19295	39.1	16,942	34.3	49,410	36,237	73.3	8,608
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA											1.9			

Sumber: Data Program

*Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri

**PTM: Penyakit Tidak Menular

TABEL 11

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PUSKESMAS	1	0	1	710	1,307	2,017	711	1,307	2,018	143	626	769	1	4	5	144	630	774
1	Kab.Cilacap	0	0	0	34	42	76	34	42	76	3	30	33	0	0	0	3	30	33
2	Kab.Banyumas	0	0	0	31	75	106	31	75	106	10	27	37	0	1	1	10	28	38
3	Kab.Purbalingga	0	0	0	17	34	51	17	34	51	3	15	18	0	0	0	3	15	18
4	Kab.Banjarnegara	0	0	0	16	19	35	16	19	35	3	11	14	0	0	0	3	11	14
5	Kab.Kebumen	0	0	0	31	42	73	31	42	73	4	26	30	0	0	0	4	26	30
6	Kab.Purworejo	0	0	0	19	34	53	19	34	53	11	23	34	0	0	0	11	23	34
7	Kab.Wonosobo	0	0	0	22	23	45	22	23	45	3	19	22	0	0	0	3	19	22
8	Kab.Magelang	1	0	1	13	36	49	14	36	50	4	27	31	0	0	0	4	27	31
9	Kab.Boyolali	0	0	0	11	26	37	11	26	37	5	20	25	0	0	0	5	20	25
10	Kab.Klaten	0	0	0	25	62	87	25	62	87	6	33	39	0	0	0	6	33	39
11	Kab.Sukoharjo	0	0	0	25	36	61	25	36	61	5	20	25	0	0	0	5	20	25
12	Kab.Wonogiri	0	0	0	17	36	53	17	36	53	5	25	30	0	0	0	5	25	30
13	Kab.Karanganyar	0	0	0	21	41	62	21	41	62	11	12	23	0	0	0	11	12	23
14	Kab.Sragen	0	0	0	24	36	60	24	36	60	7	15	22	0	0	0	7	15	22
15	Kab.Grobogan	0	0	0	19	43	62	19	43	62	4	17	21	0	0	0	4	17	21
16	Kab.Blora	0	0	0	21	39	60	21	39	60	0	16	16	0	0	0	0	16	16
17	Kab.Rembang	0	0	0	13	30	43	13	30	43	5	12	17	0	0	0	5	12	17
18	Kab.Pati	0	0	0	27	48	75	27	48	75	4	14	18	1	0	1	5	14	19
19	Kab.Kudus	0	0	0	23	35	58	23	35	58	1	17	18	0	0	0	1	17	18
20	Kab.Jepara	0	0	0	37	63	100	37	63	100	3	19	22	0	0	0	3	19	22
21	Kab.Demak	0	0	0	17	37	54	17	37	54	4	21	25	0	0	0	4	21	25
22	Kab.Semarang	0	0	0	13	29	42	13	29	42	6	21	27	0	0	0	6	21	27
23	Kab.Temanggung	0	0	0	10	22	32	10	22	32	4	21	25	0	0	0	4	21	25
24	Kab.Kendal	0	0	0	23	39	62	23	39	62	3	14	17	0	0	0	3	14	17
25	Kab.Batang	0	0	0	19	24	43	19	24	43	0	6	6	0	0	0	0	6	6
26	Kab.Pekalongan	0	0	0	18	27	45	18	27	45	4	12	16	0	0	0	4	12	16
27	Kab.Pemalang	0	0	0	25	40	65	25	40	65	5	14	19	0	0	0	5	14	19
28	Kab.Tegal	0	0	0	32	39	71	32	39	71	6	19	25	0	0	0	6	19	25
29	Kab.Brebes	0	0	0	51	49	100	51	49	100	7	11	18	0	0	0	7	11	18
30	Kota Magelang	0	0	0	2	15	17	2	15	17	1	8	9	0	2	2	1	10	11
31	Kota Surakarta	0	0	0	16	40	56	16	40	56	1	22	23	0	0	0	1	22	23
32	Kota Salatiga	0	0	0	12	25	37	12	25	37	1	12	13	0	0	0	1	12	13
33	Kota Semarang	0	0	0	9	70	79	9	70	79	1	29	30	0	1	1	1	30	31
34	Kota Pekalongan	0	0	0	14	29	43	14	29	43	2	12	14	0	0	0	2	12	14
35	Kota Tegal	0	0	0	3	22	25	3	22	25	1	6	7	0	0	0	1	6	7

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS ^a			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II	RUMAH SAKIT	2,200	1,339	3,539	1,229	1,569	2,798	3,429	2,908	6,337	129	329	458	64	98	162	193	427	620
1	Kab.Cilacap	51	19	70	47	41	88	98	60	158	6	8	14	0	0	0	6	8	14
2	Kab.Banyumas	194	77	271	103	93	196	297	170	467	15	31	46	10	5	15	25	36	61
3	Kab.Purbalingga	31	10	41	28	27	55	59	37	96	2	9	11	1	1	2	3	10	13
4	Kab.Banjarnegara	19	12	31	15	10	25	34	22	56	0	7	7	0	0	0	0	7	7
5	Kab.Kebumen	56	35	91	73	75	148	129	110	239	1	13	14	1	1	2	2	14	16
6	Kab.Purworejo	47	23	70	25	35	60	72	58	130	4	8	12	0	3	3	4	11	15
7	Kab.Wonosobo	28	14	42	8	16	24	36	30	66	2	3	5	0	3	3	2	6	8
8	Kab.Magelang	28	21	49	10	25	35	38	46	84	2	3	5	0	1	1	2	4	6
9	Kab.Boyolali	64	31	95	32	27	59	96	58	154	3	13	16	0	4	4	3	17	20
10	Kab.Klaten	108	69	177	54	74	128	162	143	305	3	22	25	7	5	12	10	27	37
11	Kab.Sukoharjo	104	72	176	48	79	127	152	151	303	1	12	13	5	8	13	6	20	26
12	Kab.Wonogiri	32	15	47	38	24	62	70	39	109	1	7	8	0	1	1	1	8	9
13	Kab.Karanganyar	38	17	55	22	28	50	60	45	105	4	5	9	0	2	2	4	7	11
14	Kab.Sragen	54	32	86	29	51	80	83	83	166	0	10	10	2	1	3	2	11	13
15	Kab.Grobogan	50	26	76	26	41	67	76	67	143	4	6	10	1	0	1	5	6	11
16	Kab.Blora	32	13	45	18	32	50	45	95	95	3	4	7	0	1	1	3	5	8
17	Kab.Rembang	19	11	30	13	30	43	32	41	73	1	2	3	0	2	2	1	4	5
18	Kab.Pati	57	30	87	43	66	109	100	96	196	2	10	12	0	1	1	2	11	13
19	Kab.Kudus	83	44	127	45	52	97	128	96	224	5	8	13	2	3	5	7	11	18
20	Kab.Jepara	28	31	59	36	47	83	64	78	142	3	7	10	0	0	0	3	7	10
21	Kab.Demak	29	29	58	20	18	38	49	47	96	3	5	8	0	2	2	3	7	10
22	Kab.Semarang	50	40	90	16	35	51	66	75	141	7	7	14	1	5	6	8	12	20
23	Kab.Temanggung	42	18	60	17	29	46	59	47	106	4	2	6	0	2	2	4	4	8
24	Kab.Kendal	19	16	35	12	11	23	31	27	58	1	7	8	0	0	0	1	7	8
25	Kab.Batang	17	16	33	13	14	27	30	30	60	0	2	2	0	0	0	0	2	2
26	Kab.Pekalongan	17	9	26	6	13	19	23	22	45	2	4	6	0	0	0	2	4	6
27	Kab.Pemalang	56	28	84	34	28	62	90	56	146	2	5	7	1	0	1	3	5	8
28	Kab.Tegal	58	24	82	40	58	98	98	82	180	1	4	5	0	2	2	1	6	7
29	Kab.Brebes	65	16	81	51	35	86	116	51	167	5	6	11	0	1	1	5	7	12
30	Kota Magelang	56	32	88	29	47	76	85	79	164	3	9	12	4	1	5	7	10	17
31	Kota Surakarta	188	124	312	81	123	204	269	247	516	9	29	38	8	15	23	17	44	61
32	Kota Salatiga	33	32	65	26	22	48	59	54	113	2	7	9	1	4	5	3	11	14
33	Kota Semarang	355	305	660	107	205	312	462	510	972	19	37	56	18	23	41	37	60	97
34	Kota Pekalongan	49	29	78	40	37	77	89	66	155	5	10	15	0	1	1	5	11	16
35	Kota Tegal	43	19	62	24	21	45	67	40	107	4	7	11	2	0	2	6	7	13
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	179	159	338	962	1,475	2,437	1,141	1,634	2,775	109	338	447	7	17	24	116	355	471
IV	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & UPT	0	2	2	3	13	16	3	15	18	0	1	1	0	0	0	0	1	1
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI & UPT	1	9	10	5	24	29	6	33	39	0	1	1	0	0	0	0	1	1
PROVINSI JAWA TENGAH ^b		2,219	1,362	3,581	2,344	3,670	6,014	4,563	5,032	9,595	311	1,081	1,392	67	112	179	378	1,193	1,571
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^b				10.3			17.3			27.6			4.0			0.5			4.5

Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 12

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	PERAWAT ^a			BIDAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
I	PUSKESMAS	3,529	5,628	9,157	15,283
1	Kab.Cilacap	280	289	569	783
2	Kab.Banyumas	150	202	352	638
3	Kab.Purbalingga	122	161	283	358
4	Kab.Banjarnegara	142	168	310	544
5	Kab.Kebumen	144	232	376	738
6	Kab.Purworejo	89	161	250	486
7	Kab.Wonosobo	76	100	176	357
8	Kab.Magelang	65	149	214	439
9	Kab.Boyolali	67	125	192	335
10	Kab.Klaten	59	135	194	450
11	Kab.Sukoharjo	42	171	213	401
12	Kab.Wonogiri	128	132	260	382
13	Kab.Karanganyar	81	158	239	388
14	Kab.Sragen	88	234	322	495
15	Kab.Grobogan	175	314	489	630
16	Kab.Blora	142	216	358	554
17	Kab.Rembang	113	180	293	406
18	Kab.Pati	146	205	351	641
19	Kab.Kudus	78	136	214	388
20	Kab.Jepara	135	176	311	352
21	Kab.Demak	108	218	326	506
22	Kab.Semarang	55	113	168	329
23	Kab.Temanggung	66	115	181	417
24	Kab.Kendal	135	240	375	530
25	Kab.Batang	75	131	206	412
26	Kab.Pekalongan	110	162	272	470
27	Kab.Pemalang	110	133	243	600
28	Kab.Tegal	125	200	325	794
29	Kab.Brebes	271	244	515	968
30	Kota Magelang	6	41	47	18
31	Kota Surakarta	26	103	129	113
32	Kota Salatiga	12	39	51	43
33	Kota Semarang	34	122	156	126
34	Kota Pekalongan	39	68	107	85
35	Kota Tegal	35	55	90	107

NO	UNIT KERJA	PERAWAT ^a			BIDAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
II	RUMAH SAKIT	10,111	22,864	32,975	5,864
1	Kab.Cilacap	251	406	657	213
2	Kab.Banyumas	841	1,424	2,265	357
3	Kab.Purbalingga	201	486	687	176
4	Kab.Banjarnegara	167	319	486	85
5	Kab.Kebumen	387	699	1,086	219
6	Kab.Purworejo	163	399	562	114
7	Kab.Wonosobo	159	255	414	54
8	Kab.Magelang	69	274	343	56
9	Kab.Boyolali	189	609	798	124
10	Kab.Klaten	405	886	1,291	167
11	Kab.Sukoharjo	360	937	1,297	137
12	Kab.Wonogiri	118	342	460	87
13	Kab.Karanganyar	158	386	544	122
14	Kab.Sragen	237	601	838	241
15	Kab.Grobogan	156	480	636	156
16	Kab.Blora	152	377	529	117
17	Kab.Rembang	120	207	327	61
18	Kab.Pati	318	844	1,162	278
19	Kab.Kudus	386	898	1,284	275
20	Kab.Jepara	323	499	822	143
21	Kab.Demak	124	269	393	68
22	Kab.Semarang	178	531	709	114
23	Kab.Temanggung	183	418	601	86
24	Kab.Kendal	91	219	310	85
25	Kab.Batang	183	328	511	132
26	Kab.Pekalongan	26	33	59	5
27	Kab.Pemalang	217	513	730	256
28	Kab.Tegal	297	611	908	211
29	Kab.Brebes	345	457	802	315
30	Kota Magelang	398	817	1,215	117
31	Kota Surakarta	1,019	2,424	3,443	352
32	Kota Salatiga	189	425	614	142
33	Kota Semarang	1,210	3,438	4,648	444
34	Kota Pekalongan	229	439	668	208
35	Kota Tegal	262	614	876	147
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	852	2,122	2,974	2,545
IV	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & UPT	91	49	140	79
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI & UPT	21	57	78	1
PROVINSI JAWA TENGAH ^b		14,293	30,427	44,720	23,206
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^b				128.8	66.8

Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3; b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 13

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PUSKESMAS	267	998	1,265	351	697	1,048	134	965	1,099
1	Kab.Cilacap	19	39	58	19	23	42	2	33	35
2	Kab.Banyumas	12	87	99	22	45	67	2	51	53
3	Kab.Purbalingga	5	36	41	10	23	33	4	27	31
4	Kab.Banjarnegara	4	53	57	12	46	58	2	63	65
5	Kab.Kebumen	13	41	54	17	39	56	5	43	48
6	Kab.Purworejo	9	27	36	10	19	29	7	26	33
7	Kab.Wonosobo	1	33	34	9	16	25	4	28	32
8	Kab.Magelang	0	22	22	9	20	29	3	23	26
9	Kab.Boyolali	2	22	24	11	13	24	3	24	27
10	Kab.Klaten	20	49	69	15	39	54	9	46	55
11	Kab.Sukoharjo	1	3	4	6	13	19	3	17	20
12	Kab.Wonogiri	12	30	42	18	14	32	8	25	33
13	Kab.Karanganyar	7	6	13	9	17	26	5	15	20
14	Kab.Sragen	13	16	29	9	20	29	6	22	28
15	Kab.Grobogan	9	23	32	12	23	35	6	33	39
16	Kab.Blora	4	35	39	13	19	32	1	40	41
17	Kab.Rembang	6	15	21	4	10	14	4	14	18
18	Kab.Pati	14	32	46	13	18	31	3	27	30
19	Kab.Kudus	17	27	44	6	18	24	2	21	23
20	Kab.Jepara	10	41	51	9	19	28	3	32	35
21	Kab.Demak	4	20	24	10	12	22	6	24	30
22	Kab.Semarang	6	34	40	9	20	29	3	29	32
23	Kab.Temanggung	0	5	5	8	20	28	5	18	23
24	Kab.Kendal	5	27	32	8	6	14	0	25	25
25	Kab.Batang	11	18	29	2	11	13	2	21	23
26	Kab.Pekalongan	12	29	41	12	21	33	8	28	36
27	Kab.Pemalang	15	39	54	15	17	32	3	30	33
28	Kab.Tegal	6	37	43	11	31	42	6	37	43
29	Kab.Brebes	16	50	66	17	42	59	7	49	56
30	Kota Magelang	0	3	3	0	7	7	0	9	9
31	Kota Surakarta	3	30	33	4	17	21	6	18	24
32	Kota Salatiga	1	8	9	3	6	9	1	9	10
33	Kota Semarang	5	25	30	6	21	27	2	31	33
34	Kota Pekalongan	3	27	30	9	5	14	1	17	18
35	Kota Tegal	2	9	11	4	7	11	2	10	12

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	RUMAH SAKIT	58	185	243	147	215	362	69	834	903
1	Kab.Cilacap	2	6	8	4	7	11	0	22	22
2	Kab.Banyumas	3	9	12	13	17	30	6	47	53
3	Kab.Purbalingga	0	0	0	2	3	5	1	21	22
4	Kab.Banjarnegara	0	3	3	3	3	6	1	13	14
5	Kab.Kebumen	2	9	11	5	8	13	1	23	24
6	Kab.Purworejo	1	0	1	7	10	17	2	18	20
7	Kab.Wonosobo	0	1	1	1	5	6	0	13	13
8	Kab.Magelang	2	10	12	4	5	9	4	7	11
9	Kab.Boyolali	0	2	2	3	5	8	0	32	32
10	Kab.Klaten	1	10	11	6	14	20	5	40	45
11	Kab.Sukoharjo	0	3	3	6	7	13	2	37	39
12	Kab.Wonogiri	0	1	1	1	5	6	2	11	13
13	Kab.Karanganyar	1	0	1	4	8	12	3	11	14
14	Kab.Sragen	1	5	6	6	10	16	1	18	19
15	Kab.Grobogan	2	2	4	3	2	5	0	17	17
16	Kab.Blora	0	3	3	4	6	10	3	19	22
17	Kab.Rembang	3	8	11	3	2	5	0	15	15
18	Kab.Pati	1	15	16	8	8	16	1	16	17
19	Kab.Kudus	2	9	11	0	4	4	3	27	30
20	Kab.Jepara	3	7	10	6	5	11	4	19	23
21	Kab.Demak	0	1	1	1	4	5	2	15	17
22	Kab.Semarang	0	3	3	3	2	5	0	23	23
23	Kab.Temanggung	0	0	0	2	3	5	0	13	13
24	Kab.Kendal	1	0	1	3	0	3	2	14	16
25	Kab.Batang	6	7	13	0	0	0	0	13	13
26	Kab.Pekalongan	0	1	1	0	0	0	0	5	5
27	Kab.Pemalang	0	4	4	5	10	15	2	15	17
28	Kab.Tegal	0	10	10	3	8	11	1	18	19
29	Kab.Brebes	5	8	13	1	4	5	1	19	20
30	Kota Magelang	2	8	10	1	10	11	2	30	32
31	Kota Surakarta	4	4	8	11	15	26	9	63	72
32	Kota Salatiga	3	4	7	4	6	10	0	30	30
33	Kota Semarang	10	16	26	19	11	30	9	114	123
34	Kota Pekalongan	2	5	7	2	3	5	0	17	17
35	Kota Tegal	1	11	12	3	5	8	2	19	21
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	15	38	53	9	15	24	13	137	150
IV	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & UPT	106	222	328	26	27	53	16	42	58
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI & UPT	21	24	45	4	3	7	0	4	4
PROVINSI JAWA TENGAH ^b		444	1,446	1,890	563	989	1,552	221	1,880	2,101
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^a				5.4			4.5			6.1

Sumber: Data SDM Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 14

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	AHLI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISAN MEDIK		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PUSKESMAS	193	797	990	29	28	57	50	141	191	271	1,018	1,289
1	Kab.Cilacap	5	35	40	1	1	2	0	0	0	7	35	42
2	Kab.Banyumas	6	19	25	0	1	1	0	1	1	7	26	33
3	Kab.Purbalingga	7	21	28	0	0	0	0	0	0	3	29	32
4	Kab.Banjarnegara	7	28	35	0	1	1	0	0	0	4	23	27
5	Kab.Kebumen	10	33	43	1	1	2	0	0	0	11	51	62
6	Kab.Purworejo	4	27	31	2	1	3	11	16	27	2	19	21
7	Kab.Wonosobo	6	12	18	0	1	1	0	0	0	8	21	29
8	Kab.Magelang	4	28	32	2	1	3	0	1	1	12	46	58
9	Kab.Boyolali	2	22	24	0	0	0	8	21	29	10	29	39
10	Kab.Klaten	4	34	38	0	0	0	10	21	31	10	51	61
11	Kab.Sukoharjo	8	15	23	1	2	3	1	18	19	7	28	35
12	Kab.Wonogiri	0	33	33	5	3	8	6	5	11	7	27	34
13	Kab.Karanganyar	3	23	26	0	0	0	2	24	26	8	44	52
14	Kab.Sragen	3	21	24	0	0	0	1	4	5	15	24	39
15	Kab.Grobogan	6	28	34	2	0	2	5	11	16	10	33	43
16	Kab.Blora	4	33	37	0	1	1	1	0	1	13	41	54
17	Kab.Rembang	7	16	23	0	0	0	0	0	0	16	28	44
18	Kab.Pati	3	19	22	1	0	1	0	2	2	8	28	36
19	Kab.Kudus	5	13	18	1	1	2	0	0	0	2	18	20
20	Kab.Jepara	11	34	45	6	3	9	1	2	3	13	36	49
21	Kab.Demak	9	30	39	1	0	1	2	0	2	6	25	31
22	Kab.Semarang	10	18	28	0	0	0	0	0	0	7	43	50
23	Kab.Temanggung	5	26	31	1	0	1	0	7	7	6	32	38
24	Kab.Kendal	5	26	31	2	4	6	0	0	0	4	8	12
25	Kab.Batang	6	7	13	1	0	1	0	0	0	3	17	20
26	Kab.Pekalongan	2	17	19	0	0	0	0	0	0	6	13	19
27	Kab.Pemalang	5	15	20	0	3	3	0	1	1	2	11	13
28	Kab.Tegal	10	29	39	1	1	2	1	0	1	6	36	42
29	Kab.Brebes	9	43	52	0	1	1	0	0	0	29	46	75
30	Kota Magelang	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	6	6
31	Kota Surakarta	7	27	34	0	0	0	1	6	7	10	49	59
32	Kota Salatiga	1	7	8	1	2	3	0	0	0	3	22	25
33	Kota Semarang	8	34	42	0	0	0	0	1	1	4	40	44
34	Kota Pekalongan	7	12	19	0	0	0	0	0	0	9	26	35
35	Kota Tegal	2	6	8	0	0	0	0	0	0	3	7	10

NO	UNIT KERJA	AHLI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	RUMAH SAKIT	432	1,602	2,034	883	720	1,603	382	658	1,040	646	1,775	2,421
1	Kab.Cilacap	14	27	41	23	19	42	5	15	20	15	46	61
2	Kab.Banyumas	33	86	119	74	50	124	18	39	57	47	108	155
3	Kab.Purbalingga	12	27	39	18	13	31	7	3	10	14	25	39
4	Kab.Banjarnegara	7	15	22	12	12	24	4	5	9	12	15	27
5	Kab.Kebumen	22	54	76	28	22	50	6	16	22	26	47	73
6	Kab.Purworejo	7	21	28	17	13	30	5	6	11	6	23	29
7	Kab.Wonosobo	4	21	25	5	5	10	5	13	18	5	19	24
8	Kab.Magelang	5	18	23	7	11	18	2	4	6	7	22	29
9	Kab.Boyolali	8	45	53	14	18	32	6	13	19	17	99	116
10	Kab.Klaten	20	63	83	44	31	75	18	45	63	26	104	130
11	Kab.Sukoharjo	17	71	88	55	36	91	35	54	89	45	106	151
12	Kab.Wonogiri	1	22	23	11	8	19	9	10	19	3	30	33
13	Kab.Karanganyar	9	39	48	14	8	22	13	9	22	11	42	53
14	Kab.Sragen	10	58	68	17	19	36	11	29	40	16	85	101
15	Kab.Grobogan	8	39	47	15	12	27	4	18	22	10	22	32
16	Kab.Blora	12	30	42	16	14	30	2	9	11	3	23	26
17	Kab.Rembang	10	17	27	15	11	26	4	3	7	10	24	34
18	Kab.Pati	11	41	52	33	31	64	14	23	37	11	38	49
19	Kab.Kudus	12	58	70	22	25	47	14	24	38	19	43	62
20	Kab.Jepara	6	34	40	26	12	38	12	9	21	23	37	60
21	Kab.Demak	3	15	18	8	13	21	4	9	13	13	22	35
22	Kab.Semarang	7	44	51	21	37	58	7	10	17	11	48	59
23	Kab.Temanggung	6	26	32	13	7	20	5	6	11	11	33	44
24	Kab.Kendal	2	31	33	12	7	19	5	5	10	6	10	16
25	Kab.Batang	10	15	25	13	7	20	4	6	10	13	20	33
26	Kab.Pekalongan	1	5	6	1	3	4	5	3	8	0	0	0
27	Kab.Pemalang	11	46	57	18	12	30	7	8	15	17	31	48
28	Kab.Tegal	8	38	46	20	19	39	8	15	23	19	19	38
29	Kab.Brebes	10	38	48	19	20	39	8	12	20	21	45	66
30	Kota Magelang	9	19	28	13	14	27	10	11	21	27	45	72
31	Kota Surakarta	35	166	201	83	52	135	31	68	99	65	245	310
32	Kota Salatiga	8	28	36	21	21	42	12	15	27	14	25	39
33	Kota Semarang	68	248	316	136	102	238	71	109	180	74	210	284
34	Kota Pekalongan	20	57	77	20	19	39	6	21	27	13	31	44
35	Kota Tegal	6	40	46	19	17	36	5	13	18	16	33	49
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	69	237	306	38	37	75	30	67	97	45	172	217
IV	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & UPT	32	89	121	10	5	15	0	1	1	2	2	4
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI & UPT	15	42	57	6	14	20	0	2	2	4	3	7
PROVINSI JAWA TENGAH ^b		704	2,706	3,410	938	797	1,735	458	861	1,319	959	2,936	3,895
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^a				9.8			5.0			3.8			11.2

Sumber: Data SDM Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 15

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PUSKESMAS	136	705	841	104	447	551	240	1,152	1,392
1	Kab.Cilacap	5	14	19	6	34	40	11	48	59
2	Kab.Banyumas	3	11	14	14	22	36	17	33	50
3	Kab.Purbalingga	3	13	16	7	15	22	10	28	38
4	Kab.Banjarnegara	6	16	22	6	10	16	12	26	38
5	Kab.Kebumen	7	39	46	5	11	16	12	50	62
6	Kab.Purworejo	1	7	8	3	23	26	4	30	34
7	Kab.Wonosobo	4	12	16	6	7	13	10	19	29
8	Kab.Magelang	5	25	30	1	2	3	6	27	33
9	Kab.Boyolali	4	19	23	1	17	18	5	36	41
10	Kab.Klaten	3	30	33	4	29	33	7	59	66
11	Kab.Sukoharjo	2	21	23	1	7	8	3	28	31
12	Kab.Wonogiri	6	27	33	2	13	15	8	40	48
13	Kab.Karanganyar	0	21	21	4	12	16	4	33	37
14	Kab.Sragen	5	24	29	2	13	15	7	37	44
15	Kab.Grobogan	9	22	31	2	14	16	11	36	47
16	Kab.Blora	2	12	14	4	14	18	6	26	32
17	Kab.Rembang	4	11	15	1	1	2	5	12	17
18	Kab.Pati	2	17	19	1	8	9	3	25	28
19	Kab.Kudus	3	18	21	1	14	15	4	32	36
20	Kab.Jepara	2	21	23	3	17	20	5	38	43
21	Kab.Demak	2	21	23	0	4	4	2	25	27
22	Kab.Semarang	0	24	24	5	25	30	5	49	54
23	Kab.Temanggung	7	20	27	1	5	6	8	25	33
24	Kab.Kendal	7	27	34	0	5	5	7	32	39
25	Kab.Batang	0	11	11	0	3	3	0	14	14
26	Kab.Pekalongan	2	14	16	2	13	15	4	27	31
27	Kab.Pemalang	3	9	12	4	18	22	7	27	34
28	Kab.Tegal	6	21	27	7	19	26	13	40	53
29	Kab.Brebes	11	30	41	7	28	35	18	58	76
30	Kota Magelang	0	12	12	0	4	4	0	16	16
31	Kota Surakarta	7	58	65	3	17	20	10	75	85
32	Kota Salatiga	1	8	9	0	5	5	1	13	14
33	Kota Semarang	2	38	40	0	10	10	2	48	50
34	Kota Pekalongan	9	22	31	0	6	6	9	28	37
35	Kota Tegal	3	10	13	1	2	3	4	12	16

NO	UNIT KERJA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	RUMAH SAKIT	401	2,456	2,857	208	1,243	1,451	609	3,699	4,308
1	Kab.Cilacap	12	33	45	7	30	37	19	63	82
2	Kab.Banyumas	26	92	118	28	97	125	54	189	243
3	Kab.Purbalingga	15	52	67	9	22	31	24	74	98
4	Kab.Banjarnegara	5	18	23	1	28	29	6	46	52
5	Kab.Kebumen	6	74	80	13	45	58	19	119	138
6	Kab.Purworejo	6	34	40	8	16	24	14	50	64
7	Kab.Wonosobo	3	23	26	3	25	28	6	48	54
8	Kab.Magelang	3	30	33	3	9	12	6	39	45
9	Kab.Bojolali	10	55	65	2	31	33	12	86	98
10	Kab.Klaten	24	93	117	4	61	65	28	154	182
11	Kab.Sukoharjo	20	88	108	5	54	59	25	142	167
12	Kab.Wonogiri	5	33	38	4	21	25	9	54	63
13	Kab.Karanganyar	3	51	54	5	23	28	8	74	82
14	Kab.Sragen	5	74	79	2	32	34	7	106	113
15	Kab.Grobogan	5	62	67	3	18	21	8	80	88
16	Kab.Blora	3	21	24	1	16	17	4	37	41
17	Kab.Rembang	3	16	19	2	18	20	5	34	39
18	Kab.Pati	3	51	54	6	42	48	9	93	102
19	Kab.Kudus	8	70	78	5	46	51	13	116	129
20	Kab.Jepara	12	61	73	6	22	28	18	83	101
21	Kab.Demak	6	38	44	2	16	18	8	54	62
22	Kab.Semarang	10	60	70	4	31	35	14	91	105
23	Kab.Temanggung	5	20	25	1	20	21	6	40	46
24	Kab.Kendal	1	26	27	1	14	15	2	40	42
25	Kab.Batang	4	45	49	2	22	24	6	67	73
26	Kab.Pekalongan	2	1	3	1	1	2	3	2	5
27	Kab.Pemalang	11	48	59	6	32	38	17	80	97
28	Kab.Tegal	21	121	142	7	35	42	28	156	184
29	Kab.Brebes	16	55	71	4	27	31	20	82	102
30	Kota Magelang	19	53	72	7	33	40	26	86	112
31	Kota Surakarta	46	277	323	15	105	120	61	382	443
32	Kota Salatiga	13	43	56	3	19	22	16	62	78
33	Kota Semarang	35	476	511	24	177	201	59	653	712
34	Kota Pekalongan	10	66	76	6	26	32	16	92	108
35	Kota Tegal	25	96	121	8	29	37	33	125	158
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	73	632	705	254	1,336	1,590	327	1,968	2,295
IV	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & UPT	21	56	77	11	40	51	32	96	128
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI & UPT	2	8	10	1	3	4	3	11	14
PROVINSI JAWA TENGAH ^b		610	3,733	4,343	529	2,823	3,352	1,139	6,556	7,695
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^b				12.5			9.7			22.2

Sumber: Data SDM Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 16

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PUSKESMAS	551	492	1,043	0	0	0	4,790	4,020	8,810	5,341	4,512	9,853
1	Kab.Cilacap	23	20	43	0	0	0	171	149	320	194	169	363
2	Kab.Banyumas	37	19	56	0	0	0	227	165	392	264	184	448
3	Kab.Purbalingga	25	14	39	0	0	0	119	114	233	144	128	272
4	Kab.Banjarnegara	29	38	67	0	0	0	207	171	378	236	209	445
5	Kab.Kebumen	18	17	35	0	0	0	177	173	350	195	190	385
6	Kab.Purworejo	23	7	30	0	0	0	179	168	347	202	175	377
7	Kab.Wonosobo	1	0	1	0	0	0	103	79	182	104	79	183
8	Kab.Magelang	25	25	50	0	0	0	167	146	313	192	171	363
9	Kab.Boyolali	22	20	42	0	0	0	100	98	198	122	118	240
10	Kab.Klaten	13	20	33	0	0	0	170	212	382	183	232	415
11	Kab.Sukoharjo	6	5	11	0	0	0	102	85	187	108	90	198
12	Kab.Wonogiri	36	20	56	0	0	0	112	86	198	148	106	254
13	Kab.Karanganyar	13	12	25	0	0	0	102	69	171	115	81	196
14	Kab.Sragen	2	0	2	0	0	0	120	62	182	122	62	184
15	Kab.Grobogan	31	23	54	0	0	0	204	161	365	235	184	419
16	Kab.Blora	24	22	46	0	0	0	148	140	288	172	162	334
17	Kab.Rembang	6	5	11	0	0	0	144	98	242	150	103	253
18	Kab.Pati	17	17	34	0	0	0	175	193	368	192	210	402
19	Kab.Kudus	23	15	38	0	0	0	110	88	198	133	103	236
20	Kab.Jepara	11	9	20	0	0	0	122	87	209	133	96	229
21	Kab.Demak	21	21	42	0	0	0	83	121	204	104	142	246
22	Kab.Semarang	26	23	49	0	0	0	138	125	263	164	148	312
23	Kab.Temanggung	18	29	47	0	0	0	94	112	206	112	141	253
24	Kab.Kendal	17	19	36	0	0	0	136	132	268	153	151	304
25	Kab.Batang	7	6	13	0	0	0	83	53	136	90	59	149
26	Kab.Pekalongan	31	10	41	0	0	0	213	153	366	244	163	407
27	Kab.Pemalang	1	0	1	0	0	0	141	84	225	142	84	226
28	Kab.Tegal	15	20	35	0	0	0	209	154	363	224	174	398
29	Kab.Brebes	1	0	1	0	0	0	350	284	634	351	284	635
30	Kota Magelang	2	3	5	0	0	0	29	19	48	31	22	53
31	Kota Surakarta	7	11	18	0	0	0	123	70	193	130	81	211
32	Kota Salatiga	0	0	0	0	0	0	50	26	76	50	26	76
33	Kota Semarang	17	41	58	0	0	0	50	67	117	67	108	175
34	Kota Pekalongan	0	0	0	0	0	0	85	47	132	85	47	132
35	Kota Tegal	3	1	4	0	0	0	47	29	76	50	30	80

NO	UNIT KERJA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	RUMAH SAKIT	825	875	1,700	0	0	0	13,555	13,093	26,648	14,380	13,968	28,348
1	Kab.Cilacap	29	30	59	0	0	0	336	282	618	365	312	677
2	Kab.Banyumas	53	49	102	0	0	0	1,261	853	2,114	1,314	902	2,216
3	Kab.Purbalingga	11	15	26	0	0	0	317	245	562	328	260	588
4	Kab.Banjarnegara	20	17	37	0	0	0	201	207	408	221	224	445
5	Kab.Kebumen	54	62	116	0	0	0	596	464	1,060	650	526	1,176
6	Kab.Purworejo	16	11	27	0	0	0	337	348	685	353	359	712
7	Kab.Wonosobo	12	12	24	0	0	0	210	168	378	222	180	402
8	Kab.Magelang	10	7	17	0	0	0	124	116	240	134	123	257
9	Kab.Boyolali	16	16	32	0	0	0	310	275	585	326	291	617
10	Kab.Klaten	25	18	43	0	0	0	526	460	986	551	478	1,029
11	Kab.Sukoharjo	35	46	81	0	0	0	555	497	1,052	590	543	1,133
12	Kab.Wonogiri	18	17	35	0	0	0	167	126	293	185	143	328
13	Kab.Karanganyar	6	12	18	0	0	0	213	153	366	219	165	384
14	Kab.Sragen	21	19	40	0	0	0	325	323	648	346	342	688
15	Kab.Grobogan	23	13	36	0	0	0	346	411	757	369	424	793
16	Kab.Blora	21	15	36	0	0	0	284	239	523	305	254	559
17	Kab.Rembang	13	10	23	0	0	0	181	160	341	194	170	364
18	Kab.Pati	31	58	89	0	0	0	468	585	1,053	499	643	1,142
19	Kab.Kudus	41	70	111	0	0	0	523	795	1,318	564	865	1,429
20	Kab.Jepara	25	17	42	0	0	0	362	240	602	387	257	644
21	Kab.Demak	10	6	16	0	0	0	190	216	406	200	222	422
22	Kab.Semarang	18	11	29	0	0	0	352	298	650	370	309	679
23	Kab.Temanggung	10	16	26	0	0	0	183	223	406	193	239	432
24	Kab.Kendal	7	1	8	0	0	0	107	120	227	114	121	235
25	Kab.Batang	16	11	27	0	0	0	214	157	371	230	168	398
26	Kab.Pekalongan	12	12	24	0	0	0	105	129	234	117	141	258
27	Kab.Pemalang	14	10	24	0	0	0	455	390	845	469	400	869
28	Kab.Tegal	43	21	64	0	0	0	446	338	784	489	359	848
29	Kab.Brebes	20	20	40	0	0	0	538	394	932	558	414	972
30	Kota Magelang	17	10	27	0	0	0	388	343	731	405	353	758
31	Kota Surakarta	36	34	70	0	0	0	991	992	1,983	1,027	1,026	2,053
32	Kota Salatiga	24	14	38	0	0	0	266	223	489	290	237	527
33	Kota Semarang	97	157	254	0	0	0	1,047	1,648	2,695	1,144	1,805	2,949
34	Kota Pekalongan	13	11	24	0	0	0	311	319	630	324	330	654
35	Kota Tegal	8	27	35	0	0	0	320	356	676	328	383	711
III	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	386	366	752	0	0	0	2,386	3,503	5,889	2,772	3,869	6,641
IV	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA & U	346	286	632	0	0	0	1,054	993	2,047	1,400	1,279	2,679
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI & U	24	27	51	0	0	0	154	155	309	178	182	360
	PROVINSI JAWA TENGAH ^a	1,783	1,788	3,571	0	0	0	20,752	20,480	41,232	22,535	22,268	44,803

Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : a) Tenaga penunjang/pendukung kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 17

**CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	2	3	4
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	15,776,380	45.4
2	PBI APBD	3,329,231	9.6
SUB JUMLAH PBI		19,105,611	55.0
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	6,657,786	19.2
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	3,766,041	10.8
3	Bukan Pekerja (BP)	696,039	2.0
SUB JUMLAH NON PBI		11,119,866	32.0
JUMLAH		30,225,477	87.1

Sumber : BPJS Kesehatan

TABEL 18

PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	DESA		
			JUMLAH	YG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Kab.Cilacap	38	269	231	85.9
2	Kab.Banyumas	39	301	301	100.0
3	Kab.Purbalingga	22	224	224	100.0
4	Kab.Banjarnegara	35	266	155	58.3
5	Kab.Kebumen	35	449	449	100.0
6	Kab.Purworejo	27	469	469	100.0
7	Kab.Wonosobo	24	236	236	100.0
8	Kab.Magelang	29	367	358	97.5
9	Kab.Boyolali	25	261	261	100.0
10	Kab.Klaten	34	391	362	92.6
11	Kab.Sukoharjo	12	150	150	100.0
12	Kab.Wonogiri	34	251	248	98.8
13	Kab.Karanganyar	21	162	162	100.0
14	Kab.Sragen	25	196	103	52.6
15	Kab.Grobogan	30	273	254	93.0
16	Kab.Blora	26	271	271	100.0
17	Kab.Rembang	17	287	287	100.0
18	Kab.Pati	29	401	375	93.5
19	Kab.Kudus	19	123	121	98.4
20	Kab.Jepara	21	184	144	78.3
21	Kab.Demak	27	243	243	100.0
22	Kab.Semarang	26	208	208	100.0
23	Kab.Temanggung	26	266	266	100.0
24	Kab.Kendal	30	266	266	100.0
25	Kab.Batang	21	239	234	97.9
26	Kab.Pekalongan	27	272	253	93.0
27	Kab.Pemalang	25	211	211	100.0
28	Kab.Tegal	29	281	281	100.0
29	Kab.Brebes	38	292	292	100.0
PROVINSI JAWA TENGAH		791	7,809	7,415	95.0

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

TABEL 19

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBD KAB/KOTA	Rp14,008,555,084,951.00	96.01
	a. Belanja Langsung	Rp8,345,241,580,590.00	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp4,001,413,693,361.00	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp1,661,899,811,000.00	
	- DAK fisik	Rp869,717,310,000.00	
	1. Reguler	Rp688,434,099,000.00	
	2. Penugasan	Rp181,283,211,000.00	
	3. Afirmasi		
	- DAK non fisik	Rp792,182,501,000.00	
	1. BOK	Rp663,525,735,000.00	
	2. Akreditasi	Rp51,564,766,000.00	
	3. Jampersal	Rp77,092,000,000.00	
2	APBD PROVINSI	Rp509,044,518,000.00	3.49
	a. Belanja Langsung	Rp409,046,558,000.00	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp95,846,710,000.00	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK	Rp4,151,250,000.00	
3	APBN :	Rp57,277,477,000.00	0.39
	a. Dana Dekonsentrasi	Rp57,277,477,000.00	
	b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi		
4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)	Rp15,415,032,454.00	0.11
	a. ADD GF AIDS NFMC	Rp2,210,655,762.00	
	b. GF TB	Rp13,204,376,692.00	
5	SUMBER PEMERINTAH LAIN*		0.00
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		Rp14,590,292,112,405.00	
TOTAL APBD PROV DAN KAB/KOTA		Rp96,016,392,441,569.50	
% APBD KESEHATAN THD APBD			10.9
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA		302,234.29	

Sumber: Profil kab/kota & pengelola program provinsi

TABEL 20

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN								
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	14,796	108	14,904	14,079	47	14,126	28,875	155	29,030
2	Kab.Banyumas	39	13,877	94	13,971	12,638	64	12,702	26,515	158	26,673
3	Kab.Purbalingga	22	7,636	23	7,659	7,140	22	7,162	14,776	45	14,821
4	Kab.Banjarnegara	35	8,072	63	8,135	7,661	73	7,734	15,733	136	15,869
5	Kab.Kebumen	35	10,091	77	10,168	9,535	71	9,606	19,626	148	19,774
6	Kab.Purworejo	27	4,573	42	4,615	4,322	38	4,360	8,895	80	8,975
7	Kab.Wonosobo	24	6,557	51	6,608	6,058	38	6,096	12,615	89	12,704
8	Kab.Magelang	29	8,806	54	8,860	8,341	61	8,402	17,147	115	17,262
9	Kab.Boyolali	25	6,968	44	7,012	6,740	39	6,779	13,708	83	13,791
10	Kab.Klaten	34	8,058	54	8,112	7,623	49	7,672	15,681	103	15,784
11	Kab.Sukoharjo	12	6,394	26	6,420	6,154	18	6,172	12,548	44	12,592
12	Kab.Wonogiri	34	5,403	30	5,433	5,427	23	5,450	10,830	53	10,883
13	Kab.Karanganyar	21	6,248	4	6,252	5,950	0	5,950	12,198	4	12,202
14	Kab.Sragen	25	7,254	46	7,300	6,802	26	6,828	14,056	72	14,128
15	Kab.Grobogan	30	11,169	9	11,178	10,390	7	10,397	21,559	16	21,575
16	Kab.Blora	26	6,069	58	6,127	5,563	44	5,607	11,632	102	11,734
17	Kab.Rembang	17	4,853	39	4,892	4,393	46	4,439	9,246	85	9,331
18	Kab.Pati	29	8,816	72	8,888	8,929	51	8,980	17,745	123	17,868
19	Kab.Kudus	19	8,246	31	8,277	6,842	41	6,883	15,088	72	15,160
20	Kab.Jepara	21	10,224	39	10,263	10,073	27	10,100	20,297	66	20,363
21	Kab.Demak	27	10,657	42	10,699	10,121	19	10,140	20,778	61	20,839
22	Kab.Semarang	26	7,227	51	7,278	6,915	42	6,957	14,142	93	14,235
23	Kab.Temanggung	26	5,575	44	5,619	4,980	42	5,022	10,555	86	10,641
24	Kab.Kendal	30	8,130	32	8,162	7,263	30	7,293	15,393	62	15,455
25	Kab.Batang	21	6,554	49	6,603	6,049	43	6,092	12,603	92	12,695
26	Kab.Pekalongan	27	8,713	94	8,807	7,830	50	7,880	16,543	144	16,687
27	Kab.Pemalang	25	13,051	51	13,102	12,746	29	12,775	25,797	80	25,877
28	Kab.Tegal	29	14,024	27	14,051	12,921	21	12,942	26,945	48	26,993
29	Kab.Brebes	38	16,618	17	16,635	15,082	16	15,098	31,700	33	31,733
30	Kota Magelang	5	782	4	786	750	4	754	1,532	8	1,540
31	Kota Surakarta	17	4,803	12	4,815	4,800	9	4,809	9,603	21	9,624
32	Kota Salatiga	6	1,352	14	1,366	1,190	9	1,199	2,542	23	2,565
33	Kota Semarang	37	11,756	25	11,781	11,990	25	12,015	23,746	50	23,796
34	Kota Pekalongan	14	2,940	21	2,961	2,983	12	2,995	5,923	33	5,956
35	Kota Tegal	8	2,233	21	2,254	1,981	4	1,985	4,214	25	4,239
PROVINSI JAWA TENGAH		878	278,525	1,468	279,993	262,261	1,140	263,401	540,786	2,608	543,394
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)				5.2			4.3			4.8	

Sumber: Profil kab/kota & pengelola program provinsi

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

TABEL 21

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU															
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
				< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kab.Cilacap	38	28,875	0	2	1	3	1	0	1	2	2	3	6	11	3	5	8	16
2	Kab.Banyumas	39	26,515	0	2	0	2	0	4	0	4	0	3	1	4	0	9	1	10
3	Kab.Purbalingga	22	14,776	1	1	2	4	0	3	1	4	0	3	1	4	1	7	4	12
4	Kab.Banjarnegara	35	15,733	0	7	1	8	0	0	0	0	0	8	6	14	0	15	7	22
5	Kab.Kebumen	35	19,626	0	1	1	2	0	1	0	1	0	2	4	6	0	4	5	9
6	Kab.Purworejo	27	8,895	0	4	0	4	0	0	3	3	1	5	3	9	1	9	6	16
7	Kab.Wonosobo	24	12,615	0	4	0	4	0	0	3	3	1	5	3	9	1	9	6	16
8	Kab.Magelang	29	17,147	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	3	6	0	4	4	8
9	Kab.Boyolali	25	13,708	0	0	1	1	0	1	0	1	0	8	3	11	0	9	4	13
10	Kab.Klaten	34	15,681	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	3	11	0	9	3	12
11	Kab.Sukoharjo	12	12,548	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	3	0	2	3	5
12	Kab.Wonogiri	34	10,830	0	1	2	3	0	0	0	0	0	2	4	6	0	3	6	9
13	Kab.Karanganyar	21	12,198	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	1	4	0	4	2	6
14	Kab.Sragen	25	14,056	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	1	6	1	5	1	7
15	Kab.Grobogan	30	21,559	0	11	1	12	0	0	0	0	3	18	3	24	3	29	4	36
16	Kab.Blora	26	11,632	0	5	0	5	0	1	0	1	0	5	0	5	0	11	0	11
17	Kab.Rembang	17	9,246	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	1	4	0	6	1	7
18	Kab.Pati	29	17,745	0	3	0	3	0	0	0	0	0	4	1	5	0	7	1	8
19	Kab.Kudus	19	15,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	7	4	11
20	Kab.Jepara	21	20,297	0	9	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13
21	Kab.Demak	27	20,778	0	2	0	2	0	0	2	2	0	6	3	9	0	8	5	13
22	Kab.Semarang	26	14,142	0	1	0	1	0	5	1	6	1	1	1	3	1	7	2	10
23	Kab.Temanggung	26	10,555	0	1	0	1	0	0	1	1	0	3	4	7	0	4	5	9
24	Kab.Kendal	30	15,393	0	2	4	6	0	0	0	0	0	7	3	10	0	9	7	16
25	Kab.Batang	21	12,603	0	2	4	6	0	0	0	0	0	7	1	8	0	9	5	14
26	Kab.Pekalongan	27	16,543	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6	1	7	0	8	2	10
27	Kab.Pemalang	25	25,797	0	1	1	2	0	1	0	1	0	4	6	10	0	6	7	13
28	Kab.Tegal	29	26,945	0	0	0	0	0	3	2	5	1	5	1	7	1	8	3	12
29	Kab.Brebes	38	31,700	0	4	2	6	0	4	0	4	1	19	7	27	1	27	9	37
30	Kota Magelang	5	1,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	2
31	Kota Surakarta	17	9,603	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	3	4
32	Kota Salatiga	6	2,542	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
33	Kota Semarang	37	23,746	0	3	1	4	0	0	0	0	0	7	7	14	0	10	8	18
34	Kota Pekalongan	14	5,923	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	1	4	0	5	1	6
35	Kota Tegal	8	4,214	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3
PROVINSI JAWA TENGAH		878	540,786	1	77	29	107	1	26	15	42	12	166	89	267	14	269	133	416
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																			76.9

Sumber: Profil kab/kota & pengelola program provinsi

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas

- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

TABEL 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN IBU					
			PERDARAHAN	HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN	INFEKSI	GANGGUAN SISTEM PEREDARAN DARAH *	GANGGUAN METABOLIK**	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Cilacap	38	5	6	0	0	0	5
2	Kab.Banyumas	39	1	2	1	3	0	3
3	Kab.Purbalingga	22	7	3	0	1	1	0
4	Kab.Banjarnegara	35	4	6	3	4	0	5
5	Kab.Kebumen	35	3	4	0	0	0	2
6	Kab.Purworejo	27	5	1	0	0	0	10
7	Kab.Wonosobo	24	1	6	0	2	0	7
8	Kab.Magelang	29	3	2	0	0	0	3
9	Kab.Boyolali	25	2	8	1	1	0	1
10	Kab.Klaten	34	2	4	1	0	0	5
11	Kab.Sukoharjo	12	1	1	0	0	0	3
12	Kab.Wonogiri	34	0	6	0	0	0	3
13	Kab.Karanganyar	21	2	3	0	0	0	1
14	Kab.Sragen	25	1	4	0	0	0	2
15	Kab.Grobogan	30	5	11	1	14	1	4
16	Kab.Blora	26	2	1	1	3	0	4
17	Kab.Rembang	17	0	1	1	0	0	5
18	Kab.Pati	29	1	1	3	1	0	2
19	Kab.Kudus	19	4	5	0	0	0	2
20	Kab.Jepara	21	2	6	0	5	0	0
21	Kab.Demak	27	5	2	0	4	0	2
22	Kab.Semarang	26	5	3	0	2	0	0
23	Kab.Temanggung	26	2	1	0	0	0	6
24	Kab.Kendal	30	5	3	0	0	0	8
25	Kab.Batang	21	1	4	3	3	0	3
26	Kab.Pekalongan	27	5	2	0	1	0	2
27	Kab.Pemalang	25	3	6	1	0	0	3
28	Kab.Tegal	29	6	1	1	0	0	4
29	Kab.Brebes	38	10	16	3	3	0	5
30	Kota Magelang	5	0	1	0	0	0	1
31	Kota Surakarta	17	1	2	0	1	0	0
32	Kota Salatiga	6	1	0	0	0	0	1
33	Kota Semarang	37	4	0	4	0	0	10
34	Kota Pekalongan	14	3	0	1	0	0	2
35	Kota Tegal	8	0	1	0	1	0	1
PROVINSI JAWA TENGAH		878	102	123	25	49	2	115

Sumber: Profil kab/kota & pengelola program provinsi

* Jantung, Stroke, dll

** Diabetes Mellitus, dll

TABEL 24

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL*	IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL											
				Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kab.Cilacap	38	31,282	624	2.0	773	2.5	465	1.5	286	0.9	188	0.6	1,712	5.5
2	Kab.Banyumas	39	26,963	9	0.0	4	0.0	2,851	10.6	7,178	26.6	11,118	41.2	21,151	78.4
3	Kab.Purbalingga	22	16,375	1,064	6.5	4,050	24.7	3,763	23.0	1,761	10.8	930	5.7	10,504	64.1
4	Kab.Banjarnegara	35	18,101	0	0.0	2	0.0	125	0.7	1,331	7.4	1,511	8.3	2,969	16.4
5	Kab.Kebumen	35	21,669	261	1.2	368	1.7	726	3.4	971	4.5	901	4.2	2,966	13.7
6	Kab.Purworejo	27	8,907	1,750	19.6	1,621	18.2	350	3.9	81	0.9	70	0.8	2,122	23.8
7	Kab.Wonosobo	24	14,335	51	0.4	139	1.0	1,917	13.4	1,205	8.4	1,780	12.4	5,041	35.2
8	Kab.Magelang	29	19,467	9,967	51.2	9,414	48.4	3,985	20.5	1,862	9.6	962	4.9	16,223	83.3
9	Kab.Boyolali	25	15,101	8,589	56.9	8,226	54.5	3,051	20.2	1,547	10.2	1,035	6.9	13,859	91.8
10	Kab.Klaten	34	16,835	1,374	8.2	4,060	24.1	5,776	34.3	3,199	19.0	2,098	12.5	15,133	89.9
11	Kab.Sukoharjo	12	13,897	2,789	20.1	3,170	22.8	3,713	26.7	5,414	39.0	4,609	33.2	16,906	121.7
12	Kab.Wonogiri	34	12,647	142	1.1	53	0.4	85	0.7	1,010	8.0	2,948	23.3	4,096	32.4
13	Kab.Karanganyar	21	13,432	821	6.1	2,734	20.4	3,338	24.9	1,454	10.8	637	4.7	8,163	60.8
14	Kab.Sragen	25	15,096	3,154	20.9	3,030	20.1	1,530	10.1	1,205	8.0	765	5.1	6,530	43.3
15	Kab.Grobogan	30	23,328	0	0.0	0	0.0	0	0.0	764	3.3	6,237	26.7	7,001	30.0
16	Kab.Blora	26	13,197	832	6.3	1,355	10.3	3,057	23.2	2,904	22.0	1,509	11.4	8,825	66.9
17	Kab.Rembang	17	9,851	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,649	87.8	8,649	87.8
18	Kab.Pati	29	18,385	296	1.6	397	2.2	814	4.4	4,981	27.1	5,064	27.5	11,256	61.2
19	Kab.Kudus	19	16,567	0	0.0	92	0.6	2,251	13.6	6,533	39.4	6,436	38.8	15,312	92.4
20	Kab.Jepara	21	22,008	887	4.0	1,798	8.2	7,651	34.8	4,500	20.4	5,052	23.0	19,001	86.3
21	Kab.Demak	27	22,374	198	0.9	166	0.7	70	0.3	42	0.2	76	0.3	354	1.6
22	Kab.Semarang	26	15,593	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.0	436	2.8	443	2.8
23	Kab.Temanggung	26	10,977	0	0.0	0	0.0	1	0.0	45	0.4	5,768	52.5	5,814	53.0
24	Kab.Kendal	30	17,222	1,352	7.9	2,226	12.9	8,203	47.6	1,922	11.2	2,679	15.6	15,030	87.3
25	Kab.Batang	21	13,023	6,468	49.7	6,038	46.4	3,433	26.4	1,719	13.2	772	5.9	11,962	91.9
26	Kab.Pekalongan	27	17,701	5,036	28.5	5,815	32.9	3,865	21.8	2,941	16.6	2,922	16.5	15,543	87.8
27	Kab.Pemalang	25	29,252	3,742	12.8	6,078	20.8	7,688	26.3	6,541	22.4	4,556	15.6	24,863	85.0
28	Kab.Tegal	29	29,304	28	0.1	226	0.8	7,259	24.8	7,715	26.3	4,431	15.1	19,631	67.0
29	Kab.Brebes	38	35,899	3,416	9.5	4,058	11.3	4,112	11.5	4,668	13.0	3,416	9.5	16,254	45.3
30	Kota Magelang	5	1,676	596	35.6	581	34.7	178	10.6	14	0.8	6	0.4	779	46.5
31	Kota Surakarta	17	10,762	5,435	50.5	5,430	50.5	5,414	50.3	5,392	50.1	5,382	50.0	21,618	200.9
32	Kota Salatiga	6	2,835	539	19.0	549	19.4	488	17.2	568	20.0	509	18.0	2,114	74.6
33	Kota Semarang	37	25,655	11,642	45.4	11,498	44.8	5,832	22.7	3,977	15.5	2,995	11.7	24,302	94.7
34	Kota Pekalongan	14	6,332	138	2.2	509	8.0	1,524	24.1	1,594	25.2	1,147	18.1	4,774	75.4
35	Kota Tegal	8	4,527	736	16.3	698	15.4	532	11.8	289	6.4	166	3.7	1,685	37.2
PROVINSI JAWA TENGAH		878	590,575	71,936	12.2	85,158	14.4	94,047	15.9	85,620	14.5	97,760	16.6	362,585	61.4

Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng

TABEL 25

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL									
				Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kab.Cilacap	38	260,718	832	0.3	189	0.1	96	0.0	66	0.0	46	0.0
2	Kab.Banyumas	39	268,522	59	0.0	157	0.1	4,743	1.8	7,150	2.7	8,671	3.2
3	Kab.Purbalingga	22	151,618	4,240	2.8	902	0.6	479	0.3	253	0.2	215	0.1
4	Kab.Banjarnegara	35	145,170	0	0.0	3	0.0	376	0.3	3,726	2.6	634	0.4
5	Kab.Kebumen	35	166,799	536	0.3	550	0.3	2,348	1.4	4,553	2.7	1,292	0.8
6	Kab.Purworejo	27	106,596	1,676	1.6	592	0.6	212	0.2	227	0.2	66	0.1
7	Kab.Wonosobo	24	122,920	723	0.6	1,119	0.9	2,162	1.8	2,685	2.2	7,849	6.4
8	Kab.Magelang	29	202,378	4,825	2.4	2,067	1.0	408	0.2	292	0.1	262	0.1
9	Kab.Boyolali	25	141,076	2,715	1.9	1,805	1.3	603	0.4	421	0.3	758	0.5
10	Kab.Klaten	34	181,095	5,055	2.8	2,407	1.3	273	0.2	150	0.1	71	0.0
11	Kab.Sukoharjo	12	159,570	14,773	9.3	13,587	8.5	15,621	9.8	16,125	10.1	14,635	9.2
12	Kab.Wonogiri	34	133,187	189	0.1	205	0.2	369	0.3	1,759	1.3	628	0.5
13	Kab.Karanganyar	21	147,248	4,081	2.8	929	0.6	584	0.4	374	0.3	267	0.2
14	Kab.Sragen	25	137,214	2,729	2.0	1,584	1.2	376	0.3	305	0.2	273	0.2
15	Kab.Grobogan	30	224,851	0	0.0	0	0.0	219	0.1	1,451	0.6	5,144	2.3
16	Kab.Blora	26	135,606	1,215	0.9	186	0.1	2,545	1.9	224	0.2	70	0.1
17	Kab.Rembang	17	112,841	0	0.0	30	0.0	0	0.0	0	0.0	3,516	3.1
18	Kab.Pati	29	197,291	678	0.3	581	0.3	618	0.3	6,128	3.1	1,357	0.7
19	Kab.Kudus	19	164,943	260	0.2	252	0.2	2,034	1.2	1,570	1.0	1,267	0.8
20	Kab.Jepara	21	227,605	117	0.1	519	0.2	1,407	0.6	3,462	1.5	578	0.3
21	Kab.Demak	27	216,999	164	0.1	64	0.0	0	0.0	0	0.0	1,582	0.7
22	Kab.Semarang	26	192,626	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23	Kab.Temanggung	26	124,338	0	0.0	0	0.0	1	0.0	27	0.0	8,223	6.6
24	Kab.Kendal	30	158,138	1,101	0.7	1,661	1.1	6,749	4.3	8,124	5.1	13,257	8.4
25	Kab.Batang	21	132,827	728	0.5	247	0.2	8	0.0	3	0.0	1	0.0
26	Kab.Pekalongan	27	155,838	4,714	3.0	1,667	1.1	1,210	0.8	1,137	0.7	708	0.5
27	Kab.Pemalang	25	211,574	7,578	3.6	1,542	0.7	2,019	1.0	1,540	0.7	894	0.4
28	Kab.Tegal	29	243,474	14	0.0	113	0.0	1,647	0.7	1,797	0.7	1,043	0.4
29	Kab.Brebes	38	312,499	1,351	0.4	1,417	0.5	3,638	1.2	4,522	1.4	2,936	0.9
30	Kota Magelang	5	20,498	338	1.6	132	0.6	3	0.0	1	0.0	0	0.0
31	Kota Surakarta	17	97,599	11,562	11.8	11,035	11.3	11,553	11.8	11,497	11.8	11,512	11.8
32	Kota Salatiga	6	37,586	132	0.4	853	2.3	61	0.2	264	0.7	284	0.8
33	Kota Semarang	37	375,498	10,158	2.7	7,717	2.1	4,885	1.3	4,128	1.1	3,898	1.0
34	Kota Pekalongan	14	56,321	141	0.3	57	0.1	721	1.3	138	0.2	143	0.3
35	Kota Tegal	8	45,606	898	2.0	159	0.3	149	0.3	24	0.1	6	0.0
PROVINSI JAWA TENGAH		878	5,768,669	83,582	1.4	54,327	0.9	68,117	1.2	84,123	1.5	92,086	1.6

Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng

TABEL 26

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS									
				Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kab.Cilacap	38	292,000	1,456	0.5	962	0.3	561	0.2	352	0.1	234	0.1
2	Kab.Banyumas	39	295,485	68	0.0	161	0.1	7,594	2.6	14,328	4.8	19,789	6.7
3	Kab.Purbalingga	22	167,993	5,304	3.2	4,952	2.9	4,242	2.5	2,014	1.2	1,145	0.7
4	Kab.Banjarnegara	35	163,271	0	0.0	5	0.0	501	0.3	5,057	3.1	2,145	1.3
5	Kab.Kebumen	35	188,468	797	0.4	918	0.5	3,074	1.6	5,524	2.9	2,193	1.2
6	Kab.Purworejo	27	115,503	3,426	3.0	2,213	1.9	562	0.5	308	0.3	136	0.1
7	Kab.Wonosobo	24	137,255	774	0.6	1,258	0.9	4,079	3.0	3,890	2.8	9,629	7.0
8	Kab.Magelang	29	221,845	14,792	6.7	11,481	5.2	4,393	2.0	2,154	1.0	1,224	0.6
9	Kab.Boyolali	25	156,177	11,304	7.2	10,031	6.4	3,654	2.3	1,968	1.3	1,793	1.1
10	Kab.Klaten	34	197,930	5,511	2.8	5,463	2.8	4,629	2.3	2,561	1.3	1,286	0.6
11	Kab.Sukoharjo	12	173,467	17,562	10.1	16,757	9.7	19,334	11.1	21,539	12.4	19,244	11.1
12	Kab.Wonogiri	34	145,834	331	0.2	258	0.2	454	0.3	2,769	1.9	3,576	2.5
13	Kab.Karanganyar	21	160,680	4,902	3.1	3,663	2.3	3,922	2.4	1,828	1.1	904	0.6
14	Kab.Sragen	25	152,310	5,883	3.9	4,614	3.0	1,906	1.3	1,510	1.0	1,038	0.7
15	Kab.Grobogan	30	248,179	0	0.0	0	0.0	219	0.1	2,215	0.9	11,381	4.6
16	Kab.Blora	26	148,803	2,047	1.4	1,541	1.0	5,602	3.8	3,128	2.1	1,579	1.1
17	Kab.Rembang	17	122,692	0	0.0	30	0.0	0	0.0	0	0.0	12,165	9.9
18	Kab.Pati	29	215,676	974	0.5	978	0.5	1,432	0.7	11,109	5.2	6,421	3.0
19	Kab.Kudus	19	181,510	260	0.1	344	0.2	4,285	2.4	8,103	4.5	7,703	4.2
20	Kab.Jepara	21	249,613	1,004	0.4	2,317	0.9	9,058	3.6	7,962	3.2	5,630	2.3
21	Kab.Demak	27	239,373	362	0.2	230	0.1	70	0.0	42	0.0	1,658	0.7
22	Kab.Semarang	26	208,219	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.0	436	0.2
23	Kab.Temanggung	26	135,315	0	0.0	0	0.0	2	0.0	72	0.1	13,991	10.3
24	Kab.Kendal	30	175,360	2,453	1.4	3,887	2.2	14,952	8.5	10,046	5.7	15,936	9.1
25	Kab.Batang	21	145,850	7,196	4.9	6,285	4.3	3,441	2.4	1,722	1.2	773	0.5
26	Kab.Pekalongan	27	173,539	9,750	5.6	7,482	4.3	5,075	2.9	4,078	2.3	3,630	2.1
27	Kab.Pemalang	25	240,826	11,320	4.7	7,620	3.2	9,707	4.0	8,081	3.4	5,450	2.3
28	Kab.Tegal	29	272,778	42	0.0	339	0.1	8,906	3.3	9,512	3.5	5,474	2.0
29	Kab.Brebes	38	348,398	4,767	1.4	5,475	1.6	7,750	2.2	9,190	2.6	6,352	1.8
30	Kota Magelang	5	22,174	934	4.2	713	3.2	181	0.8	15	0.1	6	0.0
31	Kota Surakarta	17	108,361	16,997	15.7	16,465	15.2	16,967	15.7	16,889	15.6	16,894	15.6
32	Kota Salatiga	6	40,421	671	1.7	1,402	3.5	549	1.4	832	2.1	793	2.0
33	Kota Semarang	37	401,153	21,800	5.4	19,215	4.8	10,717	2.7	8,105	2.0	6,893	1.7
34	Kota Pekalongan	14	62,653	279	0.4	566	0.9	2,245	3.6	1,732	2.8	1,290	2.1
35	Kota Tegal	8	50,133	1,634	3.3	857	1.7	681	1.4	313	0.6	172	0.3
PROVINSI JAWA TENGAH		878	6,359,244	154,600	2.4	138,481	2.2	160,744	2.5	168,955	2.7	188,963	3.0

Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng

TABEL 27

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Kab.Cilacap	38	31,282	29,564	94.51
2	Kab.Banyumas	39	26,963	26,927	99.87
3	Kab.Purbalingga	22	16,375	14,594	89.12
4	Kab.Banjarnegara	35	18,101	15,458	85.40
5	Kab.Kebumen	35	21,669	19,603	90.47
6	Kab.Purworejo	27	8,907	4,385	49.23
7	Kab.Wonosobo	24	14,335	13,109	91.45
8	Kab.Magelang	29	19,467	17,518	89.99
9	Kab.Boyolali	25	15,101	13,105	86.78
10	Kab.Klaten	34	16,835	15,714	93.34
11	Kab.Sukoharjo	12	13,897	13,054	93.93
12	Kab.Wonogiri	34	12,647	11,349	89.74
13	Kab.Karanganyar	21	13,432	12,780	95.15
14	Kab.Sragen	25	15,096	14,008	92.79
15	Kab.Grobogan	30	23,328	20,778	89.07
16	Kab.Blora	26	13,197	13,072	99.05
17	Kab.Rembang	17	9,851	9,174	93.13
18	Kab.Pati	29	18,385	18,380	99.97
19	Kab.Kudus	19	16,567	15,792	95.32
20	Kab.Jepara	21	22,008	21,055	95.67
21	Kab.Demak	27	22,374	21,512	96.15
22	Kab.Semarang	26	15,593	13,994	89.75
23	Kab.Temanggung	26	10,977	10,977	100.00
24	Kab.Kendal	30	17,222	16,132	93.67
25	Kab.Batang	21	13,023	12,882	98.92
26	Kab.Pekalongan	27	17,701	16,912	95.54
27	Kab.Pemalang	25	29,252	25,924	88.62
28	Kab.Tegal	29	29,304	27,556	94.03
29	Kab.Brebes	38	35,899	31,340	87.30
30	Kota Magelang	5	1,676	1,625	96.96
31	Kota Surakarta	17	10,762	10,463	97.22
32	Kota Salatiga	6	2,835	2,747	96.90
33	Kota Semarang	37	25,655	25,655	100.00
34	Kota Pekalongan	14	6,332	6,188	97.73
35	Kota Tegal	8	4,527	4,357	96.24
PROVINSI JAWA TENGAH		878	590,575	547,683	92.74

Sumber: Profil kab/kota & pengelola program provinsi

TABEL 28

PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUS	PESERTA KB AKTIF															
				KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kab.Cilacap	38	379,804	8,412	3.2	115,266	43.3	54,210	20.4	33,740	12.7	1,208	0.5	7,307	2.7	46,068	17.3	266,211	70.1
2	Kab.Banyumas	39	322,736	6,548	2.7	108,968	44.7	24,440	10.0	41,692	17.1	1,631	0.7	10,500	4.3	49,783	20.4	243,562	75.5
3	Kab.Purbalingga	22	190,647	3,618	2.5	80,207	54.6	17,762	12.1	14,173	9.7	1,671	1.1	10,432	7.1	18,931	12.9	146,794	77.0
4	Kab.Banjarnegara	35	212,375	3,617	2.1	96,522	57.0	18,336	10.8	19,713	11.6	1,606	0.9	9,994	5.9	19,616	11.6	169,404	79.8
5	Kab.Kebumen	35	197,918	5,068	3.6	75,961	53.9	14,551	10.3	12,175	8.6	264	0.2	3,959	2.8	29,054	20.6	141,032	71.3
6	Kab.Purworejo	27	112,711	2,846	3.3	36,586	42.6	9,762	11.4	11,925	13.9	648	0.8	4,127	4.8	19,992	23.3	85,886	76.2
7	Kab.Wonosobo	24	155,287	1,918	1.6	65,690	53.9	8,152	6.7	12,435	10.2	1,019	0.8	6,585	5.4	26,117	21.4	121,916	78.5
8	Kab.Magelang	29	205,272	5,202	3.4	81,025	52.3	14,781	9.5	26,771	17.3	439	0.3	8,692	5.6	18,111	11.7	155,021	75.5
9	Kab.Boyolali	25	178,204	1,069	0.8	82,166	64.3	3,656	2.9	16,030	12.5	1,118	0.9	6,873	5.4	16,836	13.2	127,748	71.7
10	Kab.Klaten	34	197,949	3,938	2.8	82,542	58.4	10,843	7.7	12,506	8.8	312	0.2	7,932	5.6	23,245	16.4	141,318	71.4
11	Kab.Sukoharjo	12	140,865	1,815	1.9	53,254	55.1	11,496	11.9	13,802	14.3	307	0.3	6,569	6.8	9,324	9.7	96,567	68.6
12	Kab.Wonogiri	34	159,801	4,870	3.8	77,526	61.1	20,765	16.4	9,394	7.4	235	0.2	5,762	4.5	8,389	6.6	126,941	79.4
13	Kab.Karanganyar	21	190,879	4,446	3.0	81,555	54.2	9,393	6.2	25,071	16.7	1,056	0.7	12,332	8.2	16,509	11.0	150,362	78.8
14	Kab.Sragen	25	177,287	2,373	1.8	72,659	55.0	9,485	7.2	15,255	11.5	344	0.3	9,741	7.4	22,250	16.8	132,107	74.5
15	Kab.Grobogan	30	330,527	3,297	1.3	169,968	67.6	24,117	9.6	11,870	4.7	335	0.1	14,055	5.6	27,762	11.0	251,404	76.1
16	Kab.Blora	26	186,964	2,183	1.6	74,409	54.3	20,056	14.6	9,600	7.0	1,487	1.1	5,255	3.8	24,020	17.5	137,010	73.3
17	Kab.Rembang	17	133,626	771	0.7	69,119	65.0	14,132	13.3	3,130	2.9	277	0.3	2,202	2.1	16,712	15.7	106,343	79.6
18	Kab.Pati	29	269,757	2,716	1.5	106,612	59.0	27,230	15.1	10,719	5.9	767	0.4	13,749	7.6	19,001	10.5	180,794	67.0
19	Kab.Kudus	19	139,951	1,004	1.0	74,317	74.9	10,607	10.7	4,734	4.8	209	0.2	2,031	2.0	6,294	6.3	99,196	70.9
20	Kab.Jepara	21	220,467	878	0.5	122,441	75.6	12,708	7.8	4,807	3.0	579	0.4	3,199	2.0	17,425	10.8	162,037	73.5
21	Kab.Demak	27	224,088	1,311	0.8	124,500	74.5	11,946	7.2	6,362	3.8	400	0.2	6,250	3.7	16,288	9.7	167,057	74.5
22	Kab.Semarang	26	208,772	1,834	1.2	80,713	53.3	9,984	6.6	17,921	11.8	1,200	0.8	6,843	4.5	32,992	21.8	151,487	72.6
23	Kab.Temanggung	26	133,475	3,861	3.7	44,082	42.6	5,897	5.7	13,936	13.5	497	0.5	6,548	6.3	28,657	27.7	103,478	77.5
24	Kab.Kendal	30	190,936	740	0.6	79,290	60.6	18,828	14.4	8,182	6.3	793	0.6	5,378	4.1	17,694	13.5	130,905	68.6
25	Kab.Batang	21	181,434	8,261	5.6	74,577	50.7	26,804	18.2	10,361	7.0	3,760	2.6	7,182	4.9	16,165	11.0	147,110	81.1
26	Kab.Pekalongan	27	184,879	2,815	1.9	102,507	68.6	18,526	12.4	6,557	4.4	684	0.5	6,313	4.2	12,096	8.1	149,498	80.9
27	Kab.Pemalang	25	306,099	4,168	2.0	133,948	65.3	26,362	12.8	9,112	4.4	3,156	1.5	7,277	3.5	21,191	10.3	205,214	67.0
28	Kab.Tegal	29	302,801	2,082	1.0	126,191	61.2	19,638	9.5	13,503	6.5	1,613	0.8	12,528	6.1	30,691	14.9	206,246	68.1
29	Kab.Brebes	38	360,414	1,191	0.5	184,487	74.0	24,878	10.0	9,829	3.9	824	0.3	5,211	2.1	22,908	9.2	249,328	69.2
30	Kota Magelang	5	16,665	1,236	9.8	4,889	38.9	1,490	11.8	2,417	19.2	39	0.3	1,132	9.0	1,378	11.0	12,581	75.5
31	Kota Surakarta	17	63,438	6,173	14.3	18,500	42.8	5,045	11.7	7,750	17.9	195	0.5	2,665	6.2	2,941	6.8	43,269	68.2
32	Kota Salatiga	6	25,794	1,605	9.2	6,759	38.6	1,314	7.5	3,704	21.1	125	0.7	1,422	8.1	2,591	14.8	17,520	67.9
33	Kota Semarang	37	256,868	19,399	9.7	107,853	54.2	22,787	11.5	21,385	10.7	1,102	0.6	15,543	7.8	10,932	5.5	199,001	77.5
34	Kota Pekalongan	14	46,652	1,556	5.1	19,070	62.8	3,500	11.5	2,475	8.2	134	0.4	1,743	5.7	1,874	6.2	30,352	65.1
35	Kota Tegal	8	47,109	988	2.9	19,941	58.7	3,153	9.3	3,389	10.0	88	0.3	2,288	6.7	4,105	12.1	33,952	72.1
PROVINSI JAWA TENGAH		878	6,652,451	123,809	2.5	2,854,100	58.4	536,634	11.0	446,425	9.1	30,122	0.6	239,619	4.9	657,942	13.5	4,888,651	73.5

Sumber : Statistik Rutin BKKBN

Keterangan :

AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

TABEL 29

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH IBU BERSALIN*	PESERTA KB PASCA PERSALINAN															
				KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kab.Cilacap	38	28,971	89	0.9	3,874	39.1	765	7.7	2,450	24.7	0	0.0	132	1.3	2,604	26.3	9,914	34.2
2	Kab.Banyumas	39	26,624	349	3.5	3,528	35.8	452	4.6	2,619	26.6	2	0.0	248	2.5	2,666	27.0	9,864	37.0
3	Kab.Purbalingga	22	14,785	31	0.8	1,336	33.7	333	8.4	1,303	32.9	0	0.0	419	10.6	543	13.7	3,965	26.8
4	Kab.Banjarnegara	35	15,683	167	2.1	3,820	48.3	50	0.6	2,560	32.4	1	0.0	319	4.0	987	12.5	7,904	50.4
5	Kab.Kebumen	35	19,629	172	3.3	2,450	47.5	245	4.7	772	15.0	0	0.0	245	4.7	1,278	24.8	5,162	26.3
6	Kab.Purworejo	27	8,907	24	1.6	584	39.2	25	1.7	297	20.0	0	0.0	91	6.1	467	31.4	1,488	16.7
7	Kab.Wonosobo	24	12,634	52	1.1	2,270	48.1	100	2.1	870	18.4	0	0.0	96	2.0	1,330	28.2	4,718	37.3
8	Kab.Magelang	29	17,163	176	6.3	1,285	45.6	70	2.5	801	28.5	0	0.0	121	4.3	362	12.9	2,815	16.4
9	Kab.Boyolali	25	13,699	10	0.5	1,115	60.6	24	1.3	331	18.0	0	0.0	117	6.4	243	13.2	1,840	13.4
10	Kab.Klaten	34	15,781	137	3.4	1,184	29.3	99	2.4	1,315	32.5	1	0.0	451	11.2	857	21.2	4,044	25.6
11	Kab.Sukoharjo	12	12,558	93	3.1	1,917	64.4	119	4.0	282	9.5	0	0.0	82	2.8	482	16.2	2,975	23.7
12	Kab.Wonogiri	34	10,774	12	1.0	630	50.5	66	5.3	165	13.2	1	0.1	157	12.6	217	17.4	1,248	11.6
13	Kab.Karanganyar	21	12,209	8	0.4	277	14.2	40	2.1	1,146	58.9	0	0.0	298	15.3	177	9.1	1,946	15.9
14	Kab.Sragen	25	14,075	54	1.2	1,229	26.5	88	1.9	2,616	56.4	0	0.0	399	8.6	250	5.4	4,636	32.9
15	Kab.Grobogan	30	21,593	26	1.5	1,429	82.5	82	4.7	37	2.1	0	0.0	57	3.3	101	5.8	1,732	8.0
16	Kab.Blora	26	11,672	16	0.4	2,142	59.8	269	7.5	462	12.9	1	0.0	215	6.0	476	13.3	3,581	30.7
17	Kab.Rembang	17	9,234	16	0.8	1,227	59.5	50	2.4	312	15.1	0	0.0	221	10.7	237	11.5	2,063	22.3
18	Kab.Pati	29	17,626	84	1.1	5,854	75.2	552	7.1	645	8.3	0	0.0	276	3.5	371	4.8	7,782	44.2
19	Kab.Kudus	19	15,160	114	2.3	3,447	69.4	613	12.3	182	3.7	0	0.0	227	4.6	382	7.7	4,965	32.8
20	Kab.Jepara	21	20,241	4	0.1	5,502	77.9	94	1.3	889	12.6	0	0.0	366	5.2	205	2.9	7,060	34.9
21	Kab.Demak	27	20,653	29	1.1	2,156	84.3	74	2.9	62	2.4	0	0.0	47	1.8	191	7.5	2,559	12.4
22	Kab.Semarang	26	14,103	16	0.7	1,141	50.2	24	1.1	251	11.0	0	0.0	74	3.3	767	33.7	2,273	16.1
23	Kab.Temanggung	26	10,594	60	2.1	1,328	47.0	19	0.7	415	14.7	0	0.0	14	0.5	992	35.1	2,828	26.7
24	Kab.Kendal	30	15,492	3	0.1	4,599	82.0	66	1.2	271	4.8	0	0.0	118	2.1	552	9.8	5,609	36.2
25	Kab.Batang	21	12,641	15	0.9	972	58.3	107	6.4	179	10.7	0	0.0	217	13.0	177	10.6	1,667	13.2
26	Kab.Pekalongan	27	16,547	137	1.5	7,682	82.6	185	2.0	437	4.7	7	0.1	193	2.1	655	7.0	9,296	56.2
27	Kab.Pemalang	25	25,798	144	1.7	6,152	73.8	539	6.5	347	4.2	0	0.0	141	1.7	1,017	12.2	8,340	32.3
28	Kab.Tegal	29	26,947	20	0.5	2,332	53.6	130	3.0	379	8.7	0	0.0	474	10.9	1,019	23.4	4,354	16.2
29	Kab.Brebes	38	31,808	47	0.5	4,889	48.4	1,064	10.5	839	8.3	3	0.0	253	2.5	2,997	29.7	10,092	31.7
30	Kota Magelang	5	1,526	9	1.4	36	5.6	4	0.6	266	41.6	0	0.0	299	46.7	26	4.1	640	41.9
31	Kota Surakarta	17	9,734	24	3.3	112	15.3	15	2.1	367	50.2	0	0.0	191	26.1	22	3.0	731	7.5
32	Kota Salatiga	6	2,547	7	1.5	83	18.2	108	23.7	59	12.9	0	0.0	141	30.9	58	12.7	456	17.9
33	Kota Semarang	37	23,796	607	10.7	2,382	42.1	125	2.2	1,196	21.1	0	0.0	972	17.2	379	6.7	5,661	23.8
34	Kota Pekalongan	14	5,925	17	4.7	219	60.7	15	4.2	46	12.7	0	0.0	42	11.6	22	6.1	361	6.1
35	Kota Tegal	8	4,227	10	1.6	300	48.1	37	5.9	70	11.2	0	0.0	36	5.8	171	27.4	624	14.8
PROVINSI JAWA TENGAH		878	541,356	2,779	1.9	79,483	54.7	6,648	4.6	25,238	17.4	16	0.0	7,749	5.3	23,280	16.0	145,193	26.8

Sumber : Statistik Rutin BKKBN

TABEL 30

JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN		JUMLAH LAHIR HIDUP			PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI			PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL					
					Jml	%	L	P	L + P	L	P	L + P	L		P		L + P	
													Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kab.Cilacap	38	31,282	6,256	6,728	107.5	14,796	14,079	28,875	2,219	2,112	4,331	2,043	92.1	1,899	89.9	3,942	91.0
2	Kab.Banyumas	39	26,963	5,393	8,266	153.3	13,913	12,670	26,583	2,087	1,901	3,987	1,766	84.6	1,610	84.7	3,376	84.7
3	Kab.Purbalingga	22	16,375	3,275	3,524	107.6	7,638	7,143	14,781	1,146	1,071	2,217	854	74.5	714	66.6	1,568	70.7
4	Kab.Banjarnegara	35	18,101	3,620	4,716	130.3	8,072	7,661	15,733	1,211	1,149	2,360	711	58.7	786	68.4	1,497	63.4
5	Kab.Kebumen	35	21,669	4,334	5,263	121.4	10,091	9,535	19,626	1,514	1,430	2,944	1,297	85.7	1,141	79.8	2,438	82.8
6	Kab.Purworejo	27	8,907	1,781	3,186	178.8	4,573	4,322	8,895	686	648	1,334	629	91.7	594	91.6	1,223	91.7
7	Kab.Wonosobo	24	14,335	2,867	3,176	110.8	6,557	6,058	12,615	984	909	1,892	1,159	117.8	967	106.4	2,126	112.4
8	Kab.Magelang	29	19,467	3,893	6,013	154.4	8,806	8,341	17,147	1,321	1,251	2,572	1,695	128.3	1,575	125.9	3,270	127.1
9	Kab.Boyolali	25	15,101	3,020	5,053	167.3	6,968	6,740	13,708	1,045	1,011	2,056	603	57.7	509	50.3	1,112	54.1
10	Kab.Klaten	34	16,835	3,367	2,804	83.3	8,058	7,623	15,681	1,209	1,143	2,352	651	53.9	667	58.3	1,318	56.0
11	Kab.Sukoharjo	12	13,897	2,779	2,262	81.4	6,394	6,154	12,548	959	923	1,882	687	71.6	650	70.4	1,337	71.0
12	Kab.Wonogiri	34	12,647	2,529	2,849	112.6	5,403	5,427	10,830	810	814	1,625	588	72.6	579	71.1	1,167	71.8
13	Kab.Karanganyar	21	13,432	2,686	2,792	103.9	6,248	5,950	12,198	937	893	1,830	900	96.0	826	92.5	1,726	94.3
14	Kab.Sragen	25	15,096	3,019	2,745	90.9	7,254	6,802	14,056	1,088	1,020	2,108	845	77.7	778	76.3	1,623	77.0
15	Kab.Grobogan	30	23,328	4,666	8,004	171.6	11,175	10,396	21,571	1,676	1,559	3,236	1,722	102.7	1,495	95.9	3,217	99.4
16	Kab.Blora	26	13,197	2,639	4,579	173.5	6,069	5,563	11,632	910	834	1,745	1,088	119.5	944	113.1	2,032	116.5
17	Kab.Rembang	17	9,851	1,970	2,940	149.2	4,853	4,393	9,246	728	659	1,387	936	128.6	847	128.5	1,783	128.6
18	Kab.Pati	29	18,385	3,677	4,928	134.0	8,816	8,929	17,745	1,322	1,339	2,662	982	74.3	1,079	80.6	2,061	77.4
19	Kab.Kudus	19	16,567	3,313	4,061	122.6	7,676	7,412	15,088	1,151	1,112	2,263	764	66.4	700	63.0	1,464	64.7
20	Kab.Jepara	21	22,008	4,402	4,402	100.0	10,224	10,073	20,297	1,534	1,511	3,045	1,395	91.0	1,307	86.5	2,702	88.7
21	Kab.Demak	27	22,374	4,475	6,671	149.1	10,657	10,121	20,778	1,599	1,518	3,117	1,280	80.1	1,059	69.8	2,339	75.0
22	Kab.Semarang	26	15,593	3,119	4,583	147.0	7,227	6,915	14,142	1,084	1,037	2,121	1,761	162.4	1,577	152.0	3,338	157.4
23	Kab.Temanggung	26	10,977	2,195	4,029	183.5	5,575	4,980	10,555	836	747	1,583	1,172	140.1	1,019	136.4	2,191	138.4
24	Kab.Kendal	30	17,222	3,444	3,882	112.7	8,130	7,263	15,393	1,220	1,089	2,309	888	72.8	793	72.8	1,681	72.8
25	Kab.Batang	21	13,023	2,605	4,595	176.4	6,554	6,049	12,603	983	907	1,890	903	91.9	968	106.7	1,871	99.0
26	Kab.Pekalongan	27	17,701	3,540	6,197	175.0	8,713	7,830	16,543	1,307	1,175	2,481	1,258	96.3	1,130	96.2	2,388	96.2
27	Kab.Pemalang	25	29,252	5,850	7,820	133.7	13,051	12,746	25,797	1,958	1,912	3,870	1,982	101.2	1,886	98.6	3,868	100.0
28	Kab.Tegal	29	29,304	5,861	6,632	113.2	14,024	12,921	26,945	2,104	1,938	4,042	1,697	80.7	1,630	84.1	3,327	82.3
29	Kab.Brebes	38	35,899	7,180	7,156	99.7	16,672	15,131	31,803	2,501	2,270	4,770	1,644	65.7	1,454	64.1	3,098	64.9
30	Kota Magelang	5	1,676	335	542	161.7	782	750	1,532	117	113	230	254	216.5	241	214.2	495	215.4
31	Kota Surakarta	17	10,762	2,152	2,125	98.7	4,870	4,867	9,737	731	730	1,461	374	51.2	360	49.3	734	50.3
32	Kota Salatiga	6	2,835	567	419	73.9	1,352	1,190	2,542	203	179	381	240	118.3	203	113.7	443	116.2
33	Kota Semarang	37	25,655	5,131	1,366	26.6	11,756	11,990	23,746	1,763	1,799	3,562	1,421	80.6	1,386	77.1	2,807	78.8
34	Kota Pekalongan	14	6,332	1,266	1,482	117.0	2,940	2,983	5,923	441	447	888	437	99.1	442	98.8	879	98.9
35	Kota Tegal	8	4,527	905	1,165	128.7	2,233	1,981	4,214	335	297	632	421	125.7	359	120.8	780	123.4
PROVINSI JAWA TENGAH		878	590,575	118,115	146,955	124.4	278,120	262,988	541,108	41,718	39,448	81,166	37,047	88.8	34,174	86.6	71,221	87.7

Sumber: Profil kab/kota & pengelola program provinsi

TABEL 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN												ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)								
			LAKI - LAKI						PEREMPUAN						LAKI - LAKI + PEREMPUAN						LAKI - LAKI + PEREMPUAN		
			NEONATAL	BALITA		NEONATAL	BALITA		NEONATAL	BALITA		NEONATAL	BALITA		NEONATAL	BAYI ^a	ANAK BALITA	ANAK BALITA	NEONATAL	BAYI ^a	ANAK BALITA		
				BAYI ^a	ANAK BALITA		JUMLAH TOTAL	BAYI ^a		ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI ^a	ANAK BALITA								JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Kab.Cilacap	38	71	108	17	125	32	47	18	65	103	155	35	190	3.57	5.37	6.58						
2	Kab.Banyumas	39	61	112	13	125	49	85	8	93	110	197	21	218	4.15	7.43	8.22						
3	Kab.Purbalingga	22	33	65	9	74	28	47	14	61	61	112	23	135	4.13	7.58	9.14						
4	Kab.Banjarnegara	35	63	94	12	106	67	97	13	110	130	191	25	216	8.26	12.14	13.73						
5	Kab.Kebumen	35	48	70	12	82	42	66	12	78	90	136	24	160	4.59	6.93	8.15						
6	Kab.Purworejo	27	50	66	15	81	18	30	12	42	68	96	27	123	7.64	10.79	13.83						
7	Kab.Wonosobo	24	61	72	6	78	22	32	5	37	83	104	11	115	6.58	8.24	9.12						
8	Kab.Magelang	29	58	79	8	87	52	64	3	67	110	143	11	154	6.42	8.34	8.98						
9	Kab.Boyolali	25	50	61	14	75	51	60	7	67	101	121	21	142	7.37	8.83	10.36						
10	Kab.Klaten	34	58	88	11	99	45	69	14	83	103	157	25	182	6.57	10.01	11.61						
11	Kab.Sukoharjo	12	20	34	13	47	17	35	9	44	37	69	22	91	2.95	5.50	7.25						
12	Kab.Wonogiri	34	41	50	6	56	28	38	6	44	69	88	12	100	6.37	8.13	9.23						
13	Kab.Karanganyar	21	44	60	9	69	22	42	6	48	66	102	15	117	5.41	8.36	9.59						
14	Kab.Sragen	25	34	51	15	66	21	41	8	49	55	92	23	115	3.91	6.55	8.18						
15	Kab.Grobogan	30	113	146	16	162	94	138	21	159	207	284	37	321	9.60	13.17	14.89						
16	Kab.Blora	26	56	82	13	95	33	47	11	58	89	129	24	153	7.65	11.09	13.15						
17	Kab.Rembang	17	55	111	16	127	53	53	13	66	108	164	29	193	11.68	17.74	20.87						
18	Kab.Pati	29	68	83	8	91	54	67	8	75	122	150	16	166	6.88	8.45	9.35						
19	Kab.Kudus	19	58	72	11	83	32	51	10	61	90	123	21	144	5.97	8.15	9.54						
20	Kab.Jepara	21	48	61	9	70	28	34	7	41	76	95	16	111	3.74	4.68	5.47						
21	Kab.Demak	27	43	65	12	77	26	46	16	62	69	111	28	139	3.32	5.34	6.69						
22	Kab.Semarang	26	38	52	5	57	32	53	6	59	70	105	11	116	4.95	7.42	8.20						
23	Kab.Temanggung	26	53	71	9	80	42	61	14	75	95	132	23	155	9.00	12.51	14.68						
24	Kab.Kendal	30	60	80	12	92	47	68	11	79	107	148	23	171	6.95	9.61	11.11						
25	Kab.Batang	21	53	78	13	91	41	66	11	77	94	144	24	168	7.46	11.43	13.33						
26	Kab.Pekalongan	27	62	94	21	115	29	50	13	63	91	144	34	178	5.50	8.70	10.76						
27	Kab.Pemalang	25	49	66	10	76	65	78	5	83	114	144	15	159	4.42	5.58	6.16						
28	Kab.Tegal	29	60	77	9	86	63	88	11	99	123	165	20	185	4.56	6.12	6.87						
29	Kab.Brebes	38	122	168	31	199	97	136	33	169	219	304	64	368	6.91	9.59	11.61						
30	Kota Magelang	5	5	10	1	11	4	6	1	7	9	16	2	18	5.87	10.44	11.75						
31	Kota Surakarta	17	11	21	5	26	19	27	6	33	30	48	11	59	3.12	5.00	6.14						
32	Kota Salatiga	6	13	14	2	16	7	13	0	13	20	27	2	29	7.87	10.62	11.41						
33	Kota Semarang	37	51	70	13	83	68	76	13	89	119	146	26	172	5.01	6.15	7.24						
34	Kota Pekalongan	14	24	37	17	54	22	34	7	41	46	71	24	95	7.77	11.99	16.04						
35	Kota Tegal	8	21	27	8	35	7	10	5	15	28	37	13	50	6.64	8.78	11.87						
PROVINSI JAWA TENGAH		878	1,755	2,495	401	2,896	1,357	1,955	357	2,312	3,112	4,450	758	5,208									
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)			6.3	9.0	1.4	10.4	5.2	7.5	1.4	8.8	5.8	8.2	1.4	9.6									

Sumber: (sebutkan)

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

TABEL 32

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)						PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)						PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)							
		BBLR	ASFIKSI	TETANUS NEONATORUM	SEPSIS	KELAINAN BAWAAN	LAIN-LAIN	PNEUMONIA	DIARE	MALARIA	TETANUS	KELAINAN SARAF	KELAINAN SALURAN CERNA	LAIN-LAIN	PNEUMONIA	DIARE	MALARIA	CAMPAK	DEMAM	DIFTERI	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kab.Cilacap	26	29	0	4	11	32	5	6	4	0	0	1	37	2	2	0	0	0	22	9
2	Kab.Banyumas	24	33	0	4	20	29	12	8	0	0	0	0	67	5	8	0	0	2	0	6
3	Kab.Purbalingga	19	13	0	2	19	8	5	8	0	0	0	1	37	1	3	0	0	0	0	19
4	Kab.Banjarnegara	42	33	0	11	22	22	7	3	0	0	1	1	49	1	4	0	0	0	0	20
5	Kab.Kebumen	32	21	0	1	19	17	4	2	0	0	0	0	40	1	4	0	0	0	0	19
6	Kab.Purworejo	23	19	0	1	5	20	3	3	0	0	0	0	22	0	0	0	0	3	0	24
7	Kab.Wonosobo	29	21	0	2	7	24	2	2	0	0	0	0	17	0	0	0	0	2	0	9
8	Kab.Magelang	39	25	0	1	21	24	7	3	0	0	0	3	20	1	0	0	0	0	0	10
9	Kab.Boyolali	43	19	0	5	0	34	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	19
10	Kab.Klaten	60	14	0	3	17	9	7	6	0	0	1	1	39	1	6	0	0	0	0	18
11	Kab.Sukoharjo	15	7	0	1	9	5	0	1	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	22
12	Kab.Wonogiri	21	22	0	5	8	13	1	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	12
13	Kab.Karanganyar	24	8	0	3	11	20	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	15
14	Kab.Sragen	18	14	0	3	1	19	5	4	0	0	0	0	28	4	1	0	0	5	0	13
15	Kab.Grobogan	114	39	0	0	27	27	18	9	0	0	0	1	49	8	5	0	0	1	0	23
16	Kab.Blora	30	13	0	0	13	33	4	4	0	0	1	3	28	0	1	0	0	3	0	20
17	Kab.Rembang	41	27	0	5	13	22	7	13	0	0	0	1	35	0	5	0	0	0	3	21
18	Kab.Pati	38	28	0	3	27	26	1	2	0	0	0	1	24	2	2	0	0	0	0	12
19	Kab.Kudus	40	14	0	0	27	8	2	0	0	0	0	1	32	0	2	0	0	0	0	18
20	Kab.Jepara	24	30	0	0	16	6	0	0	0	0	0	3	16	0	1	0	0	2	0	13
21	Kab.Demak	23	16	0	0	18	12	5	11	0	0	3	0	23	2	8	0	0	4	0	14
22	Kab.Semarang	33	19	0	0	8	13	2	6	0	0	0	0	24	2	1	0	0	1	0	7
23	Kab.Temanggung	41	9	0	1	22	22	0	2	0	0	0	2	33	2	2	0	0	0	0	19
24	Kab.Kendal	35	21	0	7	19	25	6	11	0	0	0	2	22	6	2	0	0	0	0	15
25	Kab.Batang	32	18	0	6	16	22	6	11	0	0	0	2	31	6	2	0	0	0	0	16
26	Kab.Pekalongan	31	29	0	0	13	18	13	8	0	0	0	0	32	10	7	0	0	2	0	15
27	Kab.Pemalang	26	34	0	5	18	31	4	2	0	0	1	2	21	1	2	0	0	0	0	12
28	Kab.Tegal	40	33	0	1	22	27	5	4	0	0	1	2	30	2	2	0	0	0	0	16
29	Kab.Brebes	84	71	0	0	31	33	14	8	0	0	0	2	61	2	9	0	0	15	0	38
30	Kota Magelang	5	2	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
31	Kota Surakarta	11	5	0	3	10	1	4	0	0	0	1	1	12	1	1	0	0	1	0	8
32	Kota Salatiga	8	4	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2
33	Kota Semarang	44	22	0	3	7	43	4	1	0	0	0	1	21	9	6	0	0	0	0	11
34	Kota Pekalongan	16	17	0	0	7	6	2	4	0	0	0	3	16	7	3	0	0	0	0	14
35	Kota Tegal	8	14	0	0	5	1	1	2	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	10
PROVINSI JAWA TENGAH		1,139	743	0	80	492	659	161	145	4	0	9	36	983	78	92	0	0	41	25	521

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

TABEL 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG						BBLR					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kab.Cilacap	14,796	14,079	28,875	14,796	100.0	14,079	100.0	28,875	100.0	535	3.6	553	3.9	1,088	3.8
2	Kab.Banyumas	13,913	12,670	26,583	13,913	100.0	12,670	100.0	26,583	100.0	757	5.4	823	6.5	1,580	5.9
3	Kab.Purbalingga	7,638	7,143	14,781	7,638	100.0	7,143	100.0	14,781	100.0	445	5.8	419	5.9	864	5.8
4	Kab.Banjarnegara	8,072	7,661	15,733	8,072	100.0	7,661	100.0	15,733	100.0	509	6.3	550	7.2	1,059	6.7
5	Kab.Kebumen	10,091	9,535	19,626	10,091	100.0	9,535	100.0	19,626	100.0	482	4.8	504	5.3	986	5.0
6	Kab.Purworejo	4,573	4,322	8,895	4,573	100.0	4,322	100.0	8,895	100.0	559	12.2	529	12.2	1,088	12.2
7	Kab.Wonosobo	6,557	6,058	12,615	6,557	100.0	6,058	100.0	12,615	100.0	314	4.8	338	5.6	652	5.2
8	Kab.Magelang	8,806	8,341	17,147	8,806	100.0	8,341	100.0	17,147	100.0	424	4.8	437	5.2	861	5.0
9	Kab.Boyolali	6,968	6,740	13,708	6,968	100.0	6,740	100.0	13,708	100.0	250	3.6	249	3.7	499	3.6
10	Kab.Klaten	8,058	7,623	15,681	8,058	100.0	7,623	100.0	15,681	100.0	394	4.9	476	6.2	870	5.5
11	Kab.Sukoharjo	6,394	6,154	12,548	6,394	100.0	6,154	100.0	12,548	100.0	219	3.4	255	4.1	474	3.8
12	Kab.Wonogiri	5,403	5,427	10,830	5,403	100.0	5,427	100.0	10,830	100.0	251	4.6	249	4.6	500	4.6
13	Kab.Karanganyar	6,248	5,950	12,198	6,248	100.0	5,950	100.0	12,198	100.0	316	5.1	310	5.2	626	5.1
14	Kab.Sragen	7,254	6,802	14,056	7,254	100.0	6,802	100.0	14,056	100.0	318	4.4	359	5.3	677	4.8
15	Kab.Grobogan	11,175	10,396	21,571	11,172	100.0	10,391	100.0	21,563	100.0	602	5.4	584	5.6	1,186	5.5
16	Kab.Blora	6,069	5,563	11,632	6,069	100.0	5,563	100.0	11,632	100.0	284	4.7	318	5.7	602	5.2
17	Kab.Rembang	4,853	4,393	9,246	4,853	100.0	4,393	100.0	9,246	100.0	217	4.5	280	6.4	497	5.4
18	Kab.Pati	8,816	8,929	17,745	8,816	100.0	8,929	100.0	17,745	100.0	280	3.2	331	3.7	611	3.4
19	Kab.Kudus	7,676	7,412	15,088	7,676	100.0	7,412	100.0	15,088	100.0	297	3.9	281	3.8	578	3.8
20	Kab.Jepara	10,224	10,073	20,297	10,224	100.0	10,073	100.0	20,297	100.0	329	3.2	341	3.4	670	3.3
21	Kab.Demak	10,657	10,121	20,778	10,657	100.0	10,121	100.0	20,778	100.0	329	3.1	333	3.3	662	3.2
22	Kab.Semarang	7,227	6,915	14,142	7,227	100.0	6,915	100.0	14,142	100.0	380	5.3	411	5.9	791	5.6
23	Kab.Temanggung	5,575	4,980	10,555	5,575	100.0	4,980	100.0	10,555	100.0	245	4.4	313	6.3	558	5.3
24	Kab.Kendal	8,130	7,263	15,393	8,130	100.0	7,263	100.0	15,393	100.0	575	7.1	513	7.1	1,088	7.1
25	Kab.Batang	6,554	6,049	12,603	6,554	100.0	6,049	100.0	12,603	100.0	293	4.5	347	5.7	640	5.1
26	Kab.Pekalongan	8,713	7,830	16,543	8,713	100.0	7,830	100.0	16,543	100.0	396	4.5	337	4.3	733	4.4
27	Kab.Pemalang	13,051	12,746	25,797	12,662	97.0	12,306	96.5	24,968	96.8	440	3.5	469	3.8	909	3.6
28	Kab.Tegal	14,024	12,921	26,945	14,024	100.0	12,921	100.0	26,945	100.0	571	4.1	662	5.1	1,233	4.6
29	Kab.Brebes	16,672	15,131	31,803	16,620	99.7	14,990	99.1	31,610	99.4	765	4.6	769	5.1	1,534	4.9
30	Kota Magelang	782	750	1,532	782	100.0	750	100.0	1,532	100.0	47	6.0	54	7.2	101	6.6
31	Kota Surakarta	4,870	4,867	9,737	4,870	100.0	4,867	100.0	9,737	100.0	96	2.0	132	2.7	228	2.3
32	Kota Salatiga	1,352	1,190	2,542	1,352	100.0	1,190	100.0	2,542	100.0	14	1.0	9	0.8	23	0.9
33	Kota Semarang	11,756	11,990	23,746	11,756	100.0	11,990	100.0	23,746	100.0	294	2.5	318	2.7	612	2.6
34	Kota Pekalongan	2,940	2,983	5,923	2,940	100.0	2,983	100.0	5,923	100.0	112	3.8	105	3.5	217	3.7
35	Kota Tegal	2,233	1,981	4,214	2,233	100.0	1,981	100.0	4,214	100.0	118	5.3	131	6.6	249	5.9
PROVINSI JAWA TENGAH		278,120	262,988	541,108	277,676	99.8	262,402	99.8	540,078	99.8	12,457	4.5	13,089	5.0	25,546	4.7

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

TABEL 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)						KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)*					
		L	P	L + P	L		P		L + P		L		P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kab.Cilacap	14,796	14,079	28,875	14,774	99.9	14,038	99.7	28,812	99.8	14,507	98.0	13,751	97.7	28,258	97.9
2	Kab.Banyumas	13,913	12,670	26,583	13,903	99.9	12,664	100.0	26,567	99.9	13,567	97.5	12,502	98.7	26,069	98.1
3	Kab.Purbalingga	7,638	7,143	14,781	7,624	99.8	7,131	99.8	14,755	99.8	7,298	95.5	6,835	95.7	14,133	95.6
4	Kab.Banjarnegara	8,072	7,661	15,733	8,005	99.2	7,605	99.3	15,610	99.2	7,891	97.8	7,507	98.0	15,398	97.9
5	Kab.Kebumen	10,091	9,535	19,626	10,081	99.9	9,532	100.0	19,613	99.9	9,862	97.7	9,367	98.2	19,229	98.0
6	Kab.Purworejo	4,573	4,322	8,895	4,569	99.9	4,318	99.9	8,887	99.9	4,495	98.3	4,248	98.3	8,743	98.3
7	Kab.Wonosobo	6,557	6,058	12,615	6,552	99.9	6,026	99.5	12,578	99.7	6,517	99.4	6,014	99.3	12,531	99.3
8	Kab.Magelang	8,806	8,341	17,147	8,792	99.8	8,335	99.9	17,127	99.9	8,743	99.3	8,279	99.3	17,022	99.3
9	Kab.Boyolali	6,968	6,740	13,708	6,964	99.9	6,735	99.9	13,699	99.9	6,709	96.3	6,640	98.5	13,349	97.4
10	Kab.Klaten	8,058	7,623	15,681	8,041	99.8	7,615	99.9	15,656	99.8	7,820	97.0	7,515	98.6	15,335	97.8
11	Kab.Sukoharjo	6,394	6,154	12,548	6,394	100.0	6,154	100.0	12,548	100.0	6,394	100.0	6,154	100.0	12,548	100.0
12	Kab.Wonogiri	5,403	5,427	10,830	5,343	98.9	5,366	98.9	10,709	98.9	5,218	96.6	5,315	97.9	10,533	97.3
13	Kab.Karanganyar	6,248	5,950	12,198	6,248	100.0	5,946	99.9	12,194	100.0	6,204	99.3	5,898	99.1	12,102	99.2
14	Kab.Sragen	7,254	6,802	14,056	7,251	100.0	6,798	99.9	14,049	100.0	7,239	99.8	6,798	99.9	14,037	99.9
15	Kab.Grobogan	11,175	10,396	21,571	11,070	99.1	10,387	99.9	21,457	99.5	11,276	100.9	10,085	97.0	21,361	99.0
16	Kab.Blora	6,069	5,563	11,632	6,063	99.9	5,569	100.1	11,632	100.0	6,043	99.6	5,537	99.5	11,580	99.6
17	Kab.Rembang	4,853	4,393	9,246	4,853	100.0	4,377	99.6	9,230	99.8	4,695	96.7	4,457	101.5	9,152	99.0
18	Kab.Pati	8,816	8,929	17,745	8,816	100.0	8,929	100.0	17,745	100.0	8,772	99.5	8,774	98.3	17,546	98.9
19	Kab.Kudus	7,676	7,412	15,088	7,642	99.6	7,398	99.8	15,040	99.7	7,531	98.1	7,335	99.0	14,866	98.5
20	Kab.Jepara	10,224	10,073	20,297	10,210	99.9	9,987	99.1	20,197	99.5	10,018	98.0	10,040	99.7	20,058	98.8
21	Kab.Demak	10,657	10,121	20,778	10,659	100.0	10,070	99.5	20,729	99.8	10,638	99.8	10,061	99.4	20,699	99.6
22	Kab.Semarang	7,227	6,915	14,142	7,213	99.8	6,888	99.6	14,101	99.7	6,960	96.3	6,653	96.2	13,613	96.3
23	Kab.Temanggung	5,575	4,980	10,555	5,575	100.0	4,980	100.0	10,555	100.0	5,529	99.2	4,890	98.2	10,419	98.7
24	Kab.Kendal	8,130	7,263	15,393	8,182	100.6	7,309	100.6	15,491	100.6	7,960	97.9	7,112	97.9	15,072	97.9
25	Kab.Batang	6,554	6,049	12,603	6,531	99.6	6,057	100.1	12,588	99.9	6,508	99.3	6,018	99.5	12,526	99.4
26	Kab.Pekalongan	8,713	7,830	16,543	8,713	100.0	7,830	100.0	16,543	100.0	8,526	97.9	8,001	102.2	16,527	99.9
27	Kab.Pemalang	13,051	12,746	25,797	13,051	100.0	12,746	100.0	25,797	100.0	13,004	99.6	12,696	99.6	25,700	99.6
28	Kab.Tegal	14,024	12,921	26,945	14,024	100.0	12,921	100.0	26,945	100.0	13,896	99.1	12,865	99.6	26,761	99.3
29	Kab.Brebes	16,672	15,131	31,803	16,620	99.7	14,990	99.1	31,610	99.4	16,266	97.6	14,759	97.5	31,025	97.6
30	Kota Magelang	782	750	1,532	781	99.9	748	99.7	1,529	99.8	777	99.4	746	99.5	1,523	99.4
31	Kota Surakarta	4,870	4,867	9,737	4,808	98.7	4,826	99.2	9,634	98.9	4,803	98.6	4,814	98.9	9,617	98.8
32	Kota Salatiga	1,352	1,190	2,542	1,352	100.0	1,190	100.0	2,542	100.0	1,336	98.8	1,171	98.4	2,507	98.6
33	Kota Semarang	11,756	11,990	23,746	11,746	99.9	11,995	100.0	23,741	100.0	11,528	98.1	11,894	99.2	23,422	98.6
34	Kota Pekalongan	2,940	2,983	5,923	2,939	100.0	2,977	99.8	5,916	99.9	2,912	99.0	2,961	99.3	5,873	99.2
35	Kota Tegal	2,233	1,981	4,214	2,228	99.8	1,980	99.9	4,208	99.9	2,222	99.5	1,976	99.7	4,198	99.6
PROVINSI JAWA TENGAH		278,120	262,988	541,108	277,617	99.8	262,417	99.8	540,034	99.8	273,664	98.4	259,668	98.7	533,332	98.6

Sumber: profil kab/kota dan program provinsi

Keterangan: *KN Lengkap sama dengan indikator SPM "Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

TABEL 35

**BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA < 6 BULAN			
		JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF		
			JUMLAH	%		JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kab.Cilacap	28,875	24,922	86.3	12,242	10,429	85.2	
2	Kab.Banyumas	26,583	19,156	72.1	10,961	7,240	66.1	
3	Kab.Purbalingga	14,781	12,100	81.9	13,641	9,273	68.0	
4	Kab.Banjarnegara	15,733	6,775	43.1	1,349	818	60.6	
5	Kab.Kebumen	19,626	18,217	92.8	13,868	9,603	69.2	
6	Kab.Purworejo	8,895	3,641	40.9	4,124	3,607	87.5	
7	Kab.Wonosobo	12,615	11,518	91.3	11,291	8,845	78.3	
8	Kab.Magelang	17,147	14,448	84.3	8,716	6,089	69.9	
9	Kab.Boyolali	13,708	11,020	80.4	7,698	4,913	63.8	
10	Kab.Klaten	15,681	13,940	88.9	15,022	12,341	82.2	
11	Kab.Sukoharjo	12,548	11,398	90.8	12,198	9,158	75.1	
12	Kab.Wonogiri	10,830	8,833	81.6	5,773	2,782	48.2	
13	Kab.Karanganyar	12,198	8,218	67.4	10,418	6,673	64.1	
14	Kab.Sragen	14,056	8,891	63.3	7,085	4,227	59.7	
15	Kab.Grobogan	21,571	1,635	7.6	11,424	7,563	66.2	
16	Kab.Blora	11,632	8,595	73.9	4,817	3,382	70.2	
17	Kab.Rembang	9,246	7,792	84.3	8,604	5,858	68.1	
18	Kab.Pati	17,745	15,170	85.5	14,786	11,800	79.8	
19	Kab.Kudus	15,088	10,505	69.6	8,324	4,140	49.7	
20	Kab.Jepara	20,297	20,093	99.0	8,946	6,324	70.7	
21	Kab.Demak	20,778	20,260	97.5	9,419	6,122	65.0	
22	Kab.Semarang	14,142	12,177	86.1	6,644	3,683	55.4	
23	Kab.Temanggung	10,555	9,842	93.2	5,988	5,166	86.3	
24	Kab.Kendal	15,393	13,229	85.9	16,222	8,516	52.5	
25	Kab.Batang	12,603	10,329	82.0	10,316	5,967	57.8	
26	Kab.Pekalongan	16,543	15,827	95.7	7,961	4,556	57.2	
27	Kab.Pemalang	25,797	21,553	83.5	19,230	6,995	36.4	
28	Kab.Tegal	26,945	24,531	91.0	2,363	1,209	51.2	
29	Kab.Brebes	31,803	27,252	85.7	31,462	18,351	58.3	
30	Kota Magelang	1,532	698	45.6	6,415	4,425	69.0	
31	Kota Surakarta	9,737	5,750	59.1	5,285	4,207	79.6	
32	Kota Salatiga	2,542	2,229	87.7	1,655	1,016	61.4	
33	Kota Semarang	23,746	21,672	91.3	23,746	18,523	78.0	
34	Kota Pekalongan	5,923	5,614	94.8	5,136	2,938	57.2	
35	Kota Tegal	4,214	3,414	81.0	1,633	742	45.4	
PROVINSI JAWA TENGAH		541,108	431,244	79.7	344,762	227,481	66.0	

Sumber: Profil Kabupaten/Kota
Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini

TABEL 36

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI			PELAYANAN KESEHATAN BAYI					
		L	P	L + P	L		P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	14,796	14,079	28,875	12,315	83.2	10,869	77.2	23,184	80.3
2	Kab.Banyumas	13,472	12,597	26,069	13,472	100.0	12,597	100.0	26,069	100.0
3	Kab.Purbalingga	7,633	7,143	14,776	7,296	95.6	6,837	95.7	14,133	95.6
4	Kab.Banjarnegara	7,998	7,735	15,733	7,828	97.9	7,570	97.9	15,398	97.9
5	Kab.Kebumen	10,091	9,535	19,626	10,091	100.0	9,535	100.0	19,626	100.0
6	Kab.Purworejo	4,614	4,281	8,895	4,593	99.5	4,261	99.5	8,854	99.5
7	Kab.Wonosobo	6,469	6,146	12,615	6,426	99.3	6,105	99.3	12,531	99.3
8	Kab.Magelang	8,833	8,314	17,147	8,769	99.3	8,253	99.3	17,022	99.3
9	Kab.Boyolali	7,104	6,604	13,708	6,918	97.4	6,431	97.4	13,349	97.4
10	Kab.Klaten	8,058	7,623	15,681	7,841	97.3	7,494	98.3	15,335	97.8
11	Kab.Sukoharjo	6,341	6,207	12,548	6,341	100.0	6,207	100.0	12,548	100.0
12	Kab.Wonogiri	5,440	5,269	10,709	5,440	100.0	5,269	100.0	10,709	100.0
13	Kab.Karanganyar	6,263	5,935	12,198	6,218	99.3	5,893	99.3	12,111	99.3
14	Kab.Sragen	7,233	6,823	14,056	7,223	99.9	6,814	99.9	14,037	99.9
15	Kab.Grobogan	11,064	10,557	21,621	10,924	98.7	10,423	98.7	21,347	98.7
16	Kab.Blora	6,110	5,522	11,632	6,110	100.0	5,522	100.0	11,632	100.0
17	Kab.Rembang	4,783	4,463	9,246	4,734	99.0	4,418	99.0	9,152	99.0
18	Kab.Pati	8,571	8,078	16,649	9,135	106.6	8,610	106.6	17,745	106.6
19	Kab.Kudus	7,676	7,412	15,088	7,332	95.5	7,534	101.6	14,866	98.5
20	Kab.Jepara	10,257	10,040	20,297	10,257	100.0	10,040	100.0	20,297	100.0
21	Kab.Demak	10,440	10,338	20,778	10,400	99.6	10,299	99.6	20,699	99.6
22	Kab.Semarang	7,162	6,980	14,142	6,894	96.3	6,719	96.3	13,613	96.3
23	Kab.Temanggung	5,416	5,139	10,555	5,416	100.0	5,139	100.0	10,555	100.0
24	Kab.Kendal	7,865	7,626	15,491	7,652	97.3	7,420	97.3	15,072	97.3
25	Kab.Batang	6,519	6,084	12,603	6,479	99.4	6,047	99.4	12,526	99.4
26	Kab.Pekalongan	8,713	7,830	16,543	8,713	100.0	7,830	100.0	16,543	100.0
27	Kab.Pemalang	13,298	12,499	25,797	13,226	99.5	12,432	99.5	25,658	99.5
28	Kab.Tegal	14,034	12,911	26,945	14,034	100.0	12,911	100.0	26,945	100.0
29	Kab.Brebes	16,520	15,283	31,803	16,116	97.6	14,909	97.6	31,025	97.6
30	Kota Magelang	760	772	1,532	756	99.5	767	99.4	1,523	99.4
31	Kota Surakarta	4,832	4,905	9,737	4,832	100.0	4,905	100.0	9,737	100.0
32	Kota Salatiga	1,352	1,190	2,542	1,277	94.5	1,230	103.4	2,507	98.6
33	Kota Semarang	12,454	12,619	25,073	12,454	100.0	12,619	100.0	25,073	100.0
34	Kota Pekalongan	3,047	2,876	5,923	3,043	99.9	2,873	99.9	5,916	99.9
35	Kota Tegal	2,167	2,047	4,214	2,164	99.9	2,044	99.9	4,208	99.9
PROVINSI JAWA TENGAH		277,385	263,462	540,847	272,719	98.3	258,826	98.2	531,545	98.3

Sumber: Data SPM Provinsi Jawa Tengah

TABEL 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KELURAHAN*	DESA/KELURAHAN UCI	% DESA/KELURAHAN UCI
1	2	3	4	5
1	Kab.Cilacap	284	284	100.00
2	Kab.Banyumas	331	331	100.00
3	Kab.Purbalingga	239	239	100.00
4	Kab.Banjarnegara	278	278	100.00
5	Kab.Kebumen	460	460	100.00
6	Kab.Purworejo	494	493	99.80
7	Kab.Wonosobo	265	265	100.00
8	Kab.Magelang	372	372	100.00
9	Kab.Boyolali	267	267	100.00
10	Kab.Klaten	401	401	100.00
11	Kab.Sukoharjo	167	167	100.00
12	Kab.Wonogiri	294	294	100.00
13	Kab.Karanganyar	177	176	99.44
14	Kab.Sragen	208	208	100.00
15	Kab.Grobogan	280	280	100.00
16	Kab.Blora	295	295	100.00
17	Kab.Rembang	294	294	100.00
18	Kab.Pati	406	406	100.00
19	Kab.Kudus	132	132	100.00
20	Kab.Jepara	195	195	100.00
21	Kab.Demak	249	249	100.00
22	Kab.Semarang	235	235	100.00
23	Kab.Temanggung	289	288	99.65
24	Kab.Kendal	286	286	100.00
25	Kab.Batang	248	248	100.00
26	Kab.Pekalongan	285	285	100.00
27	Kab.Pemalang	222	222	100.00
28	Kab.Tegal	287	287	100.00
29	Kab.Brebes	297	297	100.00
30	Kota Magelang	17	17	100.00
31	Kota Surakarta	54	51	94.44
32	Kota Salatiga	23	23	100.00
33	Kota Semarang	177	177	100.00
34	Kota Pekalongan	27	27	100.00
35	Kota Tegal	27	27	100.00
PROVINSI JAWA TENGAH		8,562	8,556	99.93

Sumber: Program Imunisasi
Keterangan:

* Data BPS 2019

TABEL 38

**CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI DIIMUNISASI																	
					HB0									BCG								
					< 24 Jam			1 - 7 Hari			L			P			L + P					
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kab.Cilacap	13,849	13,802	27,651	13,591	98.1	13,171	95.4	26,762	96.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,597	98.2	13,317	96.5	26,914	97.3
2	Kab.Banyumas	13,378	13,406	26,784	12,969	96.9	11,884	88.6	24,853	92.8	832	6.2	779	5.8	1,611	6.0	13,933	104.1	13,033	97.2	26,966	100.7
3	Kab.Purbalingga	7,611	7,800	15,411	6,275	82.4	5,947	76.2	12,222	79.3	431	5.7	383	4.9	814	5.3	7,049	92.6	6,755	86.6	13,804	89.6
4	Kab.Banjarnegara	7,376	7,350	14,726	7,824	106.1	7,385	100.5	15,209	103.3	70	0.9	75	1.0	145	1.0	8,042	109.0	7,670	104.4	15,712	106.7
5	Kab.Kebumen	9,144	9,224	18,368	9,472	103.6	9,034	97.9	18,506	100.8	226	2.5	183	2.0	409	2.2	10,363	113.3	9,885	107.2	20,248	110.2
6	Kab.Purworejo	4,809	4,946	9,755	4,000	83.2	3,644	73.7	7,644	78.4	311	6.5	266	5.4	577	5.9	4,337	90.2	4,184	84.6	8,521	87.4
7	Kab.Wonosobo	6,472	6,298	12,770	6,327	97.8	5,813	92.3	12,140	95.1	65	1.0	61	1.0	126	1.0	6,649	102.7	6,191	98.3	12,840	100.5
8	Kab.Magelang	9,625	9,562	19,187	9,781	101.6	9,430	98.6	19,211	100.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9,897	102.8	9,636	100.8	19,533	101.8
9	Kab.Bojolali	7,228	7,458	14,686	6,788	93.9	6,582	88.3	13,370	91.0	391	5.4	335	4.5	726	4.9	7,072	97.8	6,793	91.1	13,865	94.4
10	Kab.Klaten	8,111	8,420	16,531	6,968	85.9	6,479	76.9	13,447	81.3	906	11.2	890	10.6	1,796	10.9	7,829	96.5	7,382	87.7	15,211	92.0
11	Kab.Sukoharjo	6,262	6,381	12,643	6,293	100.5	6,101	95.6	12,394	98.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,374	101.8	6,138	96.2	12,512	99.0
12	Kab.Wonogiri	5,540	5,861	11,401	5,164	93.2	4,947	84.4	10,111	88.7	60	1.1	52	0.9	112	1.0	5,539	100.0	5,412	92.3	10,951	96.1
13	Kab.Karanganyar	6,541	6,689	13,230	6,072	92.8	5,772	86.3	11,844	89.5	14	0.2	9	0.1	23	0.2	6,077	92.9	5,753	86.0	11,830	89.4
14	Kab.Sragen	6,186	6,443	12,629	6,760	109.3	6,445	100.0	13,205	104.6	472	7.6	485	7.5	957	7.6	7,154	115.6	6,990	108.5	14,144	112.0
15	Kab.Grobogan	10,233	10,462	20,695	10,433	102.0	9,637	92.1	20,070	97.0	371	3.6	390	3.7	761	3.7	11,207	109.5	10,526	100.6	21,733	105.0
16	Kab.Blora	5,873	6,064	11,937	5,755	98.0	5,444	89.8	11,199	93.8	37	0.6	39	0.6	76	0.6	6,108	104.0	5,773	95.2	11,881	99.5
17	Kab.Rembang	4,392	4,425	8,817	4,683	106.6	4,319	97.6	9,002	102.1	2	0.0	1	0.0	3	0.0	4,747	108.1	4,310	97.4	9,057	102.7
18	Kab.Pati	8,435	8,983	17,418	8,532	101.1	7,753	86.3	16,285	93.5	691	8.2	665	7.4	1,356	7.8	9,464	112.2	8,778	97.7	18,242	104.7
19	Kab.Kudus	6,331	6,534	12,865	7,484	118.2	7,396	113.2	14,880	115.7	4	0.1	10	0.2	14	0.1	7,431	117.4	7,470	114.3	14,901	115.8
20	Kab.Jepara	10,488	10,553	21,041	9,771	93.2	9,621	91.2	19,392	92.2	23	0.2	32	0.3	55	0.3	10,022	95.6	9,646	91.4	19,668	93.5
21	Kab.Demak	9,214	9,390	18,604	10,329	112.1	9,733	103.7	20,062	107.8	393	4.3	399	4.2	792	4.3	10,737	116.5	10,086	107.4	20,823	111.9
22	Kab.Semarang	7,715	7,992	15,707	6,864	89.0	6,525	81.6	13,389	85.2	251	3.3	246	3.1	497	3.2	7,245	93.9	6,866	85.9	14,111	89.8
23	Kab.Temanggung	5,843	5,819	11,662	5,267	90.1	4,806	82.6	10,073	86.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5,397	92.4	4,953	85.1	10,350	88.7
24	Kab.Kendal	7,457	7,257	14,714	7,926	106.3	7,271	100.2	15,197	103.3	67	0.9	92	1.3	159	1.1	7,904	106.0	7,366	101.5	15,270	103.8
25	Kab.Batang	5,875	5,893	11,768	6,337	107.9	5,956	101.1	12,293	104.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,386	108.7	5,988	101.6	12,374	105.1
26	Kab.Pekalongan	7,391	7,492	14,883	8,372	113.3	7,612	101.6	15,984	107.4	100	1.4	66	0.9	166	1.1	8,722	118.0	7,906	105.5	16,628	111.7
27	Kab.Pemalang	10,569	10,790	21,359	8,374	79.2	7,915	73.4	16,289	76.3	4,190	39.6	4,251	39.4	8,441	39.5	12,684	120.0	12,161	112.7	24,845	116.3
28	Kab.Tegal	12,190	12,342	24,532	13,841	113.5	13,221	107.1	27,062	110.3	33	0.3	35	0.3	68	0.3	14,278	117.1	13,046	105.7	27,324	111.4
29	Kab.Brebes	14,534	14,398	28,932	14,970	103.0	13,505	93.8	28,475	98.4	1,422	9.8	1,314	9.1	2,736	9.5	16,283	112.0	15,143	105.2	31,426	108.6
30	Kota Magelang	792	816	1,608	761	96.1	767	94.0	1,528	95.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	759	95.8	740	90.7	1,499	93.2
31	Kota Surakarta	3,331	3,521	6,852	4,646	139.5	4,728	134.3	9,374	136.8	9	0.3	5	0.1	14	0.2	4,796	144.0	4,745	134.8	9,541	139.2
32	Kota Salatiga	1,389	1,452	2,841	1,349	97.1	1,168	80.4	2,517	88.6	2	0.1	0	0.0	2	0.1	1,400	100.8	1,306	89.9	2,706	95.2
33	Kota Semarang	13,032	13,552	26,584	11,475	88.1	12,027	88.7	23,502	88.4	266	2.0	264	1.9	530	2.0	12,343	94.7	12,577	92.8	24,920	93.7
34	Kota Pekalongan	2,447	2,447	4,894	2,855	116.7	2,859	116.8	5,714	116.8	13	0.5	10	0.4	23	0.5	2,782	113.7	2,879	117.7	5,661	115.7
35	Kota Tegal	1,954	1,994	3,948	2,127	108.9	1,912	95.9	4,039	102.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,025	103.6	1,984	99.5	4,009	101.5
PROVINSI JAWA TENGAH		261,617	265,816	527,433	260,435	99.5	246,809	92.8	507,244	96.2	11,652	4.5	11,337	4.3	22,989	4.4	276,632	105.7	263,388	99.1	540,020	102.4

Sumber: Program Imunisasi

TABEL 40

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BADUTA			BADUTA DIIMUNISASI											
					DPT-HB-Hib4						CAMPAK/MR2					
		L	P	L+P	L		P		L + P		L		P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kab.Cilacap	14,077	12,869	26,946	11,281	80.1	10,757	83.6	22,038	81.8	9,975	70.9	9,810	76.2	19,785	73.4
2	Kab.Banyumas	13,820	12,923	26,743	12,836	92.9	11,899	92.1	24,735	92.5	12,139	87.8	11,226	86.9	23,365	87.4
3	Kab.Purbalingga	7,684	7,404	15,088	6,407	83.4	6,202	83.8	12,609	83.6	6,314	82.2	6,093	82.3	12,407	82.2
4	Kab.Banjarnegara	7,309	7,066	14,375	7,389	101.1	7,273	102.9	14,662	102.0	6,740	92.2	6,711	95.0	13,451	93.6
5	Kab.Kebumen	9,427	8,488	17,915	8,646	91.7	8,301	97.8	16,947	94.6	8,524	90.4	8,011	94.4	16,535	92.3
6	Kab.Purworejo	4,994	4,635	9,629	3,502	70.1	3,365	72.6	6,867	71.3	3,480	69.7	3,184	68.7	6,664	69.2
7	Kab.Wonosobo	6,268	5,949	12,217	6,201	98.9	5,758	96.8	11,959	97.9	6,083	97.0	5,648	94.9	11,731	96.0
8	Kab.Magelang	9,828	9,249	19,077	9,094	92.5	8,983	97.1	18,077	94.8	9,171	93.3	9,083	98.2	18,254	95.7
9	Kab.Boyolali	7,616	7,088	14,704	6,967	91.5	6,722	94.8	13,689	93.1	6,872	90.2	6,587	92.9	13,459	91.5
10	Kab.Klaten	8,590	8,378	16,968	7,902	92.0	7,648	91.3	15,550	91.6	2,765	32.2	2,700	32.2	5,465	32.2
11	Kab.Sukoharjo	6,413	6,275	12,688	6,878	107.3	6,902	110.0	13,780	108.6	6,762	105.4	7,018	111.8	13,780	108.6
12	Kab.Wonogiri	5,573	5,401	10,974	4,420	79.3	4,098	75.9	8,518	77.6	4,003	71.8	3,713	68.7	7,716	70.3
13	Kab.Karanganyar	6,666	6,317	12,983	5,359	80.4	4,988	79.0	10,347	79.7	5,193	77.9	4,888	77.4	10,081	77.6
14	Kab.Sragen	6,487	6,124	12,611	6,602	101.8	6,221	101.6	12,823	101.7	6,294	97.0	6,079	99.3	12,373	98.1
15	Kab.Grobogan	10,361	9,890	20,251	7,679	74.1	7,189	72.7	14,868	73.4	8,937	86.3	8,250	83.4	17,187	84.9
16	Kab.Blora	5,932	5,368	11,300	5,702	96.1	5,627	104.8	11,329	100.3	5,401	91.0	5,357	99.8	10,758	95.2
17	Kab.Rembang	4,517	4,214	8,731	4,282	94.8	4,010	95.2	8,292	95.0	4,071	90.1	3,954	93.8	8,025	91.9
18	Kab.Pati	8,973	8,465	17,438	9,254	103.1	8,785	103.8	18,039	103.4	9,118	101.6	8,612	101.7	17,730	101.7
19	Kab.Kudus	6,520	6,290	12,810	8,156	125.1	8,468	134.6	16,624	129.8	8,199	125.8	8,376	133.2	16,575	129.4
20	Kab.Jepara	10,673	10,445	21,118	9,134	85.6	9,024	86.4	18,158	86.0	8,678	81.3	8,541	81.8	17,219	81.5
21	Kab.Demak	9,343	9,247	18,590	8,842	94.6	8,696	94.0	17,538	94.3	9,128	97.7	8,912	96.4	18,040	97.0
22	Kab.Semarang	8,038	7,833	15,871	6,504	80.9	6,025	76.9	12,529	78.9	6,241	77.6	5,863	74.8	12,104	76.3
23	Kab.Temanggung	5,941	5,634	11,575	5,167	87.0	4,866	86.4	10,033	86.7	5,051	85.0	4,703	83.5	9,754	84.3
24	Kab.Kendal	7,550	7,320	14,870	6,109	80.9	5,817	79.5	11,926	80.2	5,953	78.8	5,640	77.0	11,593	78.0
25	Kab.Batang	6,105	5,704	11,809	5,084	83.3	4,895	85.8	9,979	84.5	4,820	79.0	4,515	79.2	9,335	79.0
26	Kab.Pekalongan	7,542	7,205	14,747	6,513	86.4	6,059	84.1	12,572	85.3	5,799	76.9	5,080	70.5	10,879	73.8
27	Kab.Pemalang	10,626	9,994	20,620	8,137	76.6	8,282	82.9	16,419	79.6	7,856	73.9	7,542	75.5	15,398	74.7
28	Kab.Tegal	12,562	11,562	24,124	8,294	66.0	7,840	67.8	16,134	66.9	9,685	77.1	8,365	72.3	18,050	74.8
29	Kab.Brebes	14,957	13,853	28,810	11,728	78.4	10,972	79.2	22,700	78.8	10,036	67.1	9,799	70.7	19,835	68.8
30	Kota Magelang	838	850	1,688	590	70.4	592	69.6	1,182	70.0	505	60.3	548	64.5	1,053	62.4
31	Kota Surakarta	3,589	3,642	7,231	4,566	127.2	4,732	129.9	9,298	128.6	4,533	126.3	4,690	128.8	9,223	127.5
32	Kota Salatiga	1,548	1,515	3,063	1,109	71.6	1,060	70.0	2,169	70.8	1,050	67.8	1,005	66.3	2,055	67.1
33	Kota Semarang	13,864	14,036	27,900	16,286	117.5	16,365	116.6	32,651	117.0	15,952	115.1	16,384	116.7	32,336	115.9
34	Kota Pekalongan	2,531	2,387	4,918	2,355	93.0	2,396	100.4	4,751	96.6	2,373	93.8	2,373	99.4	4,746	96.5
35	Kota Tegal	2,111	1,994	4,105	1,236	58.6	1,191	59.7	2,427	59.1	994	47.1	1,009	50.6	2,003	48.8
PROVINSI JAWA TENGAH		268,873	255,614	524,487	240,211	89.3	232,008	90.8	472,219	90.0	228,695	85.1	220,269	86.2	448,964	85.6

Sumber: Program Imunisasi

TABEL 41

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI 6-11 BULAN			ANAK BALITA (12-59 BULAN)			BALITA (6-59 BULAN)		
		JUMLAH BAYI	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	28,236	28,236	100.0	99,974	99,974	100.0	128,210	128,210	100.0
2	Kab.Banyumas	13,750	13,734	99.9	96,983	96,751	99.8	110,733	110,485	99.8
3	Kab.Purbalingga	12,576	12,479	99.2	63,649	63,449	99.7	76,225	75,928	99.6
4	Kab.Banjarnegara	8,182	8,131	99.4	57,541	57,276	99.5	65,723	65,407	99.5
5	Kab.Kebumen	17,917	17,920	100.0	70,372	70,222	99.8	88,288	88,141	99.8
6	Kab.Purworejo	4,904	4,902	100.0	35,631	35,631	100.0	40,534	40,532	100.0
7	Kab.Wonosobo	6,614	6,614	100.0	48,450	48,450	100.0	55,064	55,064	100.0
8	Kab.Magelang	10,962	10,962	100.0	73,489	73,470	100.0	84,451	84,432	100.0
9	Kab.Bojolali	8,384	8,338	99.5	56,309	56,204	99.8	64,693	64,542	99.8
10	Kab.Klaten	15,259	15,259	100.0	54,799	54,799	100.0	70,058	70,058	100.0
11	Kab.Sukoharjo	13,212	13,207	100.0	43,459	43,349	99.7	56,671	56,556	99.8
12	Kab.Wonogiri	6,531	6,531	100.0	45,559	45,558	100.0	52,090	52,089	100.0
13	Kab.Karanganyar	13,824	13,824	100.0	49,594	49,594	100.0	63,418	63,418	100.0
14	Kab.Sragen	15,290	15,304	100.1	49,228	48,774	99.1	64,518	64,078	99.3
15	Kab.Grobogan	12,948	12,802	98.9	84,582	82,535	97.6	97,530	95,337	97.8
16	Kab.Blora	5,389	5,389	100.0	42,834	42,831	100.0	53,612	53,609	100.0
17	Kab.Rembang	4,933	4,933	100.0	34,460	34,460	100.0	39,393	39,393	100.0
18	Kab.Pati	18,821	18,821	100.0	67,652	67,652	100.0	86,473	86,473	100.0
19	Kab.Kudus	10,138	10,108	99.7	58,837	58,661	99.7	68,975	68,769	99.7
20	Kab.Jepara	11,439	11,389	99.6	69,974	69,485	99.3	81,413	80,874	99.3
21	Kab.Demak	10,787	10,807	100.2	76,974	76,982	100.0	87,761	87,789	100.0
22	Kab.Semarang	7,498	7,498	100.0	58,837	58,837	100.0	66,335	66,335	100.0
23	Kab.Temanggung	5,764	5,764	100.0	40,444	40,444	100.0	46,208	46,208	100.0
24	Kab.Kendal	8,919	8,909	99.9	56,813	56,769	99.9	65,732	65,678	99.9
25	Kab.Batang	6,586	6,586	100.0	47,018	46,826	99.6	53,604	53,412	99.6
26	Kab.Pekalongan	17,216	17,216	100.0	58,744	58,621	99.8	75,960	75,837	99.8
27	Kab.Pemalang	18,346	18,188	99.1	86,235	84,347	97.8	104,581	102,535	98.0
28	Kab.Tegal	17,045	16,894	99.1	94,105	93,435	99.3	111,150	110,329	99.3
29	Kab.Brebes	16,378	16,224	99.1	117,260	113,999	97.2	133,638	130,223	97.4
30	Kota Magelang	1,157	840	72.6	6,004	5,453	90.8	7,161	6,292	87.9
31	Kota Surakarta	5,643	5,347	94.8	29,189	27,572	94.5	34,832	32,919	94.5
32	Kota Salatiga	1,228	1,228	100.0	9,655	9,655	100.0	10,883	10,883	100.0
33	Kota Semarang	11,944	11,944	100.0	85,020	85,028	100.0	96,964	96,972	100.0
34	Kota Pekalongan	2,578	2,587	100.3	18,405	18,405	100.0	20,982	20,991	100.0
35	Kota Tegal	2,027	2,024	99.9	10,729	10,657	99.3	12,756	12,680	99.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		372,421	370,935	99.6	1,998,806	1,986,151	99.4	2,376,615	2,362,474	99.4

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

TABEL 42

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA			PELAYANAN KESEHATAN BALITA					
		L	P	L + P	L		P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	50,034	60,741	110,775	46,651	93.2	45,694	75.2	92,345	83.4
2	Kab.Banyumas	54,822	54,777	109,599	54,822	100.0	54,777	100.0	109,599	100.0
3	Kab.Purbalingga	30,240	29,198	59,438	28,426	94.0	27,710	94.9	56,136	94.4
4	Kab.Banjarnegara	33,139	40,777	73,916	26,543	80.1	33,965	83.3	60,508	81.9
5	Kab.Kebumen	49,423	49,384	98,807	47,762	96.6	47,730	96.7	95,492	96.6
6	Kab.Purworejo	18,703	17,705	36,408	17,385	93.0	16,457	93.0	33,842	93.0
7	Kab.Wonosobo	33,409	32,839	66,248	31,166	93.3	29,084	88.6	60,250	90.9
8	Kab.Magelang	43,727	42,455	86,182	37,863	86.6	38,282	90.2	76,145	88.4
9	Kab.Boyolali	36,911	36,389	73,300	36,835	99.8	36,322	99.8	73,157	99.8
10	Kab.Klaten	33,277	31,935	65,212	31,692	95.2	30,763	96.3	62,455	95.8
11	Kab.Sukoharjo	24,596	25,215	49,811	24,596	100.0	25,215	100.0	49,811	100.0
12	Kab.Wonogiri	27,053	27,038	54,091	22,547	83.3	22,942	84.9	45,489	84.1
13	Kab.Karanganyar	25,250	23,759	49,009	21,723	86.0	21,133	88.9	42,856	87.4
14	Kab.Sragen	28,059	27,025	55,084	27,072	96.5	26,431	97.8	53,503	97.1
15	Kab.Grobogan	47,068	44,780	91,848	42,107	89.5	40,060	89.5	82,167	89.5
16	Kab.Blora	22,874	21,837	44,711	22,487	98.3	21,589	98.9	44,076	98.6
17	Kab.Rembang	21,425	19,975	41,400	21,409	99.9	19,961	99.9	41,370	99.9
18	Kab.Pati	44,060	24,181	68,241	44,060	100.0	24,181	100.0	68,241	100.0
19	Kab.Kudus	38,960	36,818	75,778	34,435	88.4	35,829	97.3	70,264	92.7
20	Kab.Jepara	38,637	38,416	77,053	38,637	100.0	38,416	100.0	77,053	100.0
21	Kab.Demak	40,844	39,018	79,862	40,844	100.0	39,018	100.0	79,862	100.0
22	Kab.Semarang	28,913	28,038	56,951	25,266	87.4	24,725	88.2	49,991	87.8
23	Kab.Temanggung	23,060	22,263	45,323	23,149	100.4	22,023	98.9	45,172	99.7
24	Kab.Kendal	37,319	35,638	72,957	33,384	89.5	31,881	89.5	65,265	89.5
25	Kab.Batang	24,014	22,767	46,781	20,575	85.7	20,740	91.1	41,315	88.3
26	Kab.Pekalongan	41,578	39,469	81,047	41,578	100.0	39,469	100.0	81,047	100.0
27	Kab.Pemalang	52,204	50,984	103,188	51,199	98.1	51,414	100.8	102,613	99.4
28	Kab.Tegal	56,096	51,684	107,780	50,492	90.0	49,884	96.5	100,376	93.1
29	Kab.Brebes	62,631	59,691	122,322	53,158	84.9	52,062	87.2	105,220	86.0
30	Kota Magelang	3,335	3,147	6,482	3,174	95.2	2,995	95.2	6,169	95.2
31	Kota Surakarta	16,906	15,716	32,622	16,906	100.0	15,716	100.0	32,622	100.0
32	Kota Salatiga	5,830	5,544	11,374	5,830	100.0	5,544	100.0	11,374	100.0
33	Kota Semarang	49,691	50,601	100,292	49,691	100.0	50,601	100.0	100,292	100.0
34	Kota Pekalongan	13,872	12,926	26,798	13,152	94.8	12,255	94.8	25,407	94.8
35	Kota Tegal	7,316	6,903	14,219	7,156	97.8	6,753	97.8	13,909	97.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,165,276	1,129,633	2,294,909	1,093,773	93.9	1,061,620	94.0	2,155,393	93.9

Sumber: Data SPM Provinsi Jawa Tengah

TABEL 43

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	BALITA								
		JUMLAH SASARAN BALITA (S)			DITIMBANG					
					JUMLAH (D)			% (D/S)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	66,240	62,666	128,906	57,067	54,323	111,390	86.2	86.7	86.4
2	Kab.Banyumas	62,540	59,700	122,240	50,578	48,658	99,236	80.9	81.5	81.2
3	Kab.Purbalingga	36,986	34,135	71,121	30,998	29,360	60,358	83.8	86.0	84.9
4	Kab.Banjarnegara	37,438	35,994	73,432	31,072	30,093	61,165	83.0	83.6	83.3
5	Kab.Kebumen	43,971	41,681	85,652	39,372	37,589	76,961	89.5	90.2	89.9
6	Kab.Purworejo	23,223	21,984	45,207	19,171	18,148	37,319	82.6	82.6	82.6
7	Kab.Wonosobo	31,749	29,719	61,468	27,096	25,508	52,604	85.3	85.8	85.6
8	Kab.Magelang	43,727	42,455	86,182	36,822	35,617	72,439	84.2	83.9	84.1
9	Kab.Boyolali	36,911	36,389	73,300	30,359	29,802	60,161	82.2	81.9	82.1
10	Kab.Klaten	40,321	38,117	78,438	33,086	31,638	64,724	82.1	83.0	82.5
11	Kab.Sukoharjo	28,453	28,896	57,349	25,003	25,268	50,271	87.9	87.4	87.7
12	Kab.Wonogiri	27,053	27,038	54,091	22,547	22,942	45,489	83.3	84.9	84.1
13	Kab.Karanganyar	31,548	30,084	61,632	25,870	24,765	50,635	82.0	82.3	82.2
14	Kab.Sragen	32,548	31,233	63,781	28,469	27,415	55,884	87.5	87.8	87.6
15	Kab.Grobogan	45,840	46,008	91,848	46,341	45,635	91,976	101.1	99.2	100.1
16	Kab.Blora	28,943	27,400	56,343	22,253	21,332	43,585	76.9	77.9	77.4
17	Kab.Rembang	22,347	21,919	44,266	19,719	19,118	38,837	88.2	87.2	87.7
18	Kab.Pati	42,995	41,819	84,814	36,193	35,416	71,609	84.2	84.7	84.4
19	Kab.Kudus	33,145	33,630	66,775	27,457	27,909	55,366	82.8	83.0	82.9
20	Kab.Jepara	44,515	44,226	88,741	35,902	35,470	71,372	80.7	80.2	80.4
21	Kab.Demak	48,978	48,353	97,331	43,392	43,017	86,409	88.6	89.0	88.8
22	Kab.Semarang	37,036	35,943	72,979	32,586	31,559	64,145	88.0	87.8	87.9
23	Kab.Temanggung	26,701	25,235	51,936	23,966	22,581	46,547	89.8	89.5	89.6
24	Kab.Kendal	37,506	35,817	73,323	32,918	31,436	64,354	87.8	87.8	87.8
25	Kab.Batang	30,271	28,701	58,972	25,277	24,135	49,412	83.5	84.1	83.8
26	Kab.Pekalongan	35,737	35,862	71,599	28,703	28,866	57,569	80.3	80.5	80.4
27	Kab.Pemalang	52,204	50,984	103,188	42,545	41,594	84,139	81.5	81.6	81.5
28	Kab.Tegal	56,832	60,815	117,647	48,319	51,705	100,024	85.0	85.0	85.0
29	Kab.Brebes	74,649	70,818	145,467	58,046	55,793	113,839	77.8	78.8	78.3
30	Kota Magelang	3,324	3,103	6,427	2,739	2,586	5,325	82.4	83.3	82.9
31	Kota Surakarta	19,544	18,272	37,816	18,157	16,858	35,015	92.9	92.3	92.6
32	Kota Salatiga	5,830	5,544	11,374	4,416	4,193	8,609	75.7	75.6	75.7
33	Kota Semarang	53,050	54,021	107,071	44,536	45,363	89,899	84.0	84.0	84.0
34	Kota Pekalongan	11,475	11,011	22,486	9,719	9,348	19,067	84.7	84.9	84.8
35	Kota Tegal	7,348	6,871	14,219	5,721	5,199	10,920	77.9	75.7	76.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,260,978	1,226,443	2,487,421	1,066,415	1,040,239	2,106,654	84.6	84.8	84.7

Sumber: Profil Kabupaten/Kota dan Program Gizi Provinsi

TABEL 44

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	126,585	6,146	4.9	126,585	6,152	4.9	126,585	3,003	2.4
2	Kab.Banyumas	102,727	8,779	8.5	102,727	16,213	15.8	102,727	4,855	4.7
3	Kab.Purbalingga	60,213	2,401	4.0	62,533	4,338	6.9	61,792	842	1.4
4	Kab.Banjarnegara	59,437	4,608	7.8	44,138	10,445	23.7	44,138	708	1.6
5	Kab.Kebumen	73,348	3,785	5.2	73,394	9,361	12.8	74,362	585	0.8
6	Kab.Purworejo	45,207	0	0.0	45,207	0	0.0	45,207	0	0.0
7	Kab.Wonosobo	55,825	2,132	3.8	55,825	3,963	7.1	55,825	639	1.1
8	Kab.Magelang	30,494	2,824	9.3	30,494	5,193	17.0	86,182	17	0.0
9	Kab.Boyolali	63,664	2,095	3.3	63,664	3,386	5.3	63,664	1,211	1.9
10	Kab.Klaten	68,207	4,998	7.3	67,165	5,694	8.5	67,165	2,639	3.9
11	Kab.Sukoharjo	50,271	2,049	4.1	50,271	1,299	2.6	50,271	862	1.7
12	Kab.Wonogiri	44,661	276	0.6	44,661	3,589	8.0	44,661	1,337	3.0
13	Kab.Karanganyar	47,817	2,877	6.0	47,817	3,027	6.3	47,817	741	1.5
14	Kab.Sragen	63,781	2,267	3.6	63,781	3,607	5.7	63,781	1,435	2.2
15	Kab.Grobogan	91,970	799	0.9	91,970	0	0.0	91,970	0	0.0
16	Kab.Blora	46,784	4,503	9.6	46,784	3,833	8.2	46,784	2,449	5.2
17	Kab.Rembang	38,837	3,246	8.4	38,837	2,150	5.5	38,837	2,815	7.2
18	Kab.Pati	74,573	4,272	5.7	74,599	3,134	4.2	74,570	2,434	3.3
19	Kab.Kudus	57,659	2,057	3.6	57,659	2,682	4.7	57,659	1,696	2.9
20	Kab.Jepara	47,187	6,978	14.8	47,187	9,254	19.6	47,187	4,930	10.4
21	Kab.Demak	99,025	6,555	6.6	99,025	6,753	6.8	99,025	3,578	3.6
22	Kab.Semarang	64,145	2,345	3.7	64,145	3,915	6.1	64,145	1,795	2.8
23	Kab.Temanggung	47,368	2,610	5.5	46,786	6,245	13.3	46,786	1,996	4.3
24	Kab.Kendal	62,068	2,561	4.1	72,957	1,635	2.2	62,068	779	1.3
25	Kab.Batang	51,622	3,883	7.5	51,622	5,303	10.3	51,622	1,918	3.7
26	Kab.Pekalongan	57,569	2,195	3.8	16,225	2,617	16.1	16,225	1,362	8.4
27	Kab.Pemalang	61,607	3,567	5.8	54,995	6,123	11.1	56,997	2,098	3.7
28	Kab.Tegal	100,024	4,634	4.6	100,024	5,896	5.9	100,024	2,376	2.4
29	Kab.Brebes	113,144	9,366	8.3	113,144	9,909	8.8	113,144	4,873	4.3
30	Kota Magelang	5,325	263	4.9	5,325	352	6.6	5,325	182	3.4
31	Kota Surakarta	35,753	971	2.7	35,352	584	1.7	35,365	276	0.8
32	Kota Salatiga	8,609	263	3.1	8,609	270	3.1	8,609	87	1.0
33	Kota Semarang	89,899	2,524	2.8	89,899	2,046	2.3	89,899	1,719	1.9
34	Kota Pekalongan	19,067	1,764	9.3	18,924	1,016	5.4	18,924	1,060	5.6
35	Kota Tegal	11,800	1,232	10.4	11,800	550	4.7	11,800	535	4.5
JUMLAH (KAB/KOTA)		2,076,272	111,825	5.4	2,024,130	150,534	7.4	2,071,142	57,832	2.8

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

TABEL 46

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
		TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	RASIO TUMPATAN/	JUMLAH KASUS GIGI	JUMLAH KASUS DIRUJUK	% KASUS DIRUJUK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab.Cilacap	8,144	7,009	1.2	39,759	995	2.5
2	Kab.Banyumas	8,255	6,998	1.2	57,785	2,693	4.7
3	Kab.Purbalingga	5,238	4,058	1.3	41,237	1,725	4.2
4	Kab.Banjarnegara	5,438	2,522	2.2	41,121	2,223	5.4
5	Kab.Kebumen	12,213	3,027	4.0	59,012	843	1.4
6	Kab.Purworejo	0	0	0.0	0	0	0.0
7	Kab.Wonosobo	5,351	6,549	0.8	11,900	698	5.9
8	Kab.Magelang	9,303	8,519	1.1	65,856	1,869	2.8
9	Kab.Boyolali	2,940	4,286	0.7	39,404	1,050	2.7
10	Kab.Klaten	69,315	8,647	8.0	20,730	1,996	9.6
11	Kab.Sukoharjo	3,501	1,865	1.9	28,993	4,929	17.0
12	Kab.Wonogiri	4,834	4,207	1.1	67,835	0	0.0
13	Kab.Karanganyar	4,565	3,062	1.5	48,956	1,088	2.2
14	Kab.Sragen	5,055	4,105	1.2	33,731	1,240	3.7
15	Kab.Grobogan	3,147	2,144	1.5	39,565	1,274	3.2
16	Kab.Blora	1,656	2,657	0.6	0	0	0.0
17	Kab.Rembang	457	2,939	0.2	49,264	0	0.0
18	Kab.Pati	2,665	6,251	0.4	51,696	982	1.9
19	Kab.Kudus	6,503	3,305	2.0	21,218	751	3.5
20	Kab.Jepara	1,559	1,543	1.0	3,102	0	0.0
21	Kab.Demak	5,890	4,251	1.4	45,591	1,240	2.7
22	Kab.Semarang	11,414	5,474	2.1	57,636	1,485	2.6
23	Kab.Temanggung	5,866	8,626	0.7	44,933	435	1.0
24	Kab.Kendal	0	0	0.0	0	0	0.0
25	Kab.Batang	3,411	2,074	1.6	23,251	1,057	4.5
26	Kab.Pekalongan	2,289	1,653	1.4	4,355	2,813	64.6
27	Kab.Pemalang	2,336	6,309	0.4	40,611	1,956	4.8
28	Kab.Tegal	6,217	3,759	1.7	106,027	2,389	2.3
29	Kab.Brebes	9,091	2,681	3.4	96,784	2,338	2.4
30	Kota Magelang	2,993	1,352	2.2	15,762	207	1.3
31	Kota Surakarta	7,019	2,894	2.4	45,822	5,318	11.6
32	Kota Salatiga	0	0	0.0	0	0	0.0
33	Kota Semarang	12,116	8,355	1.5	88,633	4,448	5.0
34	Kota Pekalongan	5,832	1,800	3.2	17,153	601	3.5
35	Kota Tegal	0	0	0.0	0	0	0.0
JUMLAH (KAB/ KOTA)		234,613	132,921	1.8	1,307,722	48,643	3.7

Sumber: Profil Kabupaten/Kota

Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

TABEL 48

PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN														
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR						BERISIKO					
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kab.Cilacap	680,926	688,210	1,369,136	131,782	19.4	187,431	27.2	319,213	23.3	61,054	46.3	77,055	41.1	138,109	43.3
2	Kab.Banyumas	579,242	589,033	1,168,275	323,984	55.9	392,646	66.7	716,630	61.3	99,789	30.8	118,846	30.3	218,634	30.5
3	Kab.Purbalingga	274,444	289,669	564,113	28,766	10.5	41,357	14.3	70,123	12.4	11,887	41.3	11,168	27.0	23,055	32.9
4	Kab.Banjarnegara	314,289	317,889	632,178	33,685	10.7	28,842	9.1	62,527	9.9	1,078	3.2	959	3.3	2,037	3.3
5	Kab.Kebumen	442,683	452,982	895,665	255,741	57.8	249,927	55.2	505,668	56.5	51,009	19.9	81,990	32.8	132,999	26.3
6	Kab.Purworejo	212,284	219,374	431,658	86,802	40.9	83,997	38.3	170,799	39.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	Kab.Wonosobo	246,659	241,712	488,371	112,228	45.5	221,827	91.8	334,055	68.4	7,974	7.1	25,917	11.7	33,891	10.1
8	Kab.Magelang	473,206	469,189	942,395	126,851	26.8	127,937	27.3	254,788	27.0	23,616	18.6	28,935	22.6	52,551	20.6
9	Kab.Boyolali	306,609	315,860	622,469	263,198	85.8	255,489	80.9	518,687	83.3	19,596	7.4	28,535	11.2	48,131	9.3
10	Kab.Klaten	357,061	369,907	726,968	330,838	92.7	319,347	86.3	650,185	89.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	Kab.Sukoharjo	284,545	292,844	577,389	199,841	70.2	318,040	108.6	517,881	89.7	47,239	23.6	75,168	23.6	122,407	23.6
12	Kab.Wonogiri	351,024	374,218	725,242	197,422	56.2	185,185	49.5	382,607	52.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13	Kab.Karanganyar	164,883	168,457	333,340	168,457	102.2	164,883	97.9	333,340	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14	Kab.Sragen	269,318	281,662	550,980	13,327	4.9	154,287	54.8	167,614	30.4	10,356	77.7	21,485	13.9	31,841	19.0
15	Kab.Grobogan	466,575	473,234	939,809	84,845	18.2	83,651	17.7	168,496	17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	Kab.Blora	296,505	305,460	601,965	273,024	92.1	265,019	86.8	538,043	89.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	Kab.Rembang	209,344	209,476	418,820	171,939	82.1	171,831	82.0	343,770	82.1	26,784	15.6	36,369	21.2	63,153	18.4
18	Kab.Pati	385,517	412,221	797,738	368,606	95.6	453,354	110.0	821,960	103.0	75,805	20.6	94,897	20.9	170,702	20.8
19	Kab.Kudus	278,602	286,144	564,746	37,510	13.5	36,521	12.8	74,031	13.1	12,592	33.6	16,443	45.0	29,035	39.2
20	Kab.Jepara	170,662	170,725	341,387	170,725	100.0	170,662	100.0	341,387	100.0	19,871	11.6	30,713	18.0	50,584	14.8
21	Kab.Demak	379,548	387,230	766,778	306,857	80.8	303,439	78.4	610,296	79.6	111,918	36.5	115,622	38.1	227,540	37.3
22	Kab.Semarang	305,255	319,513	624,768	227,779	74.6	217,615	68.1	445,394	71.3	7,071	3.1	12,223	5.6	19,294	4.3
23	Kab.Temanggung	256,065	255,200	511,265	218,145	85.2	224,603	88.0	442,748	86.6	4,503	2.1	4,761	2.1	9,264	2.1
24	Kab.Kendal	350,021	332,541	682,562	205,171	58.6	215,956	64.9	421,127	61.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25	Kab.Batang	248,205	247,659	495,864	144,688	58.3	188,797	76.2	333,485	67.3	48,342	33.4	58,465	31.0	106,807	32.0
26	Kab.Pekalongan	274,701	277,439	552,140	206,876	75.3	204,833	73.8	411,709	74.6	17,978	8.7	35,756	17.5	53,734	13.1
27	Kab.Pemalang	392,961	404,865	797,826	96,498	24.6	155,397	38.4	251,895	31.6	29,587	30.7	62,777	40.4	92,364	36.7
28	Kab.Tegal	166,228	168,093	334,321	17,793	10.7	53,366	31.7	71,159	21.3	2,135	12.0	3,558	6.7	5,693	8.0
29	Kab.Brebes	569,565	556,891	1,126,456	76,296	13.4	78,032	14.0	154,328	13.7	13,943	18.3	19,375	24.8	33,318	21.6
30	Kota Magelang	42,120	42,856	84,976	42,198	100.2	42,778	99.8	84,976	100.0	2,791	6.6	4,827	11.3	7,618	9.0
31	Kota Surakarta	180,429	191,214	371,643	119,240	66.1	132,461	69.3	251,701	67.7	31,205	26.2	40,398	30.5	71,603	28.4
32	Kota Salatiga	61,318	64,230	125,548	23,530	38.4	47,063	73.3	70,593	56.2	2,135	9.1	3,501	7.4	5,636	8.0
33	Kota Semarang	564,100	593,114	1,157,214	353,470	62.7	841,338	141.9	1,194,808	103.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
34	Kota Pekalongan	103,732	102,771	206,503	17,851	17.2	16,621	16.2	34,472	16.7	3,958	22.2	4,213	25.3	8,171	23.7
35	Kota Tegal	80,793	81,945	162,738	6,159	7.6	20,385	24.9	26,544	16.3	2,314	37.6	8,622	42.3	10,936	41.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		10,739,419	10,953,827	21,693,246	5,442,122	50.7	6,654,917	60.8	12,097,039	55.8	746,529	13.7	1,022,578	15.4	1,769,107	14.6

Sumber: data spm dan profil kab/kota

TABEL 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	USIA LANJUT (60TAHUN+)								
		JUMLAH			MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	99,058	127,806	226,864	67,576	68.2	87,189	68.2	154,765	68.2
2	Kab.Banyumas	103,313	126,104	229,417	56,917	55.1	69,473	55.1	126,390	55.1
3	Kab.Purbalingga	57,623	58,792	116,415	35,168	61.0	35,882	61.0	71,050	61.0
4	Kab.Banjarnegara	67,875	76,201	144,076	22,081	32.5	24,790	32.5	46,871	32.5
5	Kab.Kebumen	78,175	86,438	164,613	63,680	81.5	70,411	81.5	134,091	81.5
6	Kab.Purworejo	54,677	62,606	117,283	30,950	56.6	35,439	56.6	66,389	56.6
7	Kab.Wonosobo	52,282	51,989	104,271	49,555	94.8	49,277	94.8	98,832	94.8
8	Kab.Magelang	83,756	84,642	168,398	49,124	58.7	49,643	58.7	98,767	58.7
9	Kab.Boyolali	73,451	75,507	148,958	71,751	97.7	73,760	97.7	145,511	97.7
10	Kab.Klaten	92,335	104,237	196,572	79,320	85.9	99,996	95.9	179,316	91.2
11	Kab.Sukoharjo	57,893	60,838	118,731	48,336	83.5	50,795	83.5	99,131	83.5
12	Kab.Wonogiri	58,293	76,531	134,824	27,953	48.0	36,698	48.0	64,651	48.0
13	Kab.Karanganyar	54,034	55,615	109,649	52,561	97.3	54,099	97.3	106,660	97.3
14	Kab.Sragen	52,862	59,030	111,892	45,674	86.4	51,004	86.4	96,678	86.4
15	Kab.Grobogan	80,885	91,560	172,445	56,493	69.8	63,949	69.8	120,442	69.8
16	Kab.Blora	55,883	60,927	116,810	45,381	81.2	49,478	81.2	94,859	81.2
17	Kab.Rembang	28,829	31,897	60,726	28,260	98.0	31,267	98.0	59,527	98.0
18	Kab.Pati	87,685	95,195	182,880	87,849	100.2	95,373	100.2	183,222	100.2
19	Kab.Kudus	32,787	53,136	85,923	6,853	20.9	11,107	20.9	17,960	20.9
20	Kab.Jepara	23,003	36,477	59,480	23,003	100.0	36,477	100.0	59,480	100.0
21	Kab.Demak	221,557	82,737	304,294	221,557	100.0	82,737	100.0	304,294	100.0
22	Kab.Semarang	57,787	60,110	117,897	44,424	76.9	46,210	76.9	90,634	76.9
23	Kab.Temanggung	49,091	53,653	102,744	46,269	94.3	50,570	94.3	96,839	94.3
24	Kab.Kendal	59,590	58,674	118,264	29,297	49.2	28,847	49.2	58,144	49.2
25	Kab.Batang	42,268	48,060	90,328	24,693	58.4	41,261	85.9	65,954	73.0
26	Kab.Pekalongan	35,513	41,101	76,614	26,251	73.9	30,382	73.9	56,633	73.9
27	Kab.Pemalang	65,818	62,880	128,698	43,143	65.5	41,217	65.5	84,360	65.5
28	Kab.Tegal	79,727	155,302	235,029	37,048	49.0	39,083	49.0	76,131	49.0
29	Kab.Brebes	96,979	108,906	205,885	59,481	61.3	66,796	61.3	126,277	61.3
30	Kota Magelang	8,195	10,157	18,352	6,441	78.6	7,984	78.6	14,425	78.6
31	Kota Surakarta	29,632	36,082	65,714	25,860	87.3	31,489	87.3	57,349	87.3
32	Kota Salatiga	15,196	9,653	24,849	11,423	75.2	7,256	75.2	18,679	75.2
33	Kota Semarang	74,044	104,928	178,972	74,411	100.5	105,448	100.5	179,859	100.5
34	Kota Pekalongan	8,856	11,533	20,389	8,856	100.0	11,533	100.0	20,389	100.0
35	Kota Tegal	7,269	10,904	18,173	7,094	97.6	10,642	97.6	17,736	97.6
JUMLAH (KAB/KOTA)		2,142,068	2,254,634	4,396,702	1,614,733	75.4	1,677,562	74.4	3,292,295	74.9

Sumber: Data SPM Provinsi Jawa Tengah

TABEL 50

**JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN													
			KELAS IBU HAMIL		ORIENTASI P4K		KEGIATAN KESEHATAN REMAJA		PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1		PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 7 DAN 10		PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1, 7, 10			
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Kab.Cilacap	38	34	89.5	26	68.4	31	81.6	34	89.5	33	86.8	33	86.8		
2	Kab.Banyumas	39	39	100.0	39	100.0	39	100.0	39	100.0	39	100.0	39	100.0		
3	Kab.Purbalingga	22	22	100.0	22	100.0	22	100.0	22	100.0	22	100.0	22	100.0		
4	Kab.Banjarnegara	35	35	100.0	35	100.0	35	100.0	35	100.0	35	100.0	35	100.0		
5	Kab.Kebumen	35	35	100.0	35	100.0	35	100.0	35	100.0	34	97.1	29	82.9		
6	Kab.Purworejo	27	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0		
7	Kab.Wonosobo	24	24	100.0	24	100.0	24	100.0	24	100.0	24	100.0	24	100.0		
8	Kab.Magelang	29	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0		
9	Kab.Boyolali	25	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0		
10	Kab.Klaten	34	34	100.0	34	100.0	34	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11	Kab.Sukoharjo	12	12	100.0	12	100.0	12	100.0	12	100.0	12	100.0	12	100.0		
12	Kab.Wonogiri	34	34	100.0	34	100.0	34	100.0	34	100.0	34	100.0	34	100.0		
13	Kab.Karanganyar	21	21	100.0	21	100.0	21	100.0	21	100.0	21	100.0	21	100.0		
14	Kab.Sragen	25	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0		
15	Kab.Grobogan	30	30	100.0	30	100.0	30	100.0	30	100.0	30	100.0	30	100.0		
16	Kab.Blora	26	26	100.0	26	100.0	26	100.0	26	100.0	26	100.0	26	100.0		
17	Kab.Rembang	17	17	100.0	17	100.0	17	100.0	17	100.0	16	94.1	16	94.1		
18	Kab.Pati	29	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0		
19	Kab.Kudus	19	19	100.0	19	100.0	19	100.0	19	100.0	19	100.0	19	100.0		
20	Kab.Jepara	21	21	100.0	21	100.0	15	71.4	21	100.0	21	100.0	21	100.0		
21	Kab.Demak	27	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0		
22	Kab.Semarang	26	26	100.0	26	100.0	26	100.0	26	100.0	26	100.0	26	100.0		
23	Kab.Temanggung	26	25	96.2	25	96.2	25	96.2	25	96.2	25	96.2	25	96.2		
24	Kab.Kendal	30	30	100.0	30	100.0	30	100.0	30	100.0	30	100.0	30	100.0		
25	Kab.Batang	21	21	100.0	21	100.0	21	100.0	21	100.0	21	100.0	21	100.0		
26	Kab.Pekalongan	27	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0	27	100.0		
27	Kab.Pemalang	25	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0	25	100.0		
28	Kab.Tegal	29	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0	29	100.0		
29	Kab.Brebes	38	38	100.0	38	100.0	38	100.0	38	100.0	38	100.0	38	100.0		
30	Kota Magelang	5	5	100.0	5	100.0	5	100.0	5	100.0	5	100.0	5	100.0		
31	Kota Surakarta	17	17	100.0	17	100.0	17	100.0	17	100.0	17	100.0	17	100.0		
32	Kota Salatiga	6	6	100.0	6	100.0	6	100.0	6	100.0	6	100.0	6	100.0		
33	Kota Semarang	37	37	100.0	37	100.0	37	100.0	37	100.0	37	100.0	37	100.0		
34	Kota Pekalongan	14	14	100.0	14	100.0	14	100.0	14	100.0	14	100.0	14	100.0		
35	Kota Tegal	8	8	100.0	8	100.0	8	100.0	8	100.0	8	100.0	8	100.0		
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	873	99.4	865	98.5	864	98.4	839	95.6	836	95.2	831	94.6		

Sumber : Profil Kab/Kota

TABEL 51

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS					KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN
				LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.Cilacap	38	6,246	2,749	58.5	1,954	41.5	4,703	593
2	Kab.Banyumas	39	16,017	2,201	51.5	2,074	48.5	4,275	498
3	Kab.Purbalingga	22	7,754	1,821	52.7	1,637	47.3	3,458	404
4	Kab.Banjarnegara	35	10,258	1,135	54.7	941	45.3	2,076	106
5	Kab.Kebumen	35	11,789	1,238	55.0	1,013	45.0	2,251	199
6	Kab.Purworejo	27	5,725	472	53.7	408	46.3	880	182
7	Kab.Wonosobo	24	5,380	1,126	51.5	1,062	48.5	2,188	541
8	Kab.Magelang	29	5,845	465	57.0	350	43.0	815	159
9	Kab.Boyolali	25	4,792	374	39.7	568	60.3	942	134
10	Kab.Klaten	34	5,778	1,124	58.2	808	41.8	1,932	129
11	Kab.Sukoharjo	12	4,338	767	54.1	651	45.9	1,418	138
12	Kab.Wonogiri	34	4,904	787	61.6	489	38.4	1,276	214
13	Kab.Karanganyar	21	3,281	285	55.5	229	44.5	514	9
14	Kab.Sragen	25	4,034	591	60.4	388	39.6	979	155
15	Kab.Grobogan	30	5,144	1,013	55.2	821	44.8	1,834	100
16	Kab.Blora	26	3,799	485	59.2	335	40.8	820	134
17	Kab.Rembang	17	4,963	581	56.2	452	43.8	1,033	193
18	Kab.Pati	29	8,081	1,419	58.8	996	41.2	2,415	172
19	Kab.Kudus	19	10,430	1,629	52.0	1,504	48.0	3,133	165
20	Kab.Jepara	21	6,063	732	53.9	626	46.1	1,358	104
21	Kab.Demak	27	9,045	1,067	56.2	830	43.8	1,897	232
22	Kab.Semarang	26	5,397	995	53.9	849	46.1	1,844	214
23	Kab.Temanggung	26	5,672	405	54.7	335	45.3	740	212
24	Kab.Kendal	30	4,373	827	52.6	745	47.4	1,572	395
25	Kab.Batang	21	5,570	812	52.7	728	47.3	1,540	122
26	Kab.Pekalongan	27	7,572	1,226	53.3	1,074	46.7	2,300	145
27	Kab.Pemalang	25	9,076	1,558	54.7	1,292	45.3	2,850	599
28	Kab.Tegal	29	13,951	1,421	53.1	1,258	46.9	2,679	900
29	Kab.Brebes	38	8,358	1,990	50.0	1,990	50.0	3,979	160
30	Kota Magelang	5	2,940	991	41.9	1,373	58.1	2,364	187
31	Kota Surakarta	17	7,809	960	58.3	688	41.7	1,648	207
32	Kota Salatiga	6	2,296	579	57.9	422	42.1	1,001	75
33	Kota Semarang	37	14,735	1,497	53.8	1,283	46.2	2,780	450
34	Kota Pekalongan	14	4,792	2,197	54.6	1,827	45.4	4,024	177
35	Kota Tegal	8	4,775	2,026	55.5	1,627	44.5	3,653	358
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	240,982	39,544	54.0	33,627	46.0	73,171	8,762
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS			241,154						
% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR								99.9	
CNR SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK								211	
PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) BERDASARKAN MODELING TAHUN 2019								82,978	
CASE DETECTION RATE (%)								88.2	
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)								88.0	

Sumber: Data Program TB Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

TABEL 53

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH BALITA	JUMLAH KUNJUNGAN BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS	JUMLAH PUSKESMAS YG MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60%	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60%	PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA	REALISASI PENEMUAN PENDETERITA PNEUMONIA PADA BALITA								BATUK BUKAN PNEUMONIA		
								PNEUMONIA		PNEUMONIA BERAT		JUMLAH			%	L	P	L + P
								L	P	L	P	L	P	L + P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kab.Cilacap	38	110,775	36,147	30	78.9	3,999	1,174	893	26	23	1,200	916	2,116	52.9	42,410	49,401	91,811
2	Kab.Banyumas	39	109,599	9,241	26	66.7	3,957	217	163	7	3	224	166	390	9.9	8,998	14,096	23,094
3	Kab.Purbalingga	22	59,438	44,198	15	68.2	2,146	1,301	919	23	12	1,324	931	2,255	105.1	39,941	58,675	98,616
4	Kab.Banjarnegara	35	73,916	45,554	26	74.3	2,668	2,419	2,135	15	12	2,434	2,147	4,581	171.7	21,768	21,056	42,824
5	Kab.Kebumen	35	98,807	45,508	35	100.0	3,567	2,886	2,500	34	24	2,920	2,524	5,444	152.6	36,454	62,491	98,945
6	Kab.Purworejo	27	36,408	13,316	27	100.0	1,314	106	86	12	7	118	93	211	16.1	25,654	36,387	62,041
7	Kab.Wonosobo	24	66,248	23,462	18	75.0	2,392	1,242	1,034	46	39	1,288	1,073	2,361	98.7	12,560	12,038	24,598
8	Kab.Magelang	29	86,182	25,224	29	100.0	3,111	462	352	1	0	463	352	815	26.2	31,755	43,065	74,820
9	Kab.Boyolali	25	73,300	23,154	24	96.0	2,646	35	19	0	1	35	20	55	2.1	10,537	11,037	21,574
10	Kab.Klaten	34	65,212	27,077	30	88.2	2,354	822	741	28	26	850	767	1,617	68.7	24,407	33,274	57,681
11	Kab.Sukoharjo	12	49,811	14,750	12	100.0	1,798	747	563	5	0	752	563	1,315	73.1	32,948	46,635	79,583
12	Kab.Wongiri	34	54,091	18,391	19	55.9	1,953	129	105	0	1	129	106	235	12.0	19,979	29,400	49,379
13	Kab.Karanganyar	21	49,009	28,562	21	100.0	1,769	1,017	943	6	4	1,023	947	1,970	111.3	10,921	13,544	24,465
14	Kab.Sragen	25	55,084	27,971	25	100.0	1,989	269	113	87	109	356	222	578	29.1	34,380	40,115	74,495
15	Kab.Grobogan	30	91,848	15,844	29	96.7	3,316	796	642	137	92	933	734	1,667	50.3	52,502	82,589	135,091
16	Kab.Blora	26	44,711	9,084	13	50.0	1,614	132	109	1	0	133	109	242	15.0	19,073	21,054	40,127
17	Kab.Rembang	17	41,400	6,874	15	88.2	1,495	163	106	0	0	163	106	269	18.0	23,190	41,851	65,041
18	Kab.Pati	29	68,241	25,511	20	69.0	2,464	420	398	1	0	421	398	819	33.2	44,214	63,642	107,856
19	Kab.Kudus	19	75,778	8,254	15	78.9	2,736	546	511	35	43	581	554	1,135	41.5	9,205	10,197	19,402
20	Kab.Jepara	21	77,053	52,062	9	42.9	2,782	768	736	78	58	846	794	1,640	59.0	43,951	80,484	124,435
21	Kab.Demak	27	79,862	50	10	37.0	2,883	695	622	71	38	766	660	1,426	49.5	12,424	15,559	27,983
22	Kab.Semarang	26	56,951	32,334	26	100.0	2,056	862	719	14	13	876	732	1,608	78.2	40,847	72,942	113,789
23	Kab.Temanggung	26	45,323	24,111	26	100.0	1,636	795	646	24	18	819	664	1,483	90.6	10,451	10,218	20,669
24	Kab.Kendal	30	72,957	29,552	21	70.0	2,634	426	405	6	0	432	405	837	31.8	15,602	19,569	35,171
25	Kab.Batang	21	46,781	32,418	21	100.0	1,689	324	311	10	4	334	315	649	38.4	15,991	15,850	31,841
26	Kab.Pekalongan	27	81,047	4,135	27	100.0	2,926	1,639	1,576	5	20	1,644	1,596	3,240	110.7	12,397	14,931	27,328
27	Kab.Pemalang	25	103,188	53,446	25	100.0	3,725	1,041	969	21	7	1,062	976	2,038	54.7	32,244	34,808	67,052
28	Kab.Tegal	29	107,780	16,728	24	82.8	3,891	2,630	2,240	49	63	2,679	2,303	4,982	128.0	44,121	59,678	103,799
29	Kab.Brebes	38	122,322	64,910	35	92.1	4,416	1,708	1,557	39	22	1,747	1,579	3,326	75.3	29,361	30,762	60,123
30	Kota Magelang	5	6,482	5,286	4	80.0	234	170	129	4	0	174	129	303	129.5	9,197	14,486	23,683
31	Kota Surakarta	17	32,622	17,199	12	70.6	1,178	138	115	3	5	141	120	261	22.2	7,720	8,734	16,454
32	Kota Salatiga	6	11,374	5,062	6	100.0	411	191	175	1	3	192	178	370	90.1	2,811	2,705	5,516
33	Kota Semarang	37	100,292	75,513	36	97.3	3,865	2,402	2,007	38	22	2,440	2,029	4,469	115.6	36,554	34,657	71,211
34	Kota Pekalongan	14	26,798	10,715	14	100.0	967	410	371	45	41	455	412	867	89.6	10,093	12,268	22,361
35	Kota Tegal	8	14,219	10,130	5	62.5	513	295	189	127	102	422	291	713	138.9	20,310	17,129	37,439
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	2,294,909	881,773	730	83.1	83,091	29,377	25,099	999	812	30,376	25,911	56,287	67.7	844,970	1,135,327	1,980,297
Prevalensi pneumonia pada balita (%)			3.61															

Sumber: (sebutkan)

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas

TABEL 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KELOMPOK UMUR	HIV			PROPORSI KELOMPOK UMUR
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	≤ 4 TAHUN	7	1	8	0.3
2	5 - 14 TAHUN	45	12	57	2.1
3	15 - 19 TAHUN	23	12	35	1.3
4	20 - 24 TAHUN	14	13	27	1.0
5	25 - 49 TAHUN	489	276	765	28.3
6	≥ 50 TAHUN	1,215	597	1,812	67.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,793	911	2,704	
PROPORSI JENIS KELAMIN		66.3	33.7		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					736,939
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					667,761
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					90.6

Sumber: Program HIV Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 55

JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KELOMPOK UMUR	KASUS BARU AIDS				KASUS KUMULATIF AIDS				JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS		
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	< 1 TAHUN	5	1	6	0.3	12	2	14	0.6	0	1	1
2	1 - 4 TAHUN	30	8	38	1.6	40	35	75	3.2	1	1	2
3	5 - 14 TAHUN	16	8	24	1.0	47	48	95	4.1	1	2	3
4	15 - 19 TAHUN	10	9	19	0.8	86	89	175	7.6	4	1	5
5	20 - 29 TAHUN	333	188	521	22.5	708	438	1,146	49.5	9	7	16
6	30 - 39 TAHUN	557	238	795	34.3	1,107	775	1,882	81.3	44	20	64
7	40 - 49 TAHUN	270	168	438	18.9	713	584	1,297	56.0	26	14	40
8	50 - 59 TAHUN	301	84	385	16.6	268	200	468	20.2	24	3	27
9	≥ 60 TAHUN	75	15	90	3.9	114	34	148	6.4	5	3	8
10	TIDAK DIKETAHUI	0	0	0	0.0	6	3	9	0.4	0	0	0
JUMLAH		1,597	719	2,316		3,101	2,208	5,309		114	52	166
PROPORSI JENIS KELAMIN		69.0	31.0			58.4	41.6			68.7	31.3	

Sumber: Profil Kab/Kota dan program provinsi

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru ditemukan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 56

**KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TARGET PENEMUAN		DIARE											
						DILAYANI				MENDAPAT ORALIT				MENDAPAT ZINC			
				SEMUA UMUR		BALITA		SEMUA UMUR		BALITA		SEMUA UMUR		BALITA		BALITA	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Kab.Cilacap	38	1,727,098	46,632	18,677	13,981	30.0	3,887	20.8	9,770	69.9	3,038	78.2	3,256	83.8		
2	Kab.Banyumas	39	1,693,006	45,711	18,478	34,958	76.5	10,485	56.7	24,354	69.7	7,783	74.2	9,114	86.9		
3	Kab.Purbalingga	22	933,989	25,218	10,021	23,653	93.8	8,976	89.6	15,461	65.4	7,151	79.7	7,487	83.4		
4	Kab.Banjarnegara	35	923,192	24,926	12,462	16,147	64.8	8,115	65.1	11,514	71.3	6,657	82.0	6,269	77.3		
5	Kab.Kebumen	35	1,197,982	32,346	16,659	29,620	91.6	10,880	65.3	27,966	94.4	11,337	104.2	13,991	128.6		
6	Kab.Purworejo	27	718,316	19,395	6,138	16,704	86.1	4,606	75.0	6,936	41.5	1,991	43.2	4,285	93.0		
7	Kab.Wonosobo	24	790,504	21,344	11,169	16,710	78.3	7,027	62.9	18,624	111.5	7,074	100.7	9,644	137.2		
8	Kab.Magelang	29	1,290,591	34,846	14,530	17,961	51.5	5,016	34.5	13,382	74.5	789	15.7	4,536	90.4		
9	Kab.Bojolali	25	984,807	26,590	12,358	15,018	56.5	3,322	26.9	8,234	54.8	2,563	77.2	2,271	68.4		
10	Kab.Klaten	34	1,174,986	31,725	10,995	26,918	84.8	7,026	63.9	21,167	78.6	5,015	71.4	5,395	76.8		
11	Kab.Sukoharjo	12	891,912	24,082	8,398	16,844	69.9	4,695	55.9	6,276	37.3	889	18.9	4,002	85.2		
12	Kab.Wonogiri	34	959,492	25,906	9,120	8,509	32.8	1,530	16.8	206	2.4	69	4.5	40	2.6		
13	Kab.Karanganyar	21	886,519	23,936	8,263	13,718	57.3	3,011	36.4	1,159	8.4	198	6.6	179	5.9		
14	Kab.Sragen	25	890,518	24,044	9,287	20,196	84.0	4,052	43.6	10,995	54.4	2,748	67.8	3,427	84.6		
15	Kab.Grobogan	30	1,377,788	37,200	15,486	5,370	14.4	1,791	11.6	6,666	124.1	4,877	272.3	1,001	55.9		
16	Kab.Blora	26	865,013	23,355	7,538	9,135	39.1	2,260	30.0	6,737	73.7	2,154	95.3	1,235	54.6		
17	Kab.Rembang	17	638,188	17,231	6,980	7,704	44.7	2,730	39.1	6,132	79.6	5,966	218.5	1,920	70.3		
18	Kab.Pati	29	1,259,590	34,009	11,505	15,903	46.8	2,663	23.1	11,356	71.4	2,735	102.7	1,834	68.9		
19	Kab.Kudus	19	871,311	23,525	12,776	4,653	19.8	1,428	11.2	3,015	64.8	819	57.4	790	55.3		
20	Kab.Jepara	21	1,257,912	33,964	12,991	13,874	40.8	3,230	24.9	9,081	65.5	2,236	69.2	3,633	112.5		
21	Kab.Demak	27	1,162,805	31,396	13,465	21,674	69.0	7,908	58.7	15,848	73.1	5,921	74.9	5,921	74.9		
22	Kab.Semarang	26	1,053,786	28,452	9,602	15,764	55.4	3,998	41.6	15,862	100.6	3,683	92.1	3,563	89.1		
23	Kab.Temanggung	26	772,018	20,844	7,641	11,293	54.2	3,604	47.2	8,952	79.3	3,210	89.1	3,917	108.7		
24	Kab.Kendal	30	971,086	26,219	12,301	12,145	46.3	3,645	29.6	2,113	17.4	1,673	45.9	846	23.2		
25	Kab.Batang	21	768,583	20,752	7,887	12,373	59.6	4,439	56.3	6,615	53.5	3,212	72.4	3,839	86.5		
26	Kab.Pekalongan	27	897,711	24,238	13,665	20,378	84.1	7,519	55.0	23,327	114.5	11,593	154.2	11,071	147.2		
27	Kab.Pemalang	25	1,302,813	35,176	17,397	28,056	79.8	9,227	53.0	4,494	16.0	3,323	36.0	781	8.5		
28	Kab.Tegal	29	1,440,698	38,899	18,172	35,969	92.5	15,025	82.7	35,278	98.1	14,686	97.7	14,710	97.9		
29	Kab.Brebes	38	1,809,096	48,846	20,623	13,092	26.8	3,956	19.2	7,204	55.0	4,014	101.5	4,965	125.5		
30	Kota Magelang	5	122,111	3,297	1,093	3,891	118.0	984	90.0	3,078	79.1	571	58.0	761	77.3		
31	Kota Surakarta	17	519,587	14,029	5,500	12,096	86.2	2,894	52.6	9,952	82.3	2,460	85.0	2,684	92.7		
32	Kota Salatiga	6	194,084	5,240	1,918	4,477	85.4	1,124	58.6	3,738	83.5	1,066	94.8	1,039	92.4		
33	Kota Semarang	37	1,814,110	48,981	16,909	32,484	66.3	10,137	59.9	33,359	102.7	10,093	99.6	11,201	110.5		
34	Kota Pekalongan	14	307,097	8,292	4,518	9,321	112.4	3,545	78.5	8,887	95.3	3,377	95.3	3,377	95.3		
35	Kota Tegal	8	249,905	6,747	2,397	13,020	193.0	4,437	185.1	13,108	100.7	4,823	108.7	6,425	144.8		
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	34,718,204	937,392	386,922	573,609	61.2	179,172	46.3	410,846	71.6	149,794	83.6	159,409	89.0		
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK				270	843												

Sumber: (sebutkan)

Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
 - Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

TABEL 57

KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KASUS BARU								
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	0	5	5	1	26	27	1	31	32
2	Kab.Banyumas	39	0	0	0	0	16	16	0	16	16
3	Kab.Purbalingga	22	0	0	0	1	22	23	1	22	23
4	Kab.Banjarnegara	35	0	0	0	0	19	19	0	19	19
5	Kab.Kebumen	35	0	0	0	2	33	35	2	33	35
6	Kab.Purworejo	27	0	2	2	0	6	6	0	8	8
7	Kab.Wonosobo	24	0	1	1	0	11	11	0	12	12
8	Kab.Magelang	29	0	0	0	0	8	8	0	8	8
9	Kab.Boyolali	25	0	5	5	0	14	14	0	19	19
10	Kab.Klaten	34	0	0	0	6	8	14	6	8	14
11	Kab.Sukoharjo	12	0	3	3	0	17	17	0	20	20
12	Kab.Wonogiri	34	0	0	0	0	20	20	0	20	20
13	Kab.Karanganyar	21	0	2	2	0	8	8	0	10	10
14	Kab.Sragen	25	0	4	4	0	37	37	0	41	41
15	Kab.Grobogan	30	0	0	0	0	28	28	0	28	28
16	Kab.Blora	26	0	4	4	2	82	84	2	86	88
17	Kab.Rembang	17	0	9	9	1	80	81	1	89	90
18	Kab.Pati	29	0	3	3	1	51	52	1	54	55
19	Kab.Kudus	19	3	2	5	0	33	33	3	35	38
20	Kab.Jepara	21	0	3	3	0	67	67	0	70	70
21	Kab.Demak	27	0	0	0	1	62	63	1	62	63
22	Kab.Semarang	26	0	0	0	0	3	3	0	3	3
23	Kab.Temanggung	26	0	0	0	0	1	1	0	1	1
24	Kab.Kendal	30	0	1	1	1	20	21	1	21	22
25	Kab.Batang	21	2	4	6	1	34	35	3	38	41
26	Kab.Pekalongan	27	1	9	10	2	56	58	3	65	68
27	Kab.Pemalang	25	3	5	8	8	96	104	11	101	112
28	Kab.Tegal	29	4	28	32	10	150	160	14	178	192
29	Kab.Brebes	38	4	19	23	95	97	192	99	116	215
30	Kota Magelang	5	0	0	0	0	1	1	0	1	1
31	Kota Surakarta	17	0	0	0	0	7	7	0	7	7
32	Kota Salatiga	6	0	3	3	1	3	4	1	6	7
33	Kota Semarang	37	2	0	2	5	8	13	7	8	15
34	Kota Pekalongan	14	5	18	23	3	58	61	8	76	84
35	Kota Tegal	8	2	2	4	1	17	18	3	19	22
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	26	132	158	142	1,199	1,341	168	1,331	1,499
PROPORSI JENIS KELAMIN			16.5	83.5		10.6	89.4		11.2	88.8	
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK									1.0	7.6	4.3

Sumber: Program Kusta

TABEL 58

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN, MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KASUS BARU							
			PENDERITA KUSTA	CACAT TINGKAT 0		CACAT TINGKAT 2		PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN		PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab.Cilacap	38	32	19	59.4	7	21.9	1	3.1	0
2	Kab.Banyumas	39	16	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0
3	Kab.Purbalingga	22	23	8	34.8	4	17.4	0	0.0	0
4	Kab.Banjarnegara	35	19	16	84.2	3	15.8	0	0.0	0
5	Kab.Kebumen	35	35	31	88.6	2	5.7	2	5.7	0
6	Kab.Purworejo	27	8	7	87.5	0	0.0	0	0.0	0
7	Kab.Wonosobo	24	12	3	25.0	5	41.7	0	0.0	0
8	Kab.Magelang	29	8	7	87.5	0	0.0	0	0.0	0
9	Kab.Boyolali	25	19	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0
10	Kab.Klaten	34	14	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0
11	Kab.Sukoharjo	12	20	14	70.0	1	5.0	0	0.0	0
12	Kab.Wonogiri	34	20	15	75.0	1	5.0	0	0.0	0
13	Kab.Karanganyar	21	10	6	60.0	4	40.0	0	0.0	0
14	Kab.Sragen	25	41	25	61.0	14	34.1	0	0.0	0
15	Kab.Grobogan	30	28	19	67.9	7	25.0	0	0.0	0
16	Kab.Blora	26	88	72	81.8	9	10.2	0	0.0	0
17	Kab.Rembang	17	90	77	85.6	0	0.0	1	1.1	0
18	Kab.Pati	29	55	44	80.0	0	0.0	3	5.5	0
19	Kab.Kudus	19	38	35	92.1	0	0.0	2	5.3	0
20	Kab.Jepara	21	70	60	85.7	3	4.3	3	4.3	0
21	Kab.Demak	27	63	62	98.4	1	1.6	1	1.6	0
22	Kab.Semarang	26	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0
23	Kab.Temanggung	26	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0
24	Kab.Kendal	30	22	14	63.6	5	22.7	1	4.5	0
25	Kab.Batang	21	41	38	92.7	2	4.9	3	7.3	0
26	Kab.Pekalongan	27	68	57	83.8	5	7.4	4	5.9	0
27	Kab.Pemalang	25	112	97	86.6	3	2.7	0	0.0	0
28	Kab.Tegal	29	192	146	76.0	25	13.0	14	7.3	1
29	Kab.Brebes	38	215	0	0.0	6	2.8	0	0.0	0
30	Kota Magelang	5	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0
31	Kota Surakarta	17	7	5	71.4	0	0.0	0	0.0	0
32	Kota Salatiga	6	7	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0
33	Kota Semarang	37	15	6	40.0	0	0.0	3	20.0	0
34	Kota Pekalongan	14	84	77	91.7	2	2.4	8	9.5	0
35	Kota Tegal	8	22	12	54.5	4	18.2	3	13.6	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	1,499	1,019	68.0	114	7.6	49	3.3	1
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK						3.3				

Sumber: Program Kusta dan Profil Kabupaten/Kota

TABEL 59

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KASUS TERDAFTAR								
			Pausi Basiler/Kusta kering			Multi Basiler/Kusta Basah			JUMLAH		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	0	4	4	1	26	27	1	30	31
2	Kab.Banyumas	39	0	0	0	0	25	25	0	25	25
3	Kab.Purbalingga	22	0	0	0	1	42	43	1	42	43
4	Kab.Banjarnegara	35	0	0	0	0	20	20	0	20	20
5	Kab.Kebumen	35	0	2	2	2	34	36	2	36	38
6	Kab.Purworejo	27	0	1	1	0	8	8	0	9	9
7	Kab.Wonosobo	24	0	1	1	0	17	17	0	18	18
8	Kab.Magelang	29	0	0	0	0	15	15	0	15	15
9	Kab.Boyolali	25	0	5	5	0	14	14	0	19	19
10	Kab.Klaten	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab.Sukoharjo	12	0	1	1	0	21	21	0	22	22
12	Kab.Wonogiri	34	0	0	0	0	22	22	0	22	22
13	Kab.Karanganyar	21	0	2	2	2	18	20	2	20	22
14	Kab.Sragen	25	0	1	1	0	43	43	0	44	44
15	Kab.Grobogan	30	0	0	0	2	62	64	2	62	64
16	Kab.Blora	26	0	2	2	3	97	100	3	99	102
17	Kab.Rembang	17	0	9	9	1	79	80	1	88	89
18	Kab.Pati	29	0	0	0	2	96	98	2	96	98
19	Kab.Kudus	19	3	0	3	0	33	33	3	33	36
20	Kab.Jepara	21	0	2	2	2	120	122	2	122	124
21	Kab.Demak	27	0	2	2	2	88	90	2	90	92
22	Kab.Semarang	26	0	0	0	0	15	15	0	15	15
23	Kab.Temanggung	26	0	0	0	0	1	1	0	1	1
24	Kab.Kendal	30	0	1	1	1	17	18	1	18	19
25	Kab.Batang	21	2	4	6	7	70	77	9	74	83
26	Kab.Pekalongan	27	1	5	6	3	58	61	4	63	67
27	Kab.Pemalang	25	3	8	11	9	145	154	12	153	165
28	Kab.Tegal	29	1	17	18	11	165	176	12	182	194
29	Kab.Brebes	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Magelang	5	0	0	0	0	2	2	0	2	2
31	Kota Surakarta	17	0	0	0	0	10	10	0	10	10
32	Kota Salatiga	6	0	0	0	1	3	4	1	3	4
33	Kota Semarang	37	0	1	1	1	6	7	1	7	8
34	Kota Pekalongan	14	3	11	14	3	67	70	6	78	84
35	Kota Tegal	8	1	0	1	1	19	20	2	19	21
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	14	79	93	55	1,458	1,513	69	1,537	1,606
ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK											0.5

Sumber: Program Kusta

TABEL 60

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KUSTA (PB)									KUSTA (MB)								
			TAHUN -1						TAHUN -2											
			PENDERITA PB ^a			RFT PB			PENDERITA MB ^b			RFT MB								
			L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kab.Cilacap	38	4	3	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	12	35	1	4.3	8	66.7	9	25.7
2	Kab.Banyumas	39	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	5	21	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Kab.Purbalingga	22	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5	24	0	0.0	1	20.0	1	4.2
4	Kab.Banjarnegara	35	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	5	33	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	Kab.Kebumen	35	1	1	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	13	26	0	0.0	5	38.5	5	19.2
6	Kab.Purworejo	27	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4	11	0	0.0	3	75.0	3	27.3
7	Kab.Wonosobo	24	0	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	3	13	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	Kab.Magelang	29	1	1	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	Kab.Boyolali	25	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	12	24	0	0.0	2	16.7	2	8.3
10	Kab.Klaten	34	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	9	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	Kab.Sukoharjo	12	6	3	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	4	23	0	0.0	4	100.0	4	17.4
12	Kab.Wonogiri	34	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	4	17	0	0.0	2	50.0	2	11.8
13	Kab.Karanganyar	21	0	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	2	15	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14	Kab.Sragen	25	2	0	2	0	0.0	2	0.0	2	100.0	29	8	37	0	0.0	8	100.0	8	21.6
15	Kab.Grobogan	30	1	6	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	4	26	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	Kab.Blora	26	1	3	4	1	100.0	2	66.7	3	75.0	101	50	151	3	3.0	26	52.0	29	19.2
17	Kab.Rembang	17	2	3	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	29	68	1	2.6	3	10.3	4	5.9
18	Kab.Pati	29	1	2	3	0	0.0	2	100.0	2	0.0	42	17	59	0	0.0	1	5.9	1	1.7
19	Kab.Kudus	19	2	1	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	13	44	0	0.0	12	92.3	12	27.3
20	Kab.Jepara	21	5	3	8	0	0.0	1	33.3	1	12.5	56	36	92	1	1.8	8	22.2	9	9.8
21	Kab.Demak	27	0	8	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47	20	67	0	0.0	1	5.0	1	1.5
22	Kab.Semarang	26	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23	Kab.Temanggung	26	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24	Kab.Kendal	30	0	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2	6	0	0.0	1	50.0	1	16.7
25	Kab.Batang	21	1	2	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	20	39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26	Kab.Pekalongan	27	3	3	6	0	0.0	1	33.3	1	16.7	55	20	75	2	3.6	25	125.0	27	36.0
27	Kab.Pemalang	25	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	126	53	179	0	0.0	11	20.8	11	6.1
28	Kab.Tegal	29	9	9	18	0	0.0	6	66.7	6	33.3	154	60	214	0	0.0	41	68.3	41	19.2
29	Kab.Brebes	38	20	26	46	0	0.0	0	0.0	0	0.0	188	113	301	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	Kota Magelang	5	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	0	0.0	1	0.0	1	50.0
31	Kota Surakarta	17	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2	5	0	0.0	2	100.0	2	40.0
32	Kota Salatiga	6	0	2	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
33	Kota Semarang	37	1	1	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	6	32	0	0.0	0	0.0	0	0.0
34	Kota Pekalongan	14	4	2	6	1	25.0	0	0.0	1	16.7	32	17	49	0	0.0	15	88.2	15	30.6
35	Kota Tegal	8	2	2	4	1	50.0	2	100.0	3	75.0	28	9	37	1	3.6	5	55.6	6	16.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	71	84	155	3	4.2	16	19.0	19	12.3	1,210	564	1,774	9	0.7	185	32.8	194	10.9

Sumber: Program Kusta

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2019, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2018 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2019, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

TABEL 61

JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN*	JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)
1	2	3	4	5
1	Kab.Cilacap	38	436,322	10
2	Kab.Banyumas	39	401,203	18
3	Kab.Purbalingga	22	233,056	6
4	Kab.Banjarnegara	35	223,909	7
5	Kab.Kebumen	35	298,760	8
6	Kab.Purworejo	27	160,568	4
7	Kab.Wonosobo	24	198,416	7
8	Kab.Magelang	29	298,549	8
9	Kab.Boyolali	25	223,356	7
10	Kab.Klaten	34	246,801	16
11	Kab.Sukoharjo	12	193,154	8
12	Kab.Wonogiri	34	186,032	-
13	Kab.Karanganyar	21	198,940	11
14	Kab.Sragen	25	194,402	4
15	Kab.Grobogan	30	326,125	2
16	Kab.Blora	26	188,743	9
17	Kab.Rembang	17	138,865	5
18	Kab.Pati	29	273,881	28
19	Kab.Kudus	19	198,321	4
20	Kab.Jepara	21	310,708	11
21	Kab.Demak	27	292,999	33
22	Kab.Semarang	26	234,842	12
23	Kab.Temanggung	26	174,866	4
24	Kab.Kendal	30	227,225	6
25	Kab.Batang	21	182,393	9
26	Kab.Pekalongan	27	234,987	1
27	Kab.Pemalang	25	341,739	13
28	Kab.Tegal	29	379,728	8
29	Kab.Brebes	38	461,851	15
30	Kota Magelang	5	24,962	1
31	Kota Surakarta	17	103,877	2
32	Kota Salatiga	6	40,625	6
33	Kota Semarang	37	386,617	10
34	Kota Pekalongan	14	74,780	2
35	Kota Tegal	8	59,403	5
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	8,151,005	300
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN				3.7

Sumber: Program Surveilens

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

* Data BPS 2019

TABEL 62

JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH KASUS PD3I																	
			DIFTERI				PERTUSIS			TETANUS NEONATORUM				HEPATITIS B			SUSPEK CAMPAK			
			JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS			L	P	L+P
			L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Kab.Cilacap	38	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
2	Kab.Banyumas	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	35	71
3	Kab.Purbalingga	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13
4	Kab.Banjarnegara	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	31
5	Kab.Kebumen	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	164	237	16	18	34
6	Kab.Purworejo	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	28	62
7	Kab.Wonosobo	24	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	80	71	151
8	Kab.Magelang	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	173	178	7	7	14
9	Kab.Boyolali	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	15	14	29
10	Kab.Klaten	34	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	73	139
11	Kab.Sukoharjo	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	198	385
12	Kab.Wonogiri	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Kab.Karanganyar	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	27
14	Kab.Sragen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	13
15	Kab.Grobogan	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
16	Kab.Blora	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	15
17	Kab.Rembang	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9
18	Kab.Pati	29	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	17	45	62	8	12	20
19	Kab.Kudus	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	1	1
20	Kab.Jepara	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	20	54
21	Kab.Demak	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	10	21	31
22	Kab.Semarang	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	25
23	Kab.Temanggung	26	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	18	22	28	50
24	Kab.Kendal	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
25	Kab.Batang	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	16
26	Kab.Pekalongan	27	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
27	Kab.Pemalang	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
28	Kab.Tegal	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19
29	Kab.Brebes	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	342	6	4	10
30	Kota Magelang	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	19
31	Kota Surakarta	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	33	3	6	9
32	Kota Salatiga	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	29	68
33	Kota Semarang	37	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	50	116	16	15	31
34	Kota Pekalongan	14	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0	0	0
35	Kota Tegal	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	4	5	9	0	0	2	2	0	0	0	0	176	1,121	1,297	704	685	1,389	
CASE FATALITY RATE (%)						0.0							0.0							
INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK																	2.0	2.0	4.0	

Sumber: profil kab/kota dan program provinsi

TABEL 63

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KLB DI DESA/KELURAHAN		
			JUMLAH	DITANGANI <24 JAM	%
1	2	3	4	5	6
1	Kab.Cilacap	38	1	1	100.0
2	Kab.Banyumas	39	0	0	0.0
3	Kab.Purbalingga	22	0	0	0.0
4	Kab.Banjarnegara	35	2	2	100.0
5	Kab.Kebumen	35	0	0	0.0
6	Kab.Purworejo	27	0	0	0.0
7	Kab.Wonosobo	24	4	4	100.0
8	Kab.Magelang	29	0	0	0.0
9	Kab.Boyolali	25	0	0	0.0
10	Kab.Klaten	34	2	2	100.0
11	Kab.Sukoharjo	12	4	4	100.0
12	Kab.Wonogiri	34	4	4	100.0
13	Kab.Karanganyar	21	3	3	100.0
14	Kab.Sragen	25	1	1	100.0
15	Kab.Grobogan	30	2	2	100.0
16	Kab.Blora	26	0	0	0.0
17	Kab.Rembang	17	0	0	0.0
18	Kab.Pati	29	1	1	100.0
19	Kab.Kudus	19	1	1	100.0
20	Kab.Jepara	21	4	4	100.0
21	Kab.Demak	27	0	0	0.0
22	Kab.Semarang	26	0	0	0.0
23	Kab.Temanggung	26	4	4	100.0
24	Kab.Kendal	30	4	4	100.0
25	Kab.Batang	21	1	1	100.0
26	Kab.Pekalongan	27	1	1	100.0
27	Kab.Pemalang	25	1	1	100.0
28	Kab.Tegal	29	1	1	100.0
29	Kab.Brebes	38	1	1	100.0
30	Kota Magelang	5	0	0	0.0
31	Kota Surakarta	17	0	0	0.0
32	Kota Salatiga	6	0	0	0.0
33	Kota Semarang	37	1	1	100.0
34	Kota Pekalongan	14	3	3	100.0
35	Kota Tegal	8	0	0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	46	46	100.0

Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi

TABEL 65

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)								
			JUMLAH KASUS			MENINGGAL			CFR (%)		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	273	203	476	5	4	9	1.9	1.9	1.9
2	Kab.Banyumas	39	116	86	202	7	5	12	5.9	5.9	5.9
3	Kab.Purbalingga	22	288	214	502	3	3	6	1.2	1.2	1.2
4	Kab.Banjarnegara	35	159	118	277	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Kab.Kebumen	35	148	111	259	1	0	1	0.4	0.4	0.4
6	Kab.Purworejo	27	47	35	82	1	0	1	1.2	1.2	1.2
7	Kab.Wonosobo	24	45	33	78	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8	Kab.Magelang	29	123	92	215	1	1	2	0.9	0.9	0.9
9	Kab.Boyolali	25	237	176	413	1	0	1	0.2	0.2	0.2
10	Kab.Klaten	34	171	127	298	3	2	5	1.7	1.7	1.7
11	Kab.Sukoharjo	12	180	135	315	6	4	10	3.2	3.2	3.2
12	Kab.Wonogiri	34	34	25	59	1	1	2	3.4	3.4	3.4
13	Kab.Karanganyar	21	480	358	838	4	3	7	0.8	0.8	0.8
14	Kab.Sragen	25	70	52	122	0	0	0	0.0	0.0	0.0
15	Kab.Grobogan	30	45	34	79	3	2	5	6.3	6.3	6.3
16	Kab.Blora	26	178	133	311	4	3	7	2.3	2.3	2.3
17	Kab.Rembang	17	54	41	95	2	1	3	3.2	3.2	3.2
18	Kab.Pati	29	198	148	346	1	1	2	0.6	0.6	0.6
19	Kab.Kudus	19	107	79	186	9	6	15	8.1	8.1	8.1
20	Kab.Jepara	21	209	156	365	2	2	4	1.1	1.1	1.1
21	Kab.Demak	27	90	67	157	0	0	0	0.0	0.0	0.0
22	Kab.Semarang	26	262	195	457	1	1	2	0.4	0.4	0.4
23	Kab.Temanggung	26	230	171	401	1	1	2	0.5	0.5	0.5
24	Kab.Kendal	30	106	79	185	1	0	1	0.5	0.5	0.5
25	Kab.Batang	21	206	153	359	2	1	3	0.8	0.8	0.8
26	Kab.Pekalongan	27	133	99	232	0	0	0	0.0	0.0	0.0
27	Kab.Pemalang	25	45	34	79	0	0	0	0.0	0.0	0.0
28	Kab.Tegal	29	201	150	351	2	1	3	0.9	0.9	0.9
29	Kab.Brebes	38	232	173	405	7	5	12	3.0	3.0	3.0
30	Kota Magelang	5	43	32	75	1	1	2	2.7	2.7	2.7
31	Kota Surakarta	17	88	65	153	1	0	1	0.7	0.7	0.7
32	Kota Salatiga	6	25	19	44	1	0	1	2.3	2.3	2.3
33	Kota Semarang	37	252	188	440	8	6	14	3.2	3.2	3.2
34	Kota Pekalongan	14	33	24	57	1	0	1	1.8	1.8	1.8
35	Kota Tegal	8	54	40	94	0	0	0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	5,161	3,846	9,007	77	57	134	1.5	1.5	1.5
ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK			14.9	11.1	25.9						

Sumber: Program DBD

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 66

KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	MALARIA																
			SUSPEK	KONFIRMASI LABORATORIUM			% KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF			PENGOBATAN STANDAR	% PENGOBATAN STANDAR	MENINGGAL			CFR			
				MIKROSKOPIS	RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)	TOTAL		L	P	L+P			L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Kab.Cilacap	38	360	354	6	360	100.0	31	3	34	34	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
2	Kab.Banyumas	39	57	52	5	57	100.0	4	1	5	5	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
3	Kab.Purbalingga	22	1,322	1,200	122	1,322	100.0	10	0	10	10	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
4	Kab.Banjarnegara	35	10,368	10,368	0	10,368	100.0	10	1	11	11	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
5	Kab.Kebumen	35	777	777	0	777	100.0	15	2	17	17	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
6	Kab.Purworejo	27	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
7	Kab.Wonosobo	24	2,173	2,173	0	2,173	100.0	5	1	6	6	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
8	Kab.Magelang	29	3,766	3,470	0	3,470	92.1	5	0	5	5	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
9	Kab.Boyolali	25	4	4	0	4	100.0	2	1	3	3	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
10	Kab.Klaten	34	4	4	0	4	100.0	2	0	2	2	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
11	Kab.Sukoharjo	12	3	3	0	3	100.0	2	0	2	2	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
12	Kab.Wonogiri	34	3	3	0	3	100.0	3	0	3	3	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
13	Kab.Karanganyar	21	2	2	0	2	100.0	2	0	2	2	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
14	Kab.Sragen	25	4	3	1	4	100.0	4	0	4	4	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
15	Kab.Grobogan	30	271	271	0	271	100.0	41	0	41	41	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
16	Kab.Blora	26	30	0	30	30	100.0	30	0	30	30	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
17	Kab.Rembang	17	7	6	1	7	100.0	6	0	6	6	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
18	Kab.Pati	29	32	31	29	60	187.5	31	1	32	30	93.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
19	Kab.Kudus	19	110	110	0	110	100.0	15	0	15	15	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
20	Kab.Jepara	21	669	669	0	669	100.0	19	2	21	21	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
21	Kab.Demak	27	34	34	0	34	100.0	33	1	34	34	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
22	Kab.Semarang	26	8	8	0	8	100.0	6	2	8	8	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
23	Kab.Temanggung	26	205	205	0	205	100.0	6	0	6	6	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
24	Kab.Kendal	30	563	563	0	563	100.0	5	0	5	5	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
25	Kab.Batang	21	7	3	3	6	85.7	3	0	3	3	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
26	Kab.Pekalongan	27	147	147	0	147	100.0	4	0	4	4	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
27	Kab.Pemalang	25	100	15	85	100	100.0	6	0	6	6	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
28	Kab.Tegal	29	8	8	8	16	200.0	8	0	8	6	75.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
29	Kab.Brebes	38	2	1	1	2	100.0	1	0	1	1	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
30	Kota Magelang	5	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
31	Kota Surakarta	17	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
32	Kota Salatiga	6	34	34	0	34	100.0	11	0	11	11	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
33	Kota Semarang	37	49	15	34	49	100.0	41	8	49	49	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
34	Kota Pekalongan	14	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
35	Kota Tegal	8	1	1	0	1	100.0	1	0	1	1	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	21,120	20,534	325	20,859	98.8	362	23	385	381	99.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK								0.0	0.0	0.0									

Sumber: program malaria provinsi

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 67

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	PENDERITA KRONIS FILARIASIS														
			KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA			KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN			KASUS KRONIS PINDAH			KASUS KRONIS MENINGGAL			JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kab.Cilacap	38	8	10	18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	11	19
2	Kab.Banyumas	39	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	18
3	Kab.Purbalingga	22	6	9	15	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6	12	18
4	Kab.Banjarnegara	35	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9
5	Kab.Kebumen	35	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
6	Kab.Purworejo	27	2	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11
7	Kab.Wonosobo	24	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
8	Kab.Magelang	29	3	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8
9	Kab.Boyolali	25	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9
10	Kab.Klaten	34	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
11	Kab.Sukoharjo	12	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7
12	Kab.Wonogiri	34	1	4	5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	6	8
13	Kab.Karanganyar	21	4	7	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	8	12
14	Kab.Sragen	25	2	2	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	4	6
15	Kab.Grobogan	30	1	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	4	6
16	Kab.Blora	26	7	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11
17	Kab.Rembang	17	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
18	Kab.Pati	29	7	3	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	4	11
19	Kab.Kudus	19	2	4	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	5	7
20	Kab.Jepara	21	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5
21	Kab.Demak	27	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	32
22	Kab.Semarang	26	3	6	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	5	7	12
23	Kab.Temanggung	26	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12
24	Kab.Kendal	30	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13
25	Kab.Batang	21	4	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3	7
26	Kab.Pekalongan	27	18	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	24	42
27	Kab.Pemalang	25	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
28	Kab.Tegal	29	9	17	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	18	27
29	Kab.Brebes	38	16	20	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	18	21	39
30	Kota Magelang	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	17	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4
32	Kota Salatiga	6	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4
33	Kota Semarang	37	10	17	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	17	27
34	Kota Pekalongan	14	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10
35	Kota Tegal	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	168	229	169	9	18	27	0	0	0	1	1	2	176	246	422

Sumber: Program Filariasis

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 68

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	76,524	87,955	164,479	36,034	47.1	41,417	47.1	77,451	47.1
2	Kab.Banyumas	39	184,000	212,658	396,658	47,822	26.0	55,271	26.0	103,093	26.0
3	Kab.Purbalingga	22	91,481	108,120	199,601	15,990	17.5	18,899	17.5	34,889	17.5
4	Kab.Banjarnegara	35	132,241	151,983	284,224	18,461	14.0	21,216	14.0	39,677	14.0
5	Kab.Kebumen	35	95,609	111,231	206,840	52,229	54.6	60,763	54.6	112,992	54.6
6	Kab.Purworejo	27	94,212	111,771	205,983	12,133	12.9	14,394	12.9	26,527	12.9
7	Kab.Wonosobo	24	127,275	142,861	270,136	36,853	29.0	41,366	29.0	78,219	29.0
8	Kab.Magelang	29	181,909	208,427	390,336	24,100	13.2	27,614	13.2	51,714	13.2
9	Kab.Boyolali	25	131,595	156,584	288,179	72,794	55.3	86,617	55.3	159,411	55.3
10	Kab.Klaten	34	143,506	171,812	315,318	61,127	42.6	73,185	42.6	134,312	42.6
11	Kab.Sukoharjo	12	120,335	141,406	261,741	39,271	32.6	46,147	32.6	85,418	32.6
12	Kab.Wonogiri	34	154,897	189,021	343,918	77,782	50.2	94,918	50.2	172,700	50.2
13	Kab.Karanganyar	21	33,112	39,053	72,165	33,112	100.0	39,053	100.0	72,165	100.0
14	Kab.Sragen	25	112,140	134,717	246,857	52,738	47.0	63,356	47.0	116,094	47.0
15	Kab.Grobogan	30	194,973	229,881	424,854	28,197	14.5	33,246	14.5	61,443	14.5
16	Kab.Blora	26	117,858	140,346	258,204	84,393	71.6	100,496	71.6	184,889	71.6
17	Kab.Rembang	17	74,525	86,592	161,117	29,212	39.2	33,941	39.2	63,153	39.2
18	Kab.Pati	29	137,757	169,198	306,955	34,399	25.0	42,250	25.0	76,649	25.0
19	Kab.Kudus	19	103,389	123,044	226,433	23,216	22.5	27,630	22.5	50,846	22.5
20	Kab.Jepara	21	19,733	22,900	42,633	19,733	100.0	22,900	100.0	42,633	100.0
21	Kab.Demak	27	139,189	163,600	302,789	108,608	78.0	127,655	78.0	236,263	78.0
22	Kab.Semarang	26	78,026	93,220	171,246	44,602	57.2	53,289	57.2	97,891	57.2
23	Kab.Temanggung	26	101,444	116,529	217,973	22,959	22.6	26,374	22.6	49,333	22.6
24	Kab.Kendal	30	143,262	160,815	304,077	31,587	22.0	35,458	22.0	67,045	22.0
25	Kab.Batang	21	95,393	110,359	205,752	45,866	48.1	53,061	48.1	98,927	48.1
26	Kab.Pekalongan	27	105,507	123,357	228,864	56,216	53.3	65,726	53.3	121,942	53.3
27	Kab.Pemalang	25	126,543	148,988	275,531	34,166	27.0	40,226	27.0	74,392	27.0
28	Kab.Tegal	29	49,054	57,280	106,334	14,685	29.9	17,147	29.9	31,832	29.9
29	Kab.Brebes	38	272,779	311,667	584,446	50,162	18.4	57,314	18.4	107,476	18.4
30	Kota Magelang	5	2,680	3,188	5,868	2,680	100.0	3,188	100.0	5,868	100.0
31	Kota Surakarta	17	74,378	90,671	165,049	12,015	16.2	14,648	16.2	26,663	16.2
32	Kota Salatiga	6	27,040	32,602	59,642	17,214	63.7	20,756	63.7	37,970	63.7
33	Kota Semarang	37	108,267	129,853	238,120	105,566	97.5	126,614	97.5	232,180	97.5
34	Kota Pekalongan	14	35,266	40,689	75,955	10,548	29.9	12,171	29.9	22,719	29.9
35	Kota Tegal	8	28,531	33,570	62,101	20,507	71.9	24,129	71.9	44,636	71.9
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	3,714,430	4,355,948	8,070,378	1,376,977	37.1	1,622,435	37.2	2,999,412	37.2

Sumber: Data SPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

TABEL 69

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PENDERITA DM	PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Kab.Cilacap	38	34,541	28,569	82.7
2	Kab.Banyumas	39	25,734	24,600	95.6
3	Kab.Purbalingga	22	9,199	12,376	134.5
4	Kab.Banjarnegara	35	13,763	12,526	91.0
5	Kab.Kebumen	35	13,110	12,572	95.9
6	Kab.Purworejo	27	6,634	6,130	92.4
7	Kab.Wonosobo	24	5,355	5,355	100.0
8	Kab.Magelang	29	18,249	11,401	62.5
9	Kab.Boyolali	25	14,135	14,067	99.5
10	Kab.Klaten	34	37,485	30,870	82.4
11	Kab.Sukoharjo	12	17,403	18,596	106.9
12	Kab.Wonogiri	34	14,944	14,530	97.2
13	Kab.Karanganyar	21	11,841	11,841	100.0
14	Kab.Sragen	25	21,461	20,100	93.7
15	Kab.Grobogan	30	23,161	14,457	62.4
16	Kab.Blora	26	11,657	11,590	99.4
17	Kab.Rembang	17	15,274	14,876	97.4
18	Kab.Pati	29	30,986	38,546	124.4
19	Kab.Kudus	19	17,869	19,090	106.8
20	Kab.Jepara	21	8,351	8,351	100.0
21	Kab.Demak	27	18,116	16,632	91.8
22	Kab.Semarang	26	30,663	37,163	121.2
23	Kab.Temanggung	26	10,438	7,923	75.9
24	Kab.Kendal	30	20,763	15,261	73.5
25	Kab.Batang	21	9,961	8,476	85.1
26	Kab.Pekalongan	27	13,398	12,287	91.7
27	Kab.Pemalang	25	89,661	23,560	26.3
28	Kab.Tegal	29	8,277	8,277	100.0
29	Kab.Brebes	38	18,724	16,852	90.0
30	Kota Magelang	5	1,744	1,744	100.0
31	Kota Surakarta	17	21,935	8,801	40.1
32	Kota Salatiga	6	5,763	4,905	85.1
33	Kota Semarang	37	39,902	38,899	97.5
34	Kota Pekalongan	14	6,369	6,136	96.3
35	Kota Tegal	8	5,956	5,360	90.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	652,822	542,719	83.1

Sumber: Data SPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

TABEL 70

CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS)
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS	PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN *	PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN PAYUDARA		IVA POSITIF		CURIGA KANKER		TUMOR/BENJOLAN	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kab.Cilacap	38	11	244,656	2,697	1.1	11	0.4	9	0.3	5	0.2
2	Kab.Banyumas	39	39	237,933	3,725	1.6	49	1.3	4	0.1	18	0.5
3	Kab.Purbalingga	22	14	128,096	2,318	1.8	76	3.3	2	0.1	0	0.0
4	Kab.Banjarnegara	35	35	127,644	2,287	1.8	5	0.2	20	0.9	16	0.7
5	Kab.Kebumen	35	35	161,382	6,995	4.3	106	1.5	5	0.1	43	0.6
6	Kab.Purworejo	27	11	98,654	1,073	1.1	55	5.1	0	0.0	3	0.3
7	Kab.Wonosobo	24	23	109,768	4,652	4.2	155	3.3	3	0.1	27	0.6
8	Kab.Magelang	29	28	182,739	949	0.5	79	8.3	11	1.2	16	1.7
9	Kab.Boyolali	25	17	136,274	811	0.6	177	21.8	5	0.6	5	0.6
10	Kab.Klaten	34	21	167,175	775	0.5	47	6.1	94	12.1	105	13.5
11	Kab.Sukoharjo	12	12	130,236	4,998	3.8	977	19.5	7	0.1	19	0.4
12	Kab.Wonogiri	34	10	132,572	215	0.2	8	3.7	1	0.5	3	1.4
13	Kab.Karanganyar	21	21	127,523	3,726	2.9	473	12.7	8	0.2	66	1.8
14	Kab.Sragen	25	25	124,548	2,019	1.6	234	11.6	10	0.5	42	2.1
15	Kab.Grobogan	30	10	195,132	418	0.2	16	3.8	2	0.5	9	2.2
16	Kab.Blora	26	26	128,032	849	0.7	2	0.2	3	0.4	5	0.6
17	Kab.Rembang	17	10	93,778	338	0.4	12	3.6	1	0.3	2	0.6
18	Kab.Pati	29	10	188,162	533	0.3	60	11.3	8	1.5	11	2.1
19	Kab.Kudus	19	10	131,679	221	0.2	11	5.0	1	0.5	1	0.5
20	Kab.Jepara	21	17	175,918	928	0.5	24	2.6	3	0.3	2	0.2
21	Kab.Demak	27	24	163,907	2,847	1.7	47	1.7	11	0.4	30	1.1
22	Kab.Semarang	26	26	149,481	2,561	1.7	98	3.8	2	0.1	14	0.5
23	Kab.Temanggung	26	26	113,588	2,924	2.6	782	26.7	8	0.3	49	1.7
24	Kab.Kendal	30	19	135,335	4,392	3.2	55	1.3	14	0.3	16	0.4
25	Kab.Batang	21	20	107,571	891	0.8	49	5.5	3	0.3	27	3.0
26	Kab.Pekalongan	27	20	121,732	3,555	2.9	104	2.9	5	0.1	4	0.1
27	Kab.Pemalang	25	25	179,013	3,310	1.8	5	0.2	16	0.5	7	0.2
28	Kab.Tegal	29	8	196,216	251	0.1	7	2.8	0	0.0	0	0.0
29	Kab.Brebes	38	20	239,298	673	0.3	4	0.6	7	1.0	4	0.6
30	Kota Magelang	5	5	17,953	165	0.9	6	3.6	1	0.6	1	0.6
31	Kota Surakarta	17	17	75,227	2,523	3.4	86	3.4	9	0.4	65	2.6
32	Kota Salatiga	6	6	27,677	553	2.0	80	14.5	0	0.0	22	4.0
33	Kota Semarang	37	23	272,744	7,962	2.9	344	4.3	233	2.9	41	0.5
34	Kota Pekalongan	14	9	43,893	425	1.0	1	0.2	14	3.3	22	5.2
35	Kota Tegal	8	8	35,450	1,225	3.5	55	4.5	1	0.1	2	0.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	641	4,900,986	74,784	1.5	4,300	5.7	521	0.7	702	0.9

Sumber: Program PTM Dinkes Prov Jateng 2019

Keterangan:

*Data BPS 2019

TABEL 71

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT		
			SASARAN ODGJ BERAT	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Kab.Cilacap	38	2,190	1,941	88.6
2	Kab.Banyumas	39	2,679	2,511	93.7
3	Kab.Purbalingga	22	2,335	1,621	69.4
4	Kab.Banjarnegara	35	2,675	1,901	71.1
5	Kab.Kebumen	35	3,970	3,492	88.0
6	Kab.Purworejo	27	4,781	2,708	56.6
7	Kab.Wonosobo	24	1,968	1,427	72.5
8	Kab.Magelang	29	3,226	3,211	99.5
9	Kab.Boyolali	25	2,565	1,897	74.0
10	Kab.Klaten	34	2,929	2,728	93.1
11	Kab.Sukoharjo	12	2,230	851	38.2
12	Kab.Wonogiri	34	2,172	2,050	94.4
13	Kab.Karanganyar	21	1,192	1,192	100.0
14	Kab.Sragen	25	2,226	2,192	98.5
15	Kab.Grobogan	30	2,479	1,860	75.0
16	Kab.Blora	26	2,163	1,884	87.1
17	Kab.Rembang	17	1,590	1,368	86.0
18	Kab.Pati	29	3,116	4,692	150.6
19	Kab.Kudus	19	2,110	1,092	51.8
20	Kab.Jepara	21	1,916	1,916	100.0
21	Kab.Demak	27	2,650	1,973	74.5
22	Kab.Semarang	26	1,369	1,191	87.0
23	Kab.Temanggung	26	1,974	1,754	88.9
24	Kab.Kendal	30	1,937	1,453	75.0
25	Kab.Batang	21	1,383	1,383	100.0
26	Kab.Pekalongan	27	1,647	1,656	100.5
27	Kab.Pemalang	25	6,516	6,484	99.5
28	Kab.Tegal	29	3,602	2,338	64.9
29	Kab.Brebes	38	4,486	2,547	56.8
30	Kota Magelang	5	190	190	100.0
31	Kota Surakarta	17	1,409	630	44.7
32	Kota Salatiga	6	236	236	100.0
33	Kota Semarang	37	2,086	2,497	119.7
34	Kota Pekalongan	14	831	579	69.7
35	Kota Tegal	8	617	602	97.6
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	81,445	68,047	83.5

Sumber: Data SPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

TABEL 72

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH SARANA AIR MINUM	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL)				PEMERIKSAAN			
				JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH+ SEDANG	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	48,028	23,841	49.6	8,925	37.4	21,695	45.2	18,582	85.7
2	Kab.Banyumas	39	356,329	107,357	30.1	91,815	85.5	1,098	0.3	838	76.3
3	Kab.Purbalingga	22	213,964	116,153	54.3	87,752	75.5	4,843	2.3	3,081	63.6
4	Kab.Banjarnegara	35	161,112	75,704	47.0	61,625	81.4	2,750	1.7	2,482	90.3
5	Kab.Kebumen	35	222,224	76,687	34.5	59,159	77.1	14,247	6.4	13,358	93.8
6	Kab.Purworejo	27	588	435	74.0	397	91.3	139	23.6	106	76.3
7	Kab.Wonosobo	24	2,060	450	21.8	314	69.8	267	13.0	177	66.3
8	Kab.Magelang	29	148,033	67,892	45.9	40,709	60.0	8,149	5.5	6,929	85.0
9	Kab.Boyolali	25	134,000	24,661	18.4	16,386	66.4	395	0.3	320	81.0
10	Kab.Klaten	34	305,063	118,897	39.0	118,897	100.0	840	0.3	766	91.2
11	Kab.Sukoharjo	12	230,676	16,909	7.3	12,908	76.3	298	0.1	240	80.5
12	Kab.Wonogiri	34	194,370	17,751	9.1	13,903	78.3	525	0.3	427	81.3
13	Kab.Karanganyar	21	233,788	48,405	20.7	29,635	61.2	606	0.3	564	93.1
14	Kab.Sragen	25	244,817	48,958	20.0	30,492	62.3	7,634	3.1	4,160	54.5
15	Kab.Grobogan	30	211,936	41,857	19.7	26,810	64.1	612	0.3	592	96.7
16	Kab.Blora	26	61,523	743	1.2	611	82.2	494	0.8	350	70.9
17	Kab.Rembang	17	537	475	88.5	453	95.4	433	80.6	324	74.8
18	Kab.Pati	29	156,639	40,506	25.9	30,198	74.6	146	0.1	121	82.9
19	Kab.Kudus	19	179,014	34,178	19.1	8,019	23.5	7,602	4.2	7,425	97.7
20	Kab.Jepara	21	182,441	41,561	22.8	16,689	40.2	374	0.2	310	82.9
21	Kab.Demak	27	80,706	40,978	50.8	16,362	39.9	7,603	9.4	7,527	99.0
22	Kab.Semarang	26	8,966	2,783	31.0	2,323	83.5	377	4.2	298	79.0
23	Kab.Temanggung	26	157,009	55,983	35.7	51,578	92.1	574	0.4	501	87.3
24	Kab.Kendal	30	111,522	21,042	18.9	18,503	87.9	3,770	3.4	3,747	99.4
25	Kab.Batang	21	345	252	73.0	227	90.1	129	37.4	126	97.7
26	Kab.Pekalongan	27	425	185	43.5	119	64.3	86	20.2	62	72.1
27	Kab.Pemalang	25	155,984	20,337	13.0	16,934	83.3	311	0.2	214	68.8
28	Kab.Tegal	29	356,748	41,535	11.6	31,477	75.8	1,310	0.4	1,210	92.4
29	Kab.Brebes	38	622	622	100.0	141	22.7	68	10.9	68	100.0
30	Kota Magelang	5	31,484	15,213	48.3	5,951	39.1	110	0.3	76	69.1
31	Kota Surakarta	17	100,327	6,380	6.4	2,470	38.7	900	0.9	671	74.6
32	Kota Salatiga	6	6,384	467	7.3	400	85.7	251	3.9	149	59.4
33	Kota Semarang	37	281,283	85,956	30.6	70,508	82.0	3,352	1.2	3,144	93.8
34	Kota Pekalongan	14	195	179	91.8	172	96.1	179	91.8	155	86.6
35	Kota Tegal	8	58	57	98.3	52	91.2	57	98.3	52	91.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	4,579,200	1,195,389	26.1	872,914	73.0	92,224	2.0	79,152	85.8

Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

TABEL 73

**JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBA SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH KK	SHARING/KOMUNAL		JAMBA SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBA SEHAT PERMANEN (JSP)		KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBA SEHAT)	
				JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab.Cilacap	38	435,851	14,385	44,980	42,949	93,246	145,291	246,702	384,928	88.3
2	Kab.Banyumas	39	602,938	834	834	28,519	36,709	343,672	387,604	425,147	70.5
3	Kab.Purbalingga	22	299,207	6,690	17,995	35,458	38,241	185,475	213,653	269,889	90.2
4	Kab.Banjarnegara	35	335,369	16,619	16,619	32,098	32,098	140,078	140,078	188,795	56.3
5	Kab.Kebumen	35	575,083	11,487	20,522	44,300	79,244	261,917	421,565	521,331	90.7
6	Kab.Purworejo	27	239,801	9,931	10,849	29,719	31,037	153,799	162,602	204,488	85.3
7	Kab.Wonosobo	24	289,309	5,429	8,726	36,048	46,496	82,072	86,845	142,067	49.1
8	Kab.Magelang	29	401,574	9,485	63,562	30,992	44,199	195,681	255,506	363,267	90.5
9	Kab.Boyolali	25	366,837	3,677	15,104	24,825	25,710	241,605	245,874	286,688	78.2
10	Kab.Klaten	34	422,284	3,613	47,413	2,118	2,576	298,360	372,295	422,284	100.0
11	Kab.Sukoharjo	12	269,920	3,355	6,043	3,511	4,463	235,311	259,411	269,917	100.0
12	Kab.Wonogiri	34	372,692	11,131	20,006	20,378	33,839	227,511	311,860	365,705	98.1
13	Kab.Karanganyar	21	293,253	22	944	3,781	3,768	229,703	284,775	289,487	98.7
14	Kab.Sragen	25	340,457	595	25,704	23,815	24,322	241,573	247,345	297,371	87.3
15	Kab.Grobogan	30	516,902	20,270	71,132	97,660	100,955	291,832	296,500	468,587	90.7
16	Kab.Blora	26	313,117	8,898	27,448	74,436	76,206	209,105	209,463	313,117	100.0
17	Kab.Rembang	17	212,377	1,107	2,786	7,877	10,056	151,235	192,383	205,225	96.6
18	Kab.Pati	29	483,853	13,428	39,870	56,731	56,731	309,215	309,215	405,816	83.9
19	Kab.Kudus	19	277,478	13,123	15,474	22,348	35,826	176,860	257,757	309,057	111.4
20	Kab.Jepara	21	335,180	11,803	50,529	44,902	49,338	214,210	235,313	335,180	100.0
21	Kab.Demak	27	375,851	13,335	19,294	38,038	60,162	242,444	276,111	355,567	94.6
22	Kab.Semarang	26	315,192	10,216	27,151	19,593	28,541	218,903	259,500	315,192	100.0
23	Kab.Temanggung	26	282,843	15,197	32,389	56,744	59,162	158,326	191,292	282,843	100.0
24	Kab.Kendal	30	346,811	15,171	25,146	26,814	33,846	231,828	287,819	346,811	100.0
25	Kab.Batang	21	261,630	4,021	33,100	18,867	19,903	138,475	146,857	199,860	76.4
26	Kab.Pekalongan	27	248,051	22,553	41,289	16,419	16,419	148,231	148,231	205,939	83.0
27	Kab.Pemalang	25	400,522	22,859	29,230	38,191	29,462	228,309	287,121	345,813	86.3
28	Kab.Tegal	29	441,435	24,676	52,807	7,808	10,083	251,243	378,552	441,442	100.0
29	Kab.Brebes	38	669,260	80,225	80,225	40,072	40,072	331,200	346,430	466,727	69.7
30	Kota Magelang	5	43,902	196	4,967	5,681	6,822	22,093	23,842	35,631	81.2
31	Kota Surakarta	17	213,092	4,005	26,261	0	0	99,536	186,830	213,091	100.0
32	Kota Salatiga	6	64,424	16	1,895	6,072	6,072	51,704	56,453	64,420	100.0
33	Kota Semarang	37	524,550	7,363	14,061	19,674	25,289	367,599	485,200	524,550	100.0
34	Kota Pekalongan	14	99,623	488	3,887	357	486	53,938	94,285	98,658	99.0
35	Kota Tegal	8	78,297	32	390	399	399	64,712	72,856	73,645	94.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	11,748,965	386,235	898,632	957,194	1,161,778	6,943,046	8,378,125	10,438,535	88.8

Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

TABEL 74

JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
				DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS (SBS)		DESA STBM	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.Cilacap	38	284	248	87.3	57	20.1	3	1.1
2	Kab.Banyumas	39	331	331	100.0	220	66.5	29	8.8
3	Kab.Purbalingga	22	239	239	100.0	148	61.9	0	0.0
4	Kab.Banjarnegara	35	278	278	100.0	126	45.3	13	4.7
5	Kab.Kebumen	35	460	457	99.3	412	89.6	152	33.0
6	Kab.Purworejo	27	494	491	99.4	192	38.9	0	0.0
7	Kab.Wonosobo	24	265	265	100.0	68	25.7	10	3.8
8	Kab.Magelang	29	372	372	100.0	320	86.0	225	60.5
9	Kab.Boyolali	25	267	267	100.0	267	100.0	132	49.4
10	Kab.Klaten	34	401	401	100.0	401	100.0	11	2.7
11	Kab.Sukoharjo	12	167	167	100.0	167	100.0	12	7.2
12	Kab.Wonogiri	34	294	283	96.3	294	100.0	13	4.4
13	Kab.Karanganyar	21	177	177	100.0	177	100.0	0	0.0
14	Kab.Sragen	25	208	208	100.0	208	100.0	0	0.0
15	Kab.Grobogan	30	280	280	100.0	280	100.0	7	2.5
16	Kab.Blora	26	295	295	100.0	295	100.0	3	1.0
17	Kab.Rembang	17	294	294	100.0	294	100.0	20	6.8
18	Kab.Pati	29	406	406	100.0	406	100.0	3	0.7
19	Kab.Kudus	19	132	132	100.0	132	100.0	0	0.0
20	Kab.Jepara	21	195	195	100.0	195	100.0	0	0.0
21	Kab.Demak	27	249	221	88.8	162	65.1	5	2.0
22	Kab.Semarang	26	235	232	98.7	235	100.0	116	49.4
23	Kab.Temanggung	26	289	289	100.0	289	100.0	17	5.9
24	Kab.Kendal	30	286	286	100.0	286	100.0	30	10.5
25	Kab.Batang	21	248	246	99.2	62	25.0	1	0.4
26	Kab.Pekalongan	27	285	264	92.6	56	19.6	159	55.8
27	Kab.Pemalang	25	222	222	100.0	99	44.6	25	11.3
28	Kab.Tegal	29	287	287	100.0	287	100.0	1	0.3
29	Kab.Brebes	38	297	297	100.0	150	50.5	1	0.3
30	Kota Magelang	5	17	17	100.0	3	17.6	2	11.8
31	Kota Surakarta	17	54	54	100.0	54	100.0	2	3.7
32	Kota Salatiga	6	23	23	100.0	23	100.0	0	0.0
33	Kota Semarang	37	177	177	100.0	177	100.0	0	0.0
34	Kota Pekalongan	14	27	27	100.0	21	77.8	0	0.0
35	Kota Tegal	8	27	27	100.0	17	63.0	0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	8,562	8,455	98.8	6,580	76.9	992	11.6

Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

TABEL 76

TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	TPM YANG ADA					TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN									
			JASA BOGA	RUMAH MAKAN/RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN	JUMLAH TPM YANG ADA	JASA BOGA		RUMAH MAKAN/RESTORAN		DEPOT AIR MINUM (DAM)		MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN		JUMLAH TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN	
								JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kab.Cilacap	38	364	715	631	1,027	2,737	235	64.6	345	48.3	464	73.5	656	63.9	1,700	62.1
2	Kab.Banyumas	39	785	1,020	584	3,129	5,518	546	69.6	739	72.5	448	76.7	2,130	68.1	3,863	70.0
3	Kab.Purbalingga	22	116	273	261	749	1,399	75	64.7	94	34.4	170	65.1	448	59.8	787	56.3
4	Kab.Banjarnegara	35	423	492	247	1,790	2,952	203	48.0	295	60.0	214	86.6	785	43.9	1,497	50.7
5	Kab.Kebumen	35	153	273	308	1,629	2,363	120	78.4	227	83.2	284	92.2	1,312	80.5	1,943	82.2
6	Kab.Purworejo	27	83	244	136	302	765	46	55.4	147	60.2	77	56.6	189	62.6	459	60.0
7	Kab.Wonosobo	24	100	389	82	409	980	69	69.0	83	21.3	72	87.8	155	37.9	379	38.7
8	Kab.Magelang	29	121	347	133	787	1,388	95	78.5	265	76.4	104	78.2	641	81.4	1,105	79.6
9	Kab.Boyolali	25	219	524	232	1,105	2,080	174	79.5	339	64.7	189	81.5	532	48.1	1,234	59.3
10	Kab.Klaten	34	122	254	142	2,280	2,798	79	64.8	112	44.1	99	69.7	1,219	53.5	1,509	53.9
11	Kab.Sukoharjo	12	102	428	270	744	1,544	64	62.7	229	53.5	256	94.8	342	46.0	891	57.7
12	Kab.Wonogiri	34	158	486	87	856	1,587	97	61.4	352	72.4	79	90.8	493	57.6	1,021	64.3
13	Kab.Karanganyar	21	55	230	197	86	568	38	69.1	182	79.1	122	61.9	50	58.1	392	69.0
14	Kab.Sragen	25	26	713	331	7,438	8,508	25	96.2	561	78.7	252	76.1	2,190	29.4	3,028	35.6
15	Kab.Grobogan	30	110	192	890	343	1,535	133	120.9	133	69.3	193	21.7	0	0.0	459	29.9
16	Kab.Blora	26	40	510	488	815	1,853	10	25.0	105	20.6	213	43.6	233	28.6	561	30.3
17	Kab.Rembang	17	123	48	349	1,593	2,113	115	93.5	43	89.6	287	82.2	993	62.3	1,438	68.1
18	Kab.Pati	29	131	387	672	4,204	5,394	96	73.3	322	83.2	542	80.7	2,452	58.3	3,412	63.3
19	Kab.Kudus	19	191	140	270	831	1,432	223	116.8	124	88.6	210	77.8	360	43.3	917	64.0
20	Kab.Jepara	21	380	299	421	1,004	2,104	252	66.3	232	77.6	313	74.3	637	63.4	1,434	68.2
21	Kab.Demak	27	579	175	724	1,265	2,743	404	69.8	105	60.0	546	75.4	817	64.6	1,872	68.2
22	Kab.Semarang	26	184	283	223	1,093	1,782	160	87.0	238	84.1	185	83.0	1,000	91.5	1,583	88.8
23	Kab.Temanggung	26	186	276	84	640	1,186	147	79.0	238	86.2	79	94.0	457	71.4	921	77.7
24	Kab.Kendal	30	316	411	345	1,678	2,750	172	54.4	223	54.3	282	81.7	909	54.2	1,586	57.7
25	Kab.Batang	21	63	182	126	192	563	32	50.8	110	60.4	109	86.5	86	44.8	337	59.9
26	Kab.Pekalongan	27	143	98	159	695	1,095	81	56.6	47	48.0	110	69.2	462	66.5	700	63.9
27	Kab.Pemalang	25	107	308	366	576	1,357	81	75.7	212	68.8	263	71.9	260	45.1	816	60.1
28	Kab.Tegal	29	88	137	486	259	970	44	50.0	77	56.2	329	67.7	108	41.7	558	57.5
29	Kab.Brebes	38	141	201	464	23	829	113	80.1	102	50.7	376	81.0	20	87.0	611	73.7
30	Kota Magelang	5	110	114	22	315	561	102	92.7	109	95.6	20	90.9	305	96.8	536	95.5
31	Kota Surakarta	17	97	246	163	339	845	90	92.8	241	98.0	157	96.3	325	95.9	813	96.2
32	Kota Salatiga	6	53	66	63	285	467	23	43.4	31	47.0	58	92.1	152	53.3	264	56.5
33	Kota Semarang	37	279	781	622	580	2,262	252	90.3	652	83.5	525	84.4	504	86.9	1,933	85.5
34	Kota Pekalongan	14	67	94	74	423	658	65	97.0	91	96.8	69	93.2	381	90.1	606	92.1
35	Kota Tegal	8	30	108	58	116	312	23	76.7	82	75.9	52	89.7	65	56.0	222	71.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		878	6,245	11,444	10,710	39,600	67,998	4,484	71.8	7,487	65.4	7,748	72.3	21,668	54.7	41,387	60.9

Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019